2025 LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

PLN BATUBARA NIAGA



Mengokohkan Fondasi Pasokan Energi

untuk Keandalan Sistem Kelistrikan

Strengthening Energy Supply Foundations for Reliable Power Systems

PLN BATUBARA NIAGA

Mengokohkan Fondasi Pasokan Energi

untuk Keandalan Sistem Kelistrikan

Strengthening Energy Supply Foundations for Reliable Power Systems

Sebagai bagian dari ekosistem ketenagalistrikan nasional, PT PLN Batubara Niaga (PLN BBN/ Perusahaan) memegang peranan penting dalam memastikan ketersediaan energi primer yang andal bagi pembangkit listrik PLN *Group* dan IPP. Tahun 2025 menjadi fase penguatan fondasi dalam pengelolaan pasokan energi melalui peningkatan kesiapan operasional, penguatan rantai pasok, serta pengelolaan sumber energi yang lebih terintegrasi dan efisien.

PLN BBN terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pasokan energi primer di tengah dinamika global, perubahan harga energi, serta tantangan logistik dan distribusi. Penguatan koordinasi dengan mitra pemasok, optimalisasi pengelolaan kontrak, dan peningkatan pengawasan operasional menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi guna mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional secara berkesinambungan.

PLN BBN terus berkomitmen dalam membangun fondasi bisnis yang kuat untuk memastikan keamanan energi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dengan fondasi pasokan energi yang semakin kokoh, Perusahaan optimistis dapat terus meningkatkan kontribusi dalam mendukung sistem ketenagalistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

As part of the national electricity ecosystem, PT PLN Batubara Niaga (PLN BBN/the Company) undertakes crucial role in ensuring reliable primary energy availability for PLN Group power plants. 2025 marks the beginning of a phase in strengthening the foundations of energy supply management through the increased operational readiness, strengthening the supply chain, as well as more integrated and efficient management of energy sources.

PLN BBN keeps applying various strategic measures to maintain the continuity of primary energy supply amid the global dynamics, fluctuating energy prices, and logistical and distribution challenges. Strengthening coordination with supplier partners, optimizing contract management, and enhancing operational oversight are crucial for maintaining energy supply stability to support the continued reliability of the national electricity system.

PLN BBN remains committed to building strong business foundation to ensure national energy security while supporting economic growth and community needs. With an increasingly solid foundation of energy supply, the Company is optimistic to be able to continue to increase the contribution in supporting a reliable, efficient, and sustainable electricity system.

Daftar Isi
Table of Contents

01
PENDAHULUAN
INTRODUCTION

Tema Theme	3
Daftar Isi Table of Contents	4
Komitmen Perusahaan Company Commitment	7
Pencapaian Penting 2025 Key Milestones 2025	8
Keunggulan Kompetitif Perusahaan Company Competitive Advantage	10
Ikhtisar Operasional Operational Highlights	12
Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights	12
Ikhtisar Saham Share Highlights	17
Ikhtisar Efek Lainnya Bond Highlights	17
Aksi Korporasi 2025 Corporate Actions	17
Peristiwa Penting Tahun 2025 Significant Events in 2025	18
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification	20

22
LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners	24
Laporan Direksi Report from the Board of Directors	38
Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT PLN Batubara Niaga Statement by the Board of Commissioners and Directors on Responsibility for 2025 Annual Report of PT PLN Batubara Niaga	55

56
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

Identitas Perusahaan Company Identity	58
Identitas dan Makna Logo Perusahaan The Company's Logo Identity and Meaning	59
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History	60
Jejak Langkah Milestone	61
Visi dan Misi Perusahaan Vision and Mission	62
Tata Nilai dan Budaya Perusahaan Corporate Values and Culture	63
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan Purpose, Objectives, and Business Activities of the Company	65
Produk dan Aktivitas Perusahaan Products and Services	66
Wilayah Operasional dan Peta Sebaran Wilayah Operasional Operational Areas and Map of Operational Areas	68
Struktur dan Komposisi Pemegang Shareholders Structure and Composition	70
Keanggotaan Asosiasi Association Membership	70
Informasi Pemegang Saham Utama Hingga Entitas Pemilik Akhir Information on Major Shareholders to the Ultimate Owner	71
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	72
Struktur Organisasi Organizational Structure	74
Informasi Perubahan Dewan Komisaris Pada Tahun Buku dan Setelah Buku 2025 Information on Changes to the Board of Commissioners in and After Fiscal Year 2025	75
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	77



Informasi Perubahan Direksi Pada Tahun Buku dan Setelah Buku 2025 Information on Changes to the Board of Directors During and After the 2025 Fiscal Year	80
Profil Direksi Board of Directors Profile	81
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountants and Public Accounting Firms	84
Demografi Karyawan Employee Demographics	85
Struktur Grup dan Entitas Anak /Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/*Special Purpose Vehicle* Group Structure and Subsidiaries/Associates/Joint Ventures/Special Purpose Vehicles	87
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perusahaan Company Supporting Institutions and/or Professions	88
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Chronology of the Issuance and/or Listing of Shares	90
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi/ Efek Lainnya Chronology of the Issuance and/or Listing of Bonds and/or Other Securities	90
Informasi Pada Situs *Website* Perusahaan Information on the Company Website	90

92

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
BUSINESS SUPPORT OVERVIEW

Sumber Daya Manusia Human Resources	94
Penerapan Teknologi Informasi Information Technology Implementation	100

104

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Tinjauan Perekonomian dan Industri Economy and Industry Overview	106
Strategi Pemasaran, Pangsa Pasar, dan Aspek Pelanggan Marketing Strategy, Market Share, and Customer Aspect	111
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Review by Business Segment	114
Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Overview	118
Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Analysis of the Consolidated Statement of Financial Position	118
Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Analysis of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	124
Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian Analysis of Consolidated Statement of Cash Flows	127
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Solvency and Receivables Collectibility	129
Rasio Keuangan Financial Ratios	133
Struktur Modal Capital Structure	135
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2025 Comparison between Target and Actual Performance of the Company in 2025	138
Target/Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2026 Target/Projection of Company Performance for 2026	141
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Goods Investment	144
Kontribusi Pajak kepada Negara Tax Contribution to the State	146
Kebijakan Dividen Dividend Policy	147
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	148

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest or Transactions with Affiliated/ Related Parties	149
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang atau Modal Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt or Capital Restructuring	154
Komponen Substansial Penghasilan/(Beban) Lain-lain Substantial Component of Other Income/(Expenses)	155
Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan atau Pendapatan dan Laba Perusahaan Impact of Price Changes on Company's Sales or Revenue and Profit	155
Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company	157
Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perusahaan Changes in Laws and Regulations and Their Impact on the Company	159
Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Achievement of Key Performance Indicator (KPI)	160
Prospek Usaha Business Outlook	162
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Proceeds from Public Offering	165
Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts after Accountant's Reporting Date	165
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events	165

166

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	168
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	174
Dewan Komisaris Board of Commissioners	178
Direksi Board of Directors	193
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners	206
Organ dan Komite Dewan Komisaris Supporting Organs and Committees of the Board of Commissioners	209
Tata Kelola dan Kesekretariatan Governance and Secretariat	220
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	224
Internal Audit Internal Audit	227
Manajemen Risiko Risk Management	235
Permasalahan Hukum Legal Matters	244
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	245
Kode Etik Perusahaan Code of Conduct	247
Akuntan Publik Public Accountant	251
Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy	253
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	258
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan yang Dimiliki oleh Perusahaan Long-Term Performance-Based Compensation Policy For Management and/or Employees	262
Kebijakan *Insider Trading* Insider Trading Policy	262
Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	263

266

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Komitmen Perusahaan dalam Penerapan Program Keberlanjutan Commitment to Implementing Sustainability Programs	268
Strategi Penerapan Program TJSL CSR Program Implementation Strategy	269
Dukungan Perusahaan Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Support by the Company for the Achievement of Sustainable Development Goals	270
Kinerja Aspek Ekonomi Economic Performance	272
Kinerja Lingkungan Environmental Performance	273
Kinerja Sosial Social Performance	277

289

LAPORAN KEUANGAN AUDIT
AUDITED FINANCIAL REPORT

Komitmen Perusahaan

Company Commitment



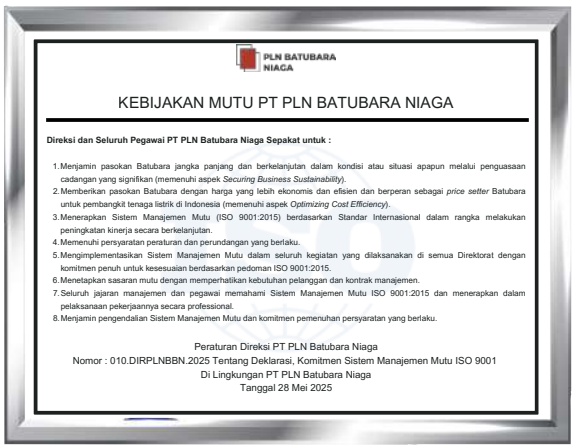
PLN BATUBARA NIAGA

KOMITMEN DIREKSI PT PLN BATUBARA NIAGA
DALAM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

Direksi memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Di Lingkungan PT PLN Batubara Niaga dalam :

1. Memastikan ketersediaan pasokan *supply* batubara melalui konsolidasi proses pengadaan & logistik, pencarian sumber batubara serta pengembangan ekosistem yang *resilient* dan rantai pasok yang kuat, dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 berdasarkan Standar Internasional ISO 9001:2015 – Sistem Manajemen Mutu, mencakup seluruh ruang lingkup PT PLN Batubara Niaga secara bertahap.
2. Memenuhi apa yang menjadi persyaratan pelanggan (*Stakeholders*).
3. Mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dan standar lainnya yang dilaksanakan secara konsisten, bertanggung jawab, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta melakukan peningkatan berkelanjutan.
4. Terlibat aktif memotivasi, menerapkan dan memberikan teladan dalam persiapan, implementasi dan pengawasan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 PT PLN Batubara Niaga.
5. Menggunakan rencana strategi terpilih dalam upaya penjabaran misi untuk mencapai visi PT PLN Batubara Niaga.

Peraturan Direksi PT PLN Batubara Niaga
Nomor : 010.DIRPLNBBN.2025 Tentang Deklarasi, Komitmen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
Di Lingkungan PT PLN Batubara Niaga
Tanggal 28 Mei 2025



PLN BATUBARA NIAGA

KEBIJAKAN MUTU PT PLN BATUBARA NIAGA

Direksi dan Seluruh Pegawai PT PLN Batubara Niaga Sepakat untuk :

1. Menjamin pasokan Batubara jangka panjang dan berkelanjutan dalam kondisi atau situasi apapun melalui penguasaan cadangan yang signifikan (memenuhi aspek *Securing Business Sustainability*).
2. Memberikan pasokan Batubara dengan harga yang lebih ekonomis dan efisien dan berperan sebagai *price setter* Batubara untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia (memenuhi aspek *Optimizing Cost Efficiency*).
3. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) berdasarkan Standar Internasional dalam rangka melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
4. Memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan yang berlaku.
5. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan di semua Direktorat dengan komitmen penuh untuk kesesuaian berdasarkan pedoman ISO 9001:2015.
6. Menetapkan sasaran mutu dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan kontrak manajemen.
7. Seluruh jajaran manajemen dan pegawai memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan menerapkan dalam pelaksanaan pekerjaannya secara professional.
8. Menjamin pengendalian Sistem Manajemen Mutu dan komitmen pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Peraturan Direksi PT PLN Batubara Niaga
Nomor : 010.DIRPLNBBN.2025 Tentang Deklarasi, Komitmen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
Di Lingkungan PT PLN Batubara Niaga
Tanggal 28 Mei 2025



BUMN UNTUK INDONESIA

PLN BATUBARA NIAGA

KOMITMEN MANAJEMEN PT PLN BATUBARA NIAGA
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEPATUHAN DAN ANTI PENYUAPAN

Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen kepatuhan dan 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mewujudkan PT PLN Batubara Niaga yang *lean*, dengan ini Manajemen PT PLN Batubara Niaga berkomitmen :

1. Menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, pedoman *Good Corporate Governance* (GCG), Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) dan prinsip **4 *NO's*** yaitu:
   a. ***No Bribery*** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
   b. ***No Kickback*** (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
   c. ***No Gift*** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
   d. ***No Luxurious Hospitality*** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
2. Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki secara berkelanjutan Sistem Manajemen Kepatuhan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku juga prinsip-prinsip GCG, pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan serta mengimplementasikan kerangka kerja pengendalian yang efektif untuk mendeteksi penyuapan, ketidakpatuhan dan mengurangi insiden dari awal.
3. Menjalankan prinsip kepatuhan dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Tidak memperkenankan Insan PT PLN Batubara Niaga melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku, kode etik perusahaan dan prinsip 4 NO's yang berkaitan dengan wewenang dan jabatannya dan melaporkan melalui mekanisme *Whistle Blowing System* di PT PLN Batubara Niaga.
5. Menghindari konflik kepentingan dan mendeklarasikan setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko fraud dan risiko kepatuhan.
6. Mengajak Insan PT PLN Batubara Niaga dan stakeholder untuk selalu menjunjung tinggi nilai integritas, mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, pedoman *Good Corporate Governance* (GCG), Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) dan prinsip 4 NO's di PT PLN Batubara Niaga.
7. Bersedia mematuhi dan melaksanakan Komitmen Sistem Manajemen Kepatuhan dan Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.

Demikian Komitmen Sistem Manajemen Kepatuhan dan Anti Penyuapan ini ditandatangani dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 01 Juli 2025

PLT Direktur Utama	PLT Direktur Niaga dan Operasi	PLT Direktur Keuangan dan *Human Capital*	PLT Komisaris Utama	Komisaris Independen
Rolly	**Rahmat Dian Amir**	**Joni Arifin**	**Tri Joko Supriyatno**	**Noor Adi Baroto**

PENCAPAIAN PENTING 2025

Key Milestones 2025

Sepanjang tahun 2025, PLN BBN mencatatkan kinerja yang solid melalui peningkatan profitabilitas, keberhasilan menjaga keandalan pasokan energi primer, serta penguatan kontribusi terhadap PLN *Group*. Pencapaian ini memperkuat peran Perusahaan sebagai mitra strategis dalam mendukung ketahanan pasokan energi nasional dan keberlanjutan sistem kelistrikan Indonesia.

Throughout 2025, PLN BBN recorded solid performance through increased profitability, successfully maintaining the reliability of primary energy supplies, and strengthening its contribution to the PLN Group. These achievements reinforce the Company's role as a strategic partner in supporting national energy supply security and the sustainability of Indonesia's electricity system.



11,89 Juta/Million **MT**

VOLUME PASOKAN BATUBARA
99% dari RKAP 2025

COAL SUPPLY VOLUME
99% of the 2025 RKAP

Rp9,20

Triliun | Trillion

PENJUALAN

Berhasil mencatatkan penjualan sebesar Rp9,20 triliun.

SALES

Successfully recorded sales in amount of Rp9,20 trillion.

Rp155,18

Miliar | Billion

LABA BERSIH

Berhasil meningkatkan laba menjadi Rp155,18 miliar.

NET PROFIT

Successfully increase in profit of Rp155,18 billion.

Rp269,13

Miliar | Billion

EBITDA

Mencerminkan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya yang baik.

EBITDA

Reflecting operational efficiency and sound cost management.

Rp5,32

Triliun | Trillion

KONTRIBUSI TERHADAP PLN *GROUP*

Mencapai 109% dari target RKAP 2025.

CONTRIBUTION TO PLN GROUP

Achieving 109% of the 2025 RKAP target.

Mendukung Ketahanan Energi Nasional melalui Pasokan Batubara yang Andal, Berkualitas dan Berkelanjutan
Supporting National Energy Security Through Reliable, Quality, and Sustainable Coal Supply

OPERATIONAL EXCELLENCE & STRATEGIC CONTRIBUTION*

102,82%
KUALITAS BATUBARA
Seluruh pasokan memenuhi spesifikasi pelanggan.

COAL QUALITY
All supplies fulfil the customers specifications.

110,00%*
KETEPATAN WAKTU PENGIRIMAN
Pengiriman batubara sesuai jadwal dan melampaui target RKAP.

ON-TIME DELIVERY
Coal deliveries are on schedule and exceeded the RKAP target.

109,58%
JAMINAN PENYEDIAAN ENERGI PRIMER PLN
Menjaga *security of supply* pembangkit PLN *Group*.

PLN PRIMARY ENERGY SUPPLY GUARANTEE
Maintaining the security of supply for PLN Group power plants.

97,86
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
Kategori Sangat Baik.

ORGANIZATIONAL PERFORMANCE SCORE (ORSC)
Excellent Category.

*Pencapaian KPI tahun 2025/ 2025 KPI Achievement.

TURNAROUND PERFORMANCE

2024	2025
Rp47,64 Miliar | Billion	Rp155,18 Miliar | Billion

Berhasil meningkatkan laba menjadi Rp155,18 miliar.
Successfully increase in profit of Rp155,18 billion.

STRATEGIC ASSIGNMENT

INTERMEDIATE STOCKPILE PLTU MEULABOH 3–4

Mendukung keandalan pasokan energi primer PLN dan memperkuat ketahanan rantai pasok nasional, khususnya di wilayah Sumatera.

Supports the reliability of PLN primary energy supply and strengthens the resilience of the national supply chain, particularly in the Sumatera region.

KOLABORASI UNTUK KEBERLANJUTAN
Collaboration for Sustainability

Rp3,87 Triliun | Trillion
Pendapatan *Beyond* Kwh
Mendorong diversifikasi pendapatan dan pertumbuhan berkelanjutan.
Revenue Beyond kWh
Driving revenue diversification and sustainable growth.

Rp4,83 Miliar | Billion
Sinergi Antar *Subholding*, Anak Perusahaan Lain, dan *Pusharlis*
Memperkuat sinergi dan menciptakan nilai tambah bagi PLN *Group*.
Synergy Between Subholdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis
Strengthening synergies and creating added value for the PLN Group.



KEUNGGULAN KOMPETITIF PERUSAHAAN COMPETITIVE ADVANTAGE

PLN BBN memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang menjadi dasar dalam menciptakan nilai tambah berkelanjutan dan memperkuat peran strategis dalam ekosistem energi nasional.

PLN BBN has several competitive advantages that serve as the foundation for creating sustainable added value and strengthening its strategic role in the national energy ecosystem.



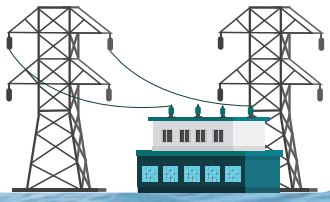
1 Garda Terdepan Ketahanan Energi Nasional
Pioneer of National Energy Security

Menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.
Maintaining the reliability of the national electricity system.

Pengelola pasokan batubara bagi pembangkit PLN *Group* dan IPP.
Managing coal supply for PLN Group and IPP power plants.

Bagian penting dalam menjaga *security of supply*.
Undertaking crucial role in maintaining security of supply.

Mendukung ketahanan pasokan energi primer Indonesia.
Supporting the resilience of Indonesia's primary energy supply.



3 Kemampuan Menjaga Kualitas dan Kuantitas Pasokan
Ability to Maintain Supply Quality and Quantity



Pengawasan kualitas menyeluruh di titik *loading* dan *unloading*.
Comprehensive quality control at loading and unloading points.

Kerja sama dengan surveyor independen.
Collaboration with independent surveyors.

Kualitas batubara memenuhi spesifikasi pelanggan.
Coal quality meets customer specifications.

2 Rantai Pasok Batubara Terintegrasi
Integrated Coal Supply Chain

End-to-end coal supply management dengan skema CIF maupun FOB yang fleksibel.
End-to-end coal supply management with flexible CIF and FOB schemes.



SOURCING
Pemilihan sumber batubara berkualitas.
Selection of quality coal sources.

LOADING PORT
Pengawasan kualitas di titik pemuatan.
Quality control at the loading point.

TRANSPORTASI
Pengiriman aman dan efisien.
Safe and efficient delivery.

MONITORING
Monitoring real time hingga tujuan.
Real-time monitoring until the destination.

SERAH TERIMA DI PLTU
Kualitas dan kuantitas sesuai spesifikasi pelanggan.
Quality and quantity according to the customers specifications.



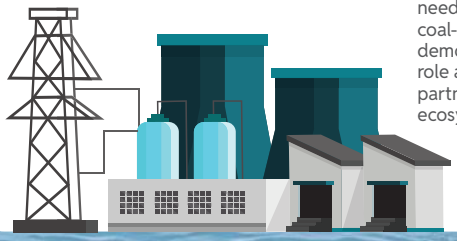
4 Dukungan Penuh Terhadap PLN *Group*
Full Support for the PLN Group

VOLUME PENJUALAN TAHUN 2025
2025 SALES VOLUME

PLN *Group*: 111,00%

IPP: 87,78%

Dari target RKAP 2025 / Against the 2025 RKAP target.



Dialokasikan untuk mendukung kebutuhan PLTU PLN *Group*, menunjukkan peran PLN BBN sebagai *strategic supply partner* dalam ekosistem energi PLN.

Allocated to support the needs of the PLN Group coal-fired power plants, demonstrating PLN BBN role as a strategic supply partner in the PLN energy ecosystem.

5 Model Bisnis Fleksibel dan Adaptif
Flexible and Adaptive Business Model



Memperluas pasar *Beyond* PLN
Expanding the market beyond PLN.

Melayani pelanggan IPP
Serving IPP customers.

Melayani sektor industri *non*-ketenagalistrikan.
Serving non-electricity industrial sectors.

Adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan.
Adapting to market dynamics and customer needs.

6 Tata Kelola dan Kepatuhan yang Baik
Good Governance and Compliance

Hasil audit kepatuhan tahun 2025 menyatakan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
The 2025 compliance audit results indicate compliance with laws and regulations.

Memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan.
Strengthening the Company's internal control system.

Berkomitmen pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
Committed to implementing Good Corporate Governance (GCG).

Menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan.
Maintaining corporate integrity, transparency, and accountability.



7 Persiapan Infrastruktur Strategis *Security of Supply*
Strategic Infrastructure Preparation for Security of Supply

PLN BBN memperoleh penugasan untuk mempersiapkan *Intermediate Stockpile* Meulaboh 3–4 sebagai bagian dari upaya peningkatan keandalan pasokan energi primer pembangkit PLN di wilayah Sumatera. *Intermediate Stockpile* PLTU Meulaboh 3–4:
- Penugasan strategis PLN *Group*.
- Mendukung *security of supply* pembangkit PLN.
- Memperkuat ketahanan pasokan energi primer di wilayah Sumatera.

PLN BBN was assigned to prepare the Meulaboh 3–4 Intermediate Stockpile as part of efforts to improve the reliability of primary energy supply for PLN power plants in the Sumatra region. Intermediate Stockpile for the Meulaboh 3–4 Power Plant:
- Strategic assignment for the PLN Group.
- Supporting the security of supply for PLN power plants.
- Strengthening the resilience of primary energy supply in the Sumatera region.

Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

Uraian Description		2025	2024	2023	2022
Volume Pasokan Batubara (MT)	Coal Supply Volume (MT)	11.890.279	11.650.671	8.484.443	2.721.668
Kualitas Batubara (%)	Coal Quality (%)	102,82	100,00	100,00	100,00
Ketepatan Waktu Pengiriman Batubara (%)	Timeliness in Coal Delivery (%)	110,00	102,34	103,74	100,00

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (juta Rupiah)
Consolidated Statement of Financial Position (in million Rupiah)

Uraian Description		2025	2024	2023	2022
Aset Lancar	Current Assets	2.178.719	2.517.068	2.323.556	1.189.492
Aset Tidak Lancar	Non-current Assets	685.048	604.159	252.513	110.067
Jumlah Aset	**Total Assets**	**2.863.767**	**3.121.227**	**2.576.069**	**1.299.559**
Liabilitas Jangka Pendek	Current Liabilities	2.355.842	2.768.477	2.175.655	1.063.702
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	2.355.842	2.768.477	2.175.655	1.063.702
Jumlah Ekuitas	Total Equity	507.925	352.750	400.414	235.858
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**Total Liabilities & Equity**	**2.863.767**	**3.121.227**	**2.576.069**	**1.299.559**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (juta Rupiah)
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

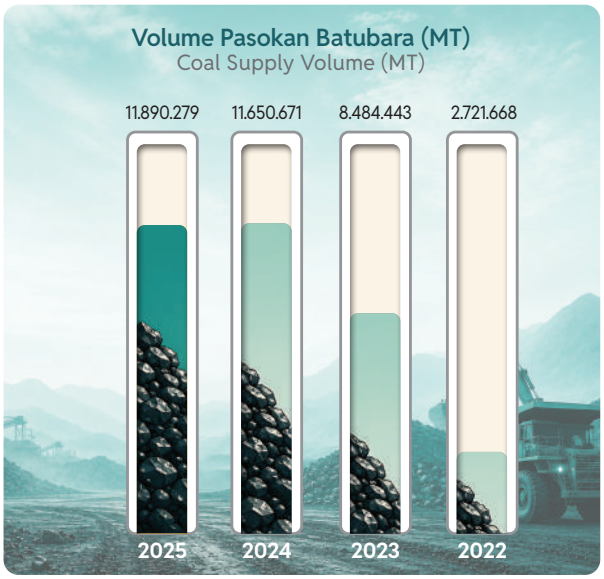
Uraian Description		2025	2024	2023	2022
Penjualan	Sales	9.204.576	8.884.597	6.578.856	2.410.295
Beban Pokok Penjualan	Cost of Sales	(8.888.929)	(8.586.697)	(6.341.910)	(2.226.205)
Laba Bruto	**Gross Profit**	**315.647**	**297.900**	**236.946**	**184.090**
Laba Sebelum Pajak	Profit Before Tax	205.242	(22.905)	209.783	187.347
Beban Pajak Penghasilan	Income Tax Expense	(50.067)	(24.759)	(45.226)	(40.950)
Laba/(Rugi) Tahun berjalan	**Profit/(loss) for The Year**	**155.175**	**(47.664)**	**164.556**	**146.397**

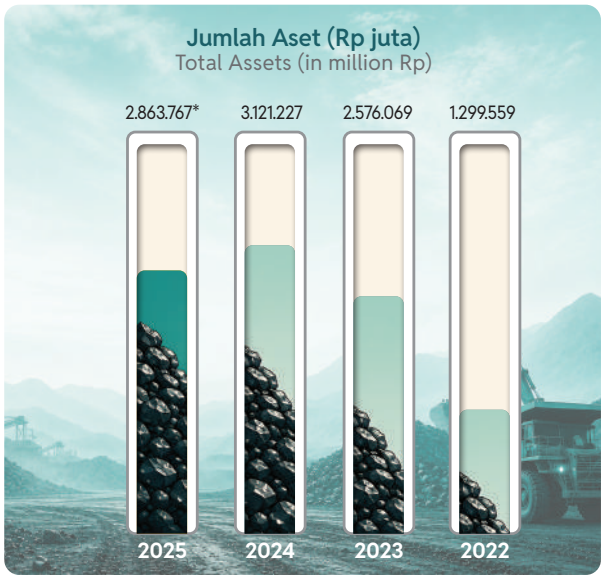
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (juta Rupiah)
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian Description		2025	2024	2023	2022
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan	**Total comprehensive income/(loss) for the year**	**155.175**	**(47.664)**	**164.556**	**146.397**
Laba per saham dasar (Rupiah penuh)	Basic earnings per share (in full Rupiah)	3,10	-	3,29	2,93

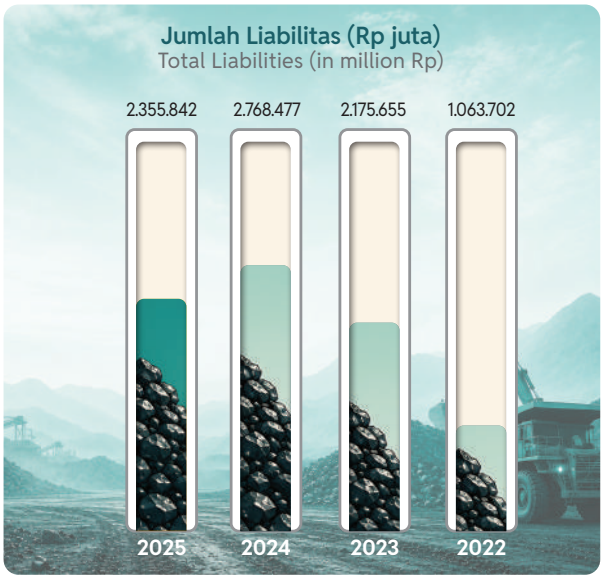
Rasio Keuangan
Financial Ratios

Uraian Description		2025	2024	2023	2022
Rasio Likuiditas (%)	**Liquidity Ratio (%)**				
Rasio Kas	Cash Ratio	3,15	0,88	4,15	5,27
Rasio Lancar	Current Ratio	92,48	90,92	106,80	111,83
Rasio Solvabilitas (%)	**Solvency Ratio (%)**				
Rasio Utang terhadap Aset	Debt to Asset Ratio	82,86	88,70	84,46	81,85
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Debt to Equity Ratio	463,82	784,83	543,35	450,99
Rasio Profitabilitas (%)	**Profitability Ratio (%)**				
Tingkat Pengembalian Aset	Return on Assets	5,42	(1,53)	6,39	11,27
Tingkat Pengembalian Ekuitas	Return on Equity	30,55	(13,51)	41,10	62,07
Margin Laba Kotor	Gross Profit Margin	3,43	3,35	3,60	7,64
Margin Laba Bersih	Net Profit Margin	1,69	(0,54)	2,50	6,07
Kolektibilitas Piutang	**Receivables Collectibility**				
Perputaran Piutang (kali)	Receivables Turnover (times)	5,00	4,65	4,73	2,61
Rata-rata Periode Penagihan (hari)	Average Collection Period (day)	71,85	78,56	77,19	139,71

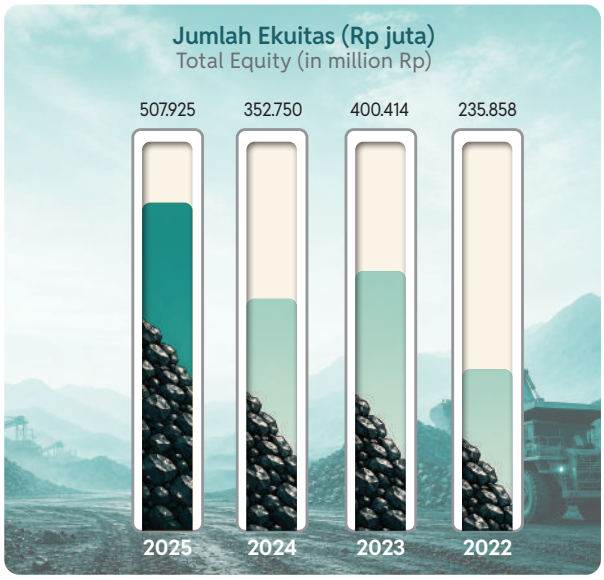


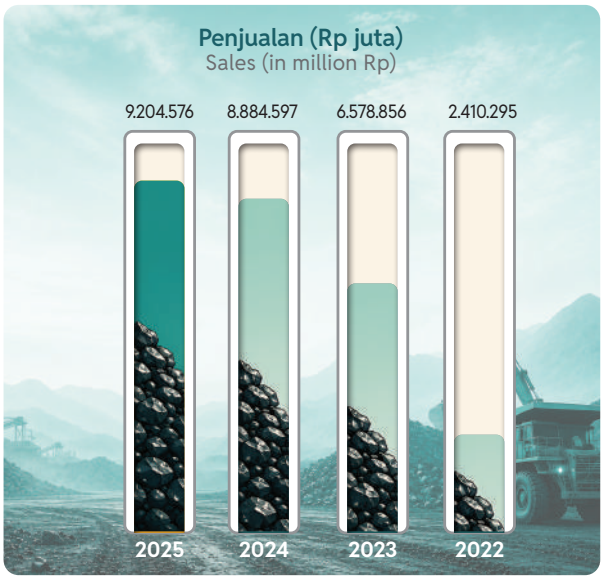


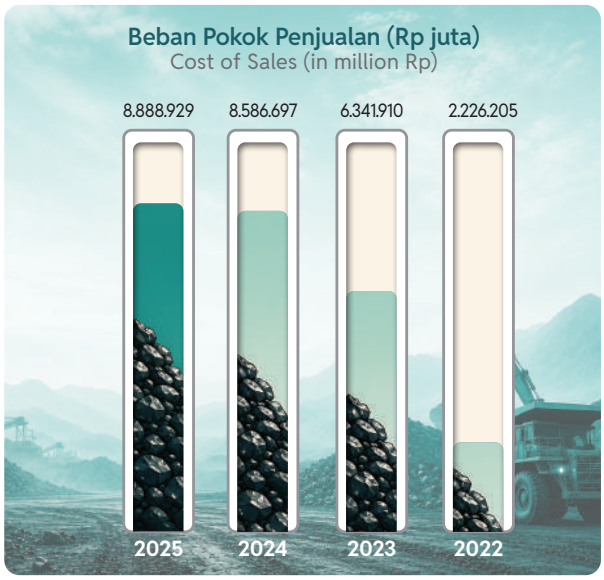
* Penjelasan terkait penurunan aset dapat dilihat di halaman 118
An explanation of the decrease in assets can be found on page 118

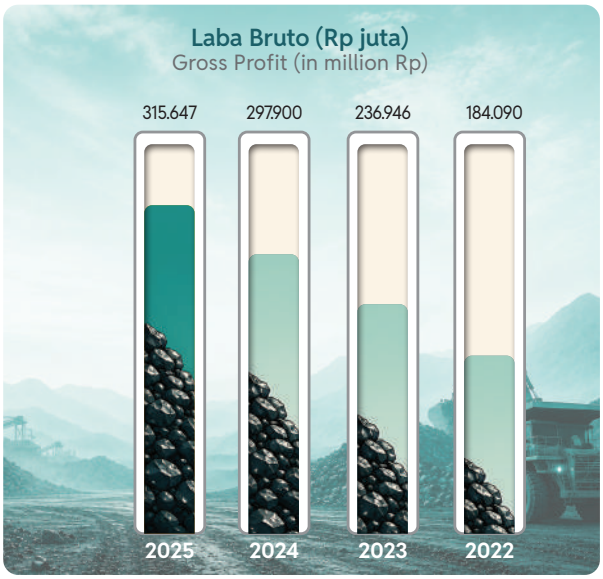


* Penjelasan terkait penurunan liabilitas dapat dilihat di halaman 121
An explanation of the decrease in liabilities can be found on page 121



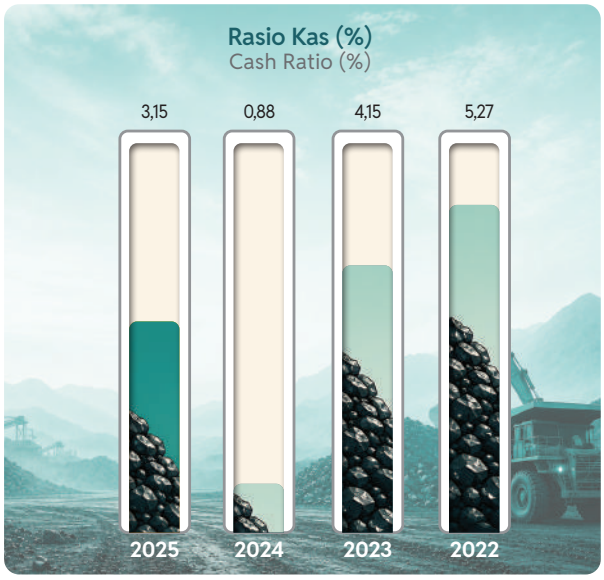


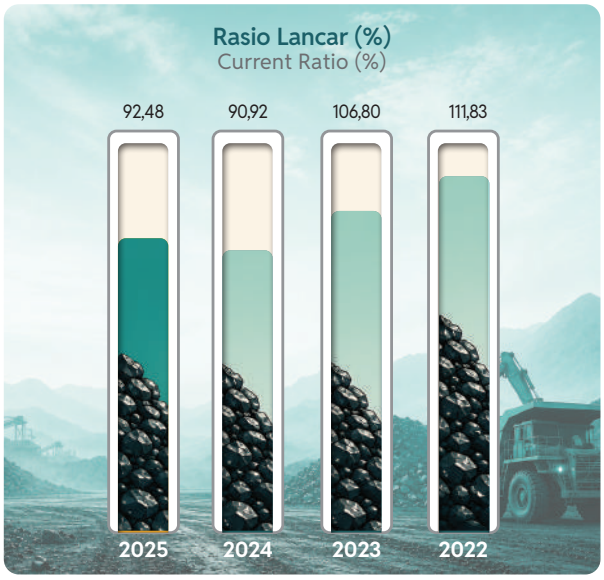


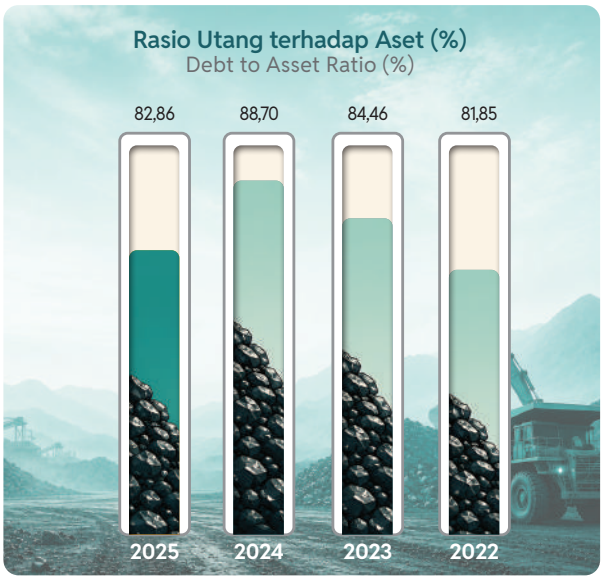

Laba Bruto (Rp juta)
Gross Profit (in million Rp)
315.647
297.900
236.946
184.090
2025
2024
2023
2022

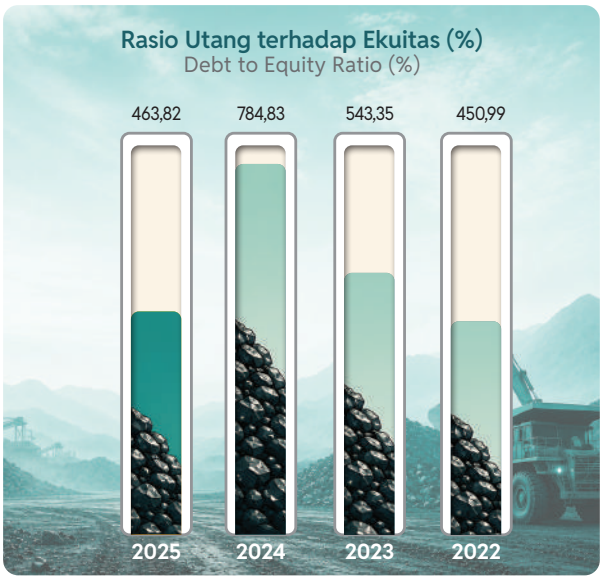

Laba Sebelum Pajak (Rp juta)
Profit Before Tax (in million Rp)
205.242
(22.905)
209.783
187.347
2025
2024
2023
2022


Laba/(rugi) tahun berjalan (Rp juta)
Profit/(loss) for the year (in million Rp)
155.175
(47.664)
164.556
146.397
2025
2024
2023
2022


Rasio Kas (%)
Cash Ratio (%)
3,15
0,88
4,15
5,27
2025
2024
2023
2022


Rasio Lancar (%)
Current Ratio (%)
92,48
90,92
106,80
111,83
2025
2024
2023
2022


Rasio Utang terhadap Aset (%)
Debt to Asset Ratio (%)
82,86
88,70
84,46
81,85
2025
2024
2023
2022


Rasio Utang terhadap Ekuitas (%)
Debt to Equity Ratio (%)
463,82
784,83
543,35
450,99
2025
2024
2023
2022


Tingkat Pengembalian Aset (%)
Return on Assets (%)
5,42
(1,53)
6,39
11,27
2025
2024
2023
2022


Tingkat Pengembalian Ekuitas (%)
Return on Equity (%)
30,55
(13,51)
41,10
62,07
2025
2024
2023
2022

Ikhtisar Saham
Share Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2025, PLN BBN tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2025, PLN BBN did not conduct share trading, so there is no information on the highest share price, lowest share price, and closing share price as well as the volume of shares traded.

Ikhtisar Efek Lainnya
Bond Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2025, PLN BBN tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2025, PLN BBN did not issue bonds, sukuk, and convertible bonds so there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/yields, maturity dates, and bonds/sukuk ratings.

Aksi Korporasi 2025
Corporate Actions

Pada tahun 2025, PLN BBN tidak melakukan aksi korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

In 2025, PLN BBN did not undertake any Corporate Actions related to activities affecting the number of outstanding shares, including stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares.

Peristiwa Penting Tahun 2025

Significant Events in 2025

21 FEBRUARI | FEBRUARY 2025



Focus Group Discussion Cascading KPI PT PLN Batubara Niaga Tahun 2025

PLN BBN menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) *Cascading* KPI Tahun 2025 pada 21 Februari 2025 sebagai bagian dari upaya penyelarasan sasaran strategis perusahaan ke seluruh level organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap indikator kinerja selaras dengan target korporasi, mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan program kerja, serta memperkuat komitmen insan perusahaan dalam mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

Focus Group Discussion Cascading KPI PT PLN Batubara Niaga Tahun 2025

PLN BBN held a Focus Group Discussion (FGD) on Cascading KPIs for 2025 on February 21, 2025, as part of the efforts to align the Company's strategic objectives across all levels of the organization. This activity purposed to ensure that each performance indicator aligns with corporate targets, support increased effectiveness in work program implementation, and strengthen the commitment of Company personnel to achieving optimal and sustainable performance.

1 AGUSTUS | AUGUST 2025



Peresmian dan Tasyakuran Pengoperasian *Intermediate Stockpile* PLTU Meulaboh 3-4.

PLN BBN bersama PLN *Group* melaksanakan Peresmian dan Tasyakuran Pengoperasian *Intermediate Stockpile* PLTU Meulaboh 3-4 sebagai bagian dari upaya memperkuat keandalan pasokan batubara bagi operasional pembangkit. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik energi serta mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan di wilayah Aceh dan sekitarnya.

Kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur atas selesainya pembangunan dan mulai beroperasinya fasilitas pendukung strategis tersebut. Melalui penguatan infrastruktur energi primer, PLN BBN terus berupaya mendukung ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Inauguration and Thanksgiving Ceremony for the Operation of the Meulaboh 3-4 Coal-fired Power Plant (CFPP) Intermediate Stockpile

PLN BBN, together with the PLN Group, held the inauguration and thanksgiving ceremony for the operation of the Meulaboh 3-4 Coal-fired Power Plant (CFPP) Intermediate Stockpile as part of efforts to strengthen the reliability of coal supply for power plant operations. This facility is expected to improve the effectiveness of energy logistics management and support the reliability of the electricity system in Aceh and the surrounding areas.

This event also served as the gratitude for the completion of construction and the commencement of operation of this strategic supporting facility. By strengthening primary energy infrastructure, PLN BBN continues to strive to support the availability of reliable and sustainable energy for the community.

4 AGUSTUS | AUGUST 2025



Ulang Tahun yang ke 6 PT PLN Batubara Niaga

PLN BBN memperingati Hari Ulang Tahun ke-6 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung keandalan pasokan energi primer nasional. Perayaan ini sekaligus menjadi pengingat atas perjalanan, kolaborasi, dan kontribusi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan operasional ketenagalistrikan nasional.

PT PLN Batubara Niaga's 6th Anniversary

PLN BBN commemorates the 6th anniversary as a momentum to strengthen the Company's commitment to supporting the reliability of the national primary energy supply. This celebration also served as a reminder of the Company's journey, collaboration, and contribution to maintaining the continuity of national electricity operations.



Pemberian bantuan dana santunan dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak binaan Yayasan Yatim Piatu dan Hafiz Quran Rosella sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan generasi muda.

The provision of financial aid and school supplies to children under the care of the Rosella Orphan and Quran Hafiz Foundation as a demonstration of the Company's commitment to enhancing the welfare of the younger generation.

6 NOVEMBER | NOVEMBER 2025



Sosialisasi proses sertifikasi penetapan ISO 9001:2015 kepada seluruh karyawan PT PLN Batubara Niaga guna memberikan pemahaman komprehensif terkait pentingnya penerapan Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* dan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap peningkatan layanan dan tata kelola yang berstandar internasional.

Dissemination of the ISO 9001:2015 certification process to all employees of PT PLN Batubara Niaga to provide a comprehensive understanding of the importance of implementing a Quality Management System and as a demonstration of the Company's commitment to improving internationally-standardized services and governance.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certification

Sepanjang tahun 2025, PLN BBN belum menerima penghargaan. PLN BBN tetap memfokuskan upaya pada penguatan *fundamental* bisnis, peningkatan keandalan operasional, serta optimalisasi pengelolaan pasokan energi primer guna mendukung kinerja Perusahaan dan keandalan sistem kelistrikan nasional secara berkelanjutan.

Throughout 2025, PLN BBN had not received any awards. PLN BBN remains focused on strengthening business fundamentals, improving operational reliability, and optimizing primary energy supply management to support the Company's performance and the sustainable reliability of the national electricity system.



Nama Sertifikasi Certification Name	SNI ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan No. 03 13 K 24000821-004	SNI ISO 37001:2016 - related to the Anti-Bribery Management System No. 03 13 K 24000821-004
Tanggal Perolehan Acquisition Date	22 November 2024	November 22, 2024
Berlaku Hingga Validity period	21 November 2027	November 21, 2027
Badan Sertifikasi Certification Agency	TUV Nord Indonesia	TUV Nord Indonesia



Nama Sertifikasi Certification Name	SNI ISO 37301:2021 - Sistem Manajemen Kepatuhan No. 05 19K 24000820 - 005	SNI ISO 37301:2021 - related to Compliance Management System No. 05 19K 24000820 - 005
Tanggal Perolehan Acquisition Date	22 November 2024	November 22, 2024
Berlaku Hingga Validity period	21 November 2027	November 21, 2027
Badan Sertifikasi Certification Agency	TUV Nord Indonesia	TUV Nord Indonesia

Tahun 2025, PLN BBN tengah melaksanakan proses pemenuhan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan sebagai bagian dari penguatan sistem manajemen dan penerapan tata kelola yang selaras dengan standar internasional. Proses sertifikasi tersebut mencakup tahapan persiapan dokumen, penyesuaian prosedur kerja, pelaksanaan audit internal, serta verifikasi kesesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Langkah ini juga menjadi inisiatif strategis untuk memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dilaksanakan secara konsisten sesuai prinsip mutu dan kepatuhan yang diakui secara global. Dengan terselesaikannya sertifikasi tersebut, Perusahaan diharapkan semakin mampu menjaga konsistensi kinerja serta mengoperasikan bisnis secara lebih efektif, berintegritas, dan berkelanjutan.

In 2025, PLN BBN was in the process of fulfilling the SNI ISO 37001:2016 certification related to the Anti-Bribery Management System and SNI ISO 37301:2021 Compliance Management System as part of strengthening the management system and implementing governance that is aligned with international standards. The certification process included the stages of document preparation, adjustment of work procedures, implementation of internal audits, and verification of compliance with the requirements set by the certification agency. This step is also a strategic initiative to strengthen trust by the stakeholders and ensure that all operational activities are carried out consistently following the globally recognized quality and compliance principles. With this certification completion, the Company is expected to be increasingly able to maintain performance consistency and operate the business more effectively, with integrity, and sustainably.



PLN BATUBARA NIAGA

1

Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Komisaris

Report from The Board of Commissioners



Ratnasari Sjamsuddin

Plt. Komisaris Utama

Act. President Commissioner

Dewan Komisaris menilai bahwa Perusahaan telah mencatatkan perbaikan kinerja keuangan yang signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, ditandai dengan keberhasilan membukukan laba bersih dan memperkuat kinerja keuangan Perusahaan pada tahun 2025.

The Board of Commissioners considers that the Company has recorded a significant improvement in financial performance in 2025 compared to the previous year. It is marked by its success in booking a net profit and strengthening the Company's financial performance in 2025.

Pemegang Saham yang Kami Hormati

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PLN BBN dapat melalui tahun buku 2025 dengan kinerja yang baik di tengah dinamika industri energi yang penuh tantangan. Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan Laporan Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi selama tahun buku 2025.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika. Kondisi ekonomi global masih dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasok, serta perubahan kebijakan perdagangan internasional. Di sisi lain, agenda transisi energi terus berkembang sehingga menuntut perusahaan-perusahaan energi untuk mampu menjaga keseimbangan antara keandalan pasokan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha.

Dalam kondisi tersebut, PLN BBN tetap memegang peranan strategis sebagai bagian dari PLN *Group* dalam memastikan keamanan pasokan batubara bagi pembangkit listrik nasional. Dewan Komisaris memandang bahwa keberhasilan Perusahaan dalam menjalankan fungsi tersebut merupakan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional sekaligus mendukung keberlangsungan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat.

Dear Shareholders

Greatest gratitude to the God Almighty for the grace and blessings granted that enabled PLN BBN to navigate the 2025 fiscal year with strong performance amid the challenging dynamics of the energy industry. On behalf of the Board of Commissioners, we hereby submit the Board of Commissioners Report as the accountability for the oversight on the Company management by the Board of Directors during the 2025 fiscal year.

2025 was marked by significant dynamics. Global economic conditions continued to be influenced by geopolitical uncertainty, fluctuations in energy prices, supply chain disruptions, and changes in international trade policies. Meanwhile, the energy transition agenda continued to evolve, requiring energy companies to maintain among the balance between supply reliability, operational efficiency, and business sustainability.

Under these conditions, PLN BBN keeps undertaking strategic role as part of the PLN Group in ensuring the security of coal supply for national power plants. The Board of Commissioners views the Company's success in carrying out this function as a tangible contribution to national energy security while supporting the continuity of electricity services to the public.

Tema *Annual Report* Tahun 2025, "Mengokohkan Fondasi Pasokan Energi untuk Keandalan Sistem Kelistrikan", menurut pandangan Dewan Komisaris telah mencerminkan arah strategis yang ditempuh PLN BBN sepanjang tahun. Tema tersebut tidak hanya menggambarkan keberhasilan menjaga kontinuitas pasokan energi primer, tetapi juga menunjukkan komitmen Perusahaan dalam memperkuat fondasi bisnis melalui peningkatan efektivitas operasional, penguatan tata kelola perusahaan, transformasi organisasi, serta pembangunan budaya risiko dan kepatuhan.

The Board of Commissioners considers the theme of the 2025 Annual Report, "Strengthening Energy Supply Foundations for Reliable Power Systems" reflects the strategic direction pursued by PLN BBN throughout the year. This theme not only illustrates the success in maintaining the continuity of primary energy supply but also demonstrates commitment by the Company to strengthening business foundation through improved operational effectiveness, enhanced corporate governance, organizational transformation, and the development of a culture of risk management and compliance.

Pandangan Dewan Komisaris Terhadap Kondisi Ekonomi dan Industri

Viewpoint by the Board of Commissioners on Economic and Industry Conditions

Dewan Komisaris memandang bahwa sepanjang tahun 2025 PLN BBN menghadapi lingkungan usaha yang semakin kompleks. Ketidakpastian ekonomi global, volatilitas harga batubara, tekanan terhadap biaya logistik, serta perubahan kondisi cuaca memberikan tantangan tersendiri dalam menjaga keandalan pasokan energi primer. Namun demikian, meningkatnya kebutuhan listrik nasional dan masih dominannya peran batubara dalam bauran energi Indonesia memberikan peluang bagi PLN BBN untuk terus memperkuat kontribusinya sebagai penyedia energi primer yang andal. Dewan Komisaris secara konsisten memberikan arahan kepada Direksi agar tetap menjaga keseimbangan antara pencapaian target jangka pendek dengan penguatan fondasi bisnis jangka panjang.

The Board of Commissioners views that throughout 2025 PLN BBN faced an increasingly complex business environment. Global economic uncertainty, coal price volatility, pressure on logistics costs, and changing weather conditions present unique challenges in maintaining the reliability of primary energy supply. Nevertheless, the rising national demand for electricity and the continued dominance of coal in Indonesia's energy mix present opportunities for PLN BBN to further strengthen the role as a reliable primary energy provider. The Board of Commissioners consistently guides the Board of Directors to maintain a balance between achieving short-term targets and strengthening the foundation for long-term business growth.

Dewan Komisaris juga memandang bahwa transformasi sektor ketenagalistrikan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan tidak mengurangi pentingnya fungsi Perusahaan. Sebaliknya, pada masa transisi energi, keandalan pasokan batubara menjadi semakin strategis karena berperan menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional.

The Board of Commissioners also believes that the transformation of electricity sector toward a more sustainable energy system does not bring down the importance of the Company's role. On the contrary, during this energy transition, the reliability of coal supply becomes increasingly strategic as it performs the key role in maintaining the stability of the national power system.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Implementation of the Supervisory Functions by the Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang Perusahaan Terbatas, serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pengawasan dilakukan secara independen, objektif, dan konstruktif guna memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan berjalan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, prinsip kehati-hatian, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Throughout 2025, the Board of Commissioners carried out oversight and advisory functions to the Board of Directors according to the provisions of the Company's Articles of Association, the Limited Liability Companies Act, and the principles of Good Corporate Governance (GCG). The Board of Commissioners supervises independently, objectively, and constructively to ensure that the Company management operates following the established strategies, the principle of prudence, as well as applicable laws and regulations.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan perusahaan melalui berbagai mekanisme pengawasan yang terstruktur. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, pembahasan Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan, evaluasi pencapaian RKAP dan Kontrak Manajemen, monitoring implementasi manajemen risiko, pemantauan tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal, serta pengawasan terhadap penerapan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) kali rapat yang terdiri atas 12 (dua belas) kali Rapat Internal Dewan Komisaris dan 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat-rapat tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai sarana untuk membahas perkembangan kinerja operasional dan keuangan perusahaan, pencapaian target RKAP, pengelolaan risiko, tindak lanjut hasil audit, penguatan tata kelola perusahaan, serta berbagai isu strategis yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha Perusahaan. Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diawali dengan rapat internal Direksi sebagai bagian dari proses pembahasan dan penyelarasan agenda strategis perusahaan.

Dari sisi kehadiran, Dewan Komisaris menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sepanjang tahun 2025, Sdr. Tri Joko Supriyatno selaku Plt. Komisaris dan Sdr. Noor Adi Baroto selaku Komisaris Independen menghadiri seluruh Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan tingkat kehadiran masing-masing sebesar 100%. Sementara itu, Sdri. Ratnasari Sjamsuddin diangkat sebagai Plt. Komisaris Utama pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga belum mengikuti rapat Dewan Komisaris selama periode pelaporan tahun 2025.

Melalui berbagai rapat dan mekanisme pengawasan tersebut, Dewan Komisaris secara aktif memberikan arahan, rekomendasi, dan masukan strategis kepada Direksi guna memastikan perusahaan dikelola secara sehat, *prudent*, dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap penguatan keamanan pasokan batubara *(security of supply),* optimalisasi rantai pasok dari sumber tambang hingga transportasi laut, peningkatan likuiditas dan kecukupan modal kerja, pengembangan bisnis trading batubara sebagai sumber pendapatan *beyond* kWh, serta optimalisasi sinergi di lingkungan PLN *Group*.

In carrying out oversight and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners actively monitors the Company management through various structured oversight mechanisms. The oversight function is carried out through the holding of Board of Commissioners meetings, joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, discussions of Monthly and Quarterly Management Reports, evaluation of the achievement of the Annual Business Plan (RKAP) and Management Contracts, monitoring of risk management implementation, follow-up on the results of internal and external audits, as well as oversight of the implementation of corporate governance and compliance with applicable regulations.

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 24 (twenty-four) meetings, consisting of 12 (twelve) Internal Meetings of the Board of Commissioners and 12 (twelve) Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. These meetings were held periodically to discuss the Company's operational and financial performance, the achievement of the Annual Business Plan (RKAP) targets, risk management, follow-up on audit findings, strengthening corporate governance, and various strategic issues that could potentially affect the Company's business continuity. Joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors began with an internal meeting of the Board of Directors as part of the process of discussing and aligning the Company's strategic agenda.

In terms of attendance, the Board of Commissioners demonstrated a high level of commitment in carrying out its supervisory functions. Throughout 2025, Mr. Tri Joko Supriyatno, acting as Acting Commissioner, and Mr. Noor Adi Baroto, acting as Independent Commissioner, attended all internal meetings of the Board of Commissioners as well as joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with an attendance rate of 100% each. Meanwhile, Ms. Ratnasari Sjamsuddin was appointed Acting President Commissioner on December 31, 2025, and therefore did not attend any Board of Commissioners meetings during the 2025 reporting period.

Through these various meetings and oversight mechanisms, the Board of Commissioners actively provided guidance, recommendations, and strategic input to the Board of Directors to ensure the Company is managed in a sound, prudent, and sustainable manner. Throughout 2025, the Board of Commissioners paid special attention to strengthening the security of coal supply, optimizing the supply chain from mining sources to maritime transportation, improving liquidity and working capital adequacy, developing the coal trading business as a revenue source beyond kWh, and optimizing synergies within the PLN Group.

Selain itu, Dewan Komisaris juga mendorong percepatan transformasi dan digitalisasi proses bisnis, penguatan kompetensi dan pengembangan *human capital*, peningkatan maturity level tata kelola perusahaan, serta implementasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) yang lebih terintegrasi. Dewan Komisaris menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dan kepatuhan dalam setiap proses pengambilan keputusan serta memastikan seluruh program kerja dan target RKAP 2025 dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip GCG.

Furthermore, the Board of Commissioners also encouraged the acceleration of business process transformation and digitalization, the strengthening of competencies and human capital development, the improvement of corporate governance maturity levels, and the implementation of a more integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC) framework. The Board of Commissioners emphasizes the importance of strengthening risk management and compliance in every decision-making process and ensuring that all work programs and targets in the 2025 Annual Work Plan and Budget (RKAP) are implemented effectively, efficiently, and according to the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Dewan Komisaris juga secara berkala mengevaluasi realisasi kinerja perusahaan dan memberikan arahan antisipatif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Perusahaan, termasuk dinamika pasokan batubara, kondisi likuiditas, kebutuhan modal kerja, perubahan regulasi, serta perkembangan kondisi pasar energi. Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan secara aktif dan konstruktif tersebut, Dewan Komisaris berupaya memastikan bahwa Perusahaan mampu menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan nilai perusahaan, serta memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan energi nasional sebagai bagian dari PLN *Group*.

The Board of Commissioners also periodically evaluates the Company's performance and provides proactive guidance regarding various challenges faced by the Company, including coal supply dynamics, liquidity conditions, working capital needs, regulatory changes, and developments in the energy market. Through these active and constructive oversight functions, the Board of Commissioners strives to ensure that the Company is able to maintain business continuity, increase corporate value, and strengthen its contribution to supporting national energy security as part of the PLN Group.

Melalui mekanisme pengawasan tersebut, Dewan Komisaris memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Direksi telah melaksanakan pengurusan Perusahaan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan arah strategis Perusahaan. Dewan Komisaris juga menilai bahwa berbagai kebijakan dan langkah strategis yang ditempuh Direksi sepanjang tahun 2025 telah diarahkan untuk menjaga keandalan pasokan energi primer, meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan.

Through this oversight mechanism, the Board of Commissioners has gained sufficient confidence that the Board of Directors has managed the Company effectively, accountably, and in alignment with strategic direction of the Company. The Board of Commissioners also assesses that the various policies and strategic measures undertaken by the Board of Directors throughout 2025 have been directed toward maintaining the reliability of primary energy supply, improving operational and financial performance, strengthening corporate governance, and supporting business sustainability of the Company.

Pandangan Dewan Komisaris Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Viewpoint by the Board of Commissioners on the Implementation of the Company's Strategy

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan strategi perusahaan secara efektif melalui berbagai program kerja yang terukur dan adaptif terhadap dinamika lingkungan usaha. Strategi yang difokuskan pada penguatan keandalan pasokan energi primer, peningkatan efisiensi operasional, penguatan tata kelola perusahaan, transformasi *digital*, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia telah mendukung pencapaian kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2025.

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has effectively implemented the Company's strategy through various measurable work programs that are adaptable to the dynamics of the business environment. The strategy, which focuses on strengthening the reliability of primary energy supply, improving operational efficiency, strengthening corporate governance, digital transformation, and developing human resource competencies, has supported the Company's performance throughout 2025.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola berbagai tantangan operasional dan bisnis yang dihadapi selama tahun berjalan. Upaya Direksi dalam memperkuat koordinasi dengan pemasok, pelanggan, dan mitra strategis dinilai efektif dalam memitigasi risiko gangguan pasokan yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, dinamika pasar, maupun perubahan pola distribusi, sehingga kontinuitas pasokan kepada pembangkit PLN *Group* dan IPP.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa berbagai inisiatif perbaikan yang dijalankan Direksi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas operasional, kualitas layanan, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko Perusahaan. Menurut pandangan Dewan Komisaris, kemampuan Direksi dalam menjaga kesinambungan operasional dan mempertahankan keandalan pasokan energi primer selama tahun 2025 mencerminkan semakin kuatnya ketahanan organisasi *(organizational resilience)* serta semakin matangnya proses pengambilan keputusan yang berbasis risiko dan prinsip kehati-hatian.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa implementasi strategi yang dilakukan Direksi telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, memperkuat posisi Perusahaan sebagai bagian dari rantai pasok energi PLN *Group*, serta menciptakan landasan yang lebih kuat bagi pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa mendatang.

Based on the results of its oversight, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has demonstrated strong capabilities in managing the various operational and business challenges faced during the current year. The Board of Directors' efforts to strengthen coordination with suppliers, customers, and strategic partners are deemed effective in mitigating the risk of supply disruptions caused by weather conditions, market dynamics, or changes in distribution patterns, thereby ensuring the continuity of supply to PLN Group power plants.

The Board of Commissioners also assesses that the various improvement initiatives implemented by the Board of Directors have presented positive contribution to enhancing operational effectiveness, service quality, and strengthening governance and risk management within the Company. The Board of Commissioners considers the Board of Directors ability to maintain operational continuity and ensure the reliability of primary energy supply throughout 2025 reflects the Company's growing organizational resilience as well as the increasing maturity of its risk-based and prudent decision-making processes.

Overall, the Board of Commissioners believes that implementation of the strategy by the Board of Directors is on the right track in supporting the achievement of the Company's objectives and strengthening the Company's position as part of the PLN Group energy supply chain, and creating a stronger foundation for future business growth and development.

Pandangan Dewan Komisaris atas Pencapaian Kinerja Tahun 2025 serta Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan Target

Viewpoint by the Board of Commissioners on Performance Achievements in 2025 and Comparison of the Results Achieved Against Targets

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri energi primer, termasuk dinamika permintaan pelanggan, fluktuasi harga batubara, peningkatan kebutuhan modal kerja, serta tekanan terhadap margin usaha. Dalam kondisi tersebut, Perusahaan mampu menjaga keberlangsungan operasional, mempertahankan keandalan pasokan energi primer, serta membukukan kinerja keuangan yang positif.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas keberhasilan Direksi dalam menjaga keandalan pasokan batubara kepada PLN *Group* sebagai pelanggan utama dengan realisasi pasokan yang melampaui target. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, koordinasi operasional yang baik, serta komitmen Perusahaan dalam mendukung keamanan pasokan energi nasional. Selain itu, kinerja kualitas

The Board of Commissioners assesses that the Company performance throughout 2025 presented positive progress in the middle of various challenges faced by the primary energy industry, including dynamics in the customers demand, fluctuations in coal prices, increased working capital requirements, and pressure on operating margins. Under these conditions, the Company was able to maintain operational continuity, ensure the reliability of primary energy supply, and post positive financial performance.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors for successfully ensuring the reliability of coal supply to the PLN Group as the Company's primary customer with actual supply volumes exceeding targets. These achievements demonstrate the effectiveness of supply chain management, good operational coordination, and the Company's commitment to supporting the security

batubara dan ketepatan waktu pengiriman yang melampaui target mencerminkan peningkatan kapabilitas operasional dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan.

Dari sisi keuangan, Dewan Komisaris mencermati bahwa sebagian indikator kinerja belum mencapai target RKAP yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan, laba bruto, laba tahun berjalan, total aset, dan ekuitas masih berada di bawah target, terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi volume pasokan pada segmen pelanggan IPP, tekanan terhadap margin usaha, serta meningkatnya kebutuhan modal kerja dan biaya pendanaan. Meskipun demikian, Dewan Komisaris menilai bahwa Perusahaan telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan berhasil membukukan laba bersih dan membalikkan kondisi rugi menjadi laba pada tahun 2025.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas berbagai langkah transformasi yang telah dijalankan Direksi, termasuk penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan disiplin operasional, optimalisasi proses bisnis, pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi, serta upaya efisiensi di berbagai lini usaha. Berbagai inisiatif tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja dan ketahanan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa struktur permodalan Perusahaan masih memerlukan perhatian khusus mengingat meningkatnya proporsi liabilitas dibandingkan dengan ekuitas. Oleh karena itu, Direksi perlu terus memperkuat profitabilitas, mengoptimalkan pengelolaan modal kerja, meningkatkan efisiensi biaya, serta menjaga keseimbangan struktur pendanaan guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Ke depan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus meningkatkan volume penjualan kepada PLN *Group* dan pelanggan IPP, memperkuat diversifikasi sumber pasokan, mengembangkan peluang bisnis baru yang memberikan nilai tambah, mempercepat digitalisasi proses bisnis, serta memperkuat penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan keberlanjutan dalam seluruh aktivitas perusahaan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja tahun 2025 telah menunjukkan arah perbaikan yang positif dan menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan Perusahaan pada masa mendatang. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target RKAP, berbagai capaian yang diraih menunjukkan bahwa Perusahaan berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat ketahanan usaha, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

of the national energy supply. Additionally, coal quality performance and on-time delivery rates that exceeded targets reflect improvements in operational capabilities and the quality of service provided to customers.

In terms of financial, the Board of Commissioners recognised that some performance indicators have not yet met the targets set in the Annual Business Plan (RKAP). Actual revenue, gross profit, net income, total assets, and equity remain below target, primarily due to suboptimal supply volumes in the IPP customer segment, pressure on operating margins, and increased working capital requirements and financing costs. Nevertheless, the Board of Commissioners assesses that the Company has demonstrated significant improvement compared to the previous year by successfully recording net income and turning a loss into a profit in 2025.

The Board of Commissioners believes that these achievements reflect the effectiveness of various transformation measures implemented by the Board of Directors, including strengthening corporate governance, enhancing operational discipline, optimizing business processes, implementing more integrated risk management, and pursuing efficiency across various business lines. These initiatives have brought positive impacts on improving the Company performance quality and business resilience.

The Board of Commissioners also assesses that the Company's capital structure still requires special attention given the increasing proportion of liabilities relative to equity. Therefore, the Board of Directors needs to continue strengthening profitability, optimizing working capital management, improving cost efficiency, and maintaining a balanced funding structure to support healthy and sustainable business growth.

Moving forward, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue increasing sales volume to the PLN Group and IPP customers, strengthen the diversification of supply sources, develop new business opportunities that provide added value, accelerate the digitization of business processes, and reinforce the implementation of corporate governance, risk management, and sustainability principles across all company activities.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the performance in 2025 has shown a positive trajectory of improvement and serves as a strong foundation for the Company's growth in the coming period. Despite several indicators still have not met the targets set in the Annual Work and Budget Plan (RKAP), the various achievements attained indicate that the Company is on the right track in strengthening business resilience, enhancing competitiveness, and creating sustainable value for shareholders and stakeholders.

Pandangan Dewan Komisaris Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Viewpoint by the Board of Commissioners on the Implementation of Corporate Governance

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2025 Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan utama dalam mendukung keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan. Di tengah dinamika industri energi primer yang semakin kompleks, penerapan tata kelola yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan operasional, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat daya tahan Perusahaan terhadap berbagai risiko usaha.

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam mengintegrasikan aspek *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) ke dalam seluruh proses bisnis perusahaan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran secara konsisten telah menjadi fondasi yang mendukung pengelolaan perusahaan secara profesional, terukur, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa hubungan kerja antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi telah berjalan dengan baik serta mencerminkan penerapan mekanisme *check and balances* yang sehat. Sinergi yang terbangun di antara organ perusahaan telah mendukung terciptanya proses pengambilan keputusan yang objektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang Perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan terhadap efektivitas implementasi tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk penyempurnaan kebijakan internal, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kualitas pengelolaan risiko, serta tindak lanjut atas rekomendasi audit dan hasil *assessment* tata kelola.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas konsistensi Perusahaan dalam menerapkan berbagai sistem manajemen yang mendukung penguatan tata kelola, termasuk implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Menurut

The Board of Commissioners assesses that throughout 2025, the Board of Directors presented strong commitment to strengthening the implementation of good corporate governance as the primary foundation for supporting business sustainability and the creation of long-term value for shareholders and stakeholders. Amid the increasingly complex dynamics of the primary energy industry, the implementation of effective corporate governance is a critical factor in maintaining operational reliability, improving the quality of decision-making, and strengthening the Company's resilience against various business risks.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors efforts to integrate Governance, Risk, and Compliance (GRC) aspects into all of the Company's business processes. Consistent application of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness has served as the foundation supporting professional and measurable corporate management in accordance with applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners also assesses that the working relationship between the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors has been functioning well and reflects the implementation of a sound system of checks and balances. The synergy established among the Company's governing bodies has supported the creation of a decision-making process that is objective, accountable, and oriented toward the Company's long-term interests.

In carrying out its oversight functions, the Board of Commissioners periodically monitors the effectiveness of the implementation of corporate governance, risk management, compliance, and internal controls. Based on the oversight results throughout 2025, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has implemented various necessary improvement measures, including refining internal policies, strengthening oversight functions, enhancing the quality of risk management, and following up on audit recommendations and governance assessment results.

The Board of Commissioners appreciates the Company's consistency in implementing various management systems that support the strengthening of corporate governance, including the implementation of the ISO 9001:2015 Quality Management System, the ISO 37301:2021 Compliance Management System, and the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

Dewan Komisaris, penerapan standar tersebut menunjukkan komitmen PLN BBN untuk membangun budaya organisasi yang mengedepankan kualitas, integritas, kepatuhan, dan perbaikan berkelanjutan.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa penerapan manajemen risiko telah semakin terintegrasi dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Pengelolaan risiko yang dilakukan secara sistematis memberikan dasar yang lebih kuat bagi Perusahaan dalam mengantisipasi berbagai tantangan yang timbul dari perubahan kondisi pasar, dinamika pasokan energi primer, perkembangan regulasi, maupun risiko operasional lainnya.

Pada aspek pengendalian internal dan budaya integritas, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang baik melalui penguatan fungsi Audit Internal, manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, serta implementasi *Whistleblowing System* (WBS). Tidak adanya laporan yang masuk melalui mekanisme WBS selama tahun 2025 menunjukkan bahwa Perusahaan berhasil menjaga lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas. Namun demikian, Dewan Komisaris mendorong agar efektivitas sistem pelaporan pelanggaran terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami dan memiliki akses yang memadai terhadap mekanisme tersebut.

Terkait hasil *assessment* implementasi GCG, Dewan Komisaris mencermati capaian skor SK-16 sebesar 63,409 dengan kategori "Cukup Baik" dan skor ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) sebesar 38,68. Dewan Komisaris menilai hasil tersebut mencerminkan adanya fondasi tata kelola yang telah terbentuk dengan baik, namun masih terdapat ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti secara konsisten guna meningkatkan kualitas pengungkapan informasi, efektivitas pengawasan, perlindungan hak pemegang saham, serta penerapan praktik tata kelola yang selaras dengan standar terbaik di tingkat regional.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris mendukung langkah Direksi dalam menyusun program peningkatan implementasi GCG yang difokuskan pada penyempurnaan dokumentasi tata kelola, penguatan kebijakan internal, peningkatan kualitas pengungkapan informasi korporasi, serta percepatan implementasi rekomendasi hasil *assessment* SK - 16 & ACGS. Dewan Komisaris juga mendorong agar aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin terintegrasi ke dalam strategi bisnis, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan perusahaan guna mendukung keberlanjutan usaha dan agenda transisi energi nasional.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi tata kelola perusahaan sepanjang tahun

(ABMS). According to the Board of Commissioners, the adoption of these standards indicates commitment by PLN BBN to building an organizational culture that prioritizes quality, integrity, compliance, and continuous improvement.

The Board of Commissioners also assessed that the implementation of risk management has become increasingly integrated into the Company's planning and decision-making processes. Systematic risk management provides a stronger foundation for the Company to anticipate various challenges arising from changes in market conditions, dynamics in primary energy supply, regulatory developments, and other operational risks.

Regarding internal controls and a culture of integrity, the Board of Commissioners considers the Board of Directors has demonstrated a strong commitment through the strengthening of the Internal Audit function, risk management, compliance, control of gratuities, management of conflicts of interest, and the implementation of the Whistleblowing System (WBS). The absence of reports submitted through the WBS mechanism during 2025 indicates that the Company has successfully maintained a conducive and integrity-driven work environment. Nevertheless, the Board of Commissioners encourages that the effectiveness of the violation reporting system be continuously evaluated on a regular basis to ensure that all stakeholders understand and have adequate access to this mechanism.

Regarding the results of the GCG implementation assessment, the Board of Commissioners noted that the SK-16 score was 63.409, categorized as "Fairly Good," and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) score was 38.68. The Board of Commissioners assesses that these results reflect a well-established foundation of corporate governance; however, there remains room for improvement that must be consistently addressed to enhance the quality of information disclosure, the effectiveness of oversight, the protection of shareholders' rights, and the implementation of governance practices aligned with regional best practices.

Therefore, the Board of Commissioners supports efforts by the Board of Directors to develop a program to enhance GCG implementation, focusing on refining governance documentation, strengthening internal policies, improving the quality of corporate information disclosure, and accelerating the implementation of recommendations from the SK - 16 & ACGS assessments. The Board of Commissioners also encourages the further integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into the Company's business strategy, risk management, and decision-making to support business sustainability and the national energy transition agenda.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the implementation of corporate governance throughout 2025

2025 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan arah perkembangan yang positif. Dengan komitmen perbaikan berkelanjutan yang terus dijalankan, Dewan Komisaris meyakini PLN BBN akan semakin mampu membangun tata kelola yang unggul, memperkuat daya saing perusahaan, serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

has proceeded well and shows a positive trajectory of development. With the ongoing commitment to continuous improvement, the Board of Commissioners is confident that PLN BBN will be increasingly capable of building excellent governance, strengthening the Company's competitiveness, and creating sustainable value for all stakeholders.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite dan Organ Pendukung Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Assessment on the Performance of Committees and Supporting Institutions to the Board of Commissioners

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2025 kedua komite tersebut telah menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan piagam komite, ketentuan internal perusahaan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

In supporting the implementation of the oversight and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and the Nomination and Risk Management Committee. The Board of Commissioners assesses that throughout 2025, both committees have carried out their duties, functions, and responsibilities effectively in accordance with their committee charters, the Company's internal regulations, and the principles of good corporate governance.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja Komite Audit yang telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap efektivitas pengendalian internal, kualitas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut atas hasil audit internal dan eksternal. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit secara aktif menyelenggarakan rapat dan memberikan berbagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyelesaian temuan audit, penyusunan proyeksi keuangan, pemantauan perkembangan program bisnis perusahaan, serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan audit tahunan. Dewan Komisaris menilai bahwa rekomendasi yang diberikan Komite Audit telah membantu meningkatkan kualitas pengawasan dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis risiko.

The Board of Commissioners appreciates the Audit Committee for the performance in overseeing the effectiveness of internal controls, the quality of financial reporting, compliance with laws and regulations, and follow-up on the results of internal and external audits. Throughout 2025, the Audit Committee actively held meetings and provided various recommendations to the Board of Commissioners regarding the resolution of audit findings, the preparation of financial projections, the monitoring of the Company's business program progress, and the strengthening of coordination in the implementation of annual audits. The Board of Commissioners assessed that the recommendations provided by the Audit Committee have helped improve the quality of oversight and supported a more objective and risk-based decision-making process.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa Komite Nominasi dan Manajemen Risiko telah menjalankan perannya secara efektif dalam memberikan masukan terkait pengelolaan sumber daya manusia pada level strategis serta pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko perusahaan. Komite secara aktif melakukan evaluasi terhadap profil risiko perusahaan, memberikan rekomendasi terkait penyusunan RKAP, serta memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara terintegrasi dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Dewan Komisaris memandang bahwa peran komite tersebut sangat penting dalam memperkuat ketahanan usaha dan meningkatkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis.

The Board of Commissioners also assesses that the Nominating and Risk Management Committee has effectively fulfilled the role in providing input regarding human resource management at the strategic level and overseeing the implementation of the Company's risk management. The committees actively evaluate the Company's risk profile, provide recommendations regarding the preparation of the Annual Business Plan (RKAP), and ensure that risk management is integrated into the Company's planning and decision-making processes. The Board of Commissioners views the role of these committees as crucial in strengthening business resilience and enhancing the Company's readiness to face various business challenges.

Dari aspek tata kelola, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite telah menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan baik, baik dengan Dewan Komisaris maupun Direksi. Tingkat kehadiran anggota komite yang mencapai 100% dalam seluruh rapat yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025 menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit serta Komite Nominasi dan Manajemen Risiko telah memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, penguatan pengendalian internal, efektivitas manajemen risiko, serta pencapaian tujuan perusahaan. Ke depan, Dewan Komisaris mendorong kedua komite untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam mendukung peningkatan maturity level tata kelola perusahaan, penguatan implementasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil *assessment Good Corporate Governance* (GCG) dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha Perusahaan.

In terms of governance, the Board of Commissioners assesses that all committees have effectively carried out their coordination and communication functions, both with the Board of Commissioners and the Board of Directors. The 100% attendance rate of committee members at all meetings held throughout 2025 demonstrates a high level of commitment to supporting the effective execution of oversight functions.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the Audit Committee and the Nomination and Risk Management Committee have made positive contributions to improving the quality of corporate governance, strengthening internal controls, enhancing the effectiveness of risk management, and achieving the Company's objectives. Moving forward, the Board of Commissioners encourages both committees to continue improving the effectiveness of their duties, particularly in supporting the enhancement of the corporate governance maturity level, strengthening the implementation of Governance, Risk, and Compliance (GRC), and following up on recommendations from the Good Corporate Governance (GCG) and ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessments to support the Company's sustainability and business growth.

Pandangan Dewan Komisaris Terhadap Prospek Usaha yang Disusun Direksi

The Board of Commissioner' Perspective on the Business Prospect Prepared by the Board of Directors

Dewan Komisaris menelaah secara seksama prospek usaha dan arah strategis yang disusun Direksi untuk tahun 2026. Berdasarkan hasil pengawasan dan pembahasan yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa asumsi, peluang, tantangan, serta strategi yang digunakan Direksi dalam menyusun prospek usaha telah mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal perusahaan secara memadai.

Dewan Komisaris sependapat dengan pandangan Direksi bahwa prospek usaha Perusahaan pada tahun 2026 masih terbuka positif. Meskipun perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian, termasuk dinamika geopolitik, volatilitas harga energi, dan percepatan transisi energi, kebutuhan akan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan diperkirakan tetap meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatnya kebutuhan listrik di berbagai sektor.

Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa batubara masih memiliki peran strategis sebagai sumber energi utama yang mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan nasional selama masa transisi menuju bauran energi yang lebih bersih. Oleh karena itu, peran PLN

The Board of Commissioners has carefully reviewed business prospect and strategic direction prepared by the Board of Directors for 2026. Based on the oversight and discussions results throughout 2025, the Board of Commissioners assesses that the assumptions, opportunities, challenges, and strategies used by the Board of Directors in preparing the business prospect have adequately considered the Company's external and internal conditions.

The Board of Commissioners agrees with the Board of Directors' view that the Company's business outlook for 2026 remains positive. Despite the global economy continues to face various uncertainties, including geopolitical dynamics, energy price volatility, and the accelerating energy transition, the need for a reliable and sustainable energy supply is expected to continue to rise in line with national economic growth and increasing electricity demand across various sectors.

In this context, the Board of Commissioners assesses that coal still plays a strategic role as a primary energy source supporting the reliability of the national power system during the transition toward a cleaner energy mix. Therefore, the role of PLN BBN—as part of the PLN Group responsible for

BBN sebagai bagian dari PLN *Group* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasokan energi primer tetap memiliki relevansi dan nilai strategis yang tinggi bagi ketahanan energi nasional.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya Direksi dalam memperkuat fungsi *security of supply* melalui pengelolaan rantai pasok yang lebih efektif, penguatan hubungan dengan pemasok, peningkatan kualitas pengelolaan kontrak, serta berbagai inisiatif yang mendukung keandalan pasokan energi primer. Langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan operasional pembangkit PLN *Group* dan *Independent Power Producer* (IPP) di tengah dinamika pasar energi yang semakin kompleks.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa capaian kinerja tahun 2025 memberikan landasan yang lebih kuat bagi Perusahaan untuk memasuki tahun 2026. Keberhasilan Perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan, meningkatkan kualitas layanan, membukukan laba bersih setelah mengalami tekanan kinerja pada tahun sebelumnya, serta meningkatkan kontribusi kepada PLN *Group* menunjukkan bahwa berbagai program transformasi yang dijalankan Direksi telah memberikan hasil yang positif dan memperkuat fundamental bisnis Perusahaan.

Meski demikian, Dewan Komisaris memandang bahwa sejumlah tantangan perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan strategi tahun 2026. Fluktuasi harga batubara, perubahan kebijakan energi nasional maupun global, dinamika permintaan pelanggan, tekanan terhadap margin usaha, serta kebutuhan penguatan modal kerja berpotensi memengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperkuat manajemen risiko, meningkatkan disiplin keuangan, menjaga efisiensi operasional, serta memperkuat ketahanan rantai pasok guna mengantisipasi berbagai potensi risiko tersebut.

Dewan Komisaris mendukung empat prioritas strategis yang telah ditetapkan Direksi, yaitu penguatan fungsi *security of supply*, peningkatan profitabilitas, pengembangan sumber pertumbuhan baru melalui bisnis *beyond* kWh, serta percepatan transformasi digital dan penguatan tata kelola perusahaan. Menurut Dewan Komisaris, keberhasilan implementasi strategi tersebut akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing Perusahaan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap PLN *Group*.

Selain itu, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperluas peluang usaha yang sejalan dengan agenda transformasi energi dan keberlanjutan, termasuk memperkuat sinergi di lingkungan PLN *Group*, mengembangkan model bisnis yang memberikan nilai tambah, serta mengintegrasikan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi dan proses pengambilan keputusan perusahaan. Langkah

managing primary energy supply—continues to hold high relevance and strategic value for national energy security.

The Board of Commissioners appreciates efforts by the Board of Directors to strengthen the security of supply through more effective supply chain management, strengthened relationships with suppliers, improved contract management, and various initiatives that support the reliability of primary energy supply. These steps serve as a crucial foundation for maintaining the operational sustainability of PLN Group power plants and Independent Power Producers (IPPs) amid increasingly complex energy market dynamics.

The Board of Commissioners also believes that 2025 performance achievements provide a stronger foundation for the Company as it rides into 2026. The Company's success in maintaining supply reliability, improving service quality, posting a net profit after facing performance pressures in the previous year, and increasing its contribution to the PLN Group demonstrates that the various transformation programs implemented by the Board of Directors have yielded positive results and strengthened the Company's business fundamentals.

Nevertheless, the Board of Commissioners believes that a number of challenges require serious attention in the implementation of the 2026 strategy. Fluctuations in coal prices, changes in national and global energy policies, shifts in customer demand, pressure on operating margins, and the need to strengthen working capital have the potential to impact the achievement of the established targets. Therefore, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue strengthening risk management, improving financial discipline, maintaining operational efficiency, and bolstering supply chain resilience to anticipate these potential risks.

The Board of Commissioners supports the four strategic priorities set by the Board of Directors, namely strengthening the security of supply, increasing profitability, developing new growth sources through "beyond kWh" businesses, and accelerating digital transformation and strengthening corporate governance. According to the Board of Commissioners, the successful implementation of these strategies will be a key factor in enhancing the Company's competitiveness while strengthening its contribution to the PLN Group.

Also, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue expanding business opportunities in line with the energy transformation and sustainability agenda, including strengthening synergies within the PLN Group, developing business models that provide added value, and integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into the Company's strategies and decision-

tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan usaha yang dicapai tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha yang disusun Direksi telah realistis, terukur, dan sejalan dengan posisi strategis Perusahaan dalam ekosistem energi primer PLN *Group*. Dengan fondasi operasional yang semakin kuat, penerapan tata kelola yang baik, serta dukungan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, Dewan Komisaris meyakini PLN BBN memiliki peluang yang baik untuk meningkatkan kinerja, memperkuat ketahanan usaha, dan menciptakan nilai berkelanjutan pada tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang.

making processes. These steps are considered essential to ensure that the business growth achieved not only delivers economic benefits but also supports long-term sustainability.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the business outlook outlined by the Board of Directors is realistic, measurable, and aligned with the Company's strategic position within the PLN Group's primary energy ecosystem. With an increasingly strong operational foundation, the implementation of good governance, and the support of shareholders and all stakeholders, the Board of Commissioners believes that PLN BBN has a good opportunity to improve performance, strengthen business resilience, and create sustainable value in 2026 and beyond.

Informasi Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Information on Changes to the Board of Commissioners Composition

Tahun buku 2025, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PLN BBN yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) pada tanggal 31 Desember 2025. Melalui keputusan tersebut, Pemegang Saham mengangkat Sdri. Ratnasari Sjamsuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama PLN BBN. Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, Sdr. Tri Joko Supriyatno yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama ditetapkan menjadi Plt. Komisaris.

Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, sejalan dengan kebutuhan organisasi dan arah strategis Perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis.

Dengan adanya perubahan tersebut, jumlah anggota Dewan Komisaris PLN BBN yang sebelumnya terdiri dari 2 (dua) orang meningkat menjadi 3 (tiga) orang. Susunan Dewan Komisaris setelah tahun buku 2025 hingga tanggal penerbitan Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ratnasari Sjamsuddin – Plt. Komisaris Utama.
2. Tri Joko Supriyatno – Plt. Komisaris.
3. Noor Adi Baroto – Komisaris Independen.

Dewan Komisaris meyakini bahwa komposisi yang baru akan semakin memperkuat efektivitas fungsi pengawasan, kualitas pemberian nasihat kepada Direksi, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan secara berkelanjutan.

For the 2025 fiscal year, there was a change in the composition of the PLN BBN Board of Commissioners, as determined by a Shareholder Resolution outside the Circular General Meeting of Shareholders on December 31, 2025. Through this resolution, the Shareholders appointed Ms. Ratnasari Sjamsuddin as Acting President Commissioner of PLN BBN. In connection with this appointment, Mr. Tri Joko Supriyatno, who previously served as Acting President Commissioner, was appointed as Acting Commissioner.

This change was purposed to strengthen oversight functions and ensure the effective implementation of good corporate governance, in line with the organization's needs and the Company's strategic direction in facing increasingly dynamic business challenges.

With this change, the number of PLN BBN Board of Commissioners members, which previously consisted of 2 (two) persons, has increased to 3 (three) people. The composition of the Board of Commissioners from the 2025 fiscal year until the date of publication of the Audited Financial Statements for the 2025 Fiscal Year is as follows:

1. Ratnasari Sjamsuddin – Act. President Commissioner.
2. Tri Joko Supriyatno – Act. Commissioner.
3. Noor Adi Baroto – Independent Commissioner.

The Board of Commissioners believes that the new composition will further strengthen the effectiveness of its oversight functions, improve the quality of advice provided to the Board of Directors, and support the Company's sustainable achievement of its strategic objectives.

Apresiasi dan Penutup
Letter of Appreciation and Closing

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi beserta seluruh insan PLN BBN atas dedikasi, integritas, dan kerja keras dalam mengelola Perusahaan sepanjang tahun 2025. Berbagai tantangan yang dihadapi telah dijawab melalui kerja sama yang solid, kepemimpinan yang adaptif, serta komitmen untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan.

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada Perusahaan. Dewan Komisaris akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara independen, profesional, dan objektif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan strategis Perusahaan dilaksanakan secara akuntabel dan sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pelanggan, mitra usaha, regulator, pemerintah, auditor, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini. Kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi Perusahaan untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Dewan Komisaris optimistis PLN BBN akan terus tumbuh sebagai perusahaan penyedia energi primer yang unggul, terpercaya, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi PLN *Group*, ketahanan energi nasional, dan pembangunan Indonesia.

On behalf of the Board of Commissioners, we extend the highest appreciation to the Board of Directors and all PLN BBN employees for the dedication, integrity, and hard work in managing the Company throughout 2025. The various challenges faced have been addressed through solid cooperation, adaptive leadership, and a commitment to continuously improving the Company's performance.

We also extend our appreciation to the Shareholders for the consistent trust and support provided toward the Company. The Board of Commissioners is going to continue to carry out the oversight functions independently, professionally, and objectively to ensure that every strategic policy of the Company is implemented in an accountable manner and in line with the Company's long-term interests.

The highest gratitude to all customers, business partners, regulators, the government, auditors, financial institutions, and all stakeholders for the intertwined synergy and collaboration thus far. This trust serves as motivation for the Company to continue strengthening corporate governance, improving service quality, and creating sustainable added value. The Board of Commissioners is optimistic that PLN BBN will continue to grow as a leading, trusted, competitive, and sustainable primary energy provider, capable of making an increasingly significant contribution to the PLN Group, national energy security, and Indonesia's development.

Jakarta, 30 Juni 2026
Atas nama Dewan Komisaris
PT PLN Batubara Niaga

Jakarta, June 30, 2026
On behalf of the Board of Commissioners
PT PLN Batubara Niaga



Ratnasari Sjamsuddin
Plt. Komisaris Utama
Act. President Commissioner

Laporan Direksi

Report from The Board of Directors



Rolly

Plt. Direktur Utama

Act. President Director

Laba bruto Perusahaan tercatat sebesar Rp315,65 miliar atau 76,07% dari target RKAP. Meskipun pencapaian tersebut masih berada di bawah target, Perusahaan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp155,18 miliar atau 57,79% dari target RKAP serta mempertahankan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun 2025.

The Company's gross profit was recorded at Rp315.65 billion or 76.07% of the WP&B target. Although this achievement was still below the target, the Company managed to record a profit for the year of Rp155.18 billion or 57.79% of the ABOP target and maintained positive financial performance throughout 2025.

Pemegang Saham yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PT PLN Batubara Niaga ("PLN BBN" atau "Perusahaan") dapat melalui tahun buku 2025 dengan baik serta mencatatkan berbagai capaian yang memperkuat fondasi bisnis Perusahaan. Atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, seluruh insan Perusahaan, pelanggan, mitra usaha, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada Perusahaan selama tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan sekaligus momentum penting bagi Perusahaan untuk memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan ketahanan usaha. Ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, volatilitas harga komoditas energi, gangguan rantai pasok global, hingga perubahan iklim yang berdampak terhadap aktivitas pertambangan dan logistik menjadi faktor yang memengaruhi industri batubara sepanjang tahun. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan energi listrik nasional serta komitmen Pemerintah dalam menjaga ketahanan energi menuntut tersedianya pasokan energi primer yang andal, tepat waktu, dan efisien.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Greatest gratitude to the Almighty God for the grace and blessings provided that enabled PT PLN Batubara Niaga ("PLN BBN" or "the Company") to successfully navigate the 2025 fiscal year and achieve various milestones that strengthen the Company's business foundation. On behalf of the Board of Directors, we express our appreciation to the Shareholders, Board of Commissioners, all employees of the Company, customers, business partners, regulators, and all stakeholders for their continued support and trust given to the Company throughout 2025.

2025 was full of challenges as well as an important momentum for the Company to strengthen its business fundamentals and enhance the resilience. Global economic uncertainty, geopolitical dynamics, volatility in energy commodity prices, global supply chain disruptions, and climate change impacting mining and logistics activities have been factors affecting the coal industry throughout the year. On the other hand, the increasing national electricity demand and the Government's commitment to maintaining energy resilience require the availability of reliable, timely, and efficient primary energy supplies.

Dalam kondisi tersebut, PLN BBN menjalankan peran strategis sebagai bagian dari PLN *Group* yang bertanggung jawab memastikan keamanan pasokan *(security of supply)* batubara bagi pembangkit listrik PLN *Group*. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional pembangkit, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional yang menopang aktivitas ekonomi dan pembangunan Indonesia.

Berangkat dari tantangan tersebut, Perusahaan mengangkat tema "Mengokohkan Fondasi Pasokan Energi untuk Keandalan Sistem Kelistrikan" sebagai cerminan fokus utama Direksi sepanjang tahun 2025. Tema ini menggambarkan keyakinan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target keuangan, tetapi juga oleh kemampuan membangun fondasi bisnis yang kuat melalui penguatan rantai pasok, peningkatan efisiensi operasional, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transformasi digital, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

Direksi meyakini bahwa fondasi yang kokoh merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan strategis yang dijalankan selama tahun 2025 diarahkan tidak hanya untuk menjawab tantangan jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan Perusahaan menghadapi perubahan lanskap industri energi di masa mendatang.

In such conditions, PLN BBN undertakes strategic role as part of the PLN Group, responsible for ensuring the security of coal supply for the PLN Group's power plants. This role is not only related to meeting the operational needs of the power plants but also undertakes crucial part in maintaining the reliability of the national electricity system that supports Indonesia's economic activities and development.

As the challenges results, the Company has adopted the theme "Strengthening the Foundation of Energy Supply for the Reliability of the Electrical System" as a reflection of the Board of Directors' main focus throughout 2025. This theme reflects the belief that the Company's success is not only determined by achieving financial targets but also by the ability to build a strong business foundation through supply chain strengthening, operational efficiency improvements, implementation of good corporate governance, digital transformation, and the development of superior human resources.

The Board of Directors believes that a solid foundation is the main prerequisite for sustainable growth. Therefore, all strategic policies implemented during 2025 are aimed not only at addressing short-term challenges but also at preparing the Company to face changes in the energy industry landscape in the future.

Tinjauan Ekonomi dan Kontribusi Perusahaan Terhadap Industri
Economic Overview and the Company's Contribution to the Industry

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global masih dibayangi berbagai tantangan yang berasal dari ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga energi, kebijakan suku bunga yang relatif tinggi di sejumlah negara maju, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa kawasan dunia. Kondisi tersebut berdampak pada pergerakan harga komoditas global, termasuk batubara, serta memengaruhi stabilitas rantai pasok energi internasional.

Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat dengan pertumbuhan yang didukung oleh konsumsi domestik, investasi, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas industri yang terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan energi listrik sebagai salah satu faktor utama dalam mendukung produktivitas, aktivitas usaha, dan pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, keandalan pasokan energi primer menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sistem ketenagalistrikan nasional. Meskipun Pemerintah terus mendorong percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih, batubara masih memegang peranan strategis

Throughout 2025, the global economy continued to be overshadowed by various challenges stemming from geopolitical uncertainties, energy price volatility, relatively high-interest rate policies in several developed countries, and economic growth slowdowns in some regions of the world. These conditions impacted the movement of global commodity prices, including coal, and affected the stability of international energy supply chains.

Amidst these conditions, Indonesia's economy continues to show strong resilience with growth supported by domestic consumption, investment, infrastructure development, and continuously evolving industrial activities. This economic growth drives an increased demand for electrical energy as one of the main factors in supporting productivity, business activities, and national development.

In this context, the reliability of primary energy supply is a crucial factor in maintaining the sustainability of the national electricity system. Although the Government continues to encourage the acceleration of the transition to cleaner energy, coal still plays a strategic role as the main energy

sebagai sumber energi utama dalam bauran energi nasional, khususnya untuk mendukung operasional pembangkit listrik yang memasok kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri.

Sebagai bagian dari PLN *Group*, PLN BBN memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan pasokan batubara yang andal bagi pembangkit listrik PLN *Group* dan *Independent Power Producers* (IPP) di seluruh Indonesia. Peran tersebut tidak hanya memastikan keberlangsungan operasional pembangkit, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem ketenagalistrikan nasional yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Sepanjang tahun 2025, PLN BBN berhasil menjaga keandalan pasokan energi primer melalui pengelolaan rantai pasok yang semakin terintegrasi, penguatan koordinasi dengan mitra pemasok, optimalisasi pengelolaan kontrak, serta peningkatan efektivitas distribusi dan pengawasan operasional. Berbagai langkah tersebut memungkinkan Perusahaan mempertahankan tingkat Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara sebesar 109,58%, melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan komitmen Perusahaan dalam menjaga keamanan pasokan energi nasional.

Perusahaan juga terus menciptakan nilai tambah melalui berbagai program efisiensi dan inovasi operasional. Implementasi program *Coal Blending* menghasilkan manfaat ekonomi sebesar Rp13,56 miliar, sementara sinergi dengan entitas PLN *Group* menghasilkan nilai sebesar Rp4,83 miliar atau melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa PLN BBN tidak hanya berperan sebagai penyedia energi primer, tetapi juga sebagai *enabler* yang mendukung peningkatan efisiensi dan daya saing ekosistem PLN Group secara keseluruhan.

Ke depan, PLN BBN akan terus memperkuat keandalan pasokan energi melalui peningkatan ketahanan rantai pasok, penguatan tata kelola, pengembangan kapabilitas organisasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan energi primer. Dengan fondasi yang semakin kokoh, PLN BBN optimistis dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung sistem ketenagalistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi nasional.

source in the national energy mix, particularly to support the operation of power plants that supply electricity needs for the community and the industrial sector.

As part of the PLN Group, PLN BBN plays a vital role in ensuring a reliable supply of coal for PLN Group power plants and Independent Power Producers (IPP) throughout Indonesia. This role not only ensures the continuity of power plant operations but also contributes to the stability of the national electricity system, which is the foundation for economic growth and national development.

Throughout 2025, PLN BBN successfully maintained the reliability of primary energy supply through increasingly integrated supply chain management, strengthened coordination with supplier partners, optimized contract management, and improved distribution and operational supervision effectiveness. These various measures enabled the Company to maintain a Coal Primary Energy Supply Assurance level of 109.58%, exceeding the set target and showing the Company's commitment to ensuring national energy supply security.

The Company also continues to create added value through various efficiency and operational innovation programs. The implementation of the Coal Blending program generated an economic benefit of Rp13.56 billion, while synergy with PLN Group entities produced a value of Rp4.83 billion, exceeding the set target. The achievement demonstrates that PLN BBN not only serves as a primary energy provider but also as an enabler that supports the improvement of efficiency and competitiveness of the PLN Group ecosystem as a whole.

In the future, PLN BBN will continue to strengthen the reliability of energy supply through supply chain resilience enhancement, governance strengthening, organizational capability development, and the utilization of digital technology to improve the effectiveness of primary energy management. With an increasingly solid foundation, PLN BBN is optimistic about continuing to enhance its contribution to supporting a reliable, efficient, and sustainable electricity system as part of efforts to achieve national energy resilience.

Strategi Direksi Dalam Menjawab Tantangan
Board of Directors' Strategy for Addressing Challenges

Tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi PLN BBN. Dinamika ekonomi global, volatilitas harga energi, perubahan kondisi cuaca yang memengaruhi aktivitas pertambangan dan distribusi, serta meningkatnya tuntutan terhadap keandalan pasokan energi primer

2025 was full of both challenges and opportunities for PLN BBN. The dynamics of the global economy, volatility in energy prices, changing weather conditions affecting mining and distribution activities, and the increasing demand for the reliability of primary energy supply require the Company

menuntut Perusahaan untuk terus memperkuat ketahanan bisnis dan meningkatkan efektivitas operasional.

Di sisi lain, kebutuhan energi listrik nasional yang terus meningkat serta peran strategis batubara dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan Indonesia menghadirkan peluang bagi Perusahaan untuk memperkuat kontribusinya sebagai penyedia energi primer yang andal bagi PLN *Group* dan IPP. Dalam kondisi ini, Perusahaan dituntut tidak hanya mampu menjaga keamanan pasokan energi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, mengelola risiko secara efektif, serta meningkatkan kontribusi perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam menghadapi berbagai isu strategis yang berkembang sepanjang tahun 2025 serta menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dan pembelajaran dari tahun sebelumnya, PLN BBN mengimplementasikan sejumlah strategi utama yang dirancang untuk memperkuat ketahanan bisnis, meningkatkan efektivitas operasional, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan perusahaan. Strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan dinamika industri energi, kebutuhan pelanggan, perkembangan regulasi, serta arah transformasi PLN *Group* guna memastikan Perusahaan tetap mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan nasional. Adapun tujuh fokus strategi utama yang menjadi prioritas Perusahaan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

to continuously strengthen business resilience and improve operational effectiveness.

On the other hand, the continuously increasing national electricity demand and the strategic role of coal in maintaining the reliability of Indonesia's electricity system present opportunities for the Company to strengthen its contribution as a reliable primary energy provider for the PLN Group and IPP. In this condition, the Company is required not only to maintain energy supply security but also to improve efficiency, strengthen governance, manage risks effectively, and enhance the Company's contribution to all stakeholders.

In overcoming various strategic issues that developed throughout 2025 and following up on performance evaluations and lessons learned from the previous year, PLN BBN implemented several key strategies designed to strengthen business resilience, enhance operational effectiveness, and ensure the sustainability of the company's growth. These strategies were formulated by considering the dynamics of the energy industry, customer needs, regulatory developments, and the direction of PLN Group's transformation to ensure the Company remains capable of optimally performing the role in supporting the reliability of the national electricity system. The seven main strategic focuses that are the Company's priorities throughout 2025 are as follows:

No	Fokus Strategis Focus of Strategy		Kegiatan Activity	
1	*Alignment* RJPP PLN BBN dengan PT PLN EPI	Alignment of PLN BBN's Long-term Plans with PT PLN EPI's	Memindahkan secara bertahap jasa transport yang saat ini dikelola PLN BBN kepada PT BAg sesuai dengan arah RJPP PT PLN EPI.	Gradually transfer the transportation services currently managed by PLN BBN to PT BAg following the direction set out in PT PLN EPI's Long-term Plan.
2	Komposisi Volume PLTU IPP dan PLN	Composition of IPP and PLN CFPP Volume	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap komposisi pasokan antara PLTU IPP dan PLN *Group* serta mengomunikasikan hasilnya kepada PT PLN EPI.	Periodically monitoring and evaluating the supply mix between CFPPs of IPP and the PLN Group, and communicate the results to PT PLN EPI
3	Peningkatan Pendapatan dari *Beyond* kWh	Increasing Revenue Beyond kWh	• Mencari potensi tambahan sumber tambang untuk meningkatkan pasokan dengan berkoordinasi dengan Divisi OKI dan PLN EPI • Melaksanakan aggressive marketing kepada pelanggan PLTU IPP melalui koordinasi dengan Divisi OKI dan PLN EPI.	• Identifying potential additional mining sources to increase supply in coordination with the OKI Division and PLN EPI • Aggressive marketing to IPP CFPP customers through coordination with the OKI Division and PLN EPI.
4	Pemenuhan Kapasitas SDM	Meet HR Capacity	• Memenuhi kebutuhan jumlah FTK sesuai kebutuhan organisasi. • Menyelenggarakan program peningkatan kompetensi guna mendukung pencapaian target KPI Tahun 2025.	• Fulfilling the needs of the organization Workforce Formation. • Implementing competency development programs to support the achievement of the 2025 KPI targets.
5	Kesehatan Keuangan dan Ekonomi Bisnis	Soundness of Finance and Business Economics	• Melakukan *review* kontraktual kerja sama pasokan batubara dari aspek legal, keuangan, dan operasional bersama konsultan. • Menambah modal kerja berdasarkan kajian pendanaan yang komprehensif. • Mempercepat penyelesaian kontrak penjualan dan memperbaiki skema pembayaran. • Meningkatkan efektivitas manajemen penagihan pelanggan.	• Contractual review of the coal supply agreement from legal, financial, and operational perspectives in collaboration with consultants. • Increasing working capital based on a comprehensive funding analysis. • Expediting the finalization of sales contracts and refine the payment terms. • Improving the effectiveness of customer billing management.

No	Fokus Strategis Focus of Strategy		Kegiatan Activity	
6	Digitalisasi Tata Kelola Operasi dan Keuangan	Digitization of Operational and Financial Management	• Mengembangkan proses bisnis operasi dan keuangan PLN BBN. • Melaksanakan digitalisasi proses operasional dan keuangan secara terintegrasi.	• Developing operational and financial business processes at PLN BBN. • Implementing the integrated digitization of operational and financial processes.
7	Peningkatan Kewenangan Persetujuan Transaksi Perusahaan	Expansion of Authority to Approve Corporate Transactions	Meningkatkan batas kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam persetujuan transaksi guna mendukung percepatan administrasi kontraktual dan proses penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.	Increasing the authority limits of the Board of Directors and Board of Commissioners in approving transactions to support the acceleration of contractual administration and collection processes as required by applicable regulations.

Ketujuh strategi tersebut disusun secara terintegrasi dengan mempertimbangkan arah kebijakan PLN *Group*, perkembangan industri energi, serta kebutuhan untuk meningkatkan daya saing Perusahaan. Strategi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan organisasi agar Perusahaan mampu menghadapi berbagai dinamika industri serta menghasilkan nilai jangka panjang bagi Pemegang Saham.

Selain memperkuat keandalan pasokan energi primer, Direksi juga terus mendorong transformasi bisnis melalui digitalisasi proses operasional, penguatan budaya kinerja, peningkatan kualitas tata kelola, serta pengembangan model bisnis yang mampu menciptakan nilai tambah di luar bisnis inti. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan menjaga keberlanjutan usaha di tengah perubahan lanskap industri energi yang semakin dinamis.

Direksi meyakini bahwa keberhasilan Perusahaan dalam menjalankan mandat sebagai penyedia energi primer tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan pasokan batubara, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola risiko, memperkuat kolaborasi dengan para mitra strategis, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam setiap proses bisnis.

Oleh karena itu, sepanjang tahun 2025 Perusahaan terus memperkuat kapasitas operasional, meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, memperluas sinergi di lingkungan PLN *Group*, serta mendorong budaya kinerja yang berorientasi pada keunggulan operasional dan penciptaan nilai. Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk memastikan keamanan pasokan energi primer sekaligus meningkatkan efisiensi dan ketahanan bisnis di tengah perubahan lingkungan usaha yang semakin dinamis. Direksi mengarahkan seluruh sumber daya perusahaan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan yang sehat, meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional, serta memperkuat posisi Perusahaan sebagai mitra strategis PLN *Group* dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan Indonesia.

PLN BBN formulated the seven strategies in an integrated manner, taking into account the direction by PLN Group's policies, developments in the energy industry, and the need to enhance the Company's competitiveness. The Company applies the strategies that are not only oriented toward achieving short-term targets but also purposed at strengthening the organization's capacity and resilience, so the Company is able to face various industry dynamics and generate long-term values for the Shareholders.

Apart from strengthening the reliability of primary energy supply, the Board of Directors keeps driving business transformation by digitizing operational processes, strengthening performance culture, improving governance quality, and developing business models that can create added value beyond the core business. These initiatives are part of the Company's efforts to enhance competitiveness and maintain business sustainability amid the increasingly dynamic changes in the energy industry landscape.

The Board of Directors believes that the Company's success in fulfilling its mandate as a primary energy provider is not only determined by its ability to meet coal supply needs but also by its ability to manage risks, strengthen collaboration with strategic partners, enhance the quality of corporate governance, and optimize the use of technology and innovation in every business process.

Therefore, throughout 2025, the Company continued to strengthen operational capacity, enhance supply chain management effectiveness, expand synergies within the PLN Group, and promote a performance culture oriented toward operational excellence and value creation. These various initiatives are part of the Company's efforts to ensure the security of primary energy supply while also enhancing efficiency and business resilience amid the increasingly dynamic business environment. The Board of Directors directs all of the Company's resources to achieve healthy growth, enhance contributions to national energy resilience, and strengthen its position as a strategic partner of the PLN Group in maintaining the reliability of Indonesia's electricity system.

Peranan Direksi Dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis
Board of Directors Role in Formulating Strategy and Strategic Policies

Direksi memiliki peran sentral dalam merumuskan serta mengimplementasikan strategi dan kebijakan strategis yang menjadi pedoman utama dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan. Melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang ditinjau dan diperbarui setiap lima tahun, Direksi secara aktif melakukan identifikasi terhadap berbagai tantangan, peluang, dan risiko yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan usaha PLN BBN.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Direksi menetapkan strategi dan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) serta mendukung penciptaan nilai berkelanjutan. Proses perumusan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal Perusahaan, termasuk perkembangan industri, dinamika pasar, kondisi operasional, serta arah kebijakan pemegang saham. Seluruh pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan.

Untuk memastikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif dan konsisten di seluruh tingkat organisasi, Direksi secara aktif melakukan sosialisasi dan penyelarasan kepada unit-unit kerja terkait. Melalui arahan, koordinasi, dan pembinaan yang berkelanjutan, Direksi memastikan setiap program kerja dan langkah operasional yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan strategis Perusahaan. Dalam proses perumusan strategi, Direksi juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, perkembangan risiko strategis, serta masukan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Selain itu, Direksi juga melaksanakan fungsi pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi dan pembahasan kinerja bersama unit-unit terkait guna mengukur tingkat pencapaian target, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan mekanisme tersebut, Direksi memastikan bahwa seluruh strategi dan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, adaptif terhadap perubahan, serta mendukung pencapaian sasaran jangka panjang Perusahaan.

The Board of Directors undertakes central role in formulating and implementing strategies and strategic policies that serve as the main guidelines in achieving the Company's goals and objectives. Through the preparation of the Company's Work Plan and Budget (WP&B) each year and the Long-Term Company Plan (RJPP), reviewed and updated every five years, the Board of Directors actively identifies various challenges, opportunities, and risks that could potentially affect the sustainability of PLN BBN's business.

Based on the identification results, the Board of Directors establishes strategies and policies that align with the principles of Good Corporate Governance/GCG and support the creation of sustainable value. The process of formulating strategies is carried out by considering various aspects, both from the external and internal environments of the Company, including industry developments, market dynamics, operational conditions, and the direction of shareholder policies. All these considerations form the basis for determining the strategic direction that supports the achievement of the Company's vision and mission.

To ensure that the established strategies and policies can be implemented effectively and consistently at all levels of the organization, the Board of Directors actively conducts socialization and alignment with the relevant work units. Through continuous direction, coordination, and guidance, the Board of Directors ensures that every work program and operational step taken aligns with the Company's strategic objectives. In the strategy formulation process, the Board of Directors also considers the results of the previous year's performance evaluation, the development of strategic risks, as well as input from the Board of Commissioners and Shareholders.

Furthermore, the Board of Directors performs supervisory functions through regular monitoring and evaluation of the implementation of established strategies and policies. The evaluation is conducted through coordination meetings and performance discussions with the relevant units to measure the level of target achievement, identify various obstacles encountered, and formulate the necessary improvement steps. With this mechanism, the Board of Directors ensures that all strategies and policies can be implemented effectively, adaptively to changes, and support the achievement of the Company's long-term goals.

Tantangan dan Kendala serta Langkah Penyelesaian
Challenges, Obstacles, and Solutions

Dalam menjalankan kegiatan usaha sepanjang tahun 2025, Perusahaan menghadapi sejumlah tantangan dan kendala yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dinamika industri energi primer, perubahan kebijakan di lingkungan PLN *Group*, persaingan pasar batubara, kebutuhan penguatan kapasitas organisasi, serta tuntutan peningkatan tata kelola dan digitalisasi menjadi faktor yang memengaruhi pencapaian target kinerja Perusahaan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah penyesuaian model bisnis dan proses operasional sejalan dengan arah strategis PLN *Group* sebagaimana tertuang dalam RJPP PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perusahaan melakukan penyelarasan proses bisnis secara bertahap, termasuk optimalisasi pengelolaan jasa transportasi dan penguatan koordinasi dengan PLN EPI guna memastikan keselarasan strategi serta efektivitas pelaksanaannya.

Di sisi operasional, Perusahaan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan komposisi pasokan batubara bagi pembangkit PLN *Group* dan Independent Power Producer (IPP). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perusahaan melakukan *monitoring* dan evaluasi pasokan secara berkala, memperkuat komunikasi dengan PLN EPI, serta melakukan penyesuaian strategi pemasaran guna menjaga keberlanjutan penjualan dan optimalisasi volume pasokan.

Perusahaan juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan di luar bisnis inti (*beyond kWh*) di tengah kondisi pasar yang semakin kompetitif. Sebagai langkah penyelesaian, Perusahaan secara aktif mencari potensi sumber pasokan baru melalui penjajakan kerja sama dengan pemilik tambang serta memperkuat kegiatan pemasaran kepada pelanggan potensial, khususnya segmen PLTU IPP.

Dari aspek organisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan kebutuhan peningkatan kompetensi menjadi salah satu perhatian utama. Untuk menjawab tantangan tersebut, Perusahaan melaksanakan program pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sesuai perencanaan organisasi serta menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi guna mendukung pencapaian target kinerja dan transformasi bisnis.

Pada aspek keuangan, Perusahaan menghadapi tantangan terkait kebutuhan modal kerja, percepatan penyelesaian kontrak, dan pengelolaan piutang pelanggan. Sebagai upaya mitigasi, Perusahaan melakukan kajian pendanaan untuk memperkuat struktur permodalan, mempercepat penyelesaian proses kontraktual, melakukan perbaikan skema pembayaran,

Throughout 2025, the Company faced several challenges and obstacles in performing business activities, arising from both internal and external factors. The dynamics of the primary energy industry, policy changes within the PLN Group, coal market competition, the need to strengthen organizational capacity, and the demands for improved governance and digitalization are factors that influence the achievement of the Company's performance targets.

One of the main challenges faced is the adjustment of the business model and operational processes in line with the strategic direction of the PLN Group, as outlined in the Long-term Plans of PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). To address this challenge, the Company is gradually aligning business processes, including optimizing transportation service management and strengthening coordination with PLN EPI to ensure strategic alignment and effective implementation.

In terms of operational, the Company faces challenges in maintaining the balance of coal supply composition for PLN Group power plants and Independent Power Producers (IPP). To anticipate this, it conducts regular monitoring and evaluation of supply, strengthens communication with PLN EPI, and adjusts marketing strategies to ensure sales sustainability and optimize supply volume.

The Company also faces challenges in increasing revenue beyond its core business (beyond kWh) amid increasingly competitive market conditions. As a solution, the Company is actively seeking potential new supply sources through collaboration with mine owners and strengthening marketing activities to potential customers, particularly in the IPP CFPP segment.

From an organizational aspect, the limitations of HR and the need for competency enhancement have become one of the main concerns. To address these challenges, the Company implements workforce fulfillment programs in accordance with organizational planning and conducts various competency development programs to support the achievement of performance targets and business transformation.

In terms of financial, Company faces challenges related to working capital needs, the acceleration of contract completion, and the management of customer receivables. As a mitigation effort, the Company conducts funding studies to strengthen the capital structure, accelerate the completion of contractual processes, improve payment schemes, and enhance the

serta meningkatkan efektivitas proses penagihan guna menjaga kesehatan arus kas dan keberlanjutan usaha.

Selain itu, tuntutan peningkatan efisiensi dan transparansi proses bisnis mendorong Perusahaan untuk mempercepat digitalisasi tata kelola operasional dan keuangan. Berbagai inisiatif pengembangan proses bisnis dan implementasi sistem digital dilakukan untuk meningkatkan akurasi data, efektivitas pengambilan keputusan, serta efisiensi operasional secara berkelanjutan.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Perusahaan berupaya memastikan bahwa setiap tantangan dan kendala yang dihadapi dapat dikelola secara efektif sehingga tidak menghambat pencapaian sasaran usaha, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan pada masa mendatang.

effectiveness of the collection process to maintain the soundness of cash flow and business sustainability.

Furthermore, the demand for increased efficiency and transparency in business processes drives the Company to accelerate the digitalization of operational and financial governance. Various initiatives for business process development and digital systems are undertaken to enhance data accuracy, decision-making effectiveness, and sustainable operational efficiency.

Through these various strategic steps, the Company strives to ensure that every challenge and obstacle faced can be managed effectively. Thus, it does not hinder the achievement of business objectives while simultaneously strengthening the foundation for the Company's future growth and sustainability.

Pencapaian Kinerja 2025 serta Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai Dengan Target

2025 Performance Achievements and Comparison of Actual Results Against Targets

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025, Perusahaan berhasil mencatat sejumlah capaian penting yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan. Selain mampu menjaga keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit PLN *Group* dan *Independent Power Producer* (IPP), PLN BBN juga berhasil meningkatkan kontribusi terhadap PLN *Group* serta membukukan laba bersih setelah pada periode sebelumnya menghadapi tekanan kinerja yang cukup signifikan.

Direksi memandang capaian tersebut sebagai hasil dari berbagai inisiatif transformasi yang dijalankan secara konsisten, mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan efektivitas pengelolaan rantai pasok, optimalisasi proses bisnis, hingga penguatan disiplin operasional dan pengelolaan risiko. Meskipun beberapa indikator kinerja belum sepenuhnya mencapai target RKAP, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa Perusahaan berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan ketahanan usaha di tengah dinamika industri energi yang terus berkembang.

Kinerja Operasional

Pada aspek operasional, realisasi volume pasokan batubara mencapai 11,89 juta MT atau 99,00% dari target RKAP sebesar 12,01 juta MT. Capaian ini dipengaruhi oleh sebagian volume pasokan kepada pelanggan PLTU IPP yang mencapai 87,78% dari target. Di sisi lain, pasokan kepada PLN Group mampu melampaui target dengan realisasi 111,00%, sehingga membantu menjaga tingkat pencapaian volume pasokan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan

In the middle of various challenges faced throughout 2025, the Company successfully recorded several important achievements that became the foundation for sustainable growth. In addition to maintaining the reliability of primary energy supply for PLN Group power plants and Independent Power Producers (IPP), PLN BBN also succeeded in increasing its contribution to PLN Group and recording a net profit after facing significant performance pressure in the previous period.

The Board of Directors considers this achievement as the result of various transformation initiatives carried out consistently. Starting from strengthening corporate governance, enhancing supply chain management effectiveness, optimizing business processes, and reinforcing operational discipline and risk management. Although some performance indicators have not fully met the WP&B targets, the results achieved indicate that the Company is on the right track in strengthening business fundamentals and enhancing business resilience amid the ever-evolving dynamics of the energy industry.

Operational Performance

In terms of operations, the realization of coal supply volume reached 11.89 million MT or 99.00% of the WP&B target of 12.01 million MT. This achievement was influenced by the portion of supply volume to IPP CFPP customers, which reached 87.78% of the target. On the other hand, the supply to the PLN Group exceeded the target with a realization of 111.00%, thereby helping to maintain the overall supply volume achievement. This indicates that the Company is

mampu menjaga keandalan pasokan kepada pelanggan utama PLN Group meskipun terdapat dinamika permintaan pada segmen IPP.

Dari sisi kualitas layanan, Perusahaan mencatat kinerja yang sangat baik. Realisasi kualitas batubara mencapai 102,82% dan ketepatan waktu pengiriman mencapai 102,82% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, koordinasi operasional yang baik, serta keberhasilan Perusahaan dalam menjaga kualitas produk dan keandalan distribusi kepada pelanggan. Kinerja ini menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan dan mendukung keamanan pasokan (*security of supply*) bagi pembangkit.

Pada aspek pendapatan, Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp9,20 triliun atau 95,69% dari target RKAP sebesar Rp9,62 triliun. Meskipun belum mencapai target, realisasi ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menjaga volume penjualan di tengah kondisi pasar yang dinamis. Capaian pendapatan yang mendekati target juga mencerminkan efektivitas strategi pemasaran dan pengelolaan kontrak penjualan yang dijalankan sepanjang tahun.

Sementara itu, laba bruto tercatat sebesar Rp315,65 miliar atau 76,07% dari target RKAP, yang mencerminkan masih adanya tekanan terhadap margin usaha. Meskipun demikian, Perusahaan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp155,18 miliar atau 57,79% dari target RKAP serta mempertahankan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menjaga profitabilitas di tengah berbagai tantangan operasional dan dinamika pasar yang dihadapi.

Direksi memandang bahwa pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 bukan semata-mata didorong oleh kondisi pasar, melainkan hasil dari berbagai inisiatif transformasi yang dijalankan secara konsisten. Fokus pada efisiensi, disiplin operasional, penguatan tata kelola, serta pengambilan keputusan berbasis risiko telah meningkatkan kualitas kinerja keuangan Perusahaan dan memperkuat kapasitas Perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Kinerja Keuangan

Dari sisi posisi keuangan, total aset Perusahaan mencapai Rp2,86 triliun atau 79,97% dari target RKAP. Penurunan aset dibandingkan target terutama dipengaruhi oleh perubahan komposisi aset lancar dan dinamika aktivitas operasional selama tahun berjalan. Sementara itu, total liabilitas tercatat sebesar Rp2,36 triliun atau 83,62% dari target, yang mencerminkan peningkatan kebutuhan pendanaan untuk mendukung operasional dan modal kerja Perusahaan. Total ekuitas mencapai Rp507,93 miliar atau 66,50% dari target RKAP, sejalan dengan pencapaian laba yang masih berada di bawah target.

capable of maintaining the reliability of supply to the main customers of the PLN Group despite the demand dynamics in the IPP segment.

From the service quality perspective, the Company recorded very good performance. The realization of coal quality reached 102.82%, and the timeliness of delivery reached 102.82% of the set target. The achievement reflects the effectiveness of supply chain management, good operational coordination, and the Company's success in maintaining product quality and distribution reliability to customers. This performance is one of the important factors in maintaining customer trust and supporting the security of supply for the power plant.

In terms of revenue, the Company recorded revenue of Rp9.20 trillion or 95.69% of the WP&B target of Rp9.62 trillion. Although it has not yet reached the target, this realization demonstrates the Company's ability to maintain sales volume amidst dynamic market conditions. The revenue achievement that is close to the target also reflects the effectiveness of the marketing strategy and sales contract management implemented throughout the year.

Meanwhile, gross profit was recorded at Rp315.65 billion or 76.07% of the WP&B target, reflecting continued pressure on operating margins. Nevertheless, the Company managed to record a net profit of Rp155.18 billion or 57.79% of the WP&B target and maintained optimistic financial performance throughout 2025. That achievement demonstrates the Company's ability to maintain profitability amidst various operational challenges and market dynamics.

The Board of Directors considers that financial performance in 2025 is not solely driven by market conditions, but rather the result of various transformation initiatives taken consistently. Focus on efficiency, operational discipline, strengthening governance, and risk-based decision-making has improved the quality of the Company's financial performance and strengthened the Company's capacity for sustainable growth.

Financial Performance

In terms of financial position, the Company's total assets reached Rp2.86 trillion or 79.97% of the WP&B target. The decrease in assets compared to the target was primarily influenced by changes in the composition of current assets and the dynamics of operational activities during the current year. Meanwhile, total liabilities were recorded at Rp2.36 trillion or 83.62% of the target, reflecting an increased funding requirement to support the Company's operations and working capital. Total equity reached Rp507.93 billion or 66.50% of the WP&B target, in line with profit achievements that were still below target.

Struktur permodalan Perusahaan pada tahun 2025 terdiri atas liabilitas sebesar 78,67% dan ekuitas sebesar 21,33% dari total aset. Dibandingkan target RKAP, porsi liabilitas meningkat sementara porsi ekuitas menurun, sehingga penguatan profitabilitas, optimalisasi modal kerja, dan pengelolaan risiko keuangan menjadi fokus utama untuk menjaga kesehatan struktur permodalan pada periode mendatang.

The Company's capital structure in 2025 consisted of liabilities amounting to 78.67% and equity amounting to 21.33% of total assets. Compared to the WP&B target, the proportion of liabilities increased while the proportion of equity decreased, making the strengthening of profitability, optimization of working capital, and financial risk management the primary focus to maintain the soundness of the capital structure in the upcoming period.

Meskipun laba bruto dan laba tahun berjalan masing-masing baru mencapai 76,07% dan 57,79% dari target RKAP, PLN BBN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp155,18 miliar dan mencatatkan peningkatan kinerja keuangan yang signifikan pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas berbagai langkah perbaikan yang dilakukan melalui peningkatan efisiensi operasional, penguatan tata kelola, optimalisasi proses bisnis, serta pengelolaan risiko dan modal kerja yang lebih terukur. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas berbagai langkah perbaikan yang dilakukan melalui peningkatan efisiensi operasional, penguatan tata kelola, optimalisasi proses bisnis, serta pengelolaan risiko dan modal kerja yang lebih terukur.

Despite gross profit and profit for the year reached only 76.07% and 57.79%, respectively, of the targets set in the Annual Budget and Operational Plan, PLN BBN succeeded in booking a net profit of Rp155.18 billion and recorded a significant improvement in financial performance in 2025. These achievements demonstrate the effectiveness of various improvement measures implemented through enhanced operational efficiency, strengthened governance, optimized business processes, and more measured risk and working capital management. These achievements demonstrate the effectiveness of various improvement measures implemented through enhanced operational efficiency, strengthened governance, optimized business processes, and more measured risk and working capital management.

Direksi menilai bahwa belum optimalnya realisasi volume pasokan pada segmen pelanggan PLTU IPP, meningkatnya kebutuhan modal kerja, serta tingginya beban usaha dan biaya pendanaan masih menjadi faktor yang memengaruhi pencapaian profitabilitas. Selain itu, fluktuasi harga batubara, perubahan pola permintaan pelanggan, dan kompleksitas pengelolaan rantai pasok turut memberikan tekanan terhadap margin usaha Perusahaan.

The Board of Directors assesses that the suboptimal realization of supply volume in the IPP CFPP customer segment, the increasing working capital needs, and the high operational burdens and financing costs are still factors affecting profitability achievement. Additionally, fluctuations in coal prices, changes in customer demand patterns, and the complexity of supply chain management also exert pressure on the Company's operating margins.

Sebagai tindak lanjut, Direksi menetapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan pada tahun berikutnya, antara lain optimalisasi volume penjualan kepada PLN *Group* dan IPP, pengembangan sumber pasokan yang lebih kompetitif, peningkatan pendapatan dari bisnis *beyond* kWh, penguatan pengelolaan piutang dan modal kerja, serta peningkatan efisiensi biaya melalui digitalisasi proses bisnis. Direksi juga terus mengevaluasi struktur pendanaan guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan usaha dan tingkat risiko yang dapat diterima.

As a follow-up, the Board of Directors has established a number of strategic steps to improve financial performance in the following year, including optimizing sales volume to the PLN Group and IPP, developing more competitive supply sources, increasing revenue from beyond kWh businesses, strengthening receivables and working capital management, and enhancing cost efficiency through business process digitalization. The Board of Directors also continues to evaluate the funding structure to maintain a balance between the need for business growth and an acceptable level of risk.

Secara keseluruhan, Direksi menilai bahwa kinerja tahun 2025 menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara keandalan pasokan energi primer dan perbaikan kinerja keuangan. Meskipun beberapa indikator belum mencapai target RKAP, berbagai langkah transformasi yang dijalankan telah memberikan dampak positif terhadap ketahanan bisnis dan menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan profitabilitas serta pertumbuhan usaha pada tahun-tahun mendatang.

Overall, the Board of Directors assesses that the performance in 2025 demonstrates the Company's success in maintaining a balance between the reliability of primary energy supply and the improvement of financial performance. Although some indicators have not yet reached the WP&B targets, various transformation steps taken have had a positive impact on business resilience and have become a strong basis for increasing profitability and business growth in the coming years.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance

Sejalan dengan perannya sebagai pengelola pasokan energi primer yang mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan nasional, PLN BBN terus memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Tata kelola yang efektif dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjaga kepercayaan pemegang saham, pelanggan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan GCG di PLN BBN dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan aspek *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) pada seluruh proses bisnis. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran senantiasa menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan operasional. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, Perusahaan berupaya memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dilaksanakan secara profesional, transparan, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, PLN BBN terus melakukan penyempurnaan sistem tata kelola melalui penguatan struktur organisasi, penyelarasan kebijakan internal, serta peningkatan efektivitas fungsi pengawasan dan pengendalian. Perusahaan juga memastikan bahwa hubungan kerja antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi berjalan secara harmonis dengan tetap menjunjung mekanisme *check and balances* yang sehat. Melalui sinergi seluruh organ perusahaan tersebut, proses pengambilan keputusan strategis dapat berlangsung secara objektif, terukur, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

Bagi Direksi, tata kelola perusahaan bukan sekadar pemenuhan kewajiban kepatuhan, tetapi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengelola risiko secara efektif, serta memperkuat daya saing Perusahaan. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2025 Direksi secara aktif mendorong penguatan budaya integritas, peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko, serta penyempurnaan kebijakan dan prosedur internal agar semakin adaptif terhadap perkembangan bisnis dan regulasi.

Direksi juga memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit, evaluasi manajemen risiko, maupun *assessment* tata kelola ditindaklanjuti secara sistematis melalui program perbaikan yang terukur. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Perusahaan untuk membangun organisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

In line with the role as the manager of primary energy supply that supports the reliability of the national electricity system, PLN BBN continues to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a foundation for conducting business activities sustainably. Effective governance is viewed as a strategic instrument to maintain the trust of shareholders, customers, regulators, and all stakeholders.

PLN BBN implements GCG in an integrated manner through the strengthening of Governance, Risk, and Compliance (GRC) aspects in all business processes. The principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness are always the foundation of every decision-making process and operational activities. With the application of these principles, the Company strives to ensure that every business activity is carried out professionally, transparently, and in accordance with applicable laws and regulations.

Throughout 2025, PLN BBN continued to enhance its governance system through the strengthening of organizational structure, alignment of internal policies, and enhancement of the effectiveness of oversight and control functions. The Company also ensures that the working relationship between the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors runs harmoniously while upholding a healthy check and balance mechanism. Through the synergy of all these corporate organs, the process of strategic decision-making can proceed objectively, measurably, and with a focus on long-term value creation.

For the Board of Directors, corporate governance is not merely a compliance obligation, but a strategic instrument to enhance the quality of decision-making, manage risks effectively, and strengthen the Company's competitiveness. Therefore, throughout 2025, the Board of Directors actively promoted the strengthening of an integrity culture, the improvement of risk-based decision-making quality, and the refinement of internal policies and procedures to be more adaptive to business and regulatory developments.

The Board of Directors also ensures that every recommendation resulting from the audit process, risk management evaluation, or governance assessment is systematically followed up through measurable improvement programs. This approach is part of the Company's commitment to building a more transparent, accountable, and competitive organization.

Komitmen terhadap tata kelola yang baik juga diwujudkan melalui implementasi berbagai sistem manajemen yang mendukung peningkatan kualitas proses bisnis. Pada tahun 2025, Perusahaan terus menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan secara efektif dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selain itu, PLN BBN juga memperkuat penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan berdasarkan ISO 37301:2021 serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai bagian dari upaya membangun budaya integritas dan kepatuhan yang berkelanjutan di seluruh jenjang organisasi.

Dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, penerapan manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Perusahaan secara konsisten mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam penyusunan RKAP, pengelolaan operasional, serta pelaksanaan proyek dan kegiatan strategis lainnya. Pendekatan ini memungkinkan PLN BBN untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan memonitor berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian target perusahaan, sekaligus meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang.

Penguatan fungsi pengendalian internal juga menjadi fokus penting dalam implementasi tata kelola perusahaan. Melalui peran Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, dan fungsi Manajemen Risiko, Perusahaan terus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan proses bisnis, kepatuhan terhadap kebijakan internal, serta pemenuhan ketentuan regulator. Seluruh fungsi tersebut bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Perusahaan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan standar tata kelola yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari upaya membangun budaya perusahaan yang berintegritas, PLN BBN secara konsisten menerapkan kebijakan anti korupsi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, serta mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Berbagai program sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai integritas dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran seluruh insan perusahaan terhadap pentingnya kepatuhan dan etika bisnis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN Batubara Niaga Nomor 008.P/DIRPLNBBN/2024 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan PT PLN Batubara Niaga. Sistem ini menyediakan berbagai kanal pelaporan yang dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal Perusahaan serta dikelola secara independen dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, objektivitas, dan perlindungan terhadap pelapor yang beritikad baik. Setiap laporan yang diterima melalui mekanisme WBS dilakukan proses evaluasi dan verifikasi awal untuk menentukan kategori pelanggaran, kecukupan bukti pendukung, serta tindak lanjut yang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing fungsi. Pengelolaan dan penanganan laporan dilaksanakan oleh

The Company actualizes commitment to good governance through the implementation of various management systems that support the improvement of business process quality. In 2025, the Company continued to apply the ISO 9001:2015 Quality Management System to ensure that all business processes run effectively and are customer-oriented. Additionally, PLN BBN also strengthens the implementation of the Compliance Management System based on ISO 37301:2021 and the Anti-Bribery Management System (ABMS) ISO 37001:2016 as part of efforts to build a sustainable culture of integrity and compliance throughout the organization.

In supporting goals achievement of the Company, risk management becomes an inseparable part of the planning and decision-making process. The Company consistently integrates risk management into the preparation of the WP&B, operational management, and the implementation of projects and other strategic activities. This approach enables PLN BBN to identify, measure, mitigate, and monitor various risks that could potentially affect the achievement of its targets, while also enhancing the organization's resilience in facing the continuously evolving business dynamics.

Strengthening the internal control function is also a crucial focus in corporate governance. Through the roles of Internal Audit, Corporate Secretary, and Risk Management functions, the Company continues to enhance the effectiveness of supervision on business process execution, compliance with internal policies, and adherence to regulatory requirements. All of these functions work synergistically to ensure that the Company's operational activities run in accordance with the established principles of prudence and governance standards.

As part of the effort to build a company culture with integrity, PLN BBN consistently implements anti-corruption policies, gratification control, conflict of interest management, and the Whistleblowing System (WBS) mechanism. Various programs for socializing and internalizing integrity values are conducted continuously to raise awareness among all company employees about the importance of compliance and business ethics in carrying out their duties and responsibilities.

The Company manages the Whistleblowing System (WBS) according to Regulation by the Board of Directors of PT PLN Batubara Niaga Number 008.P/DIRPLNBBN/2024 concerning the Reporting System for Violations within PT PLN Batubara Niaga. This system provides various reporting channels that can be accessed by both internal and external parties of the Company and is managed independently while upholding the principles of confidentiality, objectivity, and protection for whistleblowers acting in good faith. Each report received through the WBS mechanism undergoes an initial evaluation and verification process to determine the category of the violation, the sufficiency of supporting evidence, and the necessary follow-up actions pursuant to the authority of each function.

fungsi Hukum dan Kepatuhan dengan dukungan pihak terkait, termasuk Audit Internal untuk penanganan dugaan fraud dan pelanggaran yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Melalui mekanisme tersebut, Perusahaan berupaya memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, tidak terdapat laporan pengaduan yang masuk melalui mekanisme WBS.

The management and handling of reports are carried out by the Legal and Compliance function with support from related parties, including Internal Audit, for handling allegations of fraud and violations that require further investigation. Through this mechanism, the Company strives to ensure that every alleged violation is handled transparently, accountably, and in accordance with applicable regulations. In 2025, no complaints were submitted through the WBS mechanism.

Pada tahun 2025, PLN BBN melaksanakan *assessment* implementasi GCG menggunakan indikator SK-16 dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Hasil *assessment* menunjukkan skor SK-16 sebesar 63,409 dengan klasifikasi "Cukup Baik" dan skor ACGS sebesar 38,68. Capaian tersebut menjadi dasar bagi Perusahaan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperkuat efektivitas tata kelola, transparansi, dan perlindungan hak-hak pemegang saham serta pemangku kepentingan.

In 2025, PLN BBN assessed GCG implementation using the SK-16 indicator and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). The assessment results showed an SK-16 score of 63.409 with a classification of "Fairly Good" and an ACGS score of 38.68. These achievements serve as a foundation for the Company to make continuous improvements to strengthen the effectiveness of governance, transparency, and the protection of shareholders' and stakeholders' rights.

Direksi memandang hasil *assessment* tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam memperkuat implementasi GCG. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur internal, penguatan sistem pengendalian dan pengawasan, peningkatan kualitas pengungkapan informasi, serta penguatan perlindungan hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan.

The Board of Directors views the assessment results as part of the ongoing efforts to strengthen the implementation of GCG. Therefore, the Company is committed to following up on various recommendations generated through the refinement of internal policies and procedures, strengthening control and supervision systems, improving the quality of information disclosure, and enhancing the safeguard of shareholders' and stakeholders' rights.

Sebagai tindak lanjut, Perusahaan telah menyusun program peningkatan implementasi GCG yang difokuskan pada penguatan dokumentasi tata kelola, penyempurnaan kebijakan internal, serta peningkatan keselarasan penerapan tata kelola dengan prinsip-prinsip ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Melalui berbagai upaya tersebut, PLN BBN terus memperkuat fondasi tata kelola yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

As a follow-up, the Company has developed a program to enhance the implementation of GCG focused on strengthening governance documentation, refining internal policies, and improving the alignment of governance implementation with the principles of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Through these various efforts, PLN BBN continues to strengthen the foundation of governance that is transparent, accountable, adaptive, and sustainable.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Direksi juga mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG) ke dalam proses pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan risiko. Pendekatan ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta mendukung agenda transisi energi nasional sebagai bagian dari PLN *Group*.

In undertaking business activities, the Board of Directors also integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into the strategic decision-making and risk management processes. This approach is undertaken to support sustainable business growth, create added value for stakeholders, and support the national energy transition agenda as part of the PLN Group.

Prospek Usaha
Business Prospect

Direksi memandang prospek usaha PLN BBN pada tahun 2026 tetap positif di tengah dinamika perekonomian global, fluktuasi harga energi, dan percepatan transisi energi yang berlangsung di berbagai negara. Meskipun ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar energi masih menjadi tantangan, kebutuhan

The Board of Directors views the business prospects of PLN BBN in 2026 as favorable amidst the dynamics of the global economy, fluctuations in energy prices, and the acceleration of the energy transition occurring in various countries. Although geopolitical uncertainty and energy market volatility remain challenges,

akan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan diperkirakan tetap tinggi, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik nasional.

Dari sisi domestik, ketahanan perekonomian Indonesia yang didukung oleh aktivitas industri yang terus berkembang, peningkatan investasi, serta pertumbuhan kebutuhan energi memberikan peluang yang baik bagi industri batubara nasional. Dalam masa transisi menuju bauran energi yang lebih bersih, batubara masih memegang peranan penting sebagai sumber energi utama pembangkit listrik dan penopang ketahanan energi nasional.

Sebagai bagian dari PLN *Group* yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pasokan energi primer, PLN BBN berada pada posisi yang kuat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Perusahaan akan terus memperkuat fungsi *security of supply* melalui optimalisasi rantai pasok, penguatan kerja sama dengan pemasok, peningkatan efektivitas pengelolaan kontrak, serta pengembangan infrastruktur dan sistem pendukung yang mampu menjamin keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit PLN *Group* dan IPP.

Capaian operasional dan keuangan pada tahun 2025 menjadi modal penting bagi Perusahaan untuk memasuki tahun 2026 dengan fondasi bisnis yang lebih kuat. Keberhasilan menjaga keandalan pasokan, memperbaiki profitabilitas, dan meningkatkan kontribusi kepada PLN *Group* menjadi dasar bagi Perusahaan dalam menangkap peluang pertumbuhan pada periode mendatang.

Optimisme Direksi terhadap prospek usaha Perusahaan juga didukung oleh capaian kinerja tahun 2025 yang menunjukkan perbaikan yang signifikan. Perusahaan berhasil menjaga keandalan pasokan batubara sebesar 11,89 juta MT, mencatatkan kualitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman yang melampaui target, serta membalikkan kondisi kerugian pada tahun sebelumnya menjadi laba bersih sebesar Rp155,18 miliar. Selain itu, kontribusi Perusahaan kepada PLN *Group* mencapai 109% dari target RKAP, yang semakin menegaskan peran PLN BBN sebagai mitra strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Ke depan, Perusahaan akan terus memperkuat fondasi bisnis melalui peningkatan efisiensi operasional, penguatan tata kelola perusahaan, percepatan digitalisasi proses bisnis, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Di samping itu, PLN BBN akan terus mengembangkan sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan pendapatan *beyond kWh*, optimalisasi sinergi di lingkungan PLN *Group*, serta penjajakan peluang usaha yang memberikan nilai tambah dan mendukung keberlanjutan bisnis.

Direksi menyadari bahwa tantangan seperti fluktuasi harga batubara, perubahan kebijakan energi, dinamika permintaan pelanggan, serta kebutuhan penguatan modal kerja masih

the demand for a reliable, affordable, and sustainable energy supply is expected to remain high, particularly to support economic growth and national electricity needs.

From the domestic side, the resilience of Indonesia's economy, supported by the continuously developing industrial activities, increased investments, and the growing energy needs, provides good opportunities for the national coal industry. During the transition period toward a cleaner energy mix, coal still plays a crucial role as the main energy source for power plants and as a pillar of national energy resilience.

As part of the PLN Group, which holds a strategic role in managing primary energy supply, PLN BBN is well-positioned to capitalize on these opportunities. The Company will continue to strengthen the security of supply function through supply chain optimization, enhancing cooperation with suppliers, improving contract management effectiveness, and developing infrastructure and support systems that can ensure the reliability of primary energy supply for PLN Group and IPP power plants.

Operational and financial achievements in 2025 become an important capital for the Company to enter 2026 with a stronger business foundation. The success in maintaining supply reliability, improving profitability, and increasing contributions to the PLN Group serves as the basis for the Company to seize growth opportunities in the upcoming period.

The Board of Directors' optimism regarding the Company's business prospects is also supported by the performance achievements of 2025, which show significant improvement. The Company successfully maintained a coal supply reliability of 11.89 million MT, recorded supply quality and on-time delivery that exceeded targets, and reversed the previous year's loss into a net profit of Rp155.18 billion. In addition, the Company's contribution to the PLN Group reached 109% of the WP&B target, further affirming PLN BBN's role as a strategic partner in supporting national energy resilience.

In the future, the Company will continue to strengthen its business foundation through increased operational efficiency, enhanced corporate governance, accelerated digitalization of business processes, and the development of human resource competencies. Moreover, PLN BBN will continue to develop new growth sources through increased revenue beyond kWh, optimization of synergies within the PLN Group, and exploration of business opportunities that provide added value and support business sustainability.

The Board of Directors recognizes that challenges such as fluctuations in coal prices, changes in energy policies, customer demand dynamics, and the need for working capital

perlu dikelola secara cermat. Oleh karena itu, Perusahaan akan terus memperkuat manajemen risiko, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dan menjaga disiplin keuangan guna memastikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan dukungan pemegang saham, fondasi operasional yang semakin kuat, serta peluang pasar yang masih terbuka lebar, Direksi optimistis PLN BBN mampu meningkatkan kinerja, memperkuat kontribusi terhadap PLN *Group*, dan terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan pada tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang.

Untuk mewujudkan prospek tersebut, Direksi menetapkan empat prioritas strategis pada tahun 2026, yaitu memperkuat fungsi *security of supply* batubara bagi pembangkit PLN *Group* dan IPP, meningkatkan profitabilitas melalui optimalisasi volume penjualan, margin usaha, dan efisiensi biaya, mengembangkan sumber pertumbuhan baru melalui bisnis *beyond kWh*, serta mempercepat transformasi digital dan penguatan tata kelola perusahaan. Melalui fokus tersebut, PLN BBN diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis PLN *Group* dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

strengthening still need to be managed carefully. Therefore, the Company will continue to strengthen risk management, enhance the effectiveness of internal controls, and maintain financial discipline to ensure healthy and sustainable growth.

With the support of shareholders, an increasingly robust operational foundation, and wide-open market opportunities, the Board of Directors is optimistic that PLN BBN will be able to improve performance, strengthen its contribution to the PLN Group, and continue to create added value for shareholders and all stakeholders in 2026 and the years to come.

To actualize this prospect, the Board of Directors has set four strategic priorities for 2026, namely strengthening the security of coal supply for PLN Group and IPP power plants, increasing profitability through the optimization of sales volume, operating margin, and cost efficiency, developing new growth sources through beyond kWh business, and accelerating digital transformation and strengthening corporate governance. Through this focus, PLN BBN is expected to further strengthen its position as a strategic partner of the PLN Group in maintaining the reliability of the national electricity system while also creating sustainable growth.

Informasi Perubahan Direksi
Information on Changes in the Board of Directors

Sepanjang tahun buku 2025, terdapat perubahan komposisi Direksi PT PLN Batubara Niaga. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Nomor 35 tanggal 22 Januari 2025, Pemegang Saham mengangkat dan menetapkan Sdr. Rahmat Dian Amir sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Niaga dan Operasi, dengan tugas, kewajiban, kewenangan, hak, serta tanggung jawab yang sama sampai dengan ditetapkannya Anggota Direksi Perseroan yang definitif, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2025, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
a. Sdr. Rolly, sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama;
b. Sdr. Joni Arifin, sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan Human Capital; dan
c. Sdr. Rahmat Dian Amir, sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Niaga dan Operasi.

Selamat bergabung dan selamat menjalankan amanah kepada Sdr. Rahmat Dian Amir sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Niaga dan Operasi PT PLN Batubara Niaga. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan semangat kolaborasi

Throughout the 2025 financial year, the composition of the Board of Directors of PT PLN Batubara Niaga changed. Based on the Circular Shareholders' Resolution as stated in Deed Number 35 dated January 22, 2025, the Shareholders appointed and designated Mr. Rahmat Dian Amir as the Acting Director of Commerce and Operations, with the same duties, obligations, authorities, rights, and responsibilities until the definitive Members of the Company's Board of Directors are appointed, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Thus, until December 31, 2025, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
a. Rolly, as the Acting President Director;
b. Joni Arifin, as the Acting Director of Finance and Human Capital; and
c. Rahmat Dian Amir, as the Acting Director of Commerce and Operations.

Welcome aboard, and success in fulfilling your responsibilities, Mr. Rahmat Dian Amir, as the Acting Director of Commerce and Operations at PT PLN Batubara Niaga. May the entrusted responsibility be carried out with full integrity, professionalism, and a collaborative spirit to strengthen

untuk memperkuat kinerja serta mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Dengan pengalaman dan kompetensi dalam pengelolaan energi primer, pengadaan batubara, serta operasional pembangkitan yang relevan dengan lingkup tugas Direktur Niaga dan Operasi, serta didukung sinergi seluruh jajaran manajemen, kami berharap kepemimpinan yang semakin solid dapat terus mendorong penguatan tata kelola, peningkatan kinerja, pengembangan bisnis, dan penciptaan nilai berkelanjutan bagi Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.

performance and support the achievement of the Company's strategic goals.

With experience and competence in primary energy management, coal procurement, and power generator operations relevant to the scope of the Director of Commerce and Operations' duties, and supported by the synergy of the entire management team, we hope that increasingly solid leadership can continue to drive the strengthening of governance, performance improvement, business development, and the creation of sustainable value for the Company and all stakeholders.

Penutup
Closing Statements

Atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, seluruh insan PLN BBN, pelanggan, mitra usaha, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan sepanjang tahun 2025. Berbagai capaian yang berhasil diraih Perusahaan pada tahun ini merupakan hasil dari kolaborasi, dedikasi, profesionalisme, dan komitmen seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan perusahaan.

Ke depan, Direksi berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi bisnis, meningkatkan keandalan pasokan energi primer, mengembangkan inovasi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan fondasi yang semakin kuat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Direksi optimistis PT PLN Batubara Niaga akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis PLN *Group* dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham dan masyarakat.

Atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Perusahaan. Kami akan terus menjalankan amanah ini dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terbaik bagi PLN *Group*, bangsa, dan negara.

Jakarta, 30 Juni 2026
Atas nama Direksi PT PLN Batubara Niaga

On behalf of the Board of Directors, we extend the deepest appreciation and gratitude to the Shareholders, Board of Commissioners, the entire PLN BBN employees, customers, business partners, regulators, and all stakeholders for the trust, support, and cooperation provided throughout 2025. Various achievements attained by the Company this year are the result of collaboration, dedication, professionalism, and commitment from all parties in supporting the company's success.

Moving forward, the Board of Directors is committed to continuously strengthening the business foundation, enhancing the reliability of primary energy supply, developing innovations, strengthening corporate governance, and creating sustainable growth. With an increasingly solid foundation and the support of all stakeholders, the Board of Directors is optimistic that PT PLN Batubara Niaga will continue to strengthen the role as a strategic partner of the PLN Group in maintaining national energy resilience while creating sustainable added value for Shareholders and the community.

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our gratitude for the trust placed in the Company. We will continue to carry out this mandate with integrity, professionalism, and responsibility to deliver the best contribution to the PLN Group, the nation, and the country.

Jakarta, June 30, 2026
On behalf of the Board of Directors PT PLN Batubara Niaga

Rolly
Plt. Direktur Utama
Act. President Director

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT PLN Batubara Niaga

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the Annual Report 2025 of PT PLN Batubara Niaga

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PLN Batubara Niaga Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juni 2026

We, the undersigned, testify that all information in the 2025 Annual Report of PT PLN Batubara Niaga is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in this Annual Report of the Company.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, June 30, 2026

DEWAN KOMISARIS | BOARD OF COMMISSIONERS

Ratnasari Sjamsuddin
Plt. Komisaris Utama
Act. President Commissioner

Tri Joko Supriyatno
Plt. Komisaris
Act. Commissioner

Noor Adi Baroto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIREKSI | BOARD OF DIRECTORS

Rolly
Plt. Direktur Utama
Act. President Director

Joni Arifin
Plt. Direktur Keuangan dan Human Capital
Act. Director of Finance and Human Capital

Rahmat Dian Amir
Plt. Direktur Niaga dan Operasi
Act. Director of Commerce and Operations


PLN BATUBARA
NIAGA

PLN BATUBARA NIAGA

2

Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan
Company Identity

PLN BATUBARA NIAGA

Nama Perusahaan
Company name
PT PLN Batubara Niaga (PLN BBN)

Nama Panggilan
Designation
PLN BBN

Tanggal Pendirian
Date of Establishment
2 Agustus 2019
August 2, 2019

Bidang Usaha
Pengangkutan dan penjualan batubara untuk *security of supply* pasokan batubara PLTU PLN dan Independen Power Producer (IPP) serta mengelola kebutuhan industri *non*-ketenagalistrikan.

Business fields
Transportation and sales of coal for security of supply of coal supplies from PLN's coal-fired power plants and Independent Power Producers (IPPs) as well as managing the needs of non-electricity industries.

Modal Dasar
Rp200.000.000.000,-
(Dua Ratus Miliar Rupiah)
Authorized capital
Rp200,000,000,000,-
(Two Hundred Billion Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Rp50.000.000.000,-
(Lima Puluh Miliar Rupiah)
Issued and Fully Paid-Up Capital
Rp50,000,000,000,-
(Fifty Billion Rupiah)

Jumlah SDM
Number of human resources
48 Orang / People
Per 31 Desember 2025
as of December 31 , 2025

BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN
Legal Form and Ownership

Status Perusahaan:
Anak Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia

Company Status:
Subsidiary of PT PLN Energi Primer Indonesia

Kepemilikan Saham:
- **99,9% PT PLN Energi Primer Indonesia**
- **0,1% PT PLN Energi Primer Indonesia Investasi**

Share Ownership
- 99,9% PT PLN Energi Primer Indonesia
- 0,1% PT PLN Energi Primer Indonesia Investasi

Dasar Hukum Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
- **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PLN Batubara Niaga Nomor 2 Tanggal 2 Agustus 2019**
- **Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PLN Batubara Niaga Nomor 22 tanggal 22 Februari 2021**

Legal Basis for Establishment and Amendments to the Articles of Association
- Deed of Establishment of PT PLN Batubara Niaga Limited Liability Company Number 2 Dated August 2, 2019
- Amendments to the Articles of Association based on the Deed of Statement of Decision of the Shareholders of PT PLN Batubara Niaga Number 22 dated February 22, 2021

Anak Perusahaan
Subsidiary
Hingga akhir tahun 2025, PLN BBN tidak memiliki anak perusahaan.
As of the end of 2025, PLN BBN had no subsidiaries

Negara Tempat Beroperasi
Country of Operation
Indonesia

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Jl. Hj. Tutty Alawiyah No.10, Kalibata
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

(021) 26963955
kontak@plnbatubaraniaga.co.id
plnbatubaraniaga.id
@plnbatubaraniaga

Identitas dan Makna Logo Perusahaan

The Company's Logo Identity and Meaning

Identitas PLN BBN tercermin dalam Logo Perusahaan yang merepresentasikan nilai-nilai inti dan mandat Perusahaan. Disahkan pada tahun 2019 logo ini dirancang dengan ide dasar integrasi energi berbasis batubara yang andal, profesional, dan berkelanjutan, sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam mendukung ketahanan pasokan energi nasional serta memperkuat sinergi dalam ekosistem PLN Group.

The Company's Logo reflects PLN BBN identity, which represents the Company's core values and mandate. Approved in 2019, this logo was designed with the basic idea of reliable, professional, and sustainable coal-based energy integration, as a manifestation of the Company's commitment to supporting national energy supply security and strengthening synergy within the PLN Group ecosystem.

Makna Logo | Logo Meaning

PLN BATUBARA NIAGA

Warna Merah pada logo mengandung makna:

1. **Semangat dan energi** – Mewakili energi yang menjadi inti bisnis perusahaan.
2. **Keberanian dan ketegasan** – Dalam mengambil keputusan strategis di sektor energi.
3. **Daya juang dan determinasi** – Komitmen untuk mencapai target dan menjaga keandalan pasokan batubara.
4. **Kekuatan dan daya saing** – Siap bersaing dan tumbuh di industri energi nasional.

Red color in the logo represents the following:

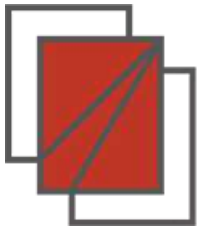
1. **Passion and energy –** Representing the energy as the Company's core business.
2. **Courage and decisiveness –** In making strategic decisions in the energy sector.
3. **Fighting spirit and determination –** Commitment to achieving targets and maintaining reliable coal supply.
4. **Strength and competitiveness –** Ready to compete and grow in the national energy industry.

Warna Hitam pada logo mengandung makna:

1. **Batubara sebagai *core business*** – Merepresentasikan komoditas utama yang dikelola perusahaan.
2. **Keteguhan dan stabilitas** – Konsistensi dalam operasional dan tata kelola.
3. **Profesionalisme dan integritas** – Menjalankan bisnis dengan prinsip GCG dan akuntabilitas.
4. **Kekuatan pondasi** – Sebagai penopang sistem kelistrikan nasional.

Black color in the logo represents the following:

1. **Coal as the core business –** Representing the main commodity managed by the Company.
2. **Determination and stability –** Consistency in operations and governance.
3. **Professionalism and integrity** – Performing business with GCG principles and accountability.
4. **Foundational strength** – Supporting the national electricity system.



Elemen persegi panjang bertumpuk melambangkan pada logo mengandung makna:

1. **Rantai pasok terintegrasi** – Dari sumber tambang, transportasi, hingga pelanggan.
2. **Kolaborasi dan sinergi** – Antar entitas dalam ekosistem PLN Group.
3. **Struktur yang kokoh dan terorganisir** – Sistem manajemen yang solid dan terukur.
4. **Pertumbuhan berkelanjutan** – Lapisan yang menunjukkan tahapan perkembangan bisnis

The stacked rectangular elements in the logo symbolize the following:

1. Integrated supply chain – From mining sources, transportation, to customers.
2. Collaboration and synergy – Among entities within the PLN Group ecosystem.
3. Solid and organized structure – Solid and measurable management system.
4. Sustainable growth – Layers representing stages of business development.

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History

PLN BBN merupakan Anak Perusahaan dari PT PLN Energi Primer Indonesia yang telah berkomitmen untuk menjamin *security of supply* pasokan batubara bagi PLTU PLN dan IPP serta industri *non* ketenagalistrikan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.

PLN BBN is a subsidiary of PT PLN Energi Primer Indonesia, which is committed to ensuring the security of coal supply for PLN's coal-fired power plants (CFPP), IPPs (Independent Power Plants), and non-electricity industries based on the principles of Good Corporate Governance.

PT PLN Batubara Niaga (Perusahaan) memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara (IPP) yang didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 02 Agustus 2019 oleh Ina Rosaina, S.H., notaris di Jakarta dimana Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0037730.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 02 Agustus 2019, dan telah didaftarkan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0127178.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 02 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Nomor 22 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Miryani Usman, S.H. yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat Keputusan Nomor: AHU-0013896.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PLN Batubara Niaga.

PT PLN Batubara Niaga (the "Company") holds a Coal Transportation and Sales Permit (IPP). The Company was established under Deed No. 2 dated August 2, 2019, by Ina Rosaina, S.H., notary, in Jakarta. This Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0037730.AH.01.01. of 2019 dated August 2, 2019, and has been registered with the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Company Registration Number AHU-0127178.AH.01.11. 2019, dated August 2, 2019.

The most recent amendment to the Company's Articles of Association is as stipulated in Notarial Deed Number 22 dated February 22, 2021, drawn up by Notary Miryani Usman, S.H., which has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Number: AHU-0013896.AH.01.02.TAHUN 2021 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT PLN Batubara Niaga.



Informasi Perubahan Nama dan Status Badan Hukum Perseroan

Sejak didirikan pada 02 Agustus 2019 melalui Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PLN BBN Nomor 2, Perseroan tidak pernah mengalami perubahan nama maupun status badan hukum.

Information on Changes to the Company's Name and Legal Entity Status

Since its establishment on August 2, 2019, through the Deed of Establishment of the Limited Liability Company (Persero) PLN BBN Number 2, there was not any changes to the Company's name or legal entity status.

Jejak Langkah

Milestone

2019

02 Agustus 2019
- Pendirian PT PLN Batubara Niaga sebagai anak perusahaan dari PT PLN Energi Primer Indonesia, berdasarkan Akta No. 2 oleh notaris di Jakarta. Perusahaan berkomitmen menjamin *security of supply* batubara bagi PLTU PLN, IPP, dan industri *non*-ketenagalistrikan dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance*.
- Perusahaan memiliki Izin Usaha Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan (IUP OPK) yang sekarang namanya berubah menjadi Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara.

August 2, 2019
- PT PLN Batubara Niaga was established as a subsidiary of PT PLN Energi Primer Indonesia, based on Deed No. 2 by a notary in Jakarta. The Company is committed to ensuring the security of coal supply for PLN's coal-fired power plants (CFPP), IPP (Independent Power Plants), and non-electricity industries based on the principles of Good Corporate Governance.
- The Company holds a Special Operational Business Permit for Transportation and Sales (IUP OPK), which has now been renamed the Transportation and Sales Permit (IPP) for coal transportation and sales activities.

2020

19 Agustus 2020
PT PLN Batubara Niaga menandatangani kerjasama dengan PT SHENHUA GUOHUA PEMBANGKITAN JAWA BALI (SGPJB) untuk pasokan batubara Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara di Jawa 7 (2 x 1.000 MW).

August 19, 2020
PT PLN Batubara Niaga signed a cooperation agreement with PT SHENHUA GUOHUA PEMBANGKITAN JAWA BALI (SGPJB) for coal supply for the Coal-Fired Power Plant in Jawa 7 (2 x 1,000 MW).

2021

22 Februari 2021
- Perubahan Anggaran Dasar terakhir pada Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha yang telah ditetapkan melalui Akta Notaris Nomor 22 dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan No. AHU-0013896.AH.01.02 Tahun 2021.
- PT PLN Batubara Niaga menandatangani kerjasama dengan PT MEULABOH POWER GENERATION (MPG) untuk pasokan batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara di Meulaboh Nagan 3 & 4.

February 22, 2021
- The latest amendment to the Articles of Association, Article 3, concerning the Purpose and Objectives and Business Activities, was stipulated through Notarial Deed No. 22 and approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0013896. AH.01.02 of 2021.
- PT PLN Batubara Niaga signed a cooperation agreement with PT MEULABOH POWER GENERATION (MPG) for coal supply for the Coal-Fired Steam Power Plant in Meulaboh, Nagan 3 & 4.

2022

PT PLN Batubara Niaga melakukan diversifikasi portofolio usaha dan optimalisasi nilai tambah dengan pengiriman batubara untuk kebutuhan sektor *non*-kelistrikan.

PT PLN Batubara Niaga diversified business portfolio and optimizing added value by delivering coal for non-electricity sector needs.

2023

PT PLN Batubara Niaga melakukan kerjasama dengan PT Kratau Bandar Samudera untuk *Coal Blending Facility* (CBF) Batubara.

PT PLN Batubara Niaga collaborated with PT Kratau Bandar Samudera for the Coal Blending Facility (CBF).

2024

- PT PLN Batubara Niaga melakukan kerjasama dengan KONSORSIUM PT ADHI GUNA PUTERA dan PT PELABUHAN BARA UTAMA untuk Jasa Penyediaan (Pembangunan dan Pengelolaan) Intermediate Stockpile (ISP) dan *Interconnecting Conveyor* (IC) PLTU MEULABOH UNIT 3 & 4.
- PT PLN Batubara Niaga Melakukan sertifikasi ISO : 37001 :2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- Pertama kali Melakukan *Assessment* GCG dengan parameter Kementerian BUMN dan ACGS dengan menggunakan pihak independen.

- PT PLN Batubara Niaga collaborated with a consortium of PT ADHI GUNA PUTERA and PT PELABUHAN BARA UTAMA for the provision (construction and management) of the Intermediate Stockpile (ISP) and Interconnecting Conveyor (IC) for the Meulaboh Coal-Fired Power Plant Units 3 & 4.
- PT PLN Batubara Niaga received ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification.
- First GCG assessment using parameters from the Ministry of State-Owned Enterprises and ACGS using an independent party.

2025

- PT PLN Batubara Niaga Melakukan sertifikasi ISO : 37301 :2021 Sistem Manajemen Kepatuhan.
- PT PLN Batubara Niaga menerapkan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 9001: 2015.

- PT PLN Batubara Niaga obtained ISO: 37301:2021 Compliance Management System certification.
- PT PLN Batubara Niaga implemented the ISO: 9001:2015 Quality Management System.

Visi dan Misi Perusahaan

Vision and Mission

PT PLN Batubara Niaga menetapkan visi sebagai pedoman dalam arah pengembangan serta posisi bisnis yang hendak dicapai dengan memperhatikan aspirasi Pemegang Saham (*Shareholders Aspiration*). Visi Perusahaan adalah:

PT PLN Batubara Niaga established vision as guideline for development and the business position to be achieved, considering aspirations by the shareholders. The Company's vision is as follows:



Visi Vision

Menjadi Perusahaan Pemasok Batubara Terpercaya di Tingkat Global yang Tumbuh dan Berkelanjutan

To be a Trusted, Growing and Sustainable Global Coal Supplier Company

Guna mewujudkan Visi di atas, PLN BBN menetapkan Misi sebagai berikut:

In the event to realize the above Vision, PLN BBN has established the following Mission:



Misi Mission

- Menyediakan dan mengelola layanan pasokan batubara secara terintegrasi dan agile dengan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang modern, inovatif, dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dengan membangun budaya kerja unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
- Membangun keunggulan operasional melalui penerapan inovasi, efisiensi proses bisnis, dan kepatuhan penuh terhadap regulasi nasional.
- Mengembangkan kemitraan strategis untuk memperkuat ekosistem bisnis batubara dan menjamin keberlanjutan pasokan energi primer bagi pelanggan domestik

- Providing and managing integrated and agile coal supply services by implementing modern, innovative, and sustainable corporate governance practices.
- Improving the capacity and capability of human resources by building an excellent, innovative, and highly competitive work culture.
- Building operational excellence through the implementation of innovation, business process efficiency, and full compliance with national regulations.
- Developing strategic partnerships to strengthen the coal business ecosystem and ensure the sustainability of the primary energy supply for local customers.

Review Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Visi dan Misi Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi PLN BBN secara rutin melakukan tinjauan terhadap visi dan misi Perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hingga laporan ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa visi dan misi Perusahaan tetap relevan dengan dinamika dan perkembangan lingkungan bisnis.

Review by the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Company's Vision and Mission

The Board of Commissioners and the Board of Directors of PLN BBN regularly review the Company's vision and mission to ensure the alignment with the established long-term objectives. As of the publication of this report, the Board of Commissioners and the Board of Directors assess that the Company's vision and mission remain relevant to the dynamics and developments of the business environment.

Tata Nilai dan Budaya Perusahaan

Corporate Values and Culture

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, organisasi menetapkan tata nilai AKHLAK yang secara lebih rinci dijelaskan dalam gambar berikut:

In order to actualize the stated vision and mission, the organization has established the AKHLAK values, which are explained in more detail in the following figure:

AKHLAK

A K H L A K

AMANAH

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan Perilaku:

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dari tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh pada nilai moral dan etika.

TRUSTWORTHY

Definition: Holding fast to the trust given.

Code of Conduct:

- Fulfill promises and commitments.
- Responsible for the task, and the decision of the actions taken.
- Stick to moral and ethical values.

KOMPETEN

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan Perilaku:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

COMPETENT

Definition: Keep learning and developing capabilities.

Code of Conduct:

- Increase self-competence to respond to everchanging challenges.
- Help others learn.
- Completing tasks of the highest quality.

HARMONIS

Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan Perilaku:

- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

HARMONIOUS

Definition: Caring for each other and respecting differences.

Code of Conduct:

- Appreciate everyone regardless of background.
- Likes helping others.
- Build a conducive work environment

LOYAL

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Panduan Perilaku:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, Pimpinan, BUMN dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

LOYAL

Definition: Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and Country.

Code of Conduct:

- Maintain the good name of fellow employees, Leaders, SOEs, and the Country.
- Willing to make sacrifices to achieve a greater goal.
- Obey the leadership as long as it does not conflict with law and ethics.

ADAPTIF

Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan Perilaku:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

ADAPTIVE

Definition: Continue to innovate and be enthusiastic in moving or dealing with change.

Code of Conduct:

- Quickly adjust to get better.
- Continuously make improvements following technological developments.
- Act proactively.

KOLABORATIF

Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan Perilaku:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

COLLABORATIVE

Definition: Building synergistic cooperation.

Code of Conduct:

- Provide opportunities for various parties to contribute.
- Open to working together to generate added value.
- Mobilizing the use of various resources for common goals.

Penerapan Nilai dan Budaya Perusahaan
Implementation of Corporate Values and Culture

Budaya Perusahaan diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai AKHLAK ke dalam setiap aspek operasional dan interaksi antar karyawan. Sosialisasi terhadap nilai dan budaya Perusahaan ini dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program seperti *BOD Talk* dan *Coffee Morning*. Seluruh inisiatif ini bertujuan untuk memastikan setiap karyawan memahami dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari para karyawan.

The Company implement its culture by integrating the AKHLAK values into every aspect of operations and employee interactions. These values and the Company's culture are continuously promoted through various programs such as BOD Talk and Coffee Morning. All of these initiatives purpose to ensure that every employee understands and is able implement these values in their daily activities.









Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan

Purpose, Objectives, and Business Activities of the Company

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

1. **Menyelenggarakan usaha di bidang jual beli serta pengolahan Batubara untuk memenuhi pasokan Batubara untuk kebutuhan unit-unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara *Independent Power Producer* (IPP) dan kebutuhan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.**
2. **Melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham mayoritas dalam rangka menunjang/ mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan kepatutan serta etika bisnis pada Perseroan Terbatas.**

According to Article 3 of the Articles of Association, the purpose and objectives of the Company are as follows:

1. Business in the trading and processing of coal to meet the coal supply needs of coal-fired steam power plants (CFPP) operated by Independent Power Producers (IPP) and other needs following the principles of a limited liability company.
2. Undertaking assignments from the majority Shareholder in order to support the Shareholders business activities through the application of the principles of good corporate governance, propriety, and business ethics in a limited liability company.



Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah diuraikan diatas, Kegiatan Usaha Perusahaan berdasarkan anggaran dasar pasal 3 adalah Menjalankan usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batubara, arang, batubara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuel) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

PLN BBN purposes to achieve those and objectives outlined above, so that the Company's business activities, as stipulated in Article 3 of the Articles of Association, are to engage in the wholesale trade of gaseous, liquid, and solid fuels and similar products, such as crude oil, diesel fuel, gasoline, fuel oil, kerosene, premium, diesel, kerosene, coal, charcoal, coal, coal tar, wood fuel, naphtha, biofuels, and other fuels—including gaseous fuels (LPG, butane, propane, and others)—as well as varnish, lubricating oil, and refined petroleum products, as well as nuclear fuel.

Produk dan Aktivitas Perusahaan

Products and Services

PLN BBN bergerak di bidang usaha perdagangan dan pengolahan Batubara dengan produk yang ditawarkan meliputi:

1. Menyediakan Batubara Kalori Rendah
2. Menyediakan Batubara Kalori Sedang
3. Menyediakan Batubara Kalori Tinggi

PLN BBN operates in the Coal trading and processing business, offering products that include:

1. Providing Low Calorie Coal
2. Providing Medium Calorie Coal
3. Providing High Calorie Coal









Adapun Aktivitas Bisnis Perusahaan meliputi:

- Bekerjasama dengan pengelola *Coal Processing Plant*.
- Penjualan Batubara ke PLTU PLN & IPP
- Penjualan Batubara ke Industri Non kelistrikan

The Company's business activities include:

- Collaboration with the Coal Processing Plant management
- Selling Coal to PLN Power Plants & Independent Power Producers (IPPs)
- Selling Coal to Non-electricity Industries

Wilayah Operasional dan Peta Sebaran Wilayah Operasional

Operational Areas and Map of Operational Areas

Hingga akhir tahun 2025, seluruh kegiatan operasional PLN BBN terpusat di kantor pusat yang berlokasi di Jl. Hj. Tutty Alawiyah No.10, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740. Perusahaan tidak memiliki wilayah operasional cabang atau unit kerja yang tersebar di daerah, sehingga seluruh fungsi pengelolaan bisnis dijalankan secara terintegrasi dari kantor pusat.

Through the end of 2025, all of operational activities by PLN BBN has been centralized at the head office located at Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. 10, Kalibata, Pancoran Subdistrict, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12740. The Company has no regional branches or operational units spread across the country; therefore, it carries out all business management functions in an integrated manner from the head office.

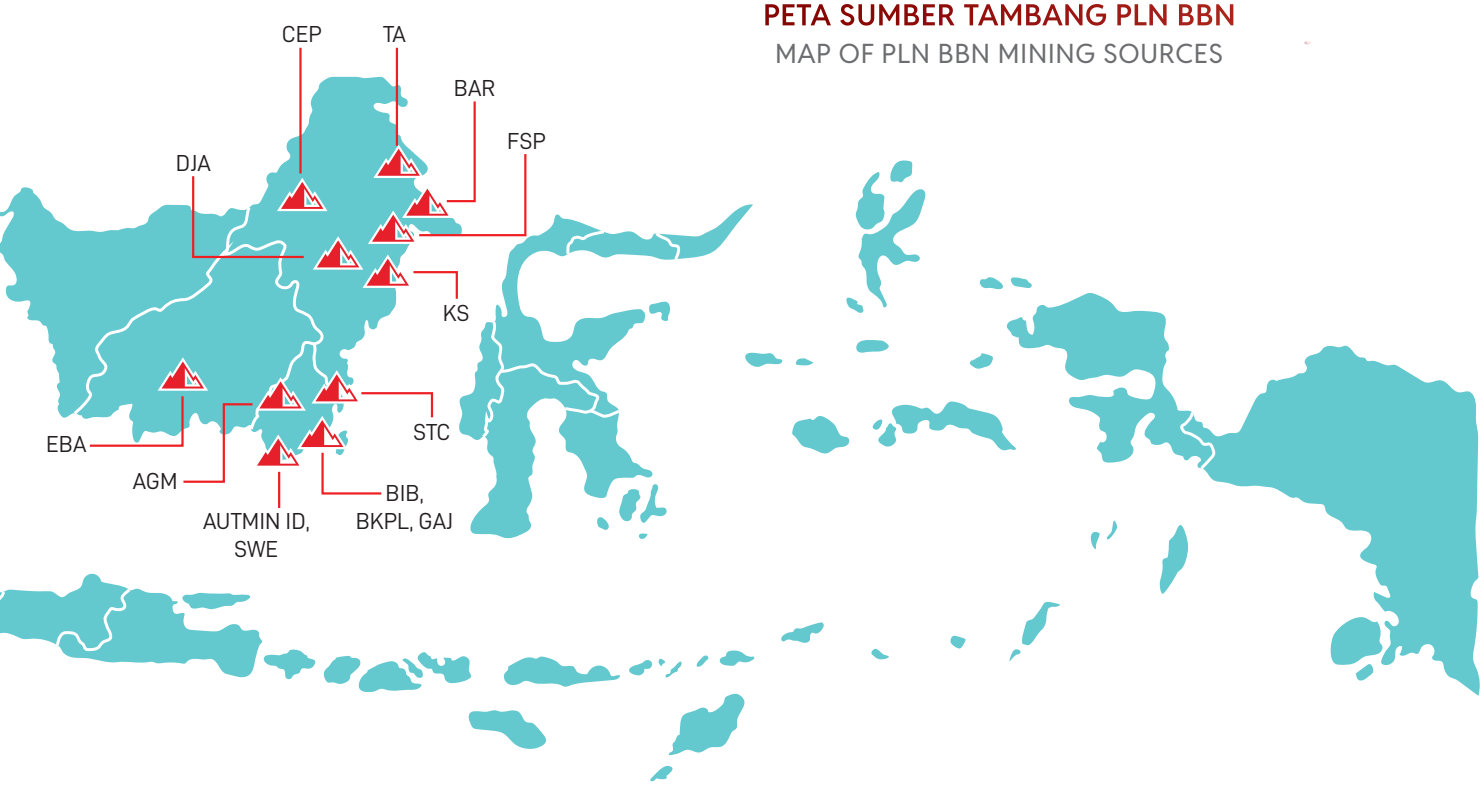


PETA DISTRIBUSI PASAR PLN BBN

MAP OF PLN BBN MARKET DISTRIBUTION



PETA SUMBER TAMBANG PLN BBN
MAP OF PLN BBN MINING SOURCES





Meskipun demikian, dalam menjalankan kegiatan usahanya, PLN BBN tetap melaksanakan distribusi penjualan batubara ke berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan mitra usaha. Dalam mendukung kegiatan tersebut, Perusahaan memperoleh pasokan batubara dari berbagai sumber tambang yang tersebar di wilayah strategis di Indonesia. Sumber tambang ini menjadi bagian penting dalam rantai pasok Perusahaan guna memastikan ketersediaan, keandalan, serta kesinambungan suplai batubara kepada pelanggan. Berikut disajikan Peta Distribusi Pasar dan Sumber Tambang PLN BBN:

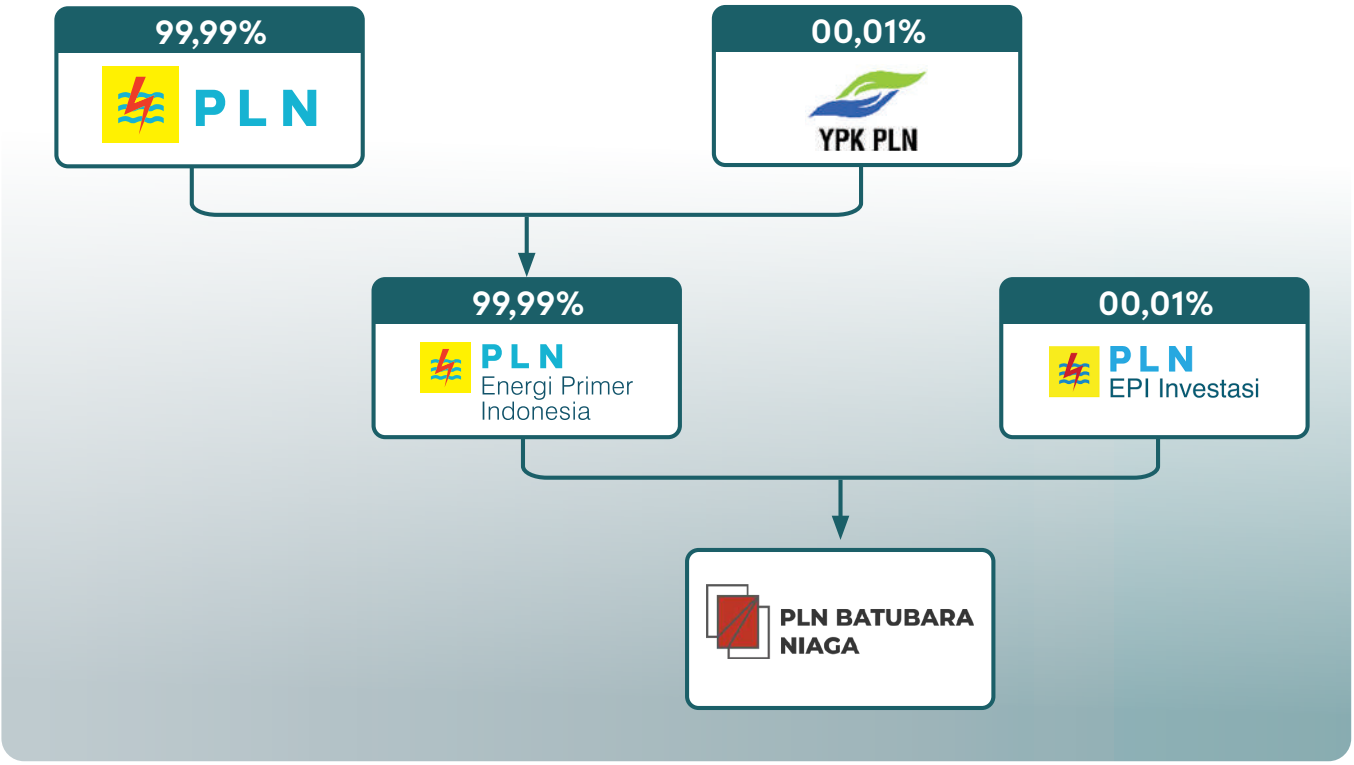
Nevertheless, in running business activities, PLN BBN continues to distribute and sell coal to various regions in Indonesia following the customers and business partners needs. To support these activities, the Company sources coal from various mines located in strategic regions across Indonesia. These mining sources takes a vital role in the Company's supply chain to ensure the availability, reliability, and continuity of coal supply to the customers. The following are maps of PLN BBN's market distribution and mining sources:

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Structure and Composition

Komposisi Pemegang Saham PLN BBN per 31 Desember 2025 sebagaimana digambarkan dalam skema berikut:

As of December 31, 2025 PLN BBN has the shareholders composition as illustrated in the following diagram:



Keanggotaan Asosiasi

Association Membership

Hingga akhir 2025, Perusahaan belum mengikuti maupun menjadi anggota pada asosiasi, organisasi, atau keanggotaan tertentu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perusahaan tetap membuka peluang untuk menjalin kerja sama atau partisipasi pada forum-forum yang relevan di masa mendatang, sepanjang memberikan nilai tambah bagi kinerja dan pengembangan bisnis Perusahaan.

As of the end of 2025, the Company has not joined or become a member of any specific associations, organizations, or membership groups, either at the national or international level. The Company remains open to opportunities for collaboration or participation in relevant forums in the future, provided that such participation adds value to the Company's performance and business development.

Informasi Pemegang Saham Utama Hingga Entitas Pemilik Akhir

Information on Major Shareholders to the Ultimate Owner

PLN BBN merupakan Anak Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia. Per 31 Desember 2025, Pemegang Saham Utama sekaligus Pengendali Perusahaan dimiliki oleh PT PLN Energi Primer Indonesia dengan jumlah saham sebanyak 99,99%.

Berikut Profil ringkas PT PLN Energi Primer Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama Pengendali PLN BBN:

PLN BBN is a subsidiary of PT PLN Energi Primer Indonesia. As of December 31, 2025, PT PLN Energi Primer Indonesia is the Company's majority shareholder and controlling shareholder, holding 99.99% of the shares.

The following is a brief profile of PT PLN Energi Primer Indonesia as the controlling shareholder of PLN BBN:

Nama Perusahaan	Company Name	PT PLN Energi Primer Indonesia	PT PLN Energi Primer Indonesia
Nama Panggilan Perusahaan	Designation	PT PLN EPI	PT PLN EPI
Status Perusahaan	Status	Subholding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).	Subholding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Kepemilikan Saham	Share Ownership	• PT PLN (Persero) memiliki 2.298.716 lembar saham atau senilai Rp2.298.716.000.000 atau 99,99%. • Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN) sebesar 1 lembar saham atau dengan nilai Rp1.000.000 atau 0,01%.	• PT PLN (Persero) owns 2,298,716 shares, valued at Rp2,298,716,000,000, or 99.99%. • Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN) holds 1 share, valued at Rp1,000,000, or 0.01%.
Kegiatan Usaha yang Dijalankan	Business Activities	• Penyediaan batubara dan pengembangan tambang eksisting untuk menyuplai seluruh PLTU PLN *Group* • Penyediaan gas untuk Pembangkit • Penyediaan BBM untuk Pembangkit • Penyediaan biomassa untuk *co-firing* PLTU	• development of existing mines to supply all PLN Group coal-fired power plants • Gas supply for power plants • Fuel supply for power plants • Biomass supply for co-firing power plants
Kantor Pusat	Head Office	Centennial Tower, Lantai 7-8, Jl. Gatot Subroto No. 24-25, Setiabudi, Jakarta 12930	Centennial Tower, Lantai 7-8, Jl. Gatot Subroto No. 24-25, Setiabudi, Jakarta 12930
Website	Website	www.plnepi.co.id	www.plnepi.co.id

Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition



Struktur kepemilikan saham PLN BBN seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yang berkedudukan di Indonesia. Tidak terdapat kepemilikan saham oleh institusi asing, individu lokal maupun individu asing.

Share ownership structure is entirely owned by local institutions domiciled in Indonesia. There is no share ownership by foreign institutions, local individuals, or foreign individuals

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Berdasarkan Klasifikasi

Per 31 Desember 2025, struktur kepemilikan saham PLN BBN diklasifikasikan berdasarkan jenis pemegang saham dan seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yang berkedudukan di Indonesia. Tidak terdapat kepemilikan saham oleh institusi asing, individu lokal maupun individu asing. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Shareholders Number and Ownership Percentage by Classification

As of December 31, 2025, PLN BBN classified share ownership structure by the shareholders type and is entirely owned by local institutions domiciled in Indonesia. There is no share ownership by foreign institutions, local individuals, or foreign individuals. Based on this classification, the Company's shareholders are as follows:

Nama Pemegang Saham Shareholders Name	Klasifikasi Classification	Kedudukan Pemegang Saham Shareholders Position	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Percentage
PT PLN Energi Primer Indonesia	Institusi Lokal Local Institution	Indonesia	49.950 lembar/shares	99,9%
PT PLN Energi Primer Indonesia Investasi	Institusi Lokal Local Institution	Indonesia	50 lembar/shares	0,1%

Komposisi Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Perusahaan

Sampai dengan akhir Desember 2025, Pemegang Saham PLN BBN yang memiliki 5% atau lebih saham Perusahaan adalah PT PLN Energi Primer Indonesia sebar 99,9% .

Composition of Shareholders Owning 5% or More of the Company's Shares

As of the end of December 2025, PLN BBN shareholders owning 5% or more of the Company's shares are PT PLN Energi Primer Indonesia, with 99.9% shares.

Nama Pemegang Saham Shareholders Name	Status Status	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Percentage
PT PLN Energi Primer Indonesia	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Key and Controlling Shareholders	49.950 lembar/ shares	99,9%



Kelompok Pemegang Saham Dengan Kepemilikan Kurang Dari 5% Saham Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pemegang Saham PLN BBN yang memiliki kurang dari 5% saham Perusahaan adalah PT PLN Energi Primer Indonesia Investasi sebesar 0,1% .

Shareholders with Ownership of Less Than 5% of the Company's Shares

As of December 31, 2025, PLN BBN shareholders with less than 5% of the Company's shares are PT PLN Energi Primer Indonesia Investasi, with 0.1% shares.

Nama Pemegang Saham Shareholders Name	Status Status	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Percentage
PT PLN Energi Primer Indonesia Investasi	Pemegang Saham Minoritas Minority Shareholders	50 lembar	0,1%

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi terkait kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan publik lainnya telah diuraikan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan.

Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors

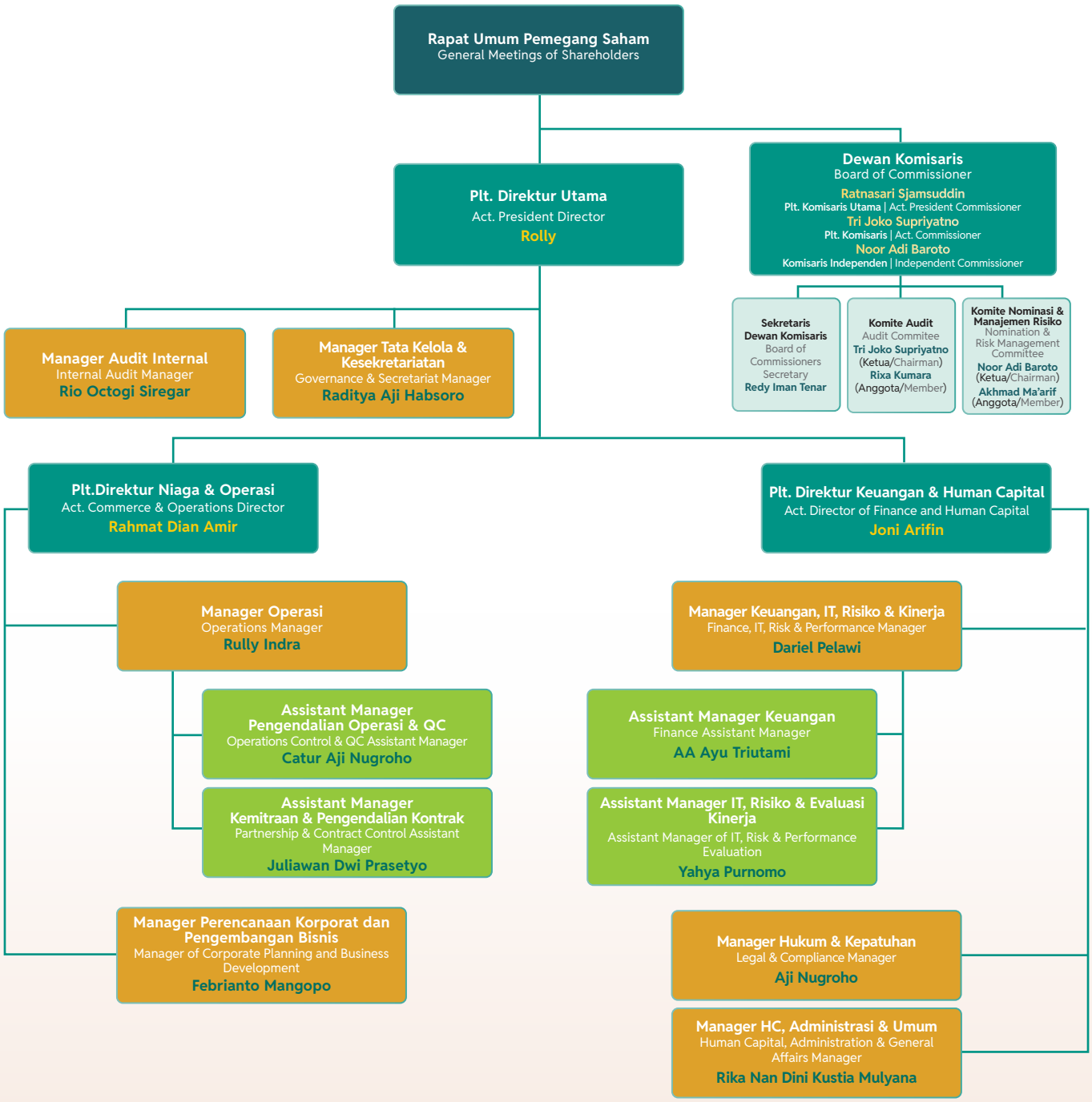
As of December 31, 2025, no members of the Board of Commissioners or Directors owned shares in the Company, either directly or indirectly. Information regarding share ownership by the Board of Commissioners and Directors in other public companies is described in the Corporate Governance Chapter.

Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur organisasi PLN BBN ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 012.P/DIRPLNBBN/2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Di PT PLN Batubara Niaga. Bagan struktur organisasi PLN BBN tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The organizational structure of PLN BBN is determined based on the Decree of the Board of Directors Number: 012.P/DIRPLNBBN/2023 concerning the Organizational Structure and Work Procedures at PT PLN Batubara Niaga. The organizational structure chart of PLN BBN in 2025 is as follows:



Informasi Perubahan Dewan Komisaris Pada Tahun Buku dan Setelah Buku 2025

Information on Changes to the Board of Commissioners in and After Fiscal Year 2025

Pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2025, komposisi Dewan Komisaris PT PLN Batubara Niaga terdiri atas Sdr. Tri Joko Supriyatno sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama dan Sdr. Noor Adi Baroto sebagai Komisaris Independen.

Pada akhir tahun 2025, Perseroan melakukan penataan susunan Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler), Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdr. Tri Joko Supriyatno dari jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama, dari seluruh tugas dan tanggung jawabnya, disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. Pemegang Saham juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan sejauh tindakan-tindakan yang dilakukan tercermin atau ternyata dalam Laporan Tahunan/ Perhitungan Tahunan Perseroan yang disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Selanjutnya, Pemegang Saham mengangkat dan menetapkan Sdri. Ratnasari Sjamsuddin sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama dan Sdr. Tri Joko Supriyatno sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris, dengan tugas, kewajiban, kewenangan, tanggung jawab, dan hak sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab berdasarkan nomenklatur masing-masing jabatan. Masa jabatan tersebut berlaku sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama Perseroan yang definitif, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian, untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham menegaskan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

a. Sdri. Ratnasari Sjamsuddin, sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama;
b. Sdr. Noor Adi Baroto, sebagai Komisaris Independen; dan
c. Sdr. Tri Joko Supriyatno, sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris.

During the period from January 1 to December 30, 2025, the Board of Commissioners of PT PLN Batubara Niaga consisted of Mr. Tri Joko Supriyatno as the Acting President Commissioner and Mr. Noor Adi Baroto as the Independent Commissioner.

At the end of 2025, the Company reorganized the composition of the Board of Commissioners. Based on the Circular Shareholders' Resolution, the Shareholders respectfully dismissed Mr. Tri Joko Supriyatno from his position as Acting President Commissioner, from all his duties and responsibilities. With gratitude for all his contributions during his tenure. The Shareholders also grant full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the concerned party as far as the actions taken are reflected or evident in the Company's Annual Report/Annual Calculation approved/ratified by the Company's General Meeting of Shareholders.

Furthermore, the Shareholders appointed and designated Ms. Ratnasari Sjamsuddin as the Acting President Commissioner and Mr. Tri Joko Supriyatno as the Acting Commissioner, with duties, obligations, authorities, responsibilities, and rights in accordance with the scope of duties and responsibilities based on the nomenclature of their respective positions. This term of office is valid until the definitive President Commissioner of the Company is appointed, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Thus, to avoid any uncertainty, the Shareholders reaffirm the composition of the Company's Board of Commissioners as follows:

a. Ms. Ratnasari Sjamsuddin, as the Acting President Commissioner;
b. Mr. Noor Adi Baroto, as Independent Commissioner; and
c. Mr. Tri Joko Supriyatno, as the Acting Commissioner.

Alasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Tahun Buku 2025

Reasons for Changes in the Composition of the Board of Commissioners for 2025 Fiscal Year

Keputusan Pemegang Saham melalui RUPS

Perubahan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyesuaian Strategi dan Kebutuhan Bisnis Perusahaan

Dalam rangka mendukung penguatan tata kelola Perusahaan *(Good Corporate Governance)* serta percepatan pencapaian target kinerja dan ekspansi usaha, diperlukan komposisi Dewan Komisaris yang selaras dengan arah strategis dan dinamika bisnis Perusahaan.

Penyegaran Organ Pengawas Perusahaan

Perubahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran (*refreshment*) struktur pengawasan guna meningkatkan efektivitas fungsi monitoring, pemberian nasihat strategis, serta pengawasan terhadap Direksi.

Penyesuaian Kebijakan Tata Kelola BUMN/ Grup PLN

Penyesuaian dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan tata kelola dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Grup PT PLN (Persero) serta regulasi terkait tata kelola perusahaan.

Peningkatan Kompetensi dan Kesesuaian Keahlian

Untuk menghadapi tantangan industri batubara dan energi yang semakin dinamis, Perusahaan memerlukan komposisi Dewan Komisaris dengan kompetensi, pengalaman, dan integritas yang relevan dengan kebutuhan usaha Perusahaan.

Shareholders Decision through the GMS

The changes were made based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Company's highest organ, following the Company's Articles of Association as well as applicable laws and regulations.

Adjustment of the Company's Strategy and Business Needs

To support the strengthening of good corporate governance and accelerate the achievement of performance targets and business expansion, it is requiring the Board of Commissioners composition that aligns with the Company's strategic direction and business dynamics.

Refreshment of the Company's Supervisory Organ

The changes were made as part of an effort to refresh the supervisory structure to increase the effectiveness of the monitoring function, providing strategic advice, and supervising the Board of Directors.

Adjustment of State-Owned Enterprise/ PLN Group Governance Policy

Adjustments were made to ensure alignment with the governance policies and provisions applicable within the PT PLN (Persero) Group, as well as regulations related to corporate governance.

Competency Improvement and Expertise Suitability

To face the increasingly dynamic challenges of the coal and energy industry, the Company requires a Board of Commissioners with competencies, experience, and integrity relevant to the Company's business needs.

Informasi Perubahan Dewan Komisaris Setelah Tahun Buku 2025

Information on Changes to the Board of Commissioners After 2025 Fiscal Year

Tidak terdapat perubahan komposisi Direksi PLN BBN setelah tahun buku 2025 hingga terbitnya Buku Laporan Keuangan *Audited* Perusahaan Tahun buku 2025.

There were no changes to the composition of the PLN BBN Board of Directors after 2025 fiscal year until the publication of the Company's Audited Financial Report for the 2025 fiscal year.

Profil Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Profile

Berikut profil Dewan Komisaris PLN BBN per 31 Desember 2025 hingga terbitnya Laporan Keuangan Audited Perusahaan tahun buku 2025:

The following is the profile of the PLN BBN Board of Commissioners as of December 31, 2025:



Ratnasari Sjamsuddin

Plt. Komisaris Utama
Act. President Commissioner

Kewarganegaraan Citizen	**Indonesia**
Usia/Age	**56 tahun per 31 Desember 2025** 56 years as of December 31, 2025

Tempat dan Tanggal Lahir/ Place and Date of Birth	Ujung Pandang, 29 November 1969	Ujung Pandang, November 29, 1969
Domisili/Domicile	Jakarta Selatan, Indonesia	South Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	Magister Teknik Universitas Indonesia pada (2008) Sarjana Teknik Listrik dari Universitas Hasanuddin (1993)	Master of Engineering, University of Indonesia (2008) Bachelor of Electrical Engineering, Hasanuddin University (1993)
Sertifikasi/Certification	*Qualified Chief Risk Officer* (QCRO)	Qualified Chief Risk Officer (QCRO)
Riwayat Jabatan Position History	Memulai karir di PT PLN (Persero) sejak tahun 1994, serta pernah menduduki beberapa posisi penting antara lain Manager Senior Enjiniring Transmisi dan Distribusi PT PLN (Persero) (2010 – 2013), Manager Senior Enjiniring dan Perencanaan Pengadaan Transmisi dan Distribusi PT PLN (Persero) (2013 – 2015), General Manager Unit Induk Pembangunan IV PT PLN (Persero) (2015 – 2016), General Manager Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa PT PLN (Persero) (2016 – 2017), Kepala Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) (2017 – 2018), General Manager Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) (2018 – 2022), Executive Vice President Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua, Dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) (2022 – 2025).	Started career at PT PLN (Persero) since 1994, and has held several important positions including Senior Manager of Transmission and Distribution Engineering at PT PLN (Persero) (2010 - 2013), Senior Manager of Transmission and Distribution Engineering and Procurement Planning at PT PLN (Persero) (2013 - 2015), General Manager of Main Development Unit IV at PT PLN (Persero) (2015 - 2016), General Manager of Main Development Unit of Sumatera Java Interconnection at PT PLN (Persero) (2016 - 2017), Head of Regional Construction Division of West Java at PT PLN (Persero) (2017 - 2018), General Manager of Main Development Unit of West Java at PT PLN (Persero) (2018 - 2022), Executive Vice President of Construction for Java, Madura, Bali, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara at PT PLN (Persero) (2022 - 2025).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Batubara Niaga tanggal 31 Desember 2025.	Shareholders Decision Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) of PT PLN Batubara Niaga dated December 31, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	Periode pertama, dengan masa jabatan 2025-2030	1st, with a term of office from December 31, 2025 to December 31, 2030
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Dalam Perusahaan:** Tidak Ada **Luar Perusahaan:** Tidak Ada	**Within the Company:** None **Outside the Company:** None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan dengan Pemegang Saham Pengendali dan Non-pengendali.	Has no affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with Controlling and Non-Controlling Shareholders.
Pernyataan Independensi dan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2025/Statement of Independence and Training Undertaken in 2025	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada bab Governansi Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately, as described in the GCG Chapter, sub-chapter of the Board of Commissioners in this Annual Report.



Tri Joko Supriyatno

Plt. Komisaris
Act. Commissioner

Kewarganegaraan Citizen	**Indonesia**
Usia/Age	**57 tahun per 31 Desember 2025** 57 years old as of December 31, 2025

Tempat dan Tanggal Lahir/ Place and Date of Birth	Cilacap, 24 November 1968	Cilacap, November 24, 1968
Domisili/Domicile	Tangerang Selatan, Indonesia	South Tangerang, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Gadjah Mada pada (1993)	Bachelor of Mechanical Engineering from Gadjah Mada University (1993)
Sertifikasi/Certification	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Riwayat Jabatan Position History	Memulai karir di PT PLN (Persero) sejak tahun 1993 dengan menduduki beberapa posisi penting antara lain Manajer Bidang Energi Primer PT PLN (Persero) Unit Pembangkit Jawa Bali (2014 - 2015), Manager Senior Pengendalian Kontrak Batubara PT PLN (Persero) (2015 - 2018), Vice President Kontrak Batubara PT PLN (Persero) (2018 – 2020), Komite Audit Dewan Komisaris PT PLN Batubara (2016 – 2020), Direktur Operasi PT PLN Batubara (2020 – 2022), Senior Vice President Pengendalian Kontrak dan Logistik Batubara PT PLN Energi Primer Indonesia (2023 – 2024).	Started his career at PT PLN (Persero) since 1993 by holding several important positions including Manager of Primary Energy at PT PLN (Persero) Java Bali Generating Unit (2014 - 2015), Senior Manager of Coal Contract Control at PT PLN (Persero) (2015 - 2018), Vice President of Coal Contract at PT PLN (Persero) (2018 - 2020), Audit Committee of the Board of Commissioners at PT PLN Batubara (2016 - 2020), Director of Operations at PT PLN Batubara (2020 - 2022), Senior Vice President of Coal Contract Control and Logistics at PT PLN Energi Primer Indonesia (2023 - 2024).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Batubara Niaga tanggal 31 Desember 2025.	Shareholders Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) of PT PLN Batubara Niaga dated December 31, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	• Ke-1 (Plt. Komisaris Utama), dengan masa jabatan 1 Oktober 2024 - 30 Desember 2025. • Ke-1 (Plt. Komisaris), dengan masa jabatan 31 Desember 2025- 31 Desember 2030.	• 1st (Act. President Commissioner), with a term of office from October 1, 2024 to December 30, 2025. • 1st (Act. Commissioner), with a term of office from December 31, 2025 to December 31, 2030.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Dalam Perusahaan:** Ketua Komite Audit **Luar Perusahaan:** Tidak Ada	**Within the Company:** Chairman of the Audit Committee **Outside the Company:** None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi. Namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham dikarenakan memiliki jabatan di PT PLN Energi Primer Indonesia.	Has no affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with Controlling and Non-Controlling Shareholders.
Pernyataan Independensi dan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2025/Statement of Independence and Training Undertaken in 2025	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada bab Governansi Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately, as described in the GCG Chapter, sub-chapter of the Board of Commissioners in this Annual Report.



Noor Adi Baroto

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan Citizen	**Indonesia**
Usia/Age	**53 tahun per 31 Desember 2025** 53 years as of December 31, 2025

Tempat dan Tanggal Lahir/ Place and Date of Birth	Yogyakarta, 27 Januari 1972	Yogyakarta, January 27, 1972
Domisili/Domicile	Depok, Indonesia	Depok, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	Sarjana Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran (1997)	Bachelor of Chemical Engineering, Pembangunan Nasional Veteran University (1997)
Sertifikasi/Certification	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Riwayat Jabatan Position History	PT Polychem Indonesia Tbk sejak tahun 1998, serta pernah menduduki beberapa posisi penting antara lain Engineer (2003-2006) PT Polychem Indonesia Tbk, Direktur Operasional PT Suryalampung Tanggamus (2006-2014), Tenaga Ahli Anggota DPR RI (2015-2024).	PT Polychem Indonesia Tbk since 1998, and has held several important positions including Engineer at PT Polychem Indonesia Tbk (2003-2006), Operational Director at PT Suryalampung Tanggamus (2006-2014), Expert Staff Member of the Indonesian House of Representatives (2015-2024).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Batubara Niaga tanggal 26 November 2024.	Shareholders Decision Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) of PT PLN Batubara Niaga dated November 26, 2024.
Periode Jabatan Term of Office	Periode pertama dengan masa jabatan 2024-2028.	1st, with a term of office from December 1, 2024 – November 30, 2028.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Dalam Perusahaan:** Ketua Komite Nominasi dan Manajemen Risiko **Luar Perusahaan:** Tidak Ada	**Within the Company:** Chairman of the Nomination and Risk Management Committee **Outside the Company:** None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan dengan Pemegang Saham Pengendali dan Non Pengendali.	Has no affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with Controlling and Non-Controlling Shareholders.
Pernyataan Independensi dan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2025/Statement of Independence and Training Undertaken in 2025	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada bab Governansi Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately, as described in the GCG Chapter, sub-chapter of the Board of Commissioners in this Annual Report.

Informasi Perubahan Direksi Pada Tahun Buku dan Setelah Buku 2025

Information on Changes to the Board of Directors During and After the 2025 Fiscal Year

Informasi Perubahan Direksi Pada Tahun Buku 2025

Information on Changes to the Board of Directors for Fiscal Year 2025

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Nomor 35 tanggal 22 Januari 2025, Pemegang Saham mengangkat dan menetapkan Sdr. Rahmat Dian Amir sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Niaga dan Operasi dengan tugas, kewajiban, kewenangan dan hak serta tanggung jawab yang sama sampai dengan ditetapkannya Anggota Direksi Perseroan yang definitif, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, Pemegang Saham menegaskan kembali susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditetapkannya Keputusan ini, menjadi sebagai berikut:

a. Rolly sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama.
b. Joni Arifin sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan Human Capital.
c. Rahmat Dian Amir sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Niaga dan Operasi.

Based on the Circular Shareholders' Resolution as stated in Deed Number 35 dated January 22, 2025, the Shareholders appointed and designated Mr. Rahmat Dian Amir as the Acting Director of Commerce and Operations with the same duties, obligations, authority, rights, and responsibilities until the definitive Members of the Company's Board of Directors are appointed, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. To avoid any uncertainty, the Shareholders reaffirm the composition of the Company's Board of Directors since the enactment of this Resolution, as follows:

a. Rolly as the Acting President Director.
b. Joni Arifin as the Acting Director of Finance and Human Capital.
c. Rahmat Dian Amir as the Acting Director of Commerce and Operations.

Informasi Perubahan Direksi Setelah Tahun Buku 2025

Information on Changes to the Board of Directors After the 2025 Fiscal Year

Tidak terdapat perubahan komposisi Direksi PLN BBN setelah tahun buku 2025 hingga terbitnya Buku Laporan Keuangan *Audited* Perusahaan Tahun buku 2025.

There were no changes to the composition of PLN BBN Board of Directors after the 2025 fiscal year through the publication of the Company's Audited Financial Statements for the 2025 fiscal year.

Profil Direksi

The Board of Directors Profile

Berikut profil Direksi PLN BBN per 31 Desember 2025 hingga terbitnya Laporan Keuangan *Audited* Perusahaan tahun buku 2025:

The following is the profile of the PLN BBN Board of Directors as of December 31, 2025, until the publication of the Company's Audited Financial Statement for the 2025 fiscal year:



Rolly

Plt. Direktur Utama
Act. President Director

Kewarganegaraan Citizen	**Indonesia**
Usia/Age	**50 tahun per 31 Desember 2025** 50 years as of December 31, 2025

Tempat dan Tanggal Lahir/ Place and Date of Birth	Padang Panjang, 22 September 1975	Padang Panjang, September 22, 1975
Domisili/Domicile	Serang, Banten, Indonesia	Serang, Banten, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (1999)	Bachelor of Chemical Engineering from Pembangunan Nasional Veteran University (1999)
Sertifikasi/Certification	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Riwayat Jabatan Position History	Rolly pernah menduduki beberapa posisi penting sebagai Manager Pemeliharaan PT Indonesia Power UBOH PLTU Banten 1 SLA (2010 – 2012), Manager Pemeliharaan PT Indonesia Power UBOH PLTU Banten 3 Lontar (2012 – 2014), Manager Engineering PT Indonesia Power UJP Banten 3 Lontar (2014 – 2017), General Manager of PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu Operation and Maintenance Service Unit PT. Indonesia Power (2017 – 2021), Vice President Of Primary and Settlement II PT Indonesia Power (2021 – 2022), Vice President Primary Energy Planning and Control I PT PLN Indonesia Power (2023), Vice President Operation and Maintenance Planning Control III PT PLN Indonesia Power (2023 – 2024), Plt. Direktur Utama PLN BBN (2024 – Sekarang).	Started his career at PT Indonesia Power Suralaya CFPP in 2002, Rolly has held several important positions as Maintenance Manager at PT Indonesia Power UBOH Banten 1 SLA CFPP (2010 – 2012), Maintenance Manager at PT Indonesia Power UBOH Banten 3 Lontar CFPP (2012 – 2014), Engineering Manager at PT Indonesia Power UJP Banten 3 Lontar (2014 – 2017), General Manager of West Java 2 CFPP, Pelabuhan Ratu Operation and Maintenance Service Unit at PT. Indonesia Power (2017 – 2021), Vice President of Primary and Settlement II at PT Indonesia Power (2021 – 2022), Vice President of Primary Energy Planning and Control I at PT PLN Indonesia Power (2022 – 2023), Vice President of Operation and Maintenance Planning Control III at PT PLN Indonesia Power (2023 – 2024), Act. President Director at PLN BBN (2024 – Present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Batubara Niaga tanggal 03 Oktober 2024.	Shareholders Decision Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) of PT PLN Batubara Niaga dated October 3, 2024.
Periode Jabatan Term of Office	Periode pertama dengan masa jabatan 2024-2029.	First term with term of office 2024-2029.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Dalam Perusahaan:** Tidak Ada **Luar Perusahaan:** Tidak Ada	**Within the Company:** None **Outside the Company:** None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali maupun Non Pengendal.	Has no affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with Controlling and Non-Controlling Shareholders.
Pernyataan Independensi dan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2025/Statement of Independence and Training Undertaken in 2025	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada bab Governansi Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately, as described in the GCG Chapter, sub-chapter of the Board of Commissioners in this Annual Report.



Joni Arifin

Plt. Direktur Keuangan dan Human Capital
Act. Director of Finance and Human Capital

Kewarganegaraan Citizen	**Indonesia**
Usia/Age	**38 tahun per 31 Desember 2025** 38 years as of December 31, 2025

Tempat dan Tanggal Lahir/ Place and Date of Birth	Kendal, 27 Maret 1987	Kendal, March 27, 1987
Domisili/Domicile	Jakarta Timur, Indonesia	East Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	Sarjana Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (2009)	Bachelor of Economics, Jenderal Soedirman University (2009)
Sertifikasi/Certification	• *Chartered Accountant* (CA) • *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	• Chartered Accountant (CA) • Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Riwayat Jabatan Position History	Mengawali karir di PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) sejak tahun 2010 serta pernah menduduki beberapa posisi penting di PJB antara lain Supervisor Keuangan UP Muara Tawar (2014 - 2017), Manajer Administrasi UBJOM PLTU Tenayan (2017-2019), Manajer Pengembangan Akuntansi PJB Kantor Pusat (2019 - 2022), Direktur Keuangan dan SDM PT Mitra Karya Prima (2022-2024), VP Penagihan dan Pendapatan PT PLN EPI (2024), Plt. Direktur Keuangan dan HC PLN BBN (2024-Sekarang). Selain itu juga aktif dalam Kepengurusan YK PT PJB Sebagai Bendahara (2019-2022).	Started his career at PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) since 2010 and has held several important positions at PJB including Financial Supervisor of Muara Tawar GU (2014 - 2017), Administration Manager at UBJOM Tenayan CFPP (2017-2019), Accounting Development Manager at PJB Head Office (2019 - 2022), Director of Finance and HR at PT Mitra Karya Prima (2022-2024), VP of Billing and Revenue at PT PLN EPI (2024), Act. Director of Finance and HC at PLN BBN (2024-Present). In addition, he is also active in the YK Management of PT PJB as Treasurer (2019-2022).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Batubara Niaga tanggal 03 Oktober 2024.	Shareholder Decision Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) of PT PLN Batubara Niaga dated October 3, 2024.
Periode Jabatan Term of Office	Periode pertama dengan masa jabatan 2024-2028.	First term with term of office 2024-2028.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Dalam Perusahaan:** Tidak Ada **Luar Perusahaan:** Tidak Ada	**Within the Company:** None **Outside the Company:** None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Non Pengendali.	Has no affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with Controlling and Non-Controlling Shareholders.
Pernyataan Independensi dan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2025/Statement of Independence and Training Undertaken in 2025	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada bab Governansi Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately, as described in the GCG Chapter, sub-chapter of the Board of Commissioners in this Annual Report.



Rahmat Dian Amir

Plt. Direktur Niaga dan Operasi
Act. Director of Commerce and Operations

Kewarganegaraan Citizen	**Indonesia**
Usia/Age	**45 tahun per 31 Desember 2025** 45 years as of December 31, 2025

Tempat dan Tanggal Lahir/ Place and Date of Birth	Padang, 24 Maret 1980	Padang, March 24, 1980
Domisili/Domicile	Jakarta Timur, Indonesia	East Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	• S1 Mesin Universitas Andalas • S2 Bidang Manajemen Stratejik Universitas Riau	• Bachelor's degree in Mechanical Engineering, Andalas University • Master's degree in Strategic Management, Riau University
Sertifikasi/Certification	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Riwayat Jabatan Position History	Mengawali karir di PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara pada tahun 2005 sebagai Engineer dan juga memiliki banyak pengalaman dalam mengelola berbagai pembangkit listrik antara lain PLTGU Belawan, PLTMG Teluk Lembu & PLTG Duri, PLTA Sipan Sihaporas, PLTA Renun & PLTA Kotopanjang, PLTU Naganraya & PLTU Labuhan Angin dan juga dipercaya 3 kali menjadi pimpinan unit pembangkit antara lain Pembangkitan Pandan, Pembangkitan Labuhan Angin dan Pembangkitan Pekanbaru. Selain itu beliau juga pernah menduduki beberapa posisi penting dalam pengelolaan Energi Primer PLN (Persero) antara lain VP Pengendalian Operasi dan Kualitas PT PLN Batubara (2021 - 2022), Assistant Senior Vice President Pelayanan Pembangkit Batubara PT PLN EPI (2022 - 2023), Assistant Senior Vice President Pelaksanaan Pengadaan Batubara PT PLN EPI (2023 - 2024), Plt. Direktur Niaga dan Operasi (2025 - Sekarang).	Started his career at PT PLN (Persero) Generation and Distribution of North Sumatera in 2005 as an Engineer and also has a lot of experience in managing various power plants including Belawan CCPP, Teluk Lembu GEPP & Duri GTPP, Sipan Sihaporas HPP, Renun & Kotopanjang HPP, Naganraya & Labuhan Angin CFPP and also trusted 3 times to be the leader of the generating unit including the Pandan Power Plant, Labuhan Angin Power Plant and Pekanbaru Power Plant. Also, he held several important positions in the management of PLN (Persero) Primary Energy including VP of Operations and Quality Control at PT PLN Batubara (2021-2022), Assistant Senior Vice President of Coal Generation Services at PT PLN EPI (2022 - 2023), Assistant Senior Vice President of Coal Procurement Implementation at PT PLN EPI (2023 - 2024), Act. Director of Commerce and Operations (2025 - Present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Batubara Niaga tanggal 22 Januari 2025.	Shareholders Decision Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) of PT PLN Batubara Niaga dated January 22, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	Periode pertama dengan masa jabatan 2025-2029.	The first term of office is 2025-2029.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**Dalam Perusahaan:** Tidak Ada **Luar Perusahaan:** Tidak Ada	**Within the Company:** None **Outside the Company:** None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Non Pengendali.	Has no affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with Controlling and Non-Controlling Shareholders.
Pernyataan Independensi dan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2025/Statement of Independence and Training Undertaken in 2025	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada bab Governansi Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately, as described in the GCG Chapter, sub-chapter of the Board of Commissioners in this Annual Report.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accountants and Public Accounting Firms

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan No. Izin: KEP-315/KM.1/2024	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan No. Izin: KEP-315/KM.1/2024
Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Firman Sababalat, CPA No. Izin: KEP-315/KM.1/2024	Firman Sababalat, CPA No. Izin: KEP-315/KM.1/2024
Alamat/Address	WTC 3, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920-Indonesia	WTC 3, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920-Indonesia
Periode Penugasan KAP Assignment Period	Periode ke - 3 hingga tahun buku 2025	3rd Period until 2025 fiscal year
Periode Penugasan AP PA Assignment Period	Periode ke - 5 hingga tahun buku 2025	5th Period until 2025 fiscal year
Jasa Audit dan Biaya jasa (*fee*) audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku 2025 Audit Services and Audit Fees for Each Engagement Provided During 2025 Fiscal Year	Biaya Audit ditanggung dan dibayarkan oleh Pemegang Saham yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI).	Audit costs are borne and paid by the shareholder, PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI).
Jasa Non Audit dan Biaya jasa (*fee*) Non-audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku 2025 Non-Audit Services and Non-Audit Fees for Each Engagement Provided During 2025 Fiscal Year	Pada tahun buku 2025, Tidak ada jasa non audit sehingga tidak terdapat informasi pembayaran biaya non-audit kepada KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan No. Izin: KEP-315/KM.1/2024.	In the 2025 fiscal year, there were no non-audit services so there is no information on payment of non-audit fees to KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Permit No.: KEP-315/KM.1/2024.

Penjelasan lebih lengkap terkait Kantor Akuntan Publik Perusahaan tahun 2025 diuraikan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Akuntan Publik pada Laporan Tahunan ini.

A more complete explanation regarding the Company's Public Accounting Firm in 2025 is available in the Corporate Governance Chapter on Public Accounting in this Annual Report.

Demografi Karyawan
Employee Demographics



Komposisi SDM PLNBBN berasal dari Pegawai Tugas Karya dan Tenaga Alih Daya, dimana Pegawai Tugas Karya berasal dari PLN Group, yaitu PT PLN (Persero), PT PLN Energi Primer Indonesia, PT PLN Nusantara Power dan PT PLN Indonesia Power

PLN BBN has Human Resources consisting of Secondee and Outsourced Employees, with the Secondees coming from the PLN Group, namely PT PLN (Persero), PT PLN Energi Primer Indonesia, PT PLN Nusantara Power, and PT PLN Indonesia Power.

Melalui skema tugas karya dan tenaga alih daya, perusahaan memperoleh SDM yang memiliki kapabilitas teknis dan manajerial yang relevan tanpa harus melakukan proses rekrutmen langsung, sehingga mendukung efektivitas operasional serta percepatan pencapaian tujuan Perusahaan. Perusahaan juga memastikan bahwa seluruh tenaga tugas karya bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Through the work assignment and and outsourcing schemes, the Company obtains human resources with relevant technical and managerial capabilities without the need for direct recruitment, thereby supporting operational effectiveness and accelerating the achievement of the Company's goals. The Company also ensures that all work assignments run professionally, comply with applicable regulations, and uphold the principles of Good Corporate Governance.

Hingga akhir tahun 2025, jumlah karyawan PLN BBN mengalami peningkatan yang semula tahun tahun 2024 adalah 37 orang karyawan menjadi 48 orang karyawan. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Perusahaan, baik secara kuantitas maupun kualitas kompetensinya.

By the end of 2025, the number of PLN BBN employees increased from 37 in 2024 to 48. This increase was aligned with the Company's organizational needs, both in terms of quantity and the quality of their competencies.

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan komposisi karyawan selama tiga tahun terakhir berdasarkan status kepegawaian, level organisasi, jenjang jabatan, jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

The tables below show the employee composition over the past three years based on employment status, organizational level, job title, gender, age, and education level.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition by Employment Status

Status Kepegawaian/Employment Status		2025	2024	2023
Tugas Karya	Secondees	15	10	5
Tenaga Alih Daya	Outsorced Labor	33	27	24
Jumlah	**Total**	**48**	**37**	**29**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employee Composition by Organizational Level

Level Organisasi/Organizational Level		2025	2024	2023
Direksi	Directors	3	2	2
Manajer	Managers	7	6	2
Assistant Manager	Assistant Managers	4	2	0
Senior Officer	Senior Officers	1	0	0
Staf	Staff	33	27	25
Jumlah	**Total**	**48**	**37**	**29**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Gender		2025	2024	2023
Laki-laki	Male	32	24	21
Perempuan	Female	16	13	8
Jumlah	**Total**	**48**	**37**	**29**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Employee Composition by Age

Usia/Age		2025	2024	2023
>56 tahun	>56 years old	0	0	0
41 – 56 Tahun	41 – 56 years old	5	5	3
31 – 40 Tahun	31 – 40 years old	10	5	0
20 – 30 Tahun	20 – 30 years old	33	27	26
Jumlah	**Total**	**48**	**37**	**29**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition by Eduacational Level

Tingkat Pendidikan/Educational Level		2025	2024	2023
Doktoral	Doctoral	0	0	0
Pasca Sarjana	Postgraduate	4	3	3
Sarjana	Bachelor's Degree	36	28	21
Diploma	Diploma	7	5	3
SMA (atau sederajat)	High School (or equivalent)	1	1	2
Jumlah	**Total**	**48**	**37**	**29**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja

Operasional Perusahaan dilaksanakan sepenuhnya di kantor pusat, sehingga tidak terdapat pembagian karyawan berdasarkan wilayah kerja. Seluruh karyawan terkonsentrasi di kantor pusat dalam mendukung pelaksanaan fungsi bisnis, operasional, dan administratif Perusahaan.

Employee Composition by Working Area

The Company's operations are conducted entirely at its head office, so there is no division of employees based on work area. All employees are concentrated at the head office to support the Company's business, operational, and administrative functions.

Struktur Grup dan Entitas Anak /Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/*Special Purpose Vehicle*

Group Structure and Subsidiaries/Associates/Joint Ventures/Special Purpose Vehicles

Struktur Grup Perusahaan

PT PLN Batubara Niaga (PLN BBN) merupakan entitas anak perusahaan yang berada di bawah PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan dan optimalisasi rantai pasok energi primer bagi kebutuhan pembangkitan listrik nasional.

PT PLN Energi Primer Indonesia sendiri merupakan *subholding* energi primer yang berada di bawah PT PLN (Persero). Dengan struktur tersebut, PLN BBN menjadi bagian dari ekosistem bisnis PLN *Group* yang berperan dalam kegiatan perdagangan batubara guna menjamin ketersediaan pasokan energi primer secara andal, efisien, dan berkelanjutan bagi pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN.

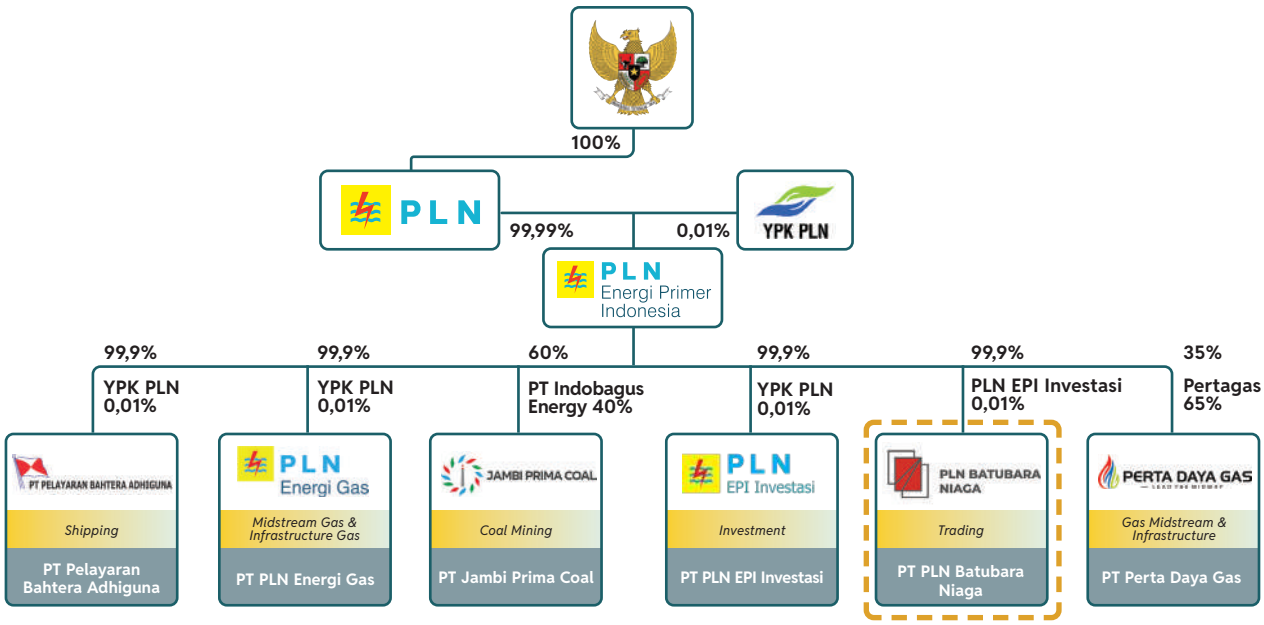
Melalui perannya sebagai entitas dalam *subholding* energi primer, PLN BBN turut mendukung strategi PT PLN (Persero) dalam memperkuat ketahanan pasokan energi primer nasional serta memastikan keberlangsungan operasional pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Corporate Group Structure

PT PLN Batubara Niaga (PLN BBN) is a subsidiary of PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), which was established to support the management and optimization of the primary energy supply chain for national electricity generation needs.

PT PLN Energi Primer Indonesia is a primary energy subholding under PT PLN (Persero). With this structure, PLN BBN is part of the PLN Group's business ecosystem, taking a role in coal trading activities to ensure a reliable, efficient, and sustainable supply of primary energy for power plants managed by PLN.

Through this role as an entity within the primary energy subholding, PLN BBN supports PT PLN (Persero)'s strategy to strengthen the resilience of the national primary energy supply and ensure the continued operation of power plants to meet the public's electricity needs.



Entitas Anak Anak/Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan/*Special Purpose Vehicle*

Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN BBN tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Entitas Pengendalian Bersama, Perusahaan Patungan atau *Joint Venture Company* (JV), maupun *Special Purpose Vehicle* (SPV) sehingga tidak ada informasi terkait alamat entitas, pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak.

Subsidiaries/Associates/Joint Ventures/Special Purpose Vehicles

As of December 31, 2025, PLN BBN has no subsidiaries, associates, jointly controlled entities, Joint Ventures (JVs), or Special Purpose Vehicles (SPVs); therefore, there is no information regarding the entities' addresses, joint control of the entities (if any), along with the percentage of share ownership, business lines, total assets, and the operational status of the subsidiaries.

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perusahaan

Company Supporting Institutions and/or Professions

Kantor Notaris | Notary Office

Nama/Name	Notaris Diharini, S.H., M.KN.
Alamat/Address	Jl Pejaten Mas VIII Blok E No.1, RT. 012/RW. 002, Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Jasa yang diberikan/Services Provided	1. Perubahan Data Perusahaan 2. Pencatatan RUPS 1. Changes to Company Data 2. GMS Registration
Periode Penugasan/Assignment Period	2025

Nama/Name	Notaris Erika A. Sofyan, S.H., M.KN.
Alamat/Address	Cluster Green View, Blok A7 No.14, Serpong Garden, kelurahan Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang 15344
Jasa yang diberikan/Services Provided	1. Perubahan Data Perusahaan 2. Pencatatan RUPS 1. Changes to Company Data 2. GMS Registration
Periode Penugasan/Assignment Period	2025

Konsultan Hukum | Legal Consultant

Nama/Name	YAR Law Firm Attorneys At Law
Alamat/Address	Menara Kuningan, 8th Floor Unit 8D Jl. H. R. Rasuna Said X-7 Kav. 5 Jakarta 12940
Jasa yang diberikan/Services Provided	1. Pembuatan Kajian Hukum terkait Batasan Kewenangan 2. Pembuatan Whitebook Meulaboh 1. Preparation of Legal Study Regarding the Limitations of Authority 2. Preparation of the Meulaboh White Paper
Periode Penugasan/Assignment Period	2025

Nama/Name	Nah'r Murdono Law Office
Alamat/Address	Prosperity Tower Lantai 20 Unit E, District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 - 53 Jakarta 12190
Jasa yang diberikan/Services Provided	1. Pembuatan Model Perjanjian 3 Pihak dan Model Perjanjian 4 Pihak 2. Kajian Konsultasi Hukum 1. Drafting 3 Party Agreement Model and 4 Party Agreement Model 2. Legal Consultation Study
Periode Penugasan/Assignment Period	2025

Konsultan Pajak | Tax Consultant

Nama/Name	SF Consulting
Alamat/Address	Menara Karya 21st Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta Selatan
Jasa yang diberikan/Services Provided	Mendampingi dalam proses pemeriksaan pajak tahun 2023 Assisting in the 2023 tax audit process
Periode Penugasan/Assignment Period	2025

Nama/Name	PT Untung Sejahtera Konsultama
Alamat/Address	Jl. Raya Pasar Minggu No. 19D, Kalibata, Pancoran-Jakarta Selatan 12740
Jasa yang diberikan/Services Provided	Melakukan pemeriksaan atas Restitusi Pajak Tahun 2024 Assisting in the 2024 tax audit process
Periode Penugasan/Assignment Period	2025

Nama/Name	Mansur Arif Consulting
Alamat/Address	Pondok Aren Indah Blok B2/10, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
Jasa yang diberikan/Services Provided	Mendampingi dalam proses pemeriksaan pajak tahun 2022 Assisting in the 2022 tax audit process
Periode Penugasan/Assignment Period	2025

Nama/Name	Pratama Indomitra Konsultan
Alamat/Address	Antam Office Park Tower B Lantai 8, Jl. TB Simatupang No.1, Jakarta Selatan 12530
Jasa yang diberikan/Services Provided	Mendampingi dalam proses pemeriksaan pajak Assisting in the tax audit process
Periode Penugasan/Assignment Period	2025

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of the Issuance and/or Listing of Shares

Hingga akhir 31 Desember 2025 PLN BBN tidak menerbitkan saham kepada publik. Dengan demikian pada Laporan Tahunan ini, Perusahaan tidak menyajikan informasi mengenai kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

As of December 31, 2025, PLN BBN has not issued shares to the public. Therefore, in this Annual Report, the Company does not present information regarding the timeline of listing, types of corporate actions, changes in the number of shares, or the name of the stock exchange.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi/Efek Lainnya

Chronology of the Issuance and/or Listing of Bonds and/or Other Securities

Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN BBN tidak menerbitkan efek dalam bentuk apa pun yang diperdagangkan di bursa mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.

As of December 31, 2025, PLN BBN has not issued any securities of any kind that are traded on any exchange; therefore, there is no information regarding the timeline of the issuance and/or listing of other securities from the start of the issuance through the end of the fiscal year.

Informasi Pada Situs *Website* Perusahaan

Information on the Company Website

PT PLN Batubara Niaga menyediakan berbagai informasi dan data terkait Perusahaan yang dapat diakses oleh publik melalui situs web resmi Perusahaan yang beralamat https://plnbatubaraniaga.id/id. Situs web tersebut merupakan salah satu media komunikasi dan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan serta masyarakat luas.

PT PLN Batubara Niaga provides various information and data related to the Company, accessible to the public through the official website at https://plnbatubaraniaga.id/id. This website serves as facility of communication and information transparency for the stakeholders and the wider public.

Situs web resmi PLN BBN menyajikan informasi dalam dua Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pada halaman utama, tersedia bar navigasi untuk memudahkan

PLN BBN provides official website with information in two languages: Indonesian and English. The main page features a navigation bar to facilitate visitors' access to various

pengunjung mengakses halaman berbagai informasi antara lain sebagai berikut:

information pages, including the following:



TENTANG KAMI
ABOUT US

TENTANG KAMI

Pada menu ini terdapat informasi terkait:

- Tentang Perusahaan
- Produk
- Visi, Misi & Moto
- Tata Nilai AKHLAK
- Inisiatif Strategis
- Lingkungan Bisnis
- Sasaran Mutu
- Komisaris
- Direksi

ABOUT US

This menu contains information related to the following:

- About the Company
- Products
- Vision, Mission & Motto
- Virtues
- Strategic Initiatives
- Business Environment
- Quality Objectives
- Board of Commissioner
- Board of Directors



AKTIVITAS BISNIS
BUSINES ACTIVITY

AKTIVITAS BISNIS

Pada menu ini terdapat informasi terkait:

- Mengolah Batubara Custom Sesuai Permintaan Pelanggan dan Mengelola *Coal Blending Facility* (CBF) dan *Intermediate Stockpile/Interconnecting Conveyor* (ISP-IC)
- Penjualan Batubara ke PLTU PLN & IPP
- Penjualan Batubara ke Industri Non Kelistrikan

BUSINES ACTIVITY

This menu contains information related to the following:

- Processing Custom Coal According to Customer Requests and Managing the Coal Blending Facility (CBF) and Intermediate Stockpile/ Interconnecting Conveyor (ISP-IC)
- Coal Sales to PLN Steam Power Plants and IPP
- Coal Sales to Non-Electricity Industries



TATA KELOLA
GOVERNANCE

TATA KELOLA

Pada menu ini terdapat informasi terkait:

- Pedoman Perilaku
- Pedoman Gratifikasi
- Manajemen Risiko
- Kelompok Usaha PLN BBN
- Kebijakan Pelatihan SDM
- WBS
- *Board Manual*
- Anggaran Dasar Perusahaan

GOVERNANCE

This menu contains information related to the following:

- Code of Conducts
- Gratification Guidelines
- Risk Management
- PLN BBN Business Group
- HR Training Policy
- WBS
- Board Manual
- Company's Articles of Association

Kebijakan website Perusahaan diatur dalam peraturan direksi No. 022.P/DIRPLNBBN/2024 tentang Pengelolaan Situs Web PT PLN Batubara Niaga adapun yang diatur dalam kebijakan tersebut adalah penetapan situs web resmi yang menandakan identitas perusahaan PT PLN Batubara Niaga, informasi yang termuat dalam situs web perusahaan, dan pengendalian yang dilakukan terhadap situs web perusahaan.

The Company has website policy regulated in the Board of Directors regulation No. 022.P/DIRPLNBBN/2024 concerning the Management of the PT PLN Batubara Niaga Website. What is regulated in this policy is the determination of an official website that indicates the identity of the PT PLN Batubara Niaga company, the information contained in the company website, and the control carried out on the company website.


PLN BATUBARA NIAGA
PLN BATUBARA NIAGA
PLN BATUBARA NIAGA
PLN BATUBARA NIAGA

PLN BATUBARA NIAGA

3

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview



Sumber Daya Manusia
Human Resources

Profil dan Komposisi SDM
Human Resources Profile and Composition

Hingga 31 Desember 2025, jumlah pekerja PLN BBN sebanyak 48 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2024 sebanyak 37 orang. Hal tersebut terutama disebabkan oleh terpenuhinya 100% Formasi Tenaga Kerja (FTK) Pegawai Struktural per 01 Desember 2025.

Informasi lebih lanjut mengenai komposisi pekerja telah disampaikan pada bagian Profil Perusahaan.

As of December 31, 2025, PLN BBN employs 48 persons, representing an increase from the 37 employees in 2024. This increase is primarily due to the 100% fulfillment of the Structural Employee Workforce Formation (FTK) as of December 1, 2025.

Further information regarding the employees composition is available in the Company Profile section.



Tenaga Alih Daya
Outsourcing

PLN BBN melaksanakan pengelolaan Tenaga Alih Daya sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PLN *Group*. Pengelolaan Alih Daya di Lingkungan PLN BBN bekerja sama dengan beberapa penyedia tenaga alih daya, antara lain PT Energi Duta Utama, PT Haleyora Powerindo dan PT Mitra Karya Prima. Hingga akhir tahun 2025 jumlah tenaga alih daya yang dikelola PLN BBN sebanyak 33 orang. pengelolaan tenaga alih daya dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

PLN BBN manages outsourced workers in accordance with applicable regulations within the PLN Group. Outsourcing Management within PLN BBN in collaboration with several outsourcing providers, including PT Energi Duta Utama, PT Haleyora Powerindo, and PT Mitra Karya Prima. As of the end of 2025, PLN BBN managed 33 outsourced workers. The management of outsourced workers is carried out with due regard to the principles of effectiveness, efficiency, and compliance with applicable labor policies and regulations.



Kebijakan Pengelolaan SDM
HR Management Policy

Kebijakan terkait pengelolaan SDM di PLN BBN antara lain:

- Peraturan Direksi No.12.SK/XII/DIRPLNBBN/2020 tentang Budaya Perusahaan
- Peraturan Direksi No. 012.P/DIRPLNBBN/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di PT PLN Batubara Niaga
- Peraturan Direksi No. 014.P/DIRPLNBBN/2023 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan
- Peraturan Direksi No. 035.P/DIRPLNBBN/2025 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pegawai PT PLN Batubara Niaga
- Keputusan Direksi No. 008.K/DIRPLNBBN/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi
- Keputusan Direksi No. 021.K/DIRPLNBBN/2024 tentang Pedoman Sistem Manajemen Penghargaan, Pengembangan, Manajemen Talenta dan Manajemen Kinerja, dan Pengelolaan Disiplin Pegawai PT PLN Batubara Niaga
- Keputusan Direksi No. 023.K/DIRPLNBBN/2024 tentang Fasilitas Direksi dan Pegawai

HR management policies at PLN BBN include the following:

- Board of Directors Regulation No. 12.SK/XII/DIRPLN BBN/2020 concerning Corporate Culture
- Board of Directors Regulation No. 012.P/DIRPLN BBN/2023 concerning Organization and Work Procedures at PT PLN Batubara Niaga
- Board of Directors Regulation No. 014.P/DIRPLN BBN/2023 concerning Occupational Safety, Health, and Environmental Policies
- Board of Directors Regulation No. 035.P/DIRPLN BBN/2025 concerning Guidelines for Official Travel for PT PLN Batubara Niaga Employees
- Board of Directors Decree No. 008.K/DIRPLN BBN/2023 concerning Determination of Organizational Structure
- Board of Directors Decree No. 021.K/DIRPLN BBN/2024 concerning Guidelines for the Reward Management System, Development, Talent Management, Performance Management, and Discipline Management of PT PLN Batubara Niaga Employees
- Board of Directors Decree No. 023.K/DIRPLN BBN/2024 concerning Facilities for Directors and Employees

Pengembangan SDM dan Kompetensi Pegawai
HR Development and Employee Competence

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui program sertifikasi di dalam negeri maupun luar negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pegawai yang bertujuan agar pegawai siap menghadapi tantangan industri energi yang terus berkembang. Perusahaan telah melaksanakan sertifikasi maupun Diklat kepada Pegawai berdasarkan dahan kompetensi pegawai. Hingga akhir tahun 2025 realisasi sertifikasi dan diklat yang telah dilaksanakan berjumlah 6 diklat sertifikasi atau sebesar 100% dari target yang direncanakan. Dengan realisasi biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp623 juta atau 391% dari anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp159 juta.

The Company is committed to enhancing employee competencies through certification programs both domestically and abroad. This program aims to improve employees' technical and managerial capacity, ensuring they are prepared to face the challenges of the ever-evolving energy industry. The Company has organized certifications and training for employees based on their competency clusters. By the end of 2025, the realized certifications and training amounted to 6 training/certification sessions, or 100% of the planned target. The actual costs incurred were Rp623 million, or 391% of the planned budget of Rp159 million.

Tabel target dan realisasi diklat dan sertifikasi tahun 2025
Table of Training and Certification Targets and Realizations for 2025

Judul Title		Jumlah Target Total Target	Realisasi Realization	Jumlah Peserta Total Participant
Pelatihan	**Training**			
• Pengadaan Barang/Jasa APLN sesuai Perdir 0018/2023	• Procurement of Goods/Services by APLN according to the Board of Directors Regulation No. 0018/2023	3	3	5
• Human Capital Business Partner Academy	• Human Capital Business Partner Academy	1	1	1
• Workshop Nasional: Kiat Membangun Pola Hubungan Kerja Melalui Kesepakatan PP Dan PKB Maupun Sistem Pengupahan Yang Adil, Serta Pengelolaan Manajemen *Outsourcing* Guna Menghindari Sanksi Hukum	• National Workshop: Tips for Building a Work Relationship Pattern Through PP and CLA Agreements, a Fair Wage System, and Outsourcing Management to Avoid Legal Sanctions	1	1	1
Sertifikasi	**Certification**			
• QRGP *(Qualified Risk Governance Professional)*	• QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	1	1	8
• QRMP *(Qualified Risk Management Professional)*	• QRMP (Qualified Risk Management Professional)	1	1	1
• Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa BUMN	• SOE Goods/Services Procurement Competency Test	3	3	3

Sistem Penghargaan dan Manajemen Talenta Pegawai
Employee Reward System and Talent Management

Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN BBN belum ada Peraturan Direksi yang mengatur langsung sistem penghargaan dan manajemen talenta karena belum ada pegawai organik dan hanya diisi oleh pegawai tugas karya dan TAD. Di tahun 2025 proses penyusunan Peraturan Direksi

As of December 31, 2025, PLN BBN had no Board of Directors Regulation directly governing the reward system and talent management since there were no organic employees; the Company was only staffed by seconded employees and TAD. In 2025, the process of drafting this Board Regulation

tersebut sudah sampai penyusunan draft sebagai stimulus untuk mengusulkan rekrutmen organik ke PLN *Holding*.

reached the draft stage as a stimulus to propose organic recruitment to PLN Holding.

Human Capital Readiness (HCR) dan *Organizational Capability Readiness* (OCR)

Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capability Readiness (OCR)

Human Capital Readiness (HCR) merupakan indikator kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam mendukung implementasi strategi perusahaan. Pada tahun 2025, PLN BBN berhasil mencapai target HCR dengan 100% pegawai telah mengikuti diklat atau sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kompetensi SDM guna memastikan efektivitas operasional dan pencapaian target bisnis secara optimal.

Sedangkan *Organizational Capability Readiness* (OCR) merupakan indikator yang menggambarkan kesiapan organisasi dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan faktor-faktor yang mendorong perbaikan serta pembelajaran berkelanjutan untuk mendukung agenda perubahan melalui implementasi strategi perusahaan. Sesuai dengan petunjuk teknis *Key Performance Indicator* (KPI) HCR OCR Anak Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia, OCR diukur berdasarkan 4 aspek utama, yaitu:

- OCR *Culture*
- OCR *Leadership*
- OCR *Alignment*
- OCR *Business Ecosystem*

Pada tahun 2025, PLN BBN berhasil mencapai 100% pencapaian OCR, yang ditunjukkan melalui implementasi sistem manajemen kinerja, pelaksanaan program pengembangan talent, serta survei *engagement* pegawai. Keberhasilan ini mencerminkan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan serta meningkatkan kapabilitas internal untuk mencapai target bisnis secara berkelanjutan.

Human Capital Readiness (HCR) is an indicator of the readiness of HR capacity and capability to support strategy implementation of the Company. In 2025, PLN BBN successfully achieved its HCR target, with 100% of employees having attended relevant training or certification aligned with company needs. This achievement reflects the Company's commitment to improving HR competencies to ensure operational effectiveness and optimal achievement of business targets.

Meanwhile, Organizational Capability Readiness (OCR) is an indicator describing the organization readiness to integrate and align factors that drive continuous improvement and learning to support the change agenda through strategy implementation of the Company. In accordance with the technical guidelines for the HCR OCR Key Performance Indicator (KPI) of PT PLN Energi Primer Indonesia's subsidiaries, OCR is measured based on four main aspects, namely:

- OCR Culture
- OCR Leadership
- OCR Alignment
- OCR Business Ecosystem

In 2025, PLN BBN achieved 100% of its OCR target, as demonstrated through the implementation of performance management system, execution of talent development programs, and employee engagement surveys. This success reflects the organization readiness to face change and enhance internal capabilities to achieve business targets sustainably.

Hubungan Industrial

Industrial Relations

Dalam rangka memperkuat tata kelola ketenagakerjaan, PLN BBN saat ini sedang dalam tahap penyusunan peraturan peraturan yang meratifikasi dari PLN *Group*. Peraturan Perusahaan PLN BBN saat ini masih dalam tahap penyusunan dan ditargetkan dapat disahkan pada tahun 2026. Meskipun tidak terdapat isu hubungan industrial, percepatan penyusunan Peraturan menjadi prioritas guna mengantisipasi potensi permasalahan industrial di masa mendatang, terutama saat pegawai organik PLN *Group* kembali setelah menyelesaikan masa tugas karya mereka.

To strengthen workforce governance, PLN BBN is currently in the process of drafting regulations that ratify those of the PLN Group. PLN BBN is currently still drafting the Company Regulation and it is targeted to be ratified in 2026. Despite there are no industrial relations issues, accelerating the drafting of the Company Regulation is a priority to anticipate potential industrial problems in the future, especially when PLN Group organic employees return after completing their work assignments.



Adapun kegiatan terkait hubungan industrial yang dilaksanakan di tahun 2025 antara lain:

- Mengikuti *Workshop* Nasional: Kiat Membangun Pola Hubungan Kerja Melalui Kesepakatan PP Dan PKB Maupun Sistem Pengupahan Yang Adil, Serta Pengelolaan Manajemen *Outsourcing* Guna Menghindari Sanksi Hukum tanggal 20 - 21 Agustus 2025.
- Mengikuti *Workshop* Hubungan Industrial PLN EPI *Group* tanggal 30 Oktober 2025

The industrial relations activities planned for 2025 include:

- Participating in the National Workshop: Tips for Building Employment Relationship Patterns through Company Regulation and Collective Labor Agreement Agreements and Fair Wage Systems, as well as Outsourcing Management to Avoid Legal Sanctions, held from 20 to 21 August 2025.
- Participating in the PLN EPI Group Industrial Relations Workshop on October 30, 2025

Suvei Kepuasan Pegawai
Employee Satisfaction Survey

Setiap tahun PLN BBN melaksanakan survei kepuasan Pegawai, dengan parameter yang berbeda di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Di tahun 2024 hasil *Employee Engagement Survey* (EES) adalah 83% dibandingkan dengan tahun 2025 dengan *Employee Experience Survey*, diperoleh hasil survei 94,4% untuk indikator *Engagement*, 41,7% untuk *Experience vs Expectation*, 88,9% untuk *Inclusion*, 66,7% untuk *Intent to Stay* dan 80,6% untuk *Well-Being*.

Penjelasan untuk masing-masing parameter, *Engagement* adalah ukuran yang menunjukkan kepemilikan hubungan yang erat Pegawai dengan performa organisasi, seperti kinerja, kepuasan pelanggan, retensi, dan inovasi. *Experience vs Expectation* adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana harapan Pegawai terpenuhi di Perusahaan. *Inclusion*

PLN BBN annually conducts employee satisfaction survey, with different parameters in 2025 compared to 2024. In 2024, the Employee Engagement Survey (EES) result was 83%, compared to 2025, where the Employee Experience Survey results were 94.4% for the Engagement indicator, 41.7% for Experience vs Expectation, 88.9% for Inclusion, 66.7% for Intent to Stay, and 80.6% for Well-Being.

Explanation of each parameter: Engagement is a measure that indicates close relationship employees have with organizational performance, such as performance, customer satisfaction, retention, and innovation. Experience vs Expectation is a measure that indicates the extent to which employee expectations are met at the Company. Inclusion is

adalah ukuran seberapa positif dan luasnya ketercakupan suatu organisasi bagi Pegawai. *Intent to Stay* adalah ukuran seberapa lama Pegawai berencana untuk tetap bekerja di Perusahaan. Dan *Well-Being* adalah ukuran yang mendorong pembentukan organisasi yang mendukung kesejahteraan Pegawai secara umum.

a measure of how positive and extensive an organization's inclusiveness is for employees. Intent to Stay is a measure of how long employees plan to remain with the Company. And Well-Being is a measure that encourages the formation of an organization that supports employee welfare in general.

Pengelolaan Dana Pensiun
Pension Fund Management

Perusahaan berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan finansial pegawai setelah masa pensiun melalui sistem pengelolaan dana pensiun yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan dana pensiun tidak hanya ditentukan oleh kontribusi perusahaan dan pegawai, tetapi juga oleh strategi investasi yang efektif serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pengelolaan Dana Pensiun di PLN BBN terbagi menjadi dua yaitu melalui Dana Pensiun PLN dan DPLK, terkait kebijakannya mengacu kepada instansi asal masing-masing Pegawai Tugas Karya.

The Company is committed to ensuring the financial well-being of employees after retirement through a pension fund management system that is safe, transparent, and sustainable. The success of pension fund management is determined not only by company and employee contributions but also by effective investment strategies and compliance with applicable regulations.

Pension fund management at PLN BBN is divided into two, namely through the PLN Pension Fund and DPLK, with policies referring to the respective home institutions of each seconded employee.

Insentif Jangka Panjang Pegawai
Long-term Employee Incentives

Pengelolaan Insentif jangka panjang Pegawai di PLN BBN terkait kebijakannya mengacu kepada instansi asal masing-masing Pegawai Tugas Karya.

PLN BBN governs long-term employee incentives management by policies that refer to the respective home institutions of each seconded employee.

Penerapan Teknologi Informasi

Information Technology Implementation

Kebijakan dan Pengelola TI

IT Policy and Management

Kebijakan dan arah pengembangan TI PT PLN Batubara Niaga adalah untuk menunjang kebutuhan Perusahaan sehingga selaras dengan perkembangan industri dan kemajuan zaman. Pengembangan produk TI dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas Otomatisasi proses bisnis serta sistem informasi manajemen dapat mempercepat pekerjaan. Implementasi transformasi digital diperlukan untuk tetap kompetitif, sehingga perusahaan atau institusi perlu mengadopsi teknologi terkini secara dalam operasional mereka.

Dalam struktur organisasi Perusahaan, penanggung jawab pengelolaan Teknologi informasi ada di fungsi Manager Keuangan, IT, Risiko dan Kinerja dengan tugas dan wewenangnya secara garis besar terkait :

1. Mengelola, mengendalikan dan memastikan keselarasan strategi dan roadmap (perencanaan, implementasi, dan evaluasi) Teknologi Informasi sesuai dengan strategi Perusahaan yang meliputi *solution architecture* Teknologi Informasi, keamanan Teknologi Informasi maupun Teknologi Operasi.
2. Menyusun, mengkaji dan merekomendasikan pengelolaan risiko yang terkait dengan informasi, termasuk penilaian dan mitigasi risiko *(disaster recovery plan);*
3. Menyusun, mengkaji dan merekomendasikan solution architecture dan *business case* layanan dan infrastruktur Teknologi Informasi yang sesuai dengan strateg Perusahaan dan kebutuhan pemilik proses bisnis;
4. Mengkaji, mengembangkan dan menyempurnakan pengelolaan aplikasi Teknologi Informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung operasional usaha, pelayanan pelanggan, pelayanan Perusahaan, data management & analytics, dan *shared services;*
5. Melaksanakan, mencapai dan, meningkatkan pengoperasian layanan Teknologi Informasi (TI) yang mencakup penanganan masalah dan insiden, serta pengelolaan permintaan layanan;
6. Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Teknologi Informasi (TI) (SDM, *Software*, Data, *Hardware*) dan anggaran;
7. Menyusun, mengkaji dan merekomendasikan pengelolaan dan implementasi inisiatif *cyber security,* transformasi digital *(change management)* serta pengawasan implementasinya;

PT PLN Batubara Niaga establishes policy and direction for IT development are to support the Company's needs, aligning with industry developments and the time progress. The Company carries out IT product development in order to improve efficiency and productivity. Automation of business processes and management information systems are able to accelerate work. Digital transformation is necessary to remain competitive, so companies or institutions need to adopt the latest technologies in their operations.

In the Company's organizational structure, the person in charge of information technology management is the Manager of Finance, IT, Risk and Performance, whose duties and authorities broadly relate to:

1. Manage, control, and ensure alignment of Information Technology strategy and roadmap (planning, implementation, and evaluation) with the Company's strategy, covering Information Technology solution architecture, Information Technology security, and Operations Technology.
2. Develop, review, and recommend risk management related to information, including risk assessment and mitigation (disaster recovery plan);
3. Develop, review, and recommend solution architecture and business case for Information Technology services and infrastructure aligned with the Company's strategy and the needs of business process owners;
4. Review, develop, and enhance the management of Information Technology applications and infrastructure to support business operations, customer service, corporate services, data management & analytics, and shared services;
5. Execute, achieve, and improve the operation of Information Technology (IT) services, including problem and incident handling and service request management;
6. Plan the Information Technology (IT) Resource Requirements (Human Resources, Software, Data, Hardware) and budget;
7. Develop, review, and recommend the management and implementation of cyber security initiatives, digital transformation (change management), and oversee their implementation;

Strategi dan Program Kerja TI
IT Strategy and Work Program

Implementasi TI telah mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan dengan memastikan kelangsungan operasional dan mempercepat proses pelayanan PT PLN Batubara Niaga. Program kerja TI disusun berdasarkan target rencana jangka panjang perusahaan dimana TI dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan responsivitas Perusahaan terhadap perubahan pasar dan teknologi yang terus berkembang.

Kesinambungan program kerja, realisasi, dan target RJPP dalam ranah teknologi informasi PT PLN Batubara Niaga menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital Perusahaan.

Adapun strategi di bidang TI yang telah dilakukan Perusahaan selama tahun 2025 antara lain:
1. Pengembangan implementasi Microsoft 365
2. Implementasi Aplikasi Manajemen Surat dengan PLN *Group*
3. *Kick off development* Sistem Informasi CRM dan ERP Finance
4. *Kick off Development* Sistem Informasi monitoring operasional *Intermediate Stockpile*

IT implementation has supported the achievement of the Company's strategic objectives by ensuring operational continuity and acceleration of the services processes by PT PLN Batubara Niaga. The Company develops IT work program based on the Company's long-term plan targets, where IT can be further optimized to improve efficiency, reliability, and responsiveness to evolving market and technology changes.

Work program continuity, realization, and RJPP targets in the realm of information technology at PT PLN Batubara Niaga marks a pivotal milestone in the Company's digital transformation journey.

The Company applied the following IT strategies during 2025 include:
1. Development and implementation of Microsoft 365
2. Implementation of a Letter Management Application with PLN Group
3. Kick off development of CRM and ERP Finance Information Systems
4. Kick off development of operational monitoring information system for Intermediate Stockpile

Arah Pengembangan TI
IT Development Direction

Peranan Teknologi Informasi kini menjadi sangat penting bagi perusahaan. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. PT PLN Batubara Niaga memulai dengan penggunaan Microsoft365 sebagai fasilitas pendukung dan berkolaborasi antar pegawai berbasis *cloud*. Selain penggunaan Microsoft 365, PLN BBN pada tahun 2025 mulai menjajagi keseriusan dalam implementasi digitalisasi perusahaan. Aplikasi pendukung proses bisnis mulai diinisiasi untuk diimplementasikan di PLN BBN. Implementasi aplikasi pendukung yang dimaksud Adalah aplikasi CRM untuk operasional proses bisnis perusahaan dan ERP untuk pengelolaan keuangan di perusahaan. Selain dengan Implementasi CRM dan ERP, perusahaan bekerjasama dengan pengelola *Intermediate Stockpile* (ISP) yang berada di Meulaboh mengembangkan *system monitoring* pasokan yang terintegrasi dengan alat ukur yang digunakan.

The role of Information Technology has now become crucial for the Company. As the times demand, companies are required to continuously innovate and keep up with technological developments. PT PLN Batubara Niaga began by adopting Microsoft 365 as a supporting facility and a cloud-based collaboration tool for employees. More than using Microsoft 365, PLN BBN started to seriously explore the implementation of corporate digitization in 2025. Business process support applications were initiated for implementation at PLN BBN. These support applications include CRM application for business process operations and ERP for financial management. Apart from implementing CRM and ERP, the Company collaborated with the Intermediate Stockpile (ISP) operator in Meulaboh to develop a supply monitoring system integrated with the measuring instruments used.

Penguatan Keamanan Dunia Maya *(Cyber Security)*
Strengthening Cyber Security

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dan teknologi informasi berkembang dengan pesat, namun terdapat risiko yaitu semakin tingginya ancaman Keamanan Teknologi Informasi/*Cyber Security* yang dihadapi seperti virus/*malware, hacker, spyware*, PLN BBN melakukan kegiatan pemeliharaan dan sosialisasi keamanan IT *security* antara lain dengan melakukan implementasi pengamanan yang berlapis. Dengan salah satu pengembangan TI yang bertujuan memperkuat keamanan digital, terutama dari ancaman siber dan pencurian data.

Dalam rangka penguatan keamanan digital dari ancaman siber, PLN BBN memulai dengan implementasi *Firewall* pada jaringan kantor PLN BBN. Dengan implementasi *firewall* di lingkungan PLN BBN sebagai Langkah awal untuk memberikan pengamanan pada jaringan kantor PLN BBN.

As times evolve and information technology advances rapidly, the risks of IT security or cyber threats—such as viruses/malware, hackers, and spyware—also increase. In response, PLN BBN conducts IT security maintenance and awareness activities, including implementing layered security. This is one of the IT developments aimed at strengthening digital security, especially against cyber threats and data theft.

To strengthen digital security against cyber threats, PLN BBN began by implementing a firewall on the office network of PLN BBN. The deployment of a firewall in the PLN BBN environment serves as an initial step to protect the office network.

Risiko Utama TI dan Mitigasinya
Key IT Risks and Mitigation

PT PLN Batubara Niaga melaksanakan identifikasi terhadap adanya potensi risiko pada pengelolaan TI Perusahaan. Segala risiko yang berpotensi dapat mempengaruhi kegiatan dan pencapaian kinerja TI telah diketahui dan disiapkan mitigasinya. Adapun beberapa risiko utama dan upaya mitigasinya dalam pengelolaan TI Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya risiko serangan *Malware* pada akses data perusahaan, risiko ini telah dimitigasi dengan penggunaan antivirus pada seluruh device laptop yang digunakan pegawai dalam mengakses data perusahaan.
2. Adanya risiko kegagalan *hardware,* risiko ini telah dimitigasi dengan melakukan maintenance rutin pada seluruh hardware yang ada di lingkungan perusahaan dan monitoring kesehatan *hardware* yang digunakan oleh pegawai perusahaan.

PT PLN Batubara Niaga identifies potential risks in the management of the Company's IT. All risks that could affect IT activities and performance achievements are identified and mitigation measures are prepared. The main risks and their mitigation efforts in the Company's IT management are as follows:

1. Risk of malware attacks on the Company data access: This risk has been mitigated by using antivirus software on all laptop devices used by employees to access company data.
2. Risk of hardware failure: This risk has been mitigated through routine maintenance on all hardware within the Company and monitoring the health of hardware used by the employees.

Implementasi *Disaster Recovery Plan*
Implementation of Disaster Recovery Plan

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keandalan operasional dan keberlanjutan layanan, PT PLN Batubara Niaga (PLN BBN) menerapkan strategi *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk memastikan kontinuitas bisnis dalam menghadapi potensi gangguan sistem, baik yang disebabkan oleh faktor teknis, bencana alam, maupun insiden keamanan siber.

As part of its commitment to operational reliability and service continuity, PT PLN Batubara Niaga (PLN BBN) implements Disaster Recovery Plan (DRP) strategy to ensure business continuity in the face of potential system disruptions, whether caused by technical factors, natural disasters, or cyber security incidents.

PLN BBN tidak memiliki data center mandiri untuk aplikasi utama. Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan terbagi dalam beberapa skema, yaitu:

1. Aplikasi terpusat (*Holding*): Sistem strategis dikelola oleh PT PLN (Persero) sebagai *holding*, dengan pengelolaan server dan data center terstandarisasi secara terpusat.
2. Aplikasi internal PLN BBN: Pengembangan dan pengelolaan sistem dilakukan oleh PLN Icon Plus, termasuk penyediaan infrastruktur server dan *data center.*
3. Infrastruktur lokal: PLN BBN hanya memiliki ruang server terbatas yang digunakan untuk mendukung jaringan internal kantor (*network infrastructure*), bukan untuk penyimpanan atau pengolahan data utama.
4. Dengan arsitektur ini, pengelolaan risiko dan pemulihan bencana sebagian besar terintegrasi dengan kebijakan dan sistem DRP milik holding dan penyedia layanan.

PLN BBN has no independent data center for its main applications. The information technology infrastructure used is divided into several schemes, namely:

1. Centralized applications (Holding): PT PLN (Persero) as the holding company, manages the strategic systems with the standardized server and data center management centrally.
2. PLN BBN internal applications: System development and management are carried out by PLN Icon Plus, including the provision of server infrastructure and data centers.
3. Local infrastructure: PLN BBN has limited server space used to support its internal office network infrastructure, not for primary data storage or processing.
4. With this architecture, risk management and disaster recovery are largely integrated with the holding company's and service provider's DRP policies and systems.

Pengembangan Bidang TI
IT Development

Untuk mengoptimalkan kinerja di bidang TI demi mendukung kelancaran dan keberlangsungan usaha baik terkait pelayanan maupun inovasi, PT PLN Batubara Niaga menganggarkan dana sebesar Rp750.000.000,-. untuk pengembangan TI. Pada tahun 2025 realisasi pengembangan di bidang TI mencapai 97,62% dari anggaran atau sebesar Rp732.158.869,-. Adapun realisasi pengembangan TI di PLN BBN yaitu:

1. Pengembangan Aplikasi Surat Menyurat
   Pada Tahun 2025, PT PLN Batubara Niaga melakukan pengembangan aplikasi untuk kegiatan surat menyurat dengan melakukan pengadaan AMS (Aplikasi Manajemen Surat) milik PLN *Group*.
2. Pengembangan Sistem Proses Bisnis
   Pada Tahun 2025, PT PLN Batubara Niaga melakukan pengembangan terkait sistem untuk mempermudah aktivitas proses bisnis di lingkungan PT PLN Batubara Niaga dengan melakukan pengadaan *Enterprise Resource Planning* (ERP) yaitu CRM (*Customer Relationship Management*) dan ERP Odoo.

In the context to optimize IT performance to support smooth and sustainable business operations, both in terms of service and innovation, PT PLN Batubara Niaga has budgeted Rp750,000,000 for IT development. By 2025, IT development realization reached 97.62% of the budget, or Rp732,158,869. PLN BBN actualized IT development as follows:

1. Correspondence Application Development
   In 2025, PT PLN Batubara Niaga developed an application for correspondence activities by procuring AMS (Mail Management Application) owned by the PLN Group.
2. Business Process System Development
   In 2025, PT PLN Batubara Niaga developed systems to streamline business processes within the Company by procuring Enterprise Resource Planning (ERP) solutions, namely CRM (Customer Relationship Management) and Odoo ERP.

Audit TI
IT Audit

Pada tahun 2025 tidak terdapat audit terhadap pelaksanaan TI di PT PLN Batubara Niaga.

In 2025, there was no audit of IT implementation at PT PLN Batubara Niaga.


KINERJA
PERUSAHAAN
100
80
60
40
20
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
Komitmen • Integritas • Kinerja •

PLN BATUBARA NIAGA

4

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perekonomian dan Industri

Economy and Industry Overview



Penetapan program strategis Perusahaan senantiasa mempertimbangkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kinerja Perusahaan adalah dinamika pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional.

The establishment of the Company's strategic programs always considers various internal and external factors. One external factor that has a significant impact, both directly and indirectly, on the Company's performance is the dynamics of global and national economic growth.

Tinjauan Perekonomian Global

Global Economic Overview

Pada tahun 2025, Kondisi keuangan global masih bersifat akomodatif, meskipun terjadi volatilitas dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Harga saham perusahaan teknologi besar semakin menjauh dari harga saham sektor lainnya. Secara keseluruhan, kondisi keuangan hanya sedikit berubah atau mengalami kontraksi secara moderat. Dolar AS sempat menguat kembali seiring melambatnya momentum lindung nilai (*hedging*) investor atas eksposur mereka, namun kembali berada di bawah tekanan sesaat setelah dimulainya penyelidikan terhadap ketua Federal Reserve.

In 2025, global financial conditions remained accommodative, despite volatility and increased government bond yields. The stock prices of major technology companies are increasingly diverging from the stock prices of other sectors. Overall, financial conditions have changed little or contracted moderately. The US dollar briefly strengthened as the momentum of investors' hedging against their exposure slowed down. However, it came under pressure again shortly after the investigation into the Federal Reserve chair began.

Dengan latar belakang stabilisasi ketegangan perdagangan dan kondisi keuangan yang mendukung ini, perekonomian global terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa, beradaptasi dengan *lanscape* yang berubah, meskipun momentum pertumbuhan berbeda-beda antarnegara dan antarsektor. Secara agregat, pertumbuhan global pada kuartal ketiga 2025 melambat menjadi 2,4 persen secara tahunan, lebih tinggi dari perkiraan, dengan kejutan positif di beberapa negara diimbangi oleh kejutan negatif di negara lain.

Against the backdrop of stabilizing trade tensions and supportive financial conditions, the global economy continues to demonstrate remarkable resilience, adapting to the changing landscape. Even though growth momentum varies between countries and sectors. Overall, global growth in the third quarter of 2025 slowed to 2.4 percent year-on-year, higher than expected, with positive outcomes in some countries offset by adverse outcomes in others.

Dorongan dari ekspor kedirgantaraan mengangkat pertumbuhan Prancis menjadi 2,2 persen, sementara penurunan ekspor terus membebani aktivitas di Jerman,

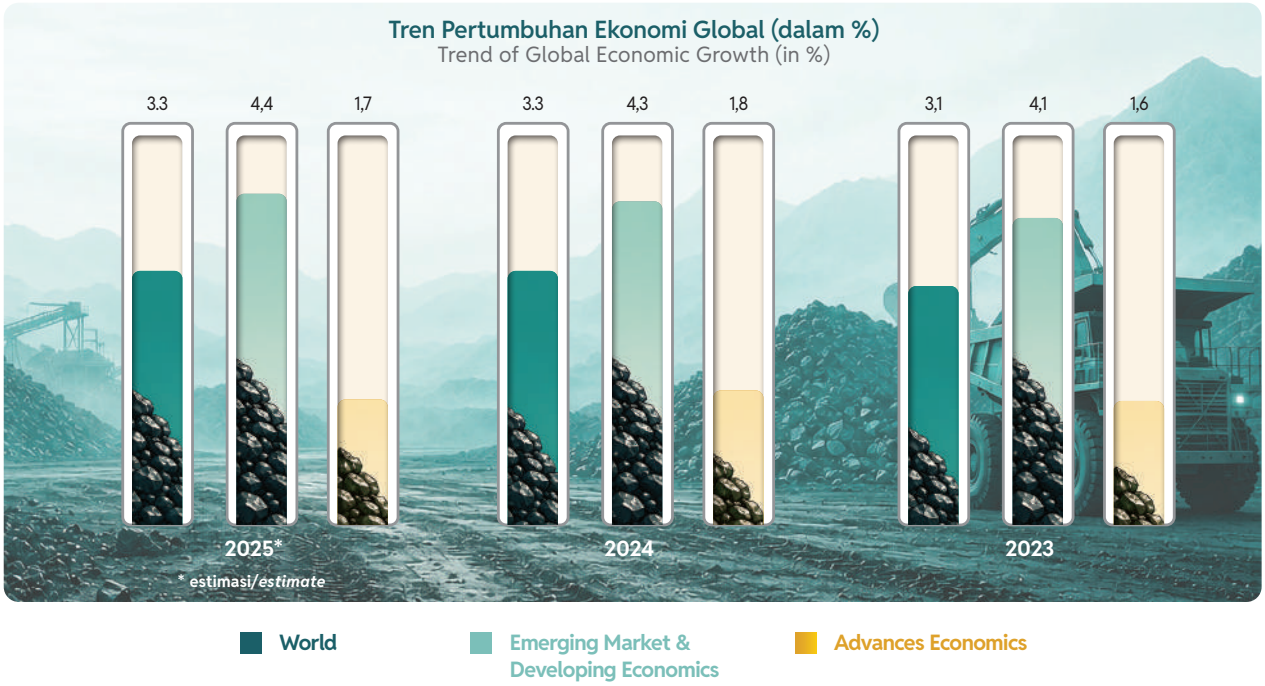
The boost from aerospace exports lifted France's growth to 2.2 percent, while a decline in exports continued to weigh on activity in Germany, leaving real GDP unchanged from

sehingga PDB riil tidak berubah dari kuartal kedua ke kuartal ketiga. Perekonomian Jepang terkontraksi sebesar 2,3 persen, dengan konsumsi swasta dan pemerintah mengimbangi sebagian kontraksi yang dipicu oleh investasi perumahan swasta dan ekspor. Pertumbuhan Tiongkok melambat menjadi 2,4 persen (berdasarkan estimasi), dengan lemahnya permintaan domestik, terutama di sektor perumahan, yang sebagian diimbangi oleh ekspor yang tetap tangguh.

Pertumbuhan di Amerika Serikat meningkat menjadi 4,3 persen, dengan percepatan investasi dan belanja di sektor teknologi yang diperkirakan menambah sekitar 0,3 poin persentase terhadap rata-rata pertumbuhan PDB tahunan dalam tiga kuartal pertama 2025, sehingga mengimbangi dampak negatif dari penutupan pemerintah federal pada kuartal terakhir tahun tersebut. Terdapat pula indikasi bahwa investasi terkait teknologi turut mendukung aktivitas ekonomi di Spanyol dan Inggris, meskipun tidak dalam skala sebesar di Amerika Serikat.

the second to the third quarter. The Japanese economy contracted by 2.3 percent, with private and government consumption offsetting some of the contraction triggered by private housing investment and exports. China's growth slowed to 2.4 percent (based on estimates), with weak domestic demand, particularly in the housing sector, partially offset by resilient exports.

Growth in the United States increased to 4.3 percent, with accelerated investment and spending in the technology sector expected to add about 0.3 percentage points to the average annual GDP growth in the first three quarters of 2025, offsetting the negative impact of the federal government shutdown in the last quarter of that year. There are also indications that technology-related investments are supporting economic activity in Spain and the UK, although not on the same scale as in the United States.



Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), *International Monetary Fund* (IMF), terbitan Januari 2026

Source: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF) January 2026 edition

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2025 mencapai Rp6.060,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.444,8 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2025 terhadap triwulan II-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,43 persen *(q-to-q)*. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,42 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan

Indonesia's Economic Growth

The Indonesian economy, based on the Gross Domestic Product (GDP) at current prices in the third quarter of 2025, reached Rp6,060.0 trillion and at constant 2010 prices reached Rp3,444.8 trillion. The Indonesian economy in the third quarter of 2025, compared to the second quarter of 2025, experienced an increase of 1.43 percent (q-to-q). From the production side, the Electricity and Gas Supply Sector experienced the highest increase at 5.42 percent. From the expenditure side, the Goods and Services Export Component experienced the

tertinggi sebesar 6,77 persen. Ekonomi Indonesia triwulan III-2025 terhadap triwulan III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen *(y-on-y)*. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,91 persen.

Sampai dengan triwulan III-2025, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen *(c-to-c)*. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,13 persen.

Secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2025 mencatat pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya *(y-on-y)*. Kelompok provinsi di Pulau Jawa tetap menjadi kontributor utama terhadap perekonomian, dengan kontribusi sebesar 56,68 persen terhadap PDB nasional serta mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen.

highest increase at 6.77 percent. Indonesia's economy in the third quarter of 2025, compared to the third quarter of 2024, experienced an increase of 5.04 percent (y-on-y). From the production side, the Education Services Sector experienced the highest increase at 10.59 percent. Meanwhile, from the expenditure side, the Goods and Services Export Component experienced the highest increase at 9.91 percent.

Until the third quarter of 2025, Indonesia's economy experienced an increase of 5.01 percent (c-to-c). From the production side, the Other Service Sector experienced the highest increase at 10.37 percent. Meanwhile, from the expenditure side, the Goods and Services Export Component experienced the highest increase at 9.13 percent.

Spatially, Indonesia's economy in the third quarter of 2025 was relatively stable compared to the same period in the previous year (y-on-y). The group of provinces on the island of Java remains the main contributor to the economy, with a contribution of 56.68 percent to the national GDP and recording an economic growth of 5.17 percent.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik

Source: Statistics Indonesia (BPS), Official Gazette of Statistics

Pada September 2025 terjadi inflasi *year-on-year (y-on-y)* sebesar 2,65 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,74. Tingkat inflasi *month-to-month (m-to-m)* September 2025 sebesar 0,21 persen dan tingkat inflasi *year-to-date (y-to-d)* September 2025 sebesar 1,82 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti September 2025 sebesar 2,19 persen; inflasi *m-to-m* sebesar 0,18 persen; dan inflasi *y-to-d* sebesar 1,61 persen.

In September 2025, there was a year-on-year (y-o-y) inflation of 2.65 percent with a Consumer Price Index (CPI) of 108.74. The month-to-month (m-o-m) inflation rate in September 2025 was 0.21 percent, and the year-to-date (y-t-d) inflation rate in September 2025 was 1.82 percent. The y-o-y inflation rate for core components in September 2025 was 2.19 percent; the m-o-m inflation was 0.18 percent; and the y-t-d inflation was 1.61 percent.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik

Source: Statistics Indonesia (BPS), Official Gazette of Statistics

Kondisi Industri Batubara
The State of Coal Industry

Industri batubara Indonesia pada 2025 berada dalam fase krusial, di mana produksi mencapai rekor tinggi (di atas 830 juta ton pada 2024), namun menghadapi tekanan penurunan harga, kelebihan pasokan, dan transisi energi global. Fokus bergeser ke efisiensi, pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO), dan risiko lingkungan, dengan permintaan ekspor ke China/India diprediksi melambat.

Hal ini dilatarbelakangi karena Pemerintah membuka kemungkinan untuk menaikkan porsi kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) lebih dari 25% dari total produksi pada 2026. Adanya wacana kenaikan porsi DMO batubara mencuat seiring rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memangkas produksi batubara pada tahun depan. Hal ini tak lepas dari harga emas hitam global yang lesu imbas ketidakseimbangan kebutuhan pasar dengan suplai batubara dari Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga batubara anjlok 21,57% *year-on-year* (yoy) ke level US$110,46 per metrik ton pada kuartal III/2025. Pertumbuhan industri pertambangan batubara dan lignit pada kuartal III/2025 juga mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -7,29%. Sementara itu, pada 2025, produksi batubara nasional ditargetkan mencapai 739,67 juta ton. Kementerian ESDM memproyeksikan realisasi hingga akhir tahun 2025 masih melebihi target.

The Indonesian coal industry in 2025 is in a crucial phase, where production reaches a record high (over 830 million tons in 2024). However, it faces pressure from falling prices, oversupply, and the global energy transition. The focus is shifting to efficiency, domestic market obligation (DMO), and environmental risks, with export demand to China/India predicted to slow down.

It is because the government has opened the possibility of increasing the mandatory domestic market obligation (DMO) for coal to more than 25% of total production by 2026. The discourse on increasing the DMO portion for coal has emerged alongside the Ministry of Energy and Mineral Resources' (ESDM) plan to cut coal production next year. This is not unrelated to the sluggish global black gold prices due to the imbalance between market demand and coal supply from Indonesia.

Statistics Indonesia (BPS) recorded a 21.57% year-on-year (yoy) decrease in coal prices to US10.46 per metric ton in the third quarter of 2025. The growth of the coal and lignite mining industry in the third quarter of 2025 also experienced a significant contraction of -7.29%. Meanwhile, in 2025, national coal production is targeted to reach 739.67 million tons. The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) projects that the realization by the end of 2025 will exceed the target.

Ditengah keresahan soal Patokan Harga DMO wacana untuk mengerek porsi DMO harus diiringi dengan kepastian pasar dalam negeri. Volume DMO yang dialokasikan harus benar-benar terserap oleh sektor-sektor pengguna dalam negeri. Di sisi lain, dia menuturkan bahwa harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton. Dengan harga tersebut, implikasi keekonomian bagi pelaku usaha perlu diperhitungkan secara hati-hati, dengan terus bertambahnya biaya produksi.

Rencana dan Program Strategi Tahun 2025

PT PLN Batubara Niaga merumuskan Langkah strategis yang mengacu pada RJPP 2024-2028 dan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang disebut sebagai *Magnetic North* PLN BBN. *Magnetic North* PLN BBN untuk tahun 2024-2028 ada 4 tujuan strategis yaitu:

- Memastikan *security of supply* pasokan dan keberlanjutan bisnis penjualan batubara
- Memastikan efisiensi dalam *supply* batubara
- Mendorong pertumbuhan bisnis untuk penciptaan nilai yang berkelanjutan
- Meningkatkan keunggulan operasional melalui *enabler* (*launchpad*) PLN BBN

Keempat tujuan strategis tersebut diturunkan menjadi 13 *Strategic Objective* dengan empat perspektif yaitu *Learning & Growth*, *Internal Business Process*, *Customer*, dan *Financial*. Sebagai penopang empat tujuan strategis RJPP, PLN BBN telah merumuskan 13 *Strategic Objective*.

Di tahun 2025 untuk mencapai sasaran utama dalam 13 *strategic objective* tersebut Perusahaan akan mengimplementasikan strategi antara lain:

- Memindahkan secara bertahap jasa transporter yang ada di PT PLN Batubara Niaga ke PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) sesuai dengan RJPP PT PLN EPI.
- Melakukan optimalisasi sumber tambang penugasan/ non penugasan untuk penjualan ke PLTU IPP serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait komposisi pasokan antara PLTU IPP dan PLN *Group* dengan tetap berkordinasi Bersama PT PLN EPI.
- Mencari potensi tambahan sumber tambang untuk penambahan pasokan sebesar 1,13 juta MT.
- Aggressive marketing untuk pelanggan PLTU IPP.
- Penambahan modal kerja seiring dengan peningkatan volume penjualan.
- Pengembangan proses bisnis operasi dan keuangan PLN BBN.
- Digitalisasi proses operasional dan keuangan.

Amidst concerns about the DMO Price Benchmark, the discourse on increasing the DMO portion must be accompanied by certainty in the domestic market. The allocated DMO volume must be fully absorbed by domestic user sectors. On the other hand, he stated that the DMO price for electricity is set at US$70 per ton and for the cement and fertilizer industries at US$90 per ton. With those prices, the economic implications for business operators need to be carefully considered, given the continuously increasing costs of production.

2025 Strategic Plans and Programs

PT PLN Batubara Niaga formulates strategic steps that refer to the RJPP 2024-2028 and are an elaboration of the vision and mission known as the Magnetic North of PLN BBN. The Magnetic North of PLN BBN for 2024-2028 consists of four strategic objectives, namely:

- Ensuring the security of supply and the sustainability of the coal sales business
- Ensuring efficiency in coal supply
- Encouraging business growth for sustainable value creation
- Improving operational excellence through PLN BBN enabler (launchpad)

The four strategic goals have been translated into 13 Strategic Objectives with four perspectives: Learning & Growth, Internal Business Process, Customer, and Financial. As support for the four strategic goals of the RJPP, PLN BBN formulated 13 Strategic Objectives.

In 2025, to achieve the main objectives within the 13 strategic objectives, the Company will implement the following strategies:

- Gradually transferring the existing transportation services at PT PLN Batubara Niaga to PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) in accordance with the RJPP of PT PLN EPI.
- Optimizing assigned/non-assigned mining sources for sales to IPP CFPPs and conducting regular monitoring and evaluation of the supply composition between IPP and the PLN Group's CFPPs while continuing to coordinate with PT PLN EPI.
- Searching for additional mining source potential to increase supply by 1.13 million MT.
- Aggressive marketing for IPP CFPP customers.
- The increase in working capital is in line with the increase in sales volume.
- Development of operational and financial business processes of PLN BBN.
- Digitalization of operational and financial processes.

Strategi Pemasaran, Pangsa Pasar, dan Aspek Pelanggan

Marketing Strategy, Market Share, and Customer Aspect



PT PLN Batubara Niaga memiliki cakupan pasar yang sejalan dengan fungsi utama Perusahaan, yaitu memastikan ketersediaan pasokan batubara secara optimal guna memenuhi kebutuhan Batubara pembangkit PLN *Group*, IPP, dan Industri Non-Kelistrikan.

PT PLN Batubara Niaga operates within a market scope that aligns with its core mandate, i.e., ensuring the optimal availability of coal to meet the needs of PLN Group power plant, IPP, and Non-Electricity Industry.

Strategi Pemasaran Tahun 2025

2025 Marketing Strategy

Strategi Pemasaran tahun 2025 ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025.

The 2025 Marketing Strategy was established as part of the Company's 2025 Work Plan and Budget (WP&B).

Program Pemasaran dan Penjualan Batubara Tahun 2025

Untuk terus menjaga ketepatan waktu pengiriman batubara, Perusahaan terus memperbaiki *system monitoring loading*, kesiapan batubara, perjalanan dan kedatangan tongkang dan vessel di PLTU tujuan melalui koordinasi bulanan antara para *stakeholder* (mitra pemasok batubara dan transportasi, serta konsultan pengawas surveyor independen).

Dan untuk terus menjaga kualitas batubara, Perusahaan telah melaksanakan Sampling Pengawasan dari pelabuhan muat sampai dengan pelabuhan bongkar yang bekerjasama dengan surveyor independen. Untuk meningkatkan margin, Perusahaan telah berupaya mencari mitra pemasok batubara dan melakukan pemasaran secara berkala ke target pasar perusahaan yaitu PLTU PLN *Group*, IPP, dan Industri Non-Kelistrikan.

Selain itu PT PLN Batubara Niaga telah melaksanakan program pemasaran Perusahaan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dan *volume* penjualan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2025 Coal Marketing and Sales Program

To continuously maintain the timeliness of coal delivery, the Company continues to improve the monitoring system for loading, coal readiness, transport, and the arrival of barges and vessels at the destination CFPP through monthly coordination among stakeholders (coal and transportation supplier partners, as well as independent surveyor supervising consultants).

And to continuously maintain the quality of the coal, the Company has implemented Supervision Sampling from the loading port to the unloading port in collaboration with independent surveyors. To increase margins, the Company has been striving to find coal supply partners and conducting periodic marketing to the Company's target markets, namely PLN Group CFPPs, IPPs, and Non-Electricity Industries.

In addition, PT PLN Batubara Niaga has implemented the Company's marketing program to increase market share and sales volume in 2025 as follows:

1. Melakukan optimalisasi sumber tambang penugasan/ non penugasan untuk penjualan ke PLTU IPP.
2. Mencari Potensi sumber tambang baru untuk penambahan pasokan dengan berkoordinasi dengan DIV OKI & PLN EPI.
3. *Aggressive* dalam melakukan marketing untuk pelanggan PLTU IPP dan Industri Non-Kelistrikan.
4. Pengembangan digitalisasi untuk menunjang kegiatan pemasaran dan operasional di lingkungan perusahaan.

1. Optimizing the assignment/non-assignment mining sources for sales to IPP CFPPs.
2. Searching for potential new mining sources to increase supply by coordinating with DIV OKI & PLN EPI.
3. Aggressive in marketing to customers of IPP CFPPs and Non-Electricity Industries.
4. Development of digitalization to support marketing and operational activities within the Company.

Aspek Pangsa Pasar
Market Share Aspects

Berikut ini diuraikan terkait dengan pangsa pasar untuk masing-masing produk Perusahaan.

The following is outlined regarding the market share for each of the Company's products.

Pangsa Pasar Batubara

Secara umum, PLN BBN melayani dua kelompok pelanggan utama, yaitu:

- *Captive market*, yaitu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berada di bawah PLN *Group*, termasuk pembangkit listrik (Genco) di PT PLN (Persero) dan *Independent Power Producer* (IPP) yang memiliki kontrak dengan PLN.
- *Non-captive market*, yaitu industri non-listrik seperti industri semen, baja, dan sektor manufaktur lainnya yang membutuhkan pasokan batubara.

Pendekatan ini memastikan PLN BBN tidak hanya berfokus pada kebutuhan internal PLN *Group*, tetapi juga membuka peluang ekspansi pasar ke sektor industri domestik lainnya.

Adapun pangsa pasar PT PLN Batubara Niaga mencakup pembangkit Listrik IPP, PLN *Group*, maupun Non Ketenagalistrikan meliputi:

- PT PLN (Persero)
- PT PLN Nusantara Power
- PT PLN Indonesia Power
- PT GCL Indo Tenaga
- PT Meulaboh Power Generation
- PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali
- PT Rekind Daya Mamuju
- PT Indonesia Energi Dinamika
- PT Bosowa energi
- PT Sumber Segara Primadaya
- PT Lestari Banten Energi

Coal Market Share

In general, PLN BBN serves two main customer groups, namely:

- Captive market, namely steam power plants (CFPP) that are under the PLN Group, including power plants (Genco) at PT PLN (Persero) and Independent Power Producers (IPP) that have contracts with PLN.
- Non-captive market, namely non-electricity industries such as cement, steel, and other manufacturing sectors that require coal supply.

This approach ensures that PLN BBN not only focuses on the internal needs of the PLN Group but also opens up market expansion opportunities to other domestic industrial sectors.

The market share of PT PLN Batubara Niaga includes IPP power plants, the PLN Group, and non-electricity sectors, covering:

- PT PLN (Persero)
- PT PLN Nusantara Power
- PT PLN Indonesia Power
- PT GCL Indo Tenaga
- PT Meulaboh Power Generation
- PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali
- PT Rekind Daya Mamuju
- PT Indonesia Energi Dinamika
- PT Bosowa energi
- PT Sumber Segara Primadaya
- PT Lestari Banten Energi

Aspek Pelanggan
Customer Aspects

PT PLN Batubara Niaga menyadari bahwa kepuasan pelanggan merupakan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan serta menjamin keberlanjutan hubungan kemitraan jangka panjang. Untuk itu, Perusahaan secara konsisten memperkuat sistem layanan pelanggan melalui peningkatan kualitas operasional, pemenuhan standar keselamatan dan mutu produk, serta peningkatan responsivitas terhadap masukan, keluhan, dan kebutuhan pelanggan. Sepanjang tahun 2025, berbagai inisiatif telah diimplementasikan sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam mengoptimalkan tingkat kepuasan pelanggan, antara lain:

- Perusahaan telah melakukan survei kepuasan pelanggan yang disebarkan kepada seluruh mitra pelanggan.
- Perusahaan telah melakukan vendor gathering secara bersama-sama dengan seluruh mitra pelanggan.
- Menyediakan media komunikasi untuk penyampaian keluhan pelanggan melalui *contact centre* perusahaan.

PT PLN Batubara Niaga recognizes that customer satisfaction is a fundamental pillar in building trust, maintaining long-term partnerships, and ensuring sustainable business relationships. Accordingly, the Company consistently strengthened its customer service system by improving operational quality, meeting product safety and quality standards, and enhancing responsiveness to customer input, complaints, and needs. Throughout 2025, various initiatives were implemented as part of the Company's commitment to optimizing customer satisfaction levels, as follows:

- The Company conducted a customer satisfaction survey distributed to all customer partners.
- The Company held a vendor gathering together with all customer partners.
- Providing communication media for customer complaints via the Company's contact center.

Pelanggan Batubara

Kepuasan pelanggan bagi Perusahaan adalah indikator yang sangat penting dan merupakan tolak ukur bagi Penilaian Kinerja Perusahaan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Tahun 2025, Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan. Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan batubara, sampai dengan tahun 2025 PT PLN Batubara Niaga telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan mitra batubara dan mitra transportasi untuk mengoptimalkan kedatangan/ketepatan waktu pengiriman batubara.
- Meningkatkan pengawasan di *loading port* untuk memonitor dan mengevaluasi kuantitas batubara.
- Merespon keluhan pelanggan.

Coal Customer

Customer satisfaction for the Company is a very crucial indicator and serves as a benchmark for its Performance Assessment. To improve customer satisfaction in 2025, the Company undertook several activities. By the year 2025, to improve customer satisfaction in the coal sector, PT PLN Batubara Niaga undertook several activities as follows:

- Improving coordination with coal partners and transportation partners to optimize the arrival/timeliness of coal deliveries.
- Increasing supervision at the loading port to monitor and evaluate the quantity of coal.
- Responding to customer complaints.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment



PT PLN Batubara Niaga hadir untuk memenuhi kebutuhan pasokan batubara untuk Pembangkit Listrik IPP dan Industri Non Ketenagalistrikan. Memberikan bukti bahwa kami turut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dalam pasokan batubara. Segmen usaha PT PLN Batubara yaitu Penjualan Pasokan Batubara.

PT PLN Batubara Niaga is present to meet the coal supply needs for IPP Power Plants and Non-Electricity Industry. Proving that we are contributing to the national economic growth by delivering the best quality service in coal supply. The business segment of PT PLN Batubara is Coal Supply Sales.

Usaha Penjualan Pasokan Batubara

Coal Supply Sales Business Segment

Pada segmen penjualan pasokan batubara, PT PLN Batubara Niaga melakukan kegiatan menyediakan batubara dalam rangka mendukung pengamanan pasokan batubara untuk kebutuhan unit-unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara pada industri kelistrikan dan non kelistrikan, baik mencakup aspek mutu dengan kualitas penyediaan pasokan, jumlah persediaan pasokan yang memadai serta aspek biaya yang efisien bagi kepentingan *stakeholders*. Secara umum PT PLN Batubara Niaga melakukan penjualan Batubara ke PLTU PLN *Group* dan *Independent Power Producer* (IPP) serta melakukan penjualan ke industri non kelistrikan.

In the coal supply sales segment, PT PLN Batubara Niaga engages in activities to provide coal to support the security of coal supply for the needs of coal-fired Steam Power Plants (CFPP) in both the electrical and non-electrical industries, covering aspects of quality with supply quality, adequate supply quantity, and cost efficiency for the benefit of stakeholders. Generally, PT PLN Batubara Niaga sells coal to the PLN Group's CFPP and Independent Power Producers (IPP), as well as to non-electrical industries.

Pada Tahun 2025, PT PLN Batubara Niaga telah mengirimkan batubara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berjumlah 38 lokasi PLTU PLN Grup dan 10 lokasi milik *Independent Power Producer* (IPP).

In 2025, PT PLN Batubara Niaga delivered coal to Steam Power Plants (CFPP) at 38 PLN Group CFPP locations and 10 Independent Power Producer (IPP) locations.

Volume Pasokan Batubara

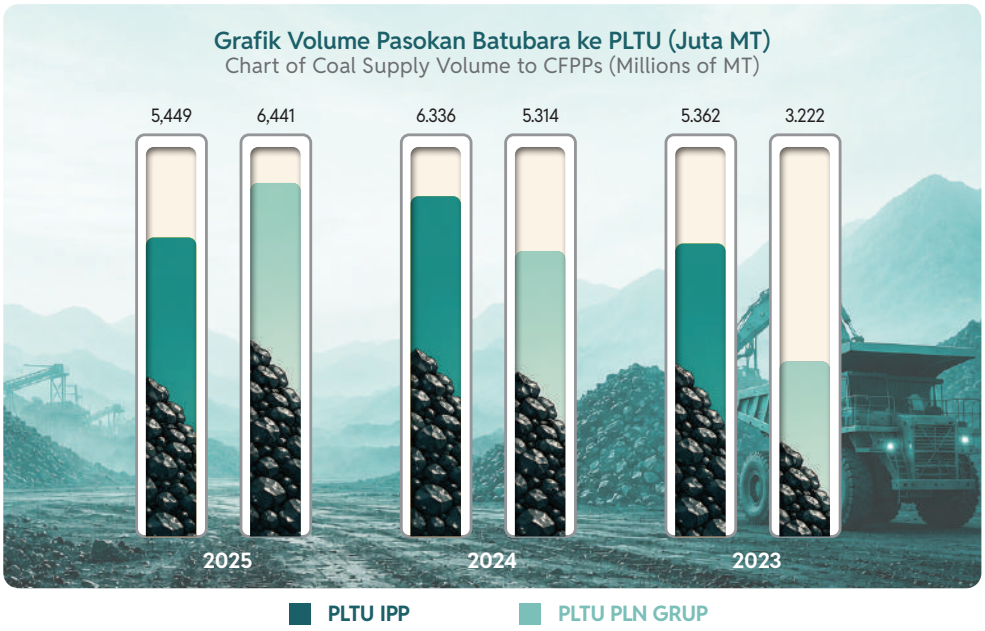
Pada tahun 2025 realisasi volume pasokan Batubara adalah sebesar 11.890 Juta MT. Pasokan ini terdiri dari pasokan ke PLTU IPP 5.449 Juta MT dan 6.441 Juta MT untuk pasokan ke PLTU PLN *Group*.

Coal Supply Volume

In 2025, the realized volume of coal supply was 11.890 million MT. This supply consisted of 5.449 million MT to IPP CFPPs and 6.441 million MT to PLN Group CFPPs.

Tabel Volume Pasokan Batubara ke PLTU PLN Grup (Juta MT)
Table of Coal Supply Volume to PLN Group CFPPs (Millions of MT)

Alokasi Allocation		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease) 2024-2025
PLTU IPP	IPP CFPPs	5.449	6.336	5.362	(14,00)%
PLTU PLN Grup	PLN Group CFPPs	6.441	5.314	3.222	21,21%
Jumlah	**Total**	**11.890**	**11.65**	**8.584**	**2,05%**

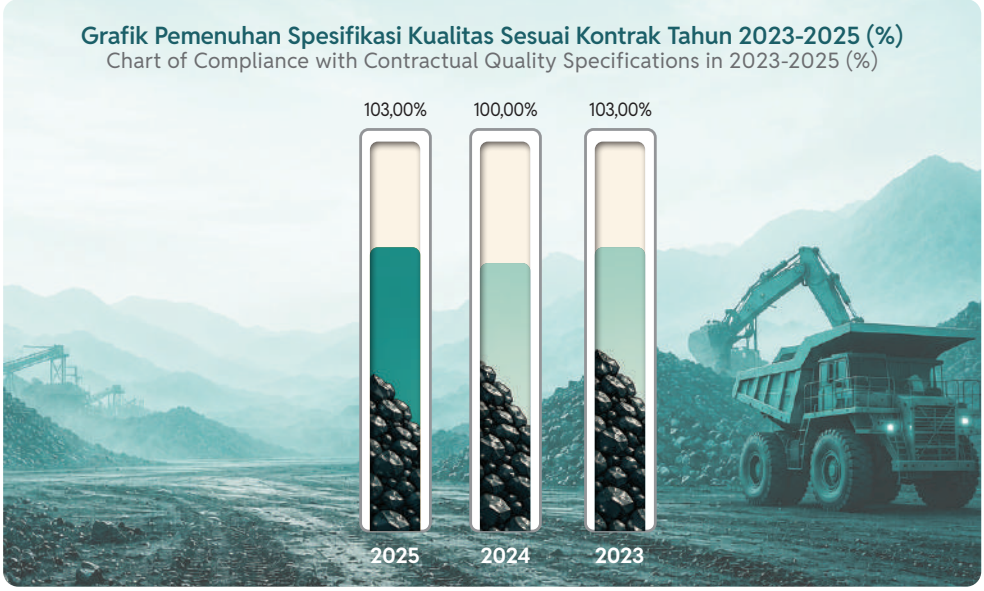


Kualitas Batubara

Realisasi pengiriman batubara yang dipasok ke PLTU IPP, PLN *Group* atau Industri di luar sektor ketenagalistrikan (pembangkit) memiliki kualitas dan telah memenuhi spesifikasi sesuai permintaan pelanggan. Untuk pencapaian kinerja kualitas batubara yaitu 102,82% di tahun 2025. Realisasi kualitas pengiriman batubara di tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu 100,00% Hal ini dipengaruhi oleh komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan.

Coal Quality

The realization of coal delivery supplied to IPP CFPPs, the PLN Group, or industries outside the electricity sector (generation) ensures quality that meets the specifications according to customer requests. The achievement of coal quality performance is 102.82% in 2025. The realization of coal delivery quality in 2025 is higher compared to 2024, which is 100,00%. It is driven by the Company's commitment to continuously enhancing the quality of its products and services to customers.



Segmen Usaha Lainnya
Other Business Segments

Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara

Realisasi Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara (PLTU PLN) adalah 109,58% atau pencapaian sebesar 109,58%, realisasi tersebut berdasarkan data pengiriman batubara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Realisasi Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara (PLTU PLN) di tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu 106,12%. Hal ini didukung oleh komitmen PLN BBN untuk terus menjaga *Security of Supply* Batubara, baik ke PLTU PLN *Group* dan PLTU IPP.

Ketepatan Waktu Pengiriman Batubara

Realisasi Ketepatan Waktu Pengiriman Batubara Sesuai Jadwal adalah 123,57% atau capaian sebesar 110,00%*, realisasi tersebut berdasarkan data pengiriman batubara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Realisasi Ketepatan Waktu Pengiriman Batubara Sesuai Jadwal di tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu 100%. Hal ini dikarenakan PLN BBN terus berkomitmen untuk menjaga ketepatan waktu pengiriman Batubara dengan melakukan optimalisasi penjadwalan pengiriman yang lebih baik antara pemasok, transportasi, dan unit PLTU Tujuan. Selain itu, peningkatan koordinasi operasional serta menerapkan mitigasi terhadap potensi hambatan cuaca dan ketersediaan armada. Upaya tersebut memastikan pengiriman batubara dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai kebutuhan operasional PLTU, sehingga dapat menjaga keandalan pasokan Batubara secara berkelanjutan.

Keterangan: *) Untuk pencapaian ≥ 110,00% ditulis 110,00%.

Security of Supply of Primary Energy – Coal

The realization of the Coal Primary Energy Supply Security (PLN CFPP) is 109.58% or an achievement of 109.58%, based on coal delivery data up to the Fourth Quarter of 2025. The realization of the Coal Primary Energy Supply Security (PLN CFPP) in 2025 is higher compared to 2024's figure of 106.12%. It is due to PLN BBN's commitment to continuously maintain the Security of Coal Supply, both to the PLN Group CFPP and IPP CFPP.

Timeliness in Coal Delivery

The realization of Timely Coal Delivery as Scheduled is 123.57% or achieviing 110.00%*, based on coal delivery data up to the Fourth Quarter of 2025. The realization of Timely Coal Delivery According to Schedule in 2025 is higher compared to 2024, which was 100%. It is because PLN BBN continues to commit to maintaining the timeliness of coal delivery by optimizing the scheduling of deliveries between suppliers, transport, and destination CFPP units. In addition, improving operational coordination and implementing mitigation against potential weather obstacles and fleet availability. These efforts ensure that coal deliveries can be made on time according to the operational needs of CFPP, thereby maintaining a sustainable and reliable coal supply.

Note: *) For achievements ≥ 110.00%, it is written as 110.00%



Penjualan (Profitabilitas) Per Segmen
Sales (Profitability) by Segment

Profitabilitas perusahaan berasal dari penjualan Batubara. Adapun komponen penjualan Batubara terdiri dari penjualan Batubara ke PLTU PLN *Group* dan PLTU IPP.

The Company's profitability comes from coal sales. The components of coal sales consist of sales to PLN Group CFPPs and IPP CFPPs.

Tabel Penjualan (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
Table of Sales (Expressed in millions of Rupiah)

Uraian Description		2025	2024	2023
Penjualan PLTU PLN *Group*	Sales of PLN Group CFPP	5.329.438	4.322.300	2.760.611
Penjualan PLTU IPP & Non-Ketenagalistrikan	Sales of IPP CFPP Non-Electricity	3.875.137	4.562.298	4.249.132
Jumlah Penjualan	**Total Sales**	**9.204.576**	**8.884.597**	**7.009.743**

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview



PT PLN Batubara Niaga berhasil mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp155,17 miliar, yaitu meningkat sangat signifikan sebesar Rp202,84 miliar dibandingkan rugi tahun berjalan di tahun 2024. Capaian kinerja keuangan didukung oleh posisi keuangan yaitu terdiri dari jumlah aset sebesar Rp2,86 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp2,36 triliun dan jumlah ekuitas sebesar Rp507,92 miliar.

PT PLN Batubara Niaga successfully recorded a profit for the year of Rp155.17 billion, which is a significant increase of Rp202.84 billion compared to the loss for the year in 2024. The financial performance achievement is supported by financial position, consisting of total assets amounting to Rp2.86 trillion, total liabilities amounting to Rp2.36 trillion, and total equity amounting to Rp507.92 billion.

Uraian kinerja keuangan berikut ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan yang diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2026 mendapatkan opini "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". Selanjutnya, Laporan Keuangan lengkap beserta catatannya disajikan pada bagian tersendiri dalam Laporan Tahunan ini.

The following description of financial performance is based on the Company's Consolidated Financial Statements, which have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS). The Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2025, and 2024, have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Partners issued on May 22, 2026, expressing an opinion of "fairly in all material respects". Additionally, the complete Financial Statements and accompanying notes are presented in a separate section of this Annual Report.

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Analysis of the Consolidated Statement of Financial Position

Pada tahun 2025, posisi keuangan PLN BBN diperkuat dengan jumlah aset sebesar Rp2,86 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp2,36 triliun dan jumlah ekuitas sebesar Rp507,92 miliar.

In 2025, the financial position of PLN BBN was strengthened with total assets amounting to Rp2.86 trillion, total liabilities amounting to Rp2.36 trillion, and total equity amounting to Rp507.92 billion.

ASET

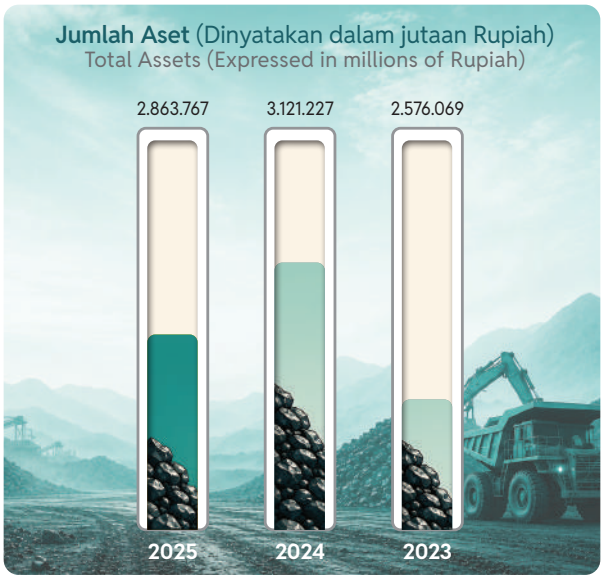
Jumlah aset PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2,86 triliun, yaitu menurun 8,25% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,12 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan piutang usaha dari Rp1,91 triliun di tahun 2024 menjadi Rp1,17 triliun di tahun 2025.

ASSETS

In 2025, the total assets of PLN BBN amounted to Rp2.86 trillion, a decrease of 8.25% compared to 2024, which was Rp3.12 trillion. This decline is primarily due to a decrease in trade receivables from Rp1.91 trillion in 2024 to Rp1.17 trillion in 2025.

Tabel Jumlah Aset (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Total Assets (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Aset lancar	Current assets	2.178.719	2.517.068	2.323.556	(13,44)%
Aset tidak lancar	Non-current assets	685.048	604.159	252.513	13,39%
Jumlah Aset	**Total Assets**	**2.863.767**	**3.121.227**	**2.576.069**	**(8,25)%**



Aset Lancar

Jumlah aset lancar PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2,18 triliun, yaitu menurun 13,44% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,52 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan piutang usaha dari Rp1,91 triliun di tahun 2024 menjadi Rp1,17 triliun di tahun 2025.

Current Assets

PLN BBN's total current assets in 2025 amounted to Rp2.18 trillion, a decrease of 13.44% compared to 2024, which was Rp2.52 trillion. This decline is mainly due to a decrease in trade receivables from Rp1.91 trillion in 2024 to Rp1.17 trillion in 2025.

Tabel Jumlah Aset (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Total Current Assets (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Kas dan setara kas	Cash and cash equivalents	74.168	24.338	90.254	204,74%
Piutang usaha	Trade receivables	1.713.183	1.910.531	1.806.119	(10,33)%
Piutang non-usaha	Non-trade receivables	14.078	54.011	54.011	(73,93)%
Persediaan	Inventories	156.397	198.969	372.974	(21,40)%
Pajak dibayar di muka, bagian lancar	Prepaid taxes, current portion	212.903	323.045	-	(34,09)%
Uang muka dan beban dibayar di muka	Advances and prepaid expenses	1.418	1.351	-	4,96%
Aset lancar lainnya	Other current assets	6.572	4.823	198	36,26%
Jumlah Aset Lancar	**Total Current Assets**	**2.178.719**	**2.517.068**	**2.323.556**	**(13,44)%**

Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp74,17 miliar, yaitu meningkat 204,74% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp24,34 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya pembayaran oleh pelanggan PLN BBN dan perbaikan tata kelola penagihan sehingga mempercepat cash in PLN BBN.

Piutang Usaha
Piutang usaha PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,71 triliun, yaitu menurun 10,33% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,91 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan hal yang positif dengan penurunan piutang dan juga penurunan hutang notpol dimana dengan perbaikan penagihan maka cash in dari hasil penagihan akan menurunkan hutang notpol PLN BBN. Jika dibandingkan dengan realisasi *Collection of Period* (CoP) tahun 2025 sebesar 72 hari semakin membaik dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 76 hari. Maka nilai Piutang yang lebih kecil dibandingkan tahun 2024 dan target RKAP merupakan hal yang positif.

Piutang Non-Usaha
Piutang non-usaha, bagian lancar PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp14,08 miliar, yaitu menurun 73,93% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp54,01 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penerimaan pembayaran atas piutang non-usaha tahun 2023 pada tahun 2025.

Persediaan
Persediaan PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp156,40 miliar, yaitu menurun 21,40% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp198,97 miliar. Hal ini karena ketidaktercapaian target volume dan nilai *shipment carry over* yang sedikit (*loading* 2025 – *unload* 2026) dibanding dengan yang direncanakan pada RKAP 2025. Hal ini berdampak pada nilai persediaan.

Pajak Dibayar Di Muka, Bagian Lancar
Pajak dibayar di muka bagian lancar PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp212,90 miliar, yaitu menurun 34,09% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp323,04 miliar. Restitusi Pajak yang diajukan lebih kecil dari tahun 2024 dan RKAP 2025 karena masih dalam proses pemeriksaan untuk PPN 2025 sebesar Rp522 miliar (pos pajak dibayar dimuka), sedangkan nilai Rp212,90 miliar adalah sisa nilai restitusi yang belum cair atas restitusi PPN 2024 dimana SPKLB terbit 2024.

Uang Muka dan Biaya Dibayar Di muka
Uang muka dan biaya dibayar di muka PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,42 miliar, yaitu meningkat 4,96% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,35 miliar. Peningkatan ini didorong oleh naiknya tarif sewa kantor PLN BBN pada 2025.

Cash and Cash Equivalents
In 2025, cash and cash equivalents of PLN BBN amounted to Rp74.17 billion, an increase of 204.74% compared to Rp24.34 billion in 2024. This increase is mainly driven by payments from PLN BBN customers and improvements in billing management, resulting in accelerated cash inflow for PLN BBN.

Trade Receivables
PLN BBN's trade receivables in 2025 amounted to Rp1.71 trillion, a decrease of 10.33% compared to Rp1.91 trillion in 2024. This condition is positive, with a decrease in receivables and also a decrease in non-policy debt, where with improved collection, the cash inflow from collection results will reduce PLN BBN's non-policy debt. When compared to the realizationCollection Period(CoP) for 2025 of 72 days is improved compared to 2024, which was 76 days. Therefore, the lower receivables value compared to 2024 and the RKAP target is a positive development.

Non-Trade Receivables
In 2025, the non-trade receivables, current portion of PLN BBN amounted to Rp14.08 billion, a decrease of 73.93% compared to Rp54.01 billion in 2024. This decrease was due to the receipt of payments for non-trade receivables from 2023 in 2025.

Inventories
PLN BBN's inventories in 2025 were Rp156.40 billion, a decrease of 21.40% compared to the 2024 figure of Rp198.97 billion. Failure to achieve the target volume and the low value of carry-over shipments (loading 2025 – unloading 2026) compared to what was planned in the 2025 RKAP impacted on the inventory value.

Prepaid Taxes, Current Portion
In 2025, the prepaid tax, current portion of PLN BBN was Rp212.90 billion, a decrease of 34.09% compared to Rp323.04 billion in 2024. The tax refund applied for is smaller than in 2024 and the 2025 RKAP because the VAT refund for 2025 amounting to Rp522 billion (under prepaid taxes) is still under audit, while the Rp212.90 billion is the remaining unpaid refund for the 2024 VAT refund where the SPKLB was issued in 2024.

Advances and Prepaid Expenses
In 2025, PLN BBN's advance and prepaid expenses amounted to Rp1.42 billion. It experienced an increase of 4.96% compared to Rp1.35 billion in 2024. This increase was driven by the rise in the office rental tariff of PLN BBN in 2025.

Aset lancar lainnya
Aset lancar lainnya PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp6,57 miliar, yaitu meningkat 36,26% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,82 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan piutang pada tahun 2025.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp685,05 miliar, yaitu meningkat 13,39% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp604,16 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh belum terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas restitusi yang diajukan untuk tahun 2025, sehingga nilai restitusi tersebut masih pada pos aset tidak lancar karena dinilai berumur diatas 1 tahun.

Other current assets
PLN BBN's other current assets in 2025 amounted to Rp6.57 billion, an increase of 36.26% compared to Rp4.82 billion in 2024. This increase was primarily driven by an increase in receivables in 2025.

Non-Current Assets

In 2025, total non-current assets of PLN BBN were Rp685.05 billion, which was an increase of 13.39% compared to 2024, amounting to Rp604.16 billion. This increase was mainly driven by the non-issuance of the SPKLB for the refund applied for in 2025, so the refund amount is still under non-current assets as it is considered to have a term of more than one year.

Tabel Aset Tidak Lancar (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Non-Current Assets (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Pajak dibayar di muka, bagian tidak lancar	Prepaid taxes, non-current portion	685.048	604.159	252.513	13,39%
Jumlah Aset Tidak Lancar	**Total Non-Current Assets**	**685.048**	**604.159**	**252.513**	**13,39%**

Pajak Dibayar Di Muka, Bagian Tidak Lancar
Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp685,05 miliar, yaitu meningkat 13,39% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp604,16 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh belum terbitnya SPKLB atas restitusi yang diajukan untuk tahun 2025, sehingga nilai restitusi tersebut masih pada pos aset tidak lancar karena dinilai berumur diatas 1 tahun.

Prepaid Taxes, Non-Current Portion
PLN BBN's prepaid taxes, non-current portion, in 2025 amounted to Rp685.05 billion, an increase of 13.39% compared to Rp604.16 billion in 2024. This increase was mainly driven by the non-issuance of the SPKLB for the refund applied for in 2025, so the refund amount is still under non-current assets as it is considered to have a term of more than one year.

LIABILITAS

Jumlah liabilitas PLN BBN pada tahun 2025 yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp2,36 triliun, yaitu menurun 14,90% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,77 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai hutang usaha sebesar Rp106,02 miliar atau 6% dari tahun 2024 serta turunnya nilai hutang lainnya atau hutang notpol kepada PLN Grup sebesar Rp235,51 miliar atau 39% dari tahun 2024.

LIABILITIES

In 2025, the total liabilities of PLN BBN, which consist of current liabilities amounting to Rp2.36 trillion, decreased by 14.90% compared to 2024, which amounted to Rp2.77 trillion. This decrease was mainly due to a decline in trade payables of Rp106.02 billion or 6% from 2024 and a decline in other payables or notpol payables to the PLN Group of Rp235.51 billion or 39% from 2024.

Tabel Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Total Current Liabilities (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Utang usaha	Trade payables	1.536.512	1.940.061	1.181.046	(20,80)%
Utang lain-lain	Other payables	567.105	799.276	455.924	(29,05)%
Biaya masih harus dibayar	Accrued expenses	244.299	18.653	526.452	1.209,70%
Utang pajak	Taxes payable				
- Pajak Penghasilan	- Corporate Income Tax	-	-	1.126	-
- Pajak Lain lain	- Other Taxes	7.926	10.487	11.106	(24,42)%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Total Current Liabilities	2.355.842	2.768.477	2.175.655	14,90%

Utang Usaha

Utang usaha PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,54 triliun, yaitu menurun 20,80% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,94 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perbaikan dari sisi penagihan piutang, hal ini berdampak baik pada lebih cepatnya pembayaran kewajiban jangka pendek kepada mitra batubara.

Trade Payables

PLN BBN's trade payables in 2025 were Rp1.54 trillion, a decrease of 20.80% compared to Rp1.94 trillion in 2024. This decrease was due to an improvement in accounts receivable collection, which has a positive impact on faster payment of short-term obligations to coal partners.

Utang Lain-lain

Utang lain-lain PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp567,10 miliar, yaitu menurun 29,05% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp799,28 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perbaikan dari sisi penagihan piutang, hal ini berdampak baik pada mampunya PLN BBN dalam melakukan cicilan atas kewajiban jangka pendek (notpol) tersebut kepada PLN Grup.

Other Payables

In 2025, other payables of PLN BBN amounted to Rp567.10 billion, a decrease of 29.05% compared to the 2024 figure of Rp799.28 billion. This decrease was due to an improvement in accounts receivable collection, which has a positive impact on PLN BBN's ability to make instalment payments on the short-term obligations (notpol) to the PLN Group.

Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya masih harus dibayar PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp244,30 miliar, yaitu meningkat 1.209,70% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp18,65 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perbaikan dari sisi penagihan piutang, hal ini berdampak baik pada lebih cepatnya pembayaran kewajiban jangka pendek kepada mitra transportasi.

Accrued Expenses

PLN BBN's accrued expenses in 2025 amounted to Rp244.30 billion, an increase of 1,209.70% compared to Rp18.65 billion in 2024. This decrease was due to an improvement in accounts receivable collection, which has a positive impact on faster payment of short-term obligations to transportation partners.

Utang Pajak

Utang pajak lain-lain PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7,93 miliar, yaitu menurun 24,42% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp10,49 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh total pembayaran kewajiban kepada mitra pada periode Desember 2025, dan jika ditelaah lebih dalam nilai pembayaran kewajiban kepada mitra pada Desember tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2025, sehingga nilai utang pajak (pph terutang yang dipotong PLN BBN untuk disetorkan ke negara pada bulan berikutnya) lebih besar pada tahun 2024.

Taxes Payable

In 2025, PLN BBN's other tax payables amounted to Rp7.93 billion, a decrease of 24.42% compared to Rp10.49 billion in 2024. This decrease was influenced by the total payment of obligations to partners in the December 2025 period, and when examined further, the value of payments to partners in December 2024 was greater than in 2025, so the tax payable (income tax payable thatwithheld by PLN BBN for remittance to the state in the following month) was higher in 2024.

EKUITAS

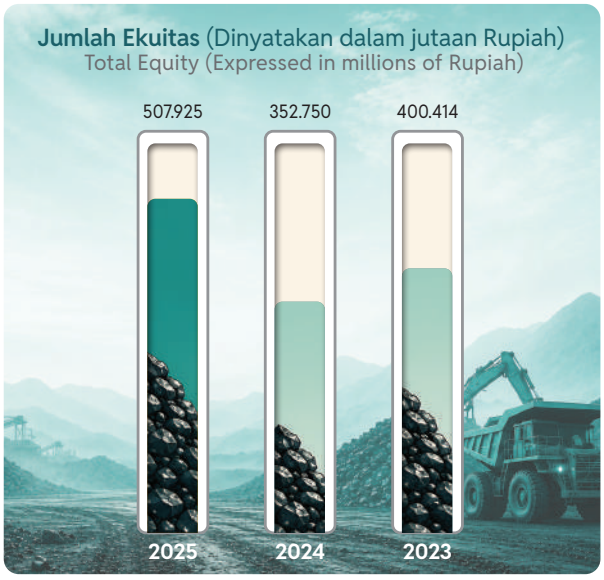
Jumlah ekuitas PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp507,92 miliar, yaitu meningkat 43,99% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp352,75 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja keuangan PLN BBN pada tahun 2025 yang mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2024. PLN BBN mendapatkan laba bersih sebesar Rp155,17 miliar pada tahun 2025 yang terakumulasi pada saldo laba.

EQUITY

PLN BBN's total equity in 2025 was Rp507.92 billion, an increase of 43.99% compared to the 2024 figure of Rp352.75 billion. This increase was mainly driven by the financial performance of PLN BBN in 2025, which improved compared to 2024. PLN BBN recorded a net profit of Rp155.17 billion in 2025, which accumulated in retained earnings.

Tabel Jumlah Ekuitas (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Total Equity (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Modal saham	Share capital	50.000	50.000	50.000	-
Saldo laba	Retained earnings	457.925	302.750	350.414	51,26%
Jumlah Ekuitas	**Total Equity**	**507.925**	**352.750**	**400.414**	**43,99%**



Modal Saham

Modal saham PLN BBN pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp50 miliar.

Share Capital

PLN BBN's share capital in 2025 and 2024 was Rp50 billion.

Saldo Laba

Saldo laba PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp457,92 miliar, yaitu meningkat 51,26% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp302,75 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja keuangan PLN BBN pada tahun 2025 yang mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2024. PLN BBN mendapatkan laba bersih sebesar Rp155,17 miliar pada tahun 2025 yang terakumulasi pada saldo laba.

Retained Earnings

PLN BBN's retained earnings in 2025 were Rp457.92 billion, an increase of 51.26% compared to 2024, which was Rp302.75 billion. This increase was mainly driven by the financial performance of PLN BBN in 2025, which improved compared to 2024. PLN BBN recorded a net profit of Rp155.17 billion in 2025, which accumulated in retained earnings.

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

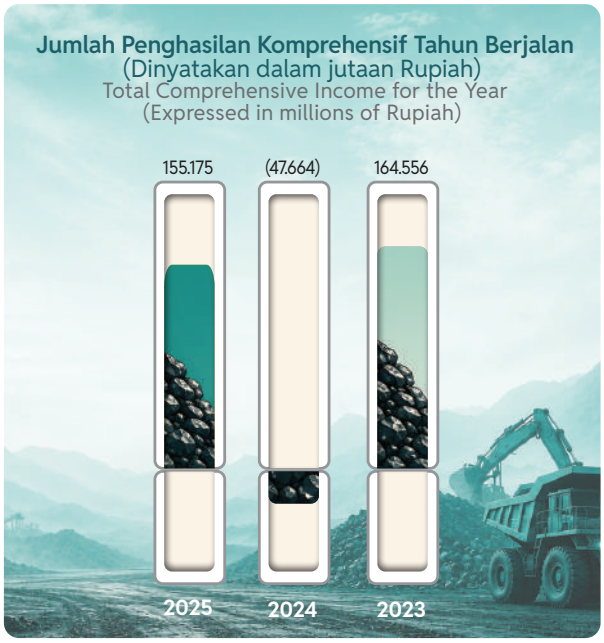
Analysis of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp155,17 miliar, yaitu meningkat 425,56% dibandingkan tahun 2024 sebesar (Rp47,66) miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perbaikan proses penagihan kepada pelanggan yang berdampak pada turunnya nilai provisi (beban administrasi 2024 tinggi) dan tepat waktunya pembayaran kewajiban jatuh tempo kepada mitra, sehingga terhindar dari beban bunga atas keterlambatan pembayaran kewajiban jatuh tempo (beban lain-lain 2024 tinggi).

PLN BBN's total comprehensive income/(loss) for the current year in 2025 amounted to Rp155.17 billion, an increase of 425.56% compared to 2024's (Rp47.66) billion. This increase was mainly due to improvements in the billing process to customers, which reduced the provision amount (high administrative expenses in 2024) and timely payment of maturing obligations to partners, thus avoiding interest expenses on late payments (high other expenses in 2024).

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Penjualan	Sales	9.204.576	8.884.597	6.578.856	3,60%
Beban pokok penjualan	Cost of sales	(8.888.929)	(8.586.697)	(6.341.910)	3,52%
Laba bruto	Gross profit	315.647	297.900	236.946	5,96%
Beban umum dan administrasi	General and administrative expenses	(46.512)	(147.997)	(21.376)	(68,57)%
Penghasilan keuangan	Finance income	421	1.158	889	(63,64)%
Beban keuangan	Finance expenses	(40.860)	(42.938)	(14.870)	(4,84)%
Beban lain-lain, bersih	Other expenses, net	(23.454)	(131.028)	8.193	(82,10)%
Laba/(rugi) sebelum pajak	Profit/(loss) before tax	205.242	(22.905)	209.783	(996,06)%
Beban pajak penghasilan	Income tax expense	(50.067)	(24.759)	(45.226)	102,22%
Laba/(rugi) tahun berjalan	Profit/(loss) for the year	155.175	(47.664)	164.556	(425,56)%
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	Other comprehensive income, net of tax	-	-	-	-
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan	Total comprehensive income/(loss) for the year	155.175	(47.664)	164.556	(425,56)%
Laba per saham dasar (Rupiah penuh)	Basic earnings per share (in full Rupiah)	3,10	(0,95)	3,29	(426,32)%



Penjualan

Penjualan PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp9,20 triliun, yaitu meningkat 3,60% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8,88 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan volume penjualan serta peningkatan harga satuan penjualan batubara CIF.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp8,89 triliun, yaitu meningkat 3,52% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8,59 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan volume pembelian serta peningkatan harga satuan pembelian batubara CIF.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp46,51 miliar, yaitu menurun 68,57% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp148 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perbaikan proses penagihan kepada pelanggan. Penurunan beban umum dan administrasi tersebut berdampak pada turunnya nilai provisi. Tahun 2024 nilai provisi yang dibuku sebesar Rp118 miliar dan pada tahun 2025 hanya sebesar Rp3 miliar dengan sisa yang belum dibuku atau masuk kedalam *Summary of Uncorrected Misstatements* (SUM) sebesar Rp28 miliar.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp421 juta, yaitu menurun 63,64% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,16 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh saldo harian PLN BBN pada tahun 2025

Sales

PLN BBN's sales in 2025 amounted to Rp9.20 trillion, an increase of 3.60% compared to 2024's Rp8.88 trillion. This increase was mainly driven by an increase in sales volume and an increase in the unit selling price of CIF coal.

Cost of Goods Sold

PLN BBN's cost of sales in 2025 was Rp8.89 trillion, an increase of 3.52% compared to Rp8.59 trillion in 2024. This increase was mainly driven by an increase in purchase volume and an increase in the unit purchase price of CIF coal.

General and Administrative Expenses

In 2025, the general and administrative expenses of PLN BBN amounted to Rp46.51 billion, a decrease of 68.57% compared to Rp148 billion in 2024. This decrease was mainly due to improvements in the billing process to customers. The decrease in general and administrative expenses resulted in a lower provision amount. In 2024, the provision recorded was Rp118 billion, and in 2025 it was only Rp3 billion, with the remaining amount not yet recorded or included in the Summary of Uncorrected Misstatements (SUM) of Rp28 billion.

Financial Income

The financial income of PLN BBN in 2025 was Rp421 million, a decrease of 63.64% compared to Rp1.16 billion in 2024. This decrease was mainly due to the lower daily balance of PLN BBN in 2025 compared to 2024 for payments of maturing

yang lebih rendah, dibandingkan dengan tahun 2024 untuk pembayaran kewajiban jatuh tempo dan cicilan utang notpol PLN Grup, sehingga nilai pendapatan bunga bank pada tahun 2025 lebih rendah.

Beban Keuangan

Beban keuangan PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp40,86 miliar, yaitu menurun 4,84% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp42,94 miliar. Penurunan ini terutama didorong oleh pembayaran cicilan utang notpol kepada PLN Grup, dimana total utang Notpol pada tahun 2024 sebesar Rp799 miliar dan tahun 2025 hanya sebesar Rp567 miliar. Hal tersebut berdampak pada perhitungan bunga notpol pada tahun 2025 yang lebih rendah dibanding tahun 2024.

Beban Lain-lain, Bersih

Beban lain-lain bersih PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp23,45 miliar, yaitu menurun 82,10% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp131,03 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perbaikan proses penagihan kepada pelanggan yang berdampak pada tepat waktunya pembayaran kewajiban jatuh tempo kepada mitra, sehingga terhindar dari beban bunga atas keterlambatan pembayaran kewajiban jatuh tempo pada tahun 2025.

Laba/(rugi) sebelum pajak

Laba/(rugi) sebelum pajak PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp205,24 miliar, yaitu menurun 996,06% dibandingkan tahun 2024 sebesar (Rp22,90) miliar. Pencapaian ini terutama didorong oleh perbaikan proses penagihan kepada pelanggan yang berdampak pada turunnya nilai provisi (beban administrasi 2024 tinggi) dan tepat waktunya pembayaran kewajiban jatuh tempo kepada mitra, sehingga terhindar dari beban bunga atas keterlambatan pembayaran kewajiban jatuh tempo (beban lain-lain 2024 tinggi).

Beban Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp50,07 miliar, yaitu meningkat 102,22% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp24,76 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kinerja keuangan tahun 2025 yang lebih baik dibanding tahun 2024. Hal ini berdampak kepada perhitungan pajak badan PLN BBN yang lebih besar dibanding tahun 2024.

Laba/(rugi) tahun berjalan

Pada tahun 2025, jumlah laba/(rugi) tahun berjalan PLN BBN adalah sebesar Rp155,17 miliar, yaitu meningkat 425,56% dibandingkan tahun 2024 sebesar (Rp47,66) miliar. Pencapaian ini terutama didorong oleh perbaikan proses penagihan kepada pelanggan yang berdampak pada turunnya nilai provisi (beban administrasi 2024 tinggi)

obligations and installments of notpol debt of the PLN Group, resulting in lower bank interest income in 2025.

Financial Expenses

In 2025, PLN BBN's financial expenses were Rp40.86 billion, a decrease of 4.84% compared to the 2024 figure of Rp42.94 billion. This decrease was mainly driven by the payment of notpol debt installments to the PLN Group, where the total notpol debt in 2024 was Rp799 billion and in 2025 only Rp567 billion. This resulted in lower notpol interest calculation in 2025 compared to 2024.

Other Expenses, Net

PLN BBN's other expenses, net, in 2025 amounted to Rp23.45 billion, a decrease of 82.10% compared to Rp131.03 billion in 2024. This decrease was mainly due to improvements in the billing process to customers, which resulted in timely payment of maturing obligations to partners, thus avoiding interest expenses on late payments in 2025.

Profit/(loss) before tax

In 2025, profit/(loss) before tax of PLN BBN was Rp205.24 billion, a decrease of 996.06% compared to the 2024 figure of (Rp22.90) billion.This achievement was mainly driven by improvements in the billing process to customers, which reduced the provision amount (high administrative expenses in 2024) and timely payment of maturing obligations to partners, thus avoiding interest expenses on late payments (high other expenses in 2024).

Income Tax Expense

PLN BBN's income tax expense in 2025 was Rp50.07 billion, an increase of 102.22% compared to Rp24.76 billion in 2024. This increase was primarily due to better financial performance in 2025 compared to 2024. This has resulted in a higher corporate tax calculation for PLN BBN than in 2024.

Profit/(loss) for the year

In 2025, PLN BBN's profit/(loss) for the year was Rp155.17 billion, an increase of 425.56% compared to 2024's (Rp47.66) billion. This achievement was mainly driven by improvements in the customer billing process, which led to a decrease in provisions (high administrative expenses in 2024) and timely payment of due obligations to partners, thus avoiding

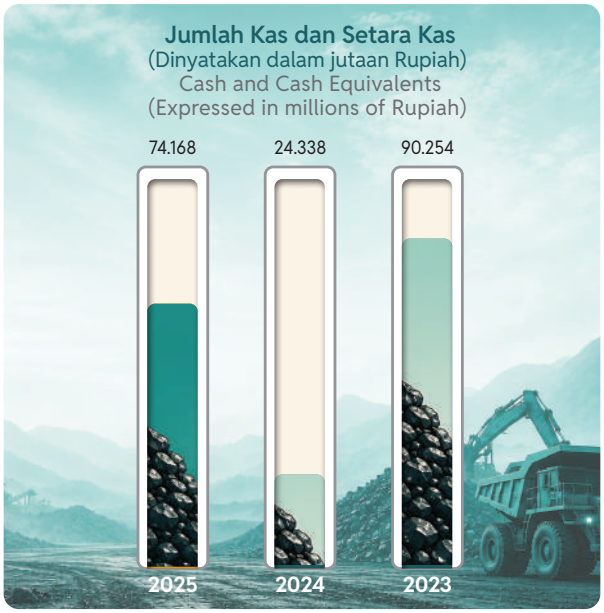
dan tepat waktunya pembayaran kewajiban jatuh tempo kepada mitra, sehingga terhindar dari beban bunga atas keterlambatan pembayaran kewajiban jatuh tempo (beban lain-lain 2024 tinggi). Berdasarkan hal tersebut PLN BBN mampu mempebaiki kinerja keuangan pada tahun 2025.

interest charges on late payments (high other expenses in 2024). Based on this, PLN BBN was able to improve its financial performance in 2025.

Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian
Analysis of the Consolidated Statement of Cash Flows

Arus kas PLN BBN terdiri dari aktivitas operasional dan aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp74,17 miliar meningkat 204,74% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp24,34 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan proses penagihan kepada pelanggan. Hal ini berdampak pada nilai penerimaan penjualan tahun 2025 yang lebih tinggi dibanding dengan pembayaran ke pemasok atas kewajiban jatuh tempo, karyawan, operasional administrasi kantor, dan pajak perusahaan.

The cash flow of PLN BBN consists of operating and financing activities. The cash and cash equivalents of PLN BBN in 2025 amounted to Rp74.17 billion, an increase of 204.74% compared to Rp24.34 billion in 2024. This increase was mainly driven by improvements in the customer billing process. This impacted the sales revenue in 2025, which was higher compared to payments to suppliers for due obligations, employees, office administrative operations, and corporate taxes.



Tabel Arus Kas (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Cash Flow (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	Net cash provided by/(used in) operating activities	317.830	(366.330)	(406.815)	(186,76)%
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	Net cash (used in)/ provided by financing activities	(268.000)	300.414	441.054	(189,21)%

Tabel Arus Kas (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Cash Flow (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	49.830	(65.916)	34.239	(175,60)%
Kas dan setara kas awal tahun	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	24.338	90.254	56.015	(73,03)%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	74.168	24.338	90.254	204,74%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp317,83 miliar, yaitu menurun 186,76% dibandingkan tahun 2024 sebesar (Rp366,33) miliar. Pencapaian ini terutama didorong oleh perbaikan proses penagihan kepada pelanggan. Hal ini berdampak pada penerimaan penjualan tahun 2025 sebesar Rp9,41 triliun yang lebih tinggi dibanding pembayaran ke pemasok atas kewajiban jatuh tempo, karyawan, operasional administrasi kantor, dan pajak perusahaan tahun 2025 sebesar Rp9,09 triliun.

Cash Flows from Operating Activities

In 2025, PLN BBN's cash flow provided by operating activities was Rp317.83 billion, a decrease of 186.76% compared to 2024, which was (Rp366.33) billion. This achievement was mainly driven by improvements in the customer billing process. This resulted in sales revenue of Rp9.41 trillion in 2025, which was higher than payments to suppliers for due obligations, employees, office administrative operations, and corporate taxes of Rp9.09 trillion in 2025.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Cash Flows from Operating Activities (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	Net cash provided by/(used in) operating activities	317.830	(366.330)	(406.815)	(186,76)%
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	Net cash (used in)/ provided by financing activities	(268.000)	300.414	441.054	(189,21)%
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	49.830	(65.916)	34.239	(175,60)%
Kas dan setara kas awal tahun	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	24.338	90.254	56.015	(73,03)%

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan PLN BBN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp268 miliar, yaitu menurun 189,21% dibandingkan tahun 2024 dengan kas diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp300,41 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perbaikan proses penagihan kepada pelanggan, sehingga PLN BBN mampu melakukan cicilan pembayaran atas hutang noptol kepada PLN Grup. Sehingga saldo hutang notpol dan beban bunga notpol pada tahun 2025 lebih kecil dibanding tahun 2024.

Cash Flows from Financing Activities

PLN BBN's cash flow used in financing activities in 2025 amounted to Rp268 billion, a decrease of 189.21% compared to 2024, where cash provided by financing activities was Rp300.41 billion. This decrease was mainly due to improvements in the customer billing process, enabling PLN BBN to make installment payments on its nontrade payables to the PLN Group. Consequently, the balance of nontrade payables and interest expense on these payables in 2025 was lower than in 2024.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Solvency and Receivables Collectibility

Kemampuan Membayar Utang

Solvency

Tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dapat dinilai melalui rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Kedua rasio ini memberikan gambaran mengenai seberapa baik perusahaan dapat mengelola kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya. Berikut ini adalah rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan yang mencakup pembayaran yang telah disepakati:

The Company's ability to meet its obligations can be assessed using solvency and liquidity ratios. These two ratios offer insights into how effectively the Company managed its short-term and long-term obligations. Below is a breakdown of the contractual maturity dates for financial liabilities, including the agreed-upon payments:

Tabel Rincian Jatuh Tempo Liabilitas Tahun 2025 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Liabilities Maturity Details in 2025 (Expressed in millions of Rupiah)

Uraian Description		Jatuh Tempo | Due Date				
		Kurang dari satu tahun Less than one year	Lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun More than one year and not later than three years	Lebih dari 3 tahun tetapi tidak lebih dari 5 tahun More than three years and not later than five years	Lebih dari 5 tahun More than five years	Jumlah Total
Utang usaha	Trade payables	1.536.512	-	-	-	1.536.512
Utang lain-lain	Other payables	567.105	-	-	-	567.105
Biaya yang masih harus dibayar	Accrued Expenses	240.923	-	-	-	240.923
Jumlah	Total	2.344.540	-	-	-	2.344.540

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban utangnya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi solvabilitas perusahaan antara lain adalah Rasio Utang terhadap Aset dan Rasio Utang terhadap Ekuitas.

Solvency Ratio

Solvency ratios are used to assess the Company's ability to meet all its debt obligations, both short-term and long-term. Key financial ratios to evaluate the Company's solvency include the Liability to Assets Ratio and the Liability to Equity Ratio.

Tabel Rasio Solvabilitas (Dinyatakan dalam %)
Table of Solvency Ratio (Expressed in %)

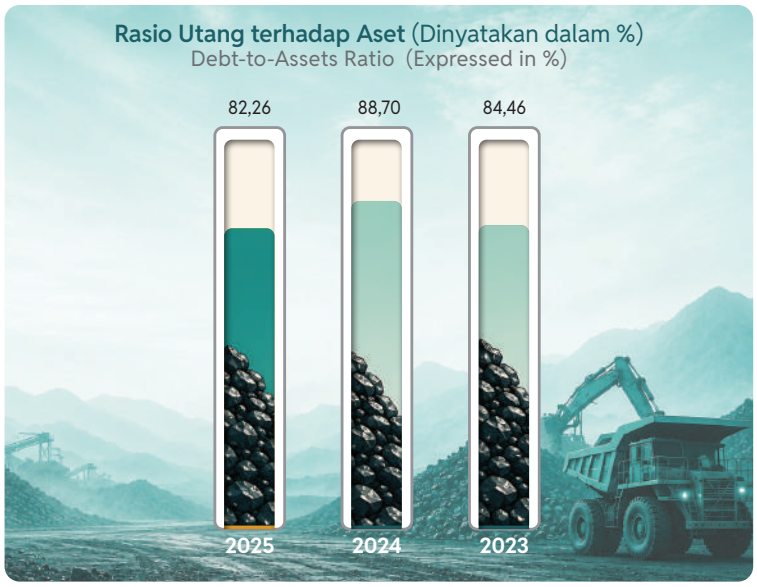
Uraian Description		2025	2024	2023
Rasio Utang terhadap Aset	Debt-to-Assets Ratio	82,26	88,70	84,46
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Debt-to-Equity Ratio	463,82	784,83	543,35

Rasio Utang terhadap Aset

Nilai rasio utang terhadap aset PLN BBN tahun 2025 adalah sebesar 82,26% yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 88,70%. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya percepatan penagihan piutang pada Tahun 2025, sehingga berdampak pada lebih kecilnya nilai piutang (aset lancar) tahun 2025 dibanding tahun 2024.

Debt-to-Assets Ratio

The debt-to-asset ratio of PLN BBN in 2025 is 82.26%, which is lower than the 88.70% in 2024. This is mainly due to the acceleration of receivables collection in 2025, resulting in a smaller value of receivables (current assets) in 2025 compared to 2024.

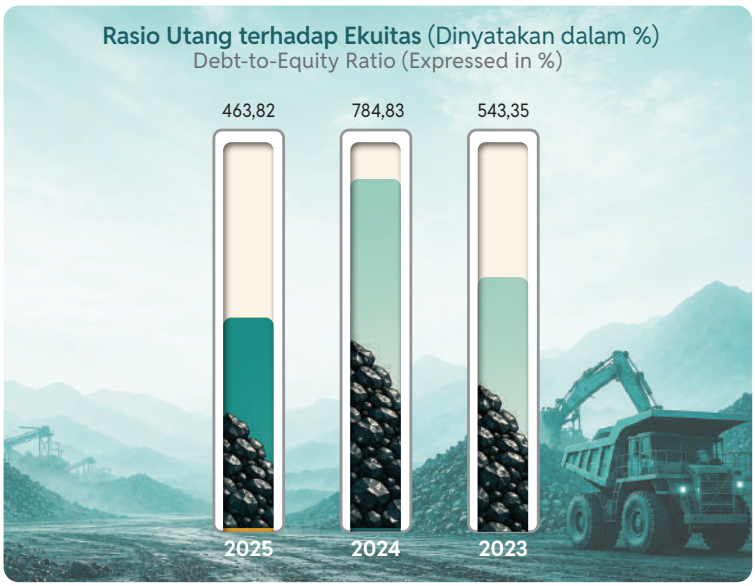


Rasio Utang terhadap Ekuitas

Nilai rasio utang terhadap ekuitas PLN BBN tahun 2025 adalah sebesar 463,82% yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 784.83%. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya percepatan pembayaran utang pada Tahun 2025, sehingga berdampak pada lebih kecilnya nilai utang (kewajiban lancar) tahun 2025 dibanding tahun 2024.

Debt-to-Equity Ratio

The debt-to-equity ratio of PLN BBN in 2025 was 463.82%, which was lower than the 784,83% in 2024. This is primarily due to the accelerated debt repayment in 2025, resulting in a smaller debt value (current liabilities) in 2025 compared to 2024.



Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Rasio ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana perusahaan memiliki aset yang cukup untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Beberapa rasio yang umum digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan antara lain adalah Rasio Kas dan Rasio Lancar.

Liquidity Ratio

Liquidity ratio measures the Company's ability to fulfill its maturing obligations. This ratio provide insight into whether the Company has enough assets to cover its current debts. Several ratios used to assess liquidity include the Cash Ratio and the Current Ratio.

Tabel Rasio Likuiditas (Dinyatakan dalam %)
Table of Liquidity Ratio (Expressed in %)

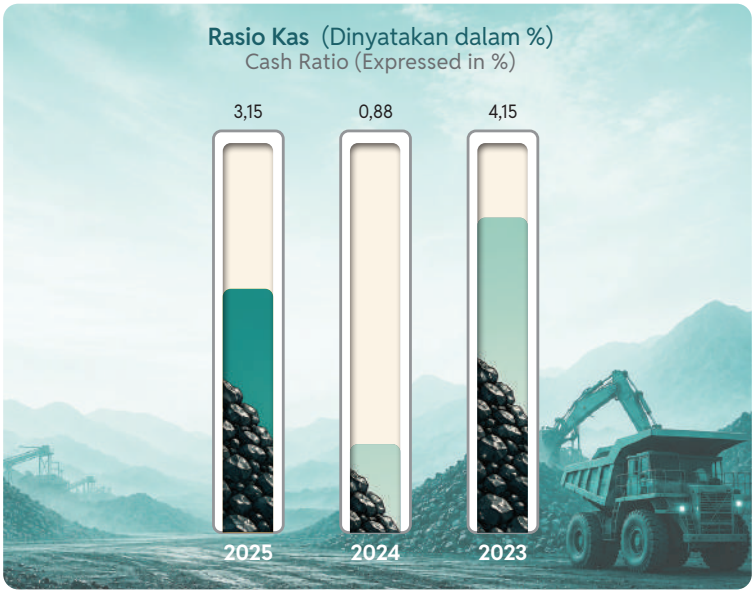
Uraian Description		2025	2024	2023
Rasio Kas	Cash Ratio	3,15	0,88	4,15
Rasio Lancar	Current Ratio	92,48	90,92	106,80

Rasio Kas

Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan kas dan setara kas. Nilai rasio kas PLN BBN tahun 2025 adalah sebesar 3,15%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,88%. Hal tersebut terutama disebabkan oleh percepatan penagihan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

Cash Ratio

The cash ratio measures the Company's ability to fulfill immediate obligations with cash and cash equivalents. The cash ratio of PLN BBN in 2025 was 3,15%, which was higher compared to 0.88% in 2024. This is mainly due to the acceleration of collections in 2025 compared to 2024.

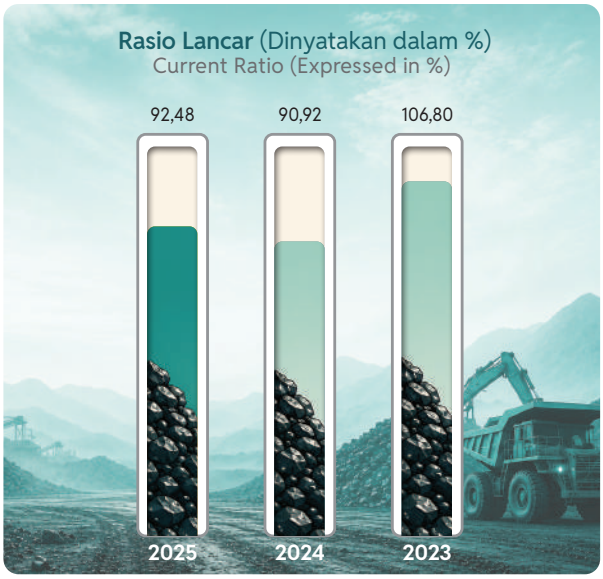


Rasio Lancar

Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo dengan aset lancar yang dimilikinya. Nilai rasio lancar PLN BBN tahun 2025 adalah sebesar 92,48%, yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 90,92%.

Current Ratio

The current ratio measures the Company's ability to fulfill its maturing obligations with its current assets. In 2025, the current ratio of PLN BBN was 92.48%, which higher than 2024 was 90.92%.



Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility

Kemampuan perusahaan dalam mengelola piutang dapat diukur melalui dua indikator utama, yaitu perputaran piutang dan *collection period*. Perputaran piutang yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menagih piutangnya. Sebaliknya, semakin kecil nilai *collection period*, semakin baik kinerja perusahaan dalam mengumpulkan piutang, yang berarti proses penagihan berlangsung lebih cepat.

Perputaran piutang PLN BBN tahun 2025 adalah sebesar 5 kali dengan nilai *collection period* selama 71,85 hari.

The Company's ability to manage receivables can be measured through two key indicators, namely receivables turnover and collection period. A higher receivables turnover indicates the Company's efficiency in collecting its receivables. Conversely, a shorter collection period reflects better company performance in collecting receivables, meaning the collection process is quicker.

In 2025, PLN BBN recorded a receivables turnover ratio of 5 times, with an average collection period of 71.85 days.

Tabel Rasio Likuiditas (Dinyatakan dalam %)
Table of Receivables Collectibility (Expressed in %)

Uraian Description		2025	2024	2023
Perputaran Piutang (kali)	Receivables Turnover (times)	5,00	4,65	4,73
Rata-rata Periode Penagihan (hari)	Average Collection Period (day)	71,85	78,56	77,19

Rasio Keuangan
Financial Ratios

Selain rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta tingkat kolektibilitas piutang, berikut diuraikan rasio penting lainnya yang relevan di PLN BBN untuk mengukur kinerja keuangan.

In addition to the ratios used to assess the Company's ability to fulfill short-term and long-term obligations, as well as the receivables collectability, the following outlines other important ratios relevant to PLN BBN for measuring financial performance.

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Rasio ini memberikan gambaran mengenai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan aset atau ekuitas yang dimilikinya. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan antara lain adalah Tingkat Pengembalian Aset, Tingkat Pengembalian Ekuitas, Margin Laba Kotor, dan Margin Laba Bersih.

Profitability Ratio

Profitability ratios are used to assess the Company's ability to generate profit from its operations. This ratio provides insight into the Company's efficiency in generating profits relative to its assets or equity. Several key indicators used to evaluate the Company's profitability include Return on Assets, Return on Equity, Gross Profit Margin, and Net Profit Margin.

Tabel Rasio Profitabilitas (Dinyatakan dalam %)
Table of Profitability Ratio (Expressed in %)

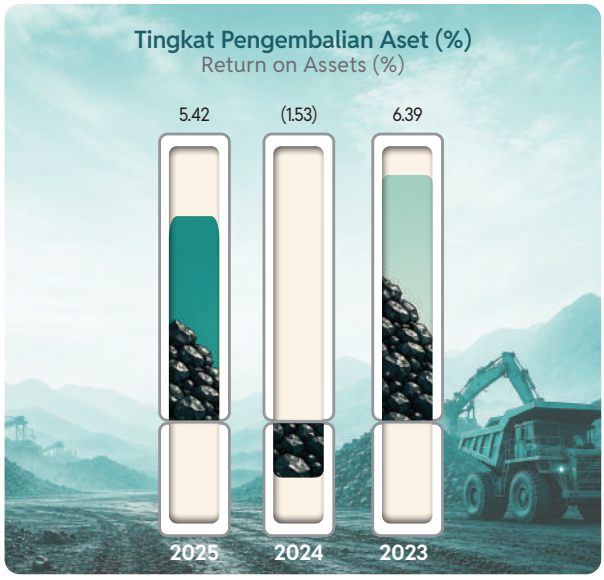
Uraian Description		2025	2024	2023
Tingkat Pengembalian Aset	Return on Assets	5,42	(1,53)	6,39
Tingkat Pengembalian Ekuitas	Return on Equity	30,55	(13,51)	41,10
Margin Laba Kotor	Gross Profit Margin	3,43	3,35	3,60
Margin Laba Bersih	Net Profit Margin	1,69	(0,54)	2,50

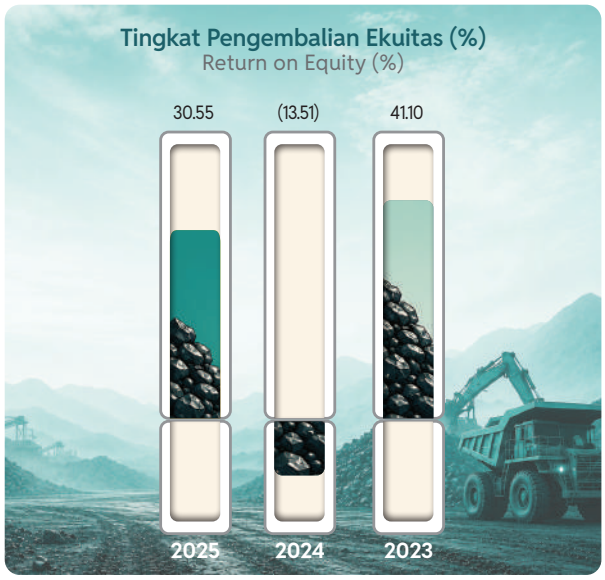
Tingkat Pengembalian Aset

Tingkat pengembalian aset digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas setiap nilai aset yang ada pada perusahaan. Nilai tingkat pengembalian aset PLN BBN tahun 2025 adalah sebesar 5,42%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar (1,53)%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh lebih tingginya nilai penjualan dan laba bersih perusahaan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

Return on Assets

Return on assets ratio measures the profit available to the company's owners for each unit of assets held by the Company. PLN BBN's return on assets in 2025 was 5.42%, which was higher compared to (1.53)% in 2024. This improvement is mainly driven by the Company's higher sales and net profit in 2025 compared to 2024.





Tingkat Pengembalian Ekuitas

Tingkat pengembalian ekuitas digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Nilai tingkat pengembalian ekuitas PLN BBN tahun 2025 adalah sebesar 30,55%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar (13,51)%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh lebih tingginya nilai penjualan serta laba bersih perusahaan pada tahun 2025 dibanding dengan tahun 2024.

Return on Equity

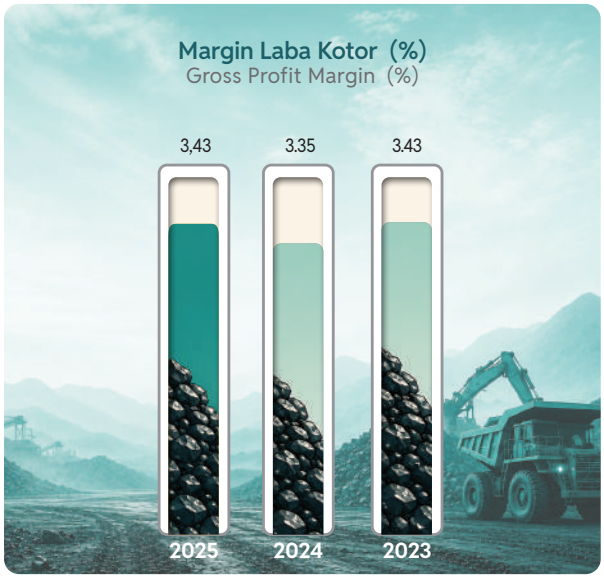
Return on equity ratio measures the profit acquisition available to the Company's owners based on the capital invested in the Company. PLN BBN's return on equity in 2025 was 30.55%, higher than (13.51)% in 2024. This increase was mainly driven by higher sales and net profits in 2025 compared to 2024.

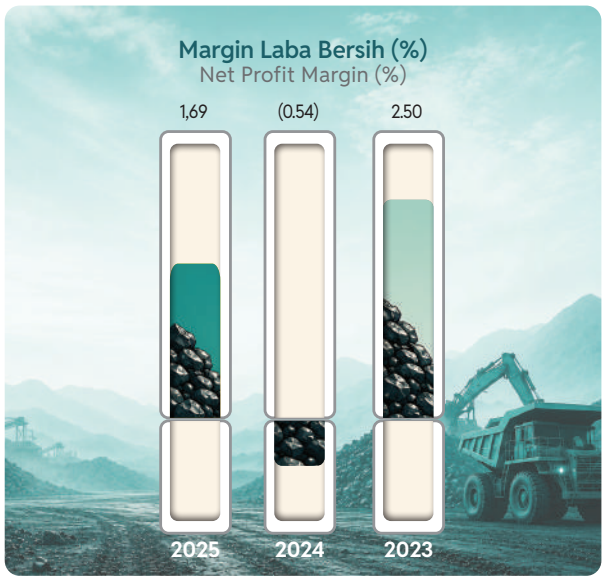
Margin Laba Kotor

Margin laba kotor adalah rasio profitabilitas untuk menghitung besaran persentase laba kotor atau laba sebelum pajak terhadap nilai laba usaha, yaitu pendapatan dari penjualan yang sudah dikurangi Biaya Pokok Penjualan. Nilai margin laba kotor PLN BBN tahun 2025 adalah sebesar 3,43%, yaitu sedikit lebih tinggi dengan tahun 2024 sebesar 3,35%.

Gross Profit Margin

Gross profit margin is a profitability ratio that calculates the percentage of gross profit or profit before tax relative to operating income, which is sales revenue after deducting the cost of sales. PLN BBN's gross profit margin in 2025 was 3.43% which is slightly higher compared to 2024 at 3.35%.





Margin Laba Bersih

Margin laba bersih adalah rasio untuk mengukur besaran laba bersih yang dihasilkan dari penjualan. Nilai margin laba bersih PLN BBN tahun 2025 adalah sebesar 1,69%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar (0,54)%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh nilai beban usaha dan beban lain-lain tahun 2025 yang lebih kecil dibanding pada tahun 2024 yang membukukan nilai provisi (cadangan piutang tak tertagih) dan beban bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan kepada vendor batubara.

Net Profit Margin

Net profit margin is a ratio used to measure the amount of net profit generated from sales. The net profit margin of PLN BBN in 2025 was 1.69%, which was higher compared to 2024 at (0.54)%. This increase is mainly driven by lower operating expenses and other expenses in 2025 compared to 2024, which recorded provisions (allowance for doubtful accounts) and interest expenses due to delayed payments to coal vendors.

Struktur Modal
Capital Structure

Struktur modal adalah salah satu hal yang paling penting agar usaha dapat beroperasi dengan lancar, hal ini dikarenakan struktur modal dapat mempengaruhi secara langsung posisi keuangan perusahaan. Struktur modal adalah perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri dari modal saham, saldo laba serta penghasilan komprehensif lain. Struktur modal Perusahaan juga terdiri dari pinjaman ekuitas Pemegang Saham. PLN BBN senantiasa mengelola struktur modal untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan nilai Pemegang Saham.

Struktur Modal tahun 2025 didominasi oleh liabilitas yaitu sebesar Rp2,36 triliun atau 82,26%, sedangkan ekuitas sebesar Rp507,92 miliar atau 17,74% dari jumlah aset Perusahaan.

Capital structure is one of the most important factors for smooth business operations, as it directly influences the Company's financial position. Capital structure refers to the ratio between liabilities and equity. Liabilities are classified into non-current and current categories, while equity consists of share capital, retained earnings, and other comprehensive income. The Company's capital structure also consists of Shareholders' equity. PLN BBN consistently manages its capital structure to support business sustainability and maximize Shareholder's value.

In 2025, the Company's Capital Structure is predominantly comprised of liabilities, totaling Rp2.36 trillion or 82.26%, while equity stands at Rp507.92 billion or 17.74% of the Company's total assets.

Tabel Struktur Modal (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Capital Structure (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025		2024		2023	
		Rp juta Rp million	Komposisi Composition	Rp juta Rp million	Komposisi Composition	Rp juta Rp million	Komposisi Composition
Liabilitas	Liabilities	2.355.842	82,26%	2.768.477.	88,70%	2.175.655	84,46%
Ekuitas	Equity	507.925	17,74%	352.750.	11,30%	400.414	15,54%
Aset	Assets	2.863.767	100,00%	3.121.227	100,00%	2.576.069	100,00%

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebijakan struktur modal tidak hanya ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko dan *control*, tetapi juga ditentukan oleh nilai, tujuan, preferensi, dan keinginan Manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) sebagai *input* pada keputusan struktur modal, yang memiliki implikasi pada kinerja keuangan suatu Perusahaan.

Management Policy on Capital Structure

The capital structure policy is influenced not only by internal and external factors affecting risk and control but also by the values, objectives, preferences, and intentions of the Management (Board of Commissioners and Board of Directors) as input for capital structure decisions, which in turn impact the Company's financial performance.

Direksi mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Direksi secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Dalam penentuannya, Direksi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya.

Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan. Struktur modal yang sehat dapat melindungi Perusahaan dari risiko finansial melalui komposisi utang dan ekuitas secara bijaksana. Hal ini juga berimplikasi terhadap tingkat likuiditas perusahaan yang dapat terjaga baik dengan adanya struktur modal yang baik dengan adanya keseimbangan antara proporsi keuangan dengan ekuitas.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Aktivitas Perusahaan rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perusahaan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko Pasar

- **Risiko nilai tukar mata uang asing**
  Secara kas, mayoritas transaksi Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, Perusahaan menilai bahwa risiko nilai tukar mata uang asing adalah minimal.
- **Risiko suku bunga**
  Eksposur terhadap suku bunga dimonitor untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Perusahaan. Pinjaman pemegang saham Perusahaan menggunakan suku bunga tetap, sehingga tidak terdapat risiko pengaruh suku bunga mengambang dari pinjaman pemegang saham. Pada tanggal 31 Desember 2025, aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang adalah kas dan setara kas di bank. Risiko pengaruh suku bunga mengambang pada kas dan setara kas dan setara kas di bank tidak signifikan.

Risiko kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang

The Board of Directors manages capital risk to ensure the Company can continue its operations and meet capital adequacy ratio requirements. The Board of Directors regularly reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks. In making decisions, the Board of Directors consults and coordinates with the Board of Commissioners and its supporting organs.

Therefore, the Company's policy in securing financing will always take into account the potential financial risks that may arise in the future. A healthy capital structure can protect the Company from financial risks through a prudent composition of debt and equity. This also impacts the Company's liquidity levels, which can be well-maintained with a strong capital structure that ensures a balanced financial proportion with equity.

Management Policy on Capital Structure

The Company's activities are vulnerable to various financial risks, such as market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk. The Company's overall risk management program is focused on the unpredictable financial markets, and the Company strives to minimize the potentially adverse effects on its financial performance.

Risk management is the Board of Directors' responsibility. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Company's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and the liquidity risk.

Market Risk

- **Foreign exchange risk**
  On a cash basis, the majority of the Company's transactions are conducted in Rupiah, the impact of foreign exchange rate fluctuations is minimized. As a result, the Company assesses the foreign exchange risk as minimal
- **Interest rate risk**
  Interest rate exposure is monitored to minimize any negative impact to the Company. Interest rate of the Company's shareholder loan and notional pooling are using fixed rates, therefore there is no floating interest rate risk from the shareholder loan.
  As at December 31, 2025, the financial assets and financial liabilities of the Company which are impacted by floating interest rates are cash and cash equivalents. Floating interest rate risk on cash and cash equivalents is not significant.

Credit risk

Credit risk arises from cash and cash equivalents, trade

usaha, dan piutang non-usaha. Kebijakan umum Perusahaan untuk penjualan batubara ke pelanggan baru dan yang sudah ada adalah sebagai berikut:

- Menyeleksi pelanggan-pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat serta reputasi yang baik.
- Penerimaan pelanggan baru dan penjualan batubara disetujui oleh karyawan yang berwenang sesuai dengan struktur pendelegasian wewenang yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Untuk piutang usaha, Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan.

Untuk kas dan setara kas, Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan bank yang digunakan untuk penempatan kas. Pemilihan bank dilakukan dengan mempertimbangkan peringkat kredit eksternal yang tersedia.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Perusahaan kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham. Direksi secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Selain itu, Perusahaan secara berkala meninjau dan menjaga struktur modal untuk memastikan kemampuan dan kelayakan yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa mendatang dan efisiensi modal Perusahaan, meliputi profitabilitas saat ini dan proyeksi ke depan, serta proyeksi arus kas operasional. Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2025.

Manajemen mengelola struktur permodalan dan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham. Manajemen memastikan adanya tingkat pengembalian modal dengan menjaga kebijakan modal yang terdiri dari modal saham biasa dan saldo laba. Pengawasan struktur modal dilakukan dengan menggunakan rasio liabilitas terhadap ekuitas.

receivables and non-trade receivables. The Company's general policy regarding coal sales to new and existing customers is as follows:

- Selecting customers with strong financial conditions and a good reputation.
- New customer acceptance and coal sales are approved by authorized employees in accordance with the delegation of authority structure determined by the Company.

For trade receivables, Management is confident in its ability to continue controlling and maintaining minimal exposure to credit risk, considering the Company has clear policies in customer selection.

For cash and cash equivalents, Management is confident in its ability to continue controlling and maintaining minimal exposure to credit risk, considering the Company has a clear policy in selecting banks used for cash placements. The selection of banks is made by considering the available external credit ratings.

Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company's capital structure consists of shareholders' equity. The Board of Directors regularly reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks. In addition, the Company periodically reviews and maintains its capital structure to ensure its capabilities and viability. This is conducted by considering future capital needs and the Company's capital efficiency, including current profitability and future projections, as well as operational cash flow projections. Management believes that the book value of its financial assets and liabilities approaches the fair value of those financial assets and liabilities as of December 31, 2025.

Management manages the capital structure and maintains a sound capital ratio to support the business and maximize returns for Shareholders. Management ensures a level of return on capital by maintaining a capital policy consisting of ordinary stock and retained earnings. Supervision of the capital structure is conducted using the debt-to-equity ratio.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2025

Comparison between Target and Actual Performance of the Company in 2025

Penilaian atas pencapaian kinerja Perusahaan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja Perusahaan melalui membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

The assessment of the Company's performance achievement is one of the efforts to enhance performance growth of the Company by comparing the actual realization with the targets previously established in the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP).

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Operasional Tahun 2025

Comparison between Target and Actual Operational Performance in 2025

Realisasi Kinerja Pasokan Batubara

Realization of Coal Supply Performance

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Volume Pasokan Batubara ke PLTU PLN Grup Tahun 2025
(Dinyatakan dalam MT, kecuali dinyatakan lain)
Table of Comparison between Target and Actual Coal Supply Volume to the PLN Group CFPPs in 2025 (Expressed in MT, unless otherwise stated)

Uraian Description		Target RKAP 2025 2025 WP&B Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi terhadap RKAP 2025 Realization to the 2025 WP&B
PLTU IPP	CFPP of IPP	6.207.502	5.449.045	87,78%
PLTU PLN Grup	CFPP of PLN Group	5.802.500	6.441.234	111,00%
Jumlah	**Total**	**12.010.000**	**11.890.279**	**99,00%**

Realisasi pengiriman batubara ke PLTU IPP dan PLN *Group* pada tahun 2025 adalah sebanyak 11.890.279 MT yaitu tercapai 99,00% dari target sebanyak 12.010.000 MT. Pencapaian ini disebabkan belum terpenuhinya volume pasokan ke PLTU IPP.

The realization of coal delivery to the IPP and PLN Group CFPPs in 2025 was 11,890,279 MT, achieving 99,00% of the target of 12.010.000 MT. This achievement was due to the unfulfilled supply volume to the IPP CFPPs.

Realisasi Kinerja Penjualan Batubara

Realization of Gas Sales Performance

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Pemenuhan Spesifikasi Pengiriman Batubara Tahun 2025
Table of Comparison Between Targets and Actual Compliance with Coal Shipment Specifications in 2025

Uraian Description		Target RKAP 2025 2025 WP&B Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi terhadap RKAP 2025 Realization to the 2025 WP&B
Kualitas Batubara	Coal Quality	100,00%	102,82%	102,82%
Ketepatan waktu pengiriman	Timeliness of delivery	100,00%	123,57%	110,00%*

Keterangan/Note: *) Untuk pencapaian ≥ 110,00% ditulis 110,00%./For achievements ≥ 110.00%, it is written as 110.00%

Realisasi kualitas penjualan batubara ke PLTU IPP dan PLN *Group* adalah sebesar 102,82% atau tercapai 102,82% dari target RKAP sebesar 100,00%. Ketercapaian ini didukung oleh kualitas spesifikasi batubara yang diterima oleh PLTU sesuai dengan kesepakatan bersama.

Selain itu, realisasi ketepatan waktu pengiriman batubara ke PLTU IPP dan PLN *Group* sesuai kontrak adalah sebesar 123,57% atau tercapai 110,00%* dari target RKAP sebesar 100,00%. Ketercapaian ini dipengaruhi oleh proses *loading* dan *unloading* yang tepat waktu sehingga menjaga *security of supply.*

Keterangan: *) Untuk pencapaian ≥ 110,00% ditulis 110,00%.

The realization of coal sales quality to the IPP and PLN Group CFPPs is 102.82%, achieving 102.82% of the WP&B target of 100.00%. This achievement is supported by the quality specifications of the coal received by the power plants according to the mutual agreement.

Additionally, the realization of on-time coal delivery to the IPP and PLN Group CFPPs according to the contract was 123,57% achieving 117.47% of the WP&B target of 110.00%*. This achievement was influenced by timely loading and unloading processes, thereby maintaining the security of supply.

Note: *) For achievements ≥ 110.00%, it is written as 110.00%

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pendapatan dan Laba Tahun 2025
Comparison between Target and Actual Revenue and Profit in 2025

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Pemenuhan Spesifikasi Pengiriman Batubara Tahun 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Comparison between Target and Actual Sales and Profit in 2025 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		Target RKAP 2025 2025 WP&B Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi terhadap RKAP 2025 Realization to the 2025 WP&B
Pendapatan	Revenue	9.619.143	9.204.576	95,69%
Laba Bruto	Gross Profit	414.945	315.647	76,07%
Laba Tahun Berjalan	Profit for the Year	268.502	155.175	57,79%

Realisasi pendapatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp9,20 triliun yaitu tercapai 95,69% dari RKAP Tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan volume penjualan serta peningkatan harga satuan penjualan batubara CIF.

Sedangkan untuk realisasi laba tahun berjalan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp155,17 miliar yaitu tercapai 57,79% dari RKAP Tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh perbaikan proses penagihan kepada pelanggan yang berdampak pada turunnya nilai provisi (beban administrasi 2024 tinggi) dan tepat waktunya pembayaran kewajiban jatuh tempo kepada mitra, sehingga terhindar dari beban bunga atas keterlambatan pembayaran kewajiban jatuh tempo (beban lain-lain 2024 tinggi). Berdasarkan hal tersebut. PLN BBN mampu mempebaiki kinerja keuangan pada tahun 2025.

The revenue realization in 2025 amounted to Rp9.20 trillion, achieving 95.69% of the 2025 WP&B. This achievement was supported by an increase in sales volume and an increase in the CIF coal sales unit price.

Meanwhile, the realization of the profit for the year in 2025 was Rp155.17 billion, which is 57.79% of the 2025 WP&B. This achievement was supported by improvements in the customer billing process, which led to a decrease in provisions (high administrative expenses in 2024) and timely payment of due obligations to partners, thus avoiding interest charges on late payments (high other expenses in 2024). Based on this, PLN BBN was able to improve its financial performance in 2025.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Posisi Keuangan Tahun 2025
Comparison between Target and Actual Financial Position Performance in 2025

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2025 (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Comparison between Target and Actual Financial Position in 2025 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		Target RKAP 2025 2025 WP&B Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi terhadap RKAP 2025 Realization to the 2025 WP&B
Jumlah aset	Total assets	3.581.017	2.863.767	79,97%
Jumlah liabilitas	Total liabilities	2.817.252	2.355.842	83,62%
Jumlah ekuitas	Total equity	763.765	507.925	66,50%

Realisasi jumlah aset pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2,86 triliun yaitu tercapai 79,97% dari RKAP Tahun 2025. Pencapaian tersebut terutama didorong oleh peningkatan piutang pada tahun 2025.

The realization of total assets in 2025 amounted to Rp2.86 trillion, achieving 79,97% of the 2025 WP&B. This achievement was primarily driven by an increase in receivables in 2025.

Realisasi jumlah liabilitas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2,36 triliun yaitu tercapai 83,62% dari RKAP Tahun 2025. Pencapaian tersebut terutama didorong oleh turunnya nilai hutang usaha sebesar Rp106,02 miliar atau 6% dari tahun 2024 serta turunnya nilai hutang lainnya atau hutang notpol kepada PLN Grup sebesar Rp235,51 miliar atau 39% dari tahun 2024.

The realization of total liabilities in 2025 amounted to Rp2.36 trillion, achieving 83,62% of the 2025 WP&B. This achievement was primarily driven by decrease in trade payables of Rp106.02 billion, or 6%, compared to 2024, and decrease in other payables, or notpol payables, to the PLN Group of Rp235.51 billion, or 39%, compared to 2024.

Sedangkan realisasi jumlah ekuitas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp507,92 miliar yaitu tercapai 66,50% dari RKAP Tahun 2025. Pencapaian tersebut terutama didorong oleh kinerja keuangan PLN BBN pada tahun 2025 yang mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2024. PLN BBN mendapatkan laba bersih sebesar Rp155,17 miliar pada tahun 2025 yang terakumulasi pada saldo laba.

Meanwhile, the realization of total equity in 2025 amounted to Rp507.92 billion, achieving 66.50% of the 2025 WP&B. This achievement was mainly driven by PLN BBN's improved financial performance in 2025 compared to 2024. PLN BBN posted a net profit of Rp155.17 billion in 2025, which was accumulated in retained earnings.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Struktur Modal Tahun 2025
Comparison between Target and Actual Capital Structure Performance in 2025

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Struktur Modal Tahun 2025 (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Comparison between Target and Actual Capital Structure in 2025 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		Target RKAP 2025 2025 WP&B Target		Realisasi 2025 2025 Realization		Realisasi terhadap RKAP 2025 Realization to the 2025 WP&B
		Nominal	Komposisi Composition	Nominal	Komposisi Composition	
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	2.817.252	78,67%	2.355.842	82,26%	83,62%
Jumlah Ekuitas	Total Equity	763.765	21,33%	507.925	17,74%	66,50%
Jumlah Aset	Total Assets	3.581.017	100,00%	2.863.767	100,00%	79,97%

Realisasi struktur modal pada tahun 2025 terdiri dari jumlah liabilitas sebesar Rp2,36 triliun atau 82,26% dari jumlah aset dan jumlah ekuitas sebesar Rp507,92 miliar atau sebesar 17,74% dari jumlah aset.

The realization of capital structure in 2025 consisted of total liabilities of Rp2.36 trillion, or 82.26% of total assets, and total equity of Rp507.92 billion, or 17.74% of total assets.

Target/Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2026

Target/Projection of Company Performance for 2026

Sebelum dimulainya tahun anggaran baru PLN BBN membuat target terkait kinerja yang akan dicapai untuk tahun mendatang dalam RKAP. Hal ini sebagai bentuk perbaikan Perusahaan dengan melakukan perbandingan antara realisasi tahun sebelumnya dengan target yang akan ditetapkan selanjutnya.

Before the start of the new fiscal year, PLN BBN establishes performance targets for the upcoming year in its Annual Budget & Operational Plan (WP&B). As part of the Company's efforts to enhance performance, a comparison is conducted between the previous year's actual results and the targets to be set for the following period.

Asumsi Penyusunan Target/ Proyeksi Tahun 2026

Assumptions for the Formulation of 2026 Target/Projection

Untuk melaksanakan rencana kerja Perusahaan, perhitungan anggaran perusahaan menggunakan asumsi berdasarkan Surat dari PT PLN Energi Primer Indonesia dengan Nomor: 14052/KEU.00.02/PLNEPI0501/2025 tanggal 25 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Perubahan Asumsi Makro dalam Penyusunan RKAP Tahun 2026-2027 Anak Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia, sebagai berikut:

a. Nilai Tukar = 16.500 (Rp/USD)
b. Pertumbuhan Ekonomi = 5,4%
c. Harga Batubara Rata-Rata = 1.049 (Rp/Kg)
d. Inflasi = 2,5%

To implement the Company's operational plan, the Company's budget calculation uses assumptions based on the Letter from PT PLN Energi Primer Indonesia with Number: 14052/KEU.00.02/PLNEPI0501/2025 dated October 25, 2025, regarding the Submission of Changes in Macro Assumptions in the Preparation of the 2026-2027 WP&B of PT PLN Energi Primer Indonesia Subsidiaries, as follows:

a. Exchange Rate = 16.500 (Rp/USD)
b. Economic Growth = 5,4%
c. Average Coal Price = 1.049 (Rp/Kg)
d. Inflation = 2,5%

Target Kinerja Operasional Tahun 2026

Operational Performance Target for 2026

Target Kinerja Penjualan Pasokan Batubara 2026

Coal Supply Sales Performance Target for 2026

Tabel Target Volume Pasokan Batubara Tahun 2026
Table of Coal Supply Volume Target for 2026

Uraian Description		Target Tahun 2026 2026 Target
PLTU IPP	CFPP of IPP	6.355.000
PLTU PLN *Group*	CFPP of PLN Group	6.525.000
Non Kelistrikan	Non-Electricity	220.000
Jumlah	Total	13.100.000

Target pengiriman batubara di tahun 2026 ke PLTU IPP adalah sebanyak 6.355.000 MT dan ke PLN *Group* adalah sebanyak 6.525.000 MT. Hal ini diasumsikan dengan adanya peningkatan pertumbuhan pasar, baik PLTU IPP maupun PLN *Group*.

The target for coal delivery in 2026 to CFPPs of IPP is 6,355,000 MT, and to CFPPs of PLN Group is 6,525,000 MT. It is assumed with the expected market growth for both CFPPs of IPP and the PLN Group.

Tabel Target kualitas Batubara Tahun 2026 (Dinyatakan dalam TBTU)
Table of Coal Quality Target for 2026 (Stated in TBTU)

Uraian Description		Target Tahun 2026 2026 Target
Kualitas Batubara	Coal Quality	100%

Target kualitas penjualan batubara ke PLTU IPP dan PLN *Group* adalah sebesar 100%. Hal ini diasumsikan karena perusahaan terus menjaga kualitas pasokan batubara yang dikirimkan, baik ke PLTU PLN *Group* maupun PLTU IPP.

The quality target for coal sales to CFPPs of IPP and the PLN Group is 100%. This assumption is based on the fact that the Company consistently maintains the quality of the coal it supplies to both the PLN Group's and IPP's CFPPs.

Target Kinerja Segmen Usaha Lainnya

Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara
Target Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara (PLTU PLN) di tahun 2026 adalah 100% hal ini diasumsikan karena perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga rantai pasok energi primer dan menjaga keandalan operasional.

Other Business Segment Performance Target

Security of Supply of Primary Energy – Coal
The target for the Primary Energy Supply Security for Coal (CFPP of PLN) in 2026 is 100%. It is assumed that the Company is committed to continuously maintaining the primary energy supply chain and ensuring operational reliability.

Target Kinerja Pendapatan dan Laba Tahun 2026
Revenue and Profit Performance Target for 2026

Kinerja keuangan diuraikan dalam pencapaian PLN BBN pada target pendapatan dan laba Perusahaan sebagaimana pada tabel berikut:

Financial performance is detailed in PLN BBN's achievements regarding the Company's revenue and profit targets, as shown in the following table:

Tabel Target Penjualan dan Laba Tahun 2026 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
Table of Sales and Profit Target for 2026 (Expressed in millions of Rupiah)

Uraian Description		Target Tahun 2026 2026 Target
Pendapatan Usaha	Operating Revenue	10.366.604
Laba Bruto	Gross Profit	373.017
Laba Tahun Berjalan	Profit for the Year	226.440

Target pendapatan usaha pada tahun 2026 adalah sebesar Rp10,36 Triliun. hal ini diasumsikan karena adanya peningkatan dari volume pasokan batubara tahun 2026.

The operating revenue target for 2026 is Rp10.36 trillion. This is based on the assumption of an increase in coal supply volume in 2026.

Sedangkan target laba tahun berjalan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp226,44 miliar. Hal ini diasumsikan karena adanya peningkatan pada nilai beban usaha.

Meanwhile, the profit for the year target for 2026 is Rp226.44 billion. This is based on the assumption of an increase in operating expenses.

Target Posisi Keuangan Tahun 2026
Financial Position Target for 2026

Tabel Target Posisi Keuangan Tahun 2026 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
Table of Financial Position Target for 2026 (Expressed in millions of Rupiah)

Uraian Description		Target Tahun 2026 2026 Target
Jumlah Aset	Total Assets	3.678.814
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	2.943.088
Jumlah Ekuitas	Total Equity	735.727

Target Struktur Modal Tahun 2026
Capital Structure Target for 2026

Tabel Target Struktur Modal Tahun 2026 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
Table of Capital Structure Target for 2026 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		Nominal	Komposisi Composition
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	2.943.088	80%
Jumlah Ekuitas	Total Equity	735.727	20%
Jumlah Aset	Total Assets	3.678.814	100%

Jumlah komposisi liabilitas terhadap aset tahun 2026 diproyeksikan sebesar 80% dan jumlah komposisi ekuitas terhadap aset tahun 2026 diproyeksikan sebesar 20%.

The projected composition of liabilities to assets for 2026 is 80%, and the projected composition of equity to assets for 2026 is 20%.

Target Kebijakan Dividen Tahun 2026
Dividend Policy Target for 2026

Kebijakan dividen ke depan mengacu pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

The dividend policy moving forward will be based on Resolutions made by the General Meeting of Shareholders (GMS), in compliance with applicable and relevant laws and regulations.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Goods Investment

PT PLN Batubara Niaga merupakan Anak Perusahaan dari PT PLN Energi Primer Indonesia yang telah berkomitmen untuk menjamin *security of supply pasokan* batubara bagi PLTU PLN dan IPP serta industri non ketenagalistrikan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Oleh karena itu, apabila ada penugasan yang membutuhkan mitra kerja sama untuk mendukung operasional bisnis Perusahaan akan melakukan investasi baik yang signifikan maupun tidak. Namun hingga tahun 2025 PLN BBN belum melakukan ikatan yang material untuk investasi barang modal. Sehingga tidak ada informasi yang dapat diungkapkan terkait tujuan dari ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

PT PLN Batubara Niaga is a subsidiary of PT PLN Energi Primer Indonesia that is committed to ensuring the security of coal supply for CFPPs of PLN and IPPs, as well as non-electricity industries based on the principles of Good Corporate Governance. Therefore, if there is an assignment that requires a partnership to support the Company's business operations, it will make investments, whether significant or not. However, until 2025, PLN BBN had not made any material commitments for capital investment. Therefore, there is no information that can be disclosed regarding the purpose of the commitment, the expected sources of funds to meet the commitment, the currency denomination, or the steps planned by the Company to hedge the risk from the related foreign currency position.

Perjanjian Penting

Perjanjian Penjualan Batubara

1. Pada tanggal 17 Februari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pasokan Batubara CIF dengan PLN EPI, pihak berelasi, dimana Perusahaan bersedia untuk memenuhi kebutuhan Batubara unit-unit pembangkit listrik milik PNP. Dalam perjanjian tersebut Perusahaan berkomitmen untuk menjual 1,07 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
2. Pada tanggal 16 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pasokan Batubara CIF dengan PLN EPI, pihak berelasi, dimana Perusahaan bersedia memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PIP dan anak perusahaannya dengan total 905 ribu metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
3. Pada tanggal 15 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pasokan Batubara CIF dengan PLN EPI, pihak berelasi, dimana Perusahaan bersedia untuk memenuhi kebutuhan batubara unit-unit pembangkit listrik milik PLN dengan total 825 ribu metrik ton batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
4. Pada tanggal 31 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pasokan Batubara CIF dengan SGPJB, dimana Perusahaan bersedia memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan batubara pembangkit listrik di PLTU Jawa-7 dengan total 1,05 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

Significant Agreements

Coal Sales Agreement

1. On February 17, 2025, the Company entered into a CIF Coal Supply Contract Agreement with PLN EPI, a related party, in which the Company agreed to meet the coal needs of PNP's power plant units. In the agreement, the Company committed to selling 1.07 million metric tons of coal. This agreement is in effect until December 31, 2025.
2. On January 16, 2025, the Company entered into a CIF Coal Supply Contract Agreement with PLN EPI, a related party. The Company agreed to meet the coal needs for the PIP and its subsidiaries' power plant units with a total of 905 thousand metric tons of coal. This agreement is in effect until December 31, 2025.
3. On January 15, 2025, the Company entered into a CIF Coal Supply Contract Agreement with PLN EPI, a related party, in which the Company agreed to meet the coal needs of PLN's power plant units with a total of 825 thousand metric tons of coal. This agreement is in effect until December 31, 2025.
4. On January 31, 2025, the Company entered into a CIF Coal Supply Contract Agreement with SGPJB, under which the Company agreed to meet the coal supply needs for the power plant at Jawa-7 CFPP with a total of 1.05 million metric tons of coal. This agreement is in effect until December 31, 2025.

Perjanjian Pembelian Batubara

1. Pada tanggal 3 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Jhonlin Group dengan sumber tambang PT Arutmin Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN *Group* dan IPP dengan total 3 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Pada tanggal 20 November 2024, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Borneo Indobara, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN dan IPP dengan total 1,2 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
3. Pada tanggal 31 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Jhonlin Group dengan sumber tambang PT Bangun Karya Pratama Lestari, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN dan anak perusahaannya dengan total 1 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
4. Pada tanggal 3 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Mifa Bersaudara, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN dan anak perusahaannya dengan total 1,2 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
5. Pada tanggal 2 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Tiwa Abadi, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN dan anak perusahaannya dengan total 1,2 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

Perjanjian Sewa ISP dan IC

1. Pada tanggal 24 Juni 2024, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Jasa Penyediaan (Pembangunan dan Pengelolaan) ISP dan IC PLTU Meulaboh Unit 3 & 4 dengan Konsorsium PT Adhi Guna Putera dan PT Pelabuhan Bara Utama ("PT AGP-PBU"), sebagai tindaklanjut penugasan dari pemegang saham (PLN EPI) untuk menyediakan tempat penyimpanan batubara tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan batubara PLTU Meulaboh 3 & 4.
2. Perjanjian ini telah diamandemen sebanyak empat kali, dengan perubahan utama mencakup penyesuaian tanggal mulai beroperasinya fasilitas menjadi 1 Agustus 2025, pengambilan minimum bulanan menjadi 130.000 MT per bulan (1,56 juta MT per tahun), serta penyesuaian jangka waktu perjanjian dari 25 tahun menjadi 24 tahun mengikuti masa berlaku *Coal Supply Agreement* antara Perusahaan dengan PT Meulaboh Power Generation.

Coal Purchase Agreements

1. On January 3, 2025, the Company entered into a Coal Purchase Contract (FOB) with PT Jhonlin Group from PT Arutmin Indonesia's mines, to meet the 3 million metric tons of coal needs for the PLN Group and IPP-owned CFPPs. This agreement ends on December 31, 2025.
2. On November 20, 2024, the Company entered into a Coal Purchase Contract (FOB) with PT Borneo Indobara to meet the coal needs for PLN and IPP-owned CFPPs with a total of 1.2 million metric tons of coal. This agreement is in effect until December 31, 2025.
3. On January 31, 2025, the Company entered into a Coal Purchase Contract (FOB) with PT Jhonlin Group sourced from PT Bangun Karya Pratama Lestari, to meet the 1 million metric tons of coal needs for the PLN and its subsidiaries' CFPPs. This agreement is in effect until December 31, 2025.
4. On January 3, 2025, the Company entered into a Coal Purchase Contract (FOB) with PT Mifa Bersaudara to meet the coal needs for the PLN and its subsidiaries' CFPPs with a total of 1.2 million metric tons of coal. This agreement is in effect until December 31, 2025.
5. On January 2, 2025, the Company entered into a Coal Purchase Contract (FOB) with PT Tiwa Abadi to meet the 1.2 million metric tons of coal needs for the PLN and its subsidiaries' CFPPs. This agreement is in effect until December 31, 2025.

ISP and IC Lease Agreements

1. On June 24, 2024, the Company entered into a Service Provision Contract Agreement (Construction and Management) for ISP and IC of Meulaboh Units 3 & 4 CFPP with the Consortium of PT Adhi Guna Putera and PT Pelabuhan Bara Utama ("PT AGP-PBU"), as a follow-up to the assignment from the shareholders (PLN EPI) to provide additional coal storage to meet the coal needs of Meulaboh 3 & 4 CFPP.
2. This agreement has been amended four times, with the main changes including the adjustment of the facility's operational start date to August 1, 2025, the minimum monthly off-take to 130,000 MT per month (1.56 million MT per year), and the adjustment of the agreement's term from 25 years to 24 years in accordance with the term of the Coal Supply Agreement between the Company and PT Meulaboh Power Generation.

Kontribusi Pajak kepada Negara

Tax Contribution to the State

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap entitas yang berada dalam suatu negara, baik itu individu maupun badan usaha atau perusahaan. Membayar pajak merupakan suatu bentuk kontribusi dan apresiasi bagi Negara. Selain sebagai sebuah kewajiban, pajak juga dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Uraian terkait Kontribusi Pajak kepada Negara juga disajikan dalam Laporan Keberlanjutan sub bab Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Pengelolaan Pajak

PLN BBN sebagai Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) ikut berperan sebagai *agent of value creator* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke Negara. Oleh karena itu, komitmen PLN BBN kepada Negara terwujud dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban Perusahaan salah satunya adalah sebagai Wajib Pajak melalui pembayaran setoran pajak.

Aspek perpajakan di PLN BBN berada di bawah pengelolaan Divisi Keuangan. Terkait dengan perpajakan, secara umum bertugas untuk mengelola segala aspek mengenai perpajakan yang terjadi pada setiap transaksi di PLN BBN sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku (memotong, menyetorkan dan melaporkan) serta melakukan *Tax Planning* sesuai dengan proses bisnis dan RKAP.

Pada tahun 2025, PLN BBN telah melaksanakan strategi perpajakan yang telah ditinjau dan disetujui oleh Manajemen, melalui perubahan mekanisme Restitusi PPN dari Tahunan menjadi Bulanan, penerbitan SKB PPh 22, dan dilakukan pemilahan pengkreditan Pajak Masukan. Strategi ini ditinjau secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan regulasi atau peraturan perpajakan baru.

Setoran Pajak

Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan setoran pajak disebabkan oleh meningkatnya volume pasokan yang berdampak pada bertambahnya jumlah transaksi, sehingga kewajiban perpajakan yang harus disetorkan juga mengalami peningkatan.

Taxes are an obligation for every entity within a country, whether individual, business, or Company. Paying taxes is a form of contribution and appreciation to the State. In addition to being a legal obligation, taxes also serve as a tool to enhance the credibility of a Company. A description of the Company's Tax Contributions to the State is also presented in the Sustainability Report, specifically in the section on Contributions to National Economic Growth.

Tax Management

PLN BBN, as a company predominantly owned by PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), plays a key role as an agent of value creator and is expected to contribute profits to the State. Therefore, PLN BBN's commitment to the State is demonstrated through compliance with its obligations, including fulfilling its duties as a Taxpayer through tax payments.

The taxation management at PLN BBN is handled by the Finance Division. This division is responsible for managing all aspects of taxation related to the PLN BBN's transactions, ensuring adherence to applicable tax laws (including tax deductions, payments, and reporting), and conducting Tax Planning aligned with the Company's business processes and the WP&B.

In 2025, PLN BBN implemented a tax strategy that was reviewed and approved by Management, by changing the VAT Refund mechanism from annual to monthly, issuing PPh 22 Exemption Certificates (SKB PPh 22), and segregating input tax credits. This strategy is reviewed periodically, especially when there are changes in regulations or new tax rules.

Tax Payment

This increase was due to higher tax remittances resulting from increased supply volume, which led to more transactions, thereby increasing the tax obligations to be remitted.

Tabel Setoran Pajak (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Tax Payment (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2	Income Tax Article 4 paragraph 2	160	293	72	(45,39)%
PPh Pasal 15	Income Tax Article 15	20.170	20.051	18.069	0,59%
PPh Pasal 21	Income Tax Article 21	3.585	1.817	1.455	97,30%
PPh Pasal 22	Income Tax Article 22	81.101	77.116	56.622	5,17%
PPh Pasal 23	Income Tax Article 23	10.530	9.354	3.318	12,57%
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran	Output Value-Added Tax (VAT)	1.011.588	961.725	411.049	5,18%
Jumlah Setoran Pajak	Total Tax Payment	1.127.134	1.070.356	490.585	5,30%

Selain itu, PLN BBN juga secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi, PPh 22, PPh 15, PPh Pasal 23/26, dan Pasal 4 ayat 2.

Furthermore, PLN BBN actively participates in the withholding, depositing, and reporting of taxes, including Income Tax Article 21 on income received by individual taxpayers, Income Tax Article 22, Income Tax Article 15, Income Tax Articles 23/26, and Article 4, paragraph 2.

Kepatuhan terhadap Aspek Perpajakan

Selama tiga tahun terakhir, PLN BBN tidak memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun.

Compliance with Taxation Aspects

Over the past three years, PLN BBN has not received any guilty verdicts from the highest tax court regarding tax-related matters.

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Kebijakan Pembagian Dividen

Kebijakan Dividen PLN BBN diatur berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 26 tentang Penggunaan Laba yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS,
3. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perusahaan mempunyai saldo laba positif,
4. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu,
5. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang

Dividend Distribution Policy

The Dividend Policy of PLN BBN is governed by the Company's Articles of Association, Article 26 regarding the Use of Profit as follows:

1. The allocation of net profit, including the provision for loss reserves, is decided by the General Meeting of Shareholders (GMS),
2. The entire net profit after deducting provision for reserves shall be distributed to Shareholders as dividends, unless otherwise decided by the GMS,
3. Dividends can only be distributed if the Company has a positive retained earnings balance,
4. The unclaimed dividends within five (5) years after being allocated for payment will be transferred to a special reserve fund designated for that purpose,
5. The eligible Shareholders may claim dividends in the special reserve fund by submitting proof of their entitlement, which is acceptable to the Company's Board

dapat diterima oleh Direksi Perusahaan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi,
6. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perusahaan,
7. Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perusahaan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perusahaan,
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perusahaan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perusahaan,
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Pembagian Dividen

Penentuan pembagian dividen ditentukan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun hingga tahun 2025 PLN BBN belum pernah melakukan pembagian dividen. Adapun laba bersih Perusahaan digunakan untuk pengembangan bisnis, sehingga tidak ada informasi yang dapat diungkapkan terkait persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih, tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas, jumlah dividen per saham, dan jumlah dividen per tahun yang dibayar.

of Directors. The claim must not be made in a single lump sum, and paid administrative fees set by the Board of Directors,
6. Dividends placed in the special reserve fund that remain unclaimed for ten (10) years will become the property of the Company,
7. The Company may distribute interim dividends before the end of the financial year if requested by Shareholders representing at least one-tenth (1/10) of the issued shares, based on projected earnings and the Company's financial capacity,
8. The Board of Directors determines the distribution of interim dividends following approval from the Board of Commissioners,
9. If the Company incurs a loss after the financial year ends, interim dividends that have already been distributed must be refunded by the Shareholders to the Company,
10. The Board of Directors and Board of Commissioners are jointly responsible for the Company's losses if Shareholders are unable to return interim dividends.

Dividend Distribution

The determination of dividend distribution is decided in the General Meeting of Shareholders (GMS). However, until 2025, PLN BBN had never distributed dividends. The Company's net profit is used for business development. Therefore, there is no information that can be disclosed regarding the percentage of the total dividends distributed against the net profit, the cash dividend payment date and/or the non-cash dividend distribution date, the amount of dividends per share, and the paid amount of dividends per year.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Hingga akhir tahun 2025, PLN BBN belum melakukan investasi. Sehingga tidak ada informasi yang dapat diungkapkan terkait investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir meliputi jenis investasi barang modal, tujuan investasi barang modal, dan nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.

Until the end of 2025, PLN BBN had not made any investments. Therefore, no information can be disclosed regarding the realized capital goods investment in the last financial year, including the type of capital goods investment, the purpose of the capital goods investment, and the value of the capital goods investments incurred.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest or Transactions with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2025, tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi

Pihak-pihak Berelasi

PLN BBN dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  (1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  (2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  (3) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  (1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  (2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  (3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  (4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  (5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

Material Transactions Containing Conflicts of Interest

In 2025, there were no material transactions involving conflicts of interest, and as such, no related information is disclosed.

Transactions with Affiliated/Related Parties

Related Parties

PLN BBN and its Subsidiaries have transactions with related parties as defined under SFAS No. 224, "Related Parties Disclosures", as follows:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  (1) Has control or joint control over the reporting entity;
  (2) Has significant influence over the reporting entity; or
  (3) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions apply:
  (1) The entity and the reporting entity are members of the same Group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
  (2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member);
  (3) Both entities are joint ventures of the same third party;
  (4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
  (5) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

(6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
(7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
(8) Entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah Indonesia, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa Pemegang Saham. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan No.16.

Sifat Hubungan Berelasi

1. PLN EPI merupakan entitas induk Perusahaan.
2. PT PLN EPI Investasi merupakan pemegang saham Perusahaan.
3. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan BUMN lainnya.
4. Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Nama, Sifat Hubungan dan Sifat Transaksi Pihak Berelasi

Sifat dan Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

a. PLN EPI merupakan entitas induk Perusahaan
b. PT PLN EPI Investasi merupakan pemegang saham Perusahaan.
c. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan BUMN lainnya.
d. Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

(6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
(7) A person identified in (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
(8) The entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to the Government of the Republic of Indonesia, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entities include entities which are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE as shareholder's representative. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes to the Financial Statements No.16.

Nature of Related Parties

1. PLN EPI is the Company's parent entity.
2. PT PLN EPI Investasi is the Company's shareholder.
3. The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of PLN and other SOEs.
4. Commissioner and Board of Directors are the Company's key management personnel.

Name, Nature of Relationship, and Nature of Transactions with Related Parties

Nature and Transactions with Related Parties

a. PLN EPI is the Company's parent entity.
b. PT PLN EPI Investasi is the Company's shareholder.
c. The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of PLN and other SOEs.
d. Commissioner and Board of Directors are the Company's key management personnel.

Tabel Nama, Sifat Hubungan dan Sifat Transaksi Pihak Berelasi

Table of Name, Nature of Relationship, and Nature of Transactions with Related Parties

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship		Sifat Transaksi Nature of Transaction	
PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI)	Entitas induk	Parent entity	Utang usaha	Trade payables
PT PLN (Persero) (PLN)	Entitas induk utama Perusahaan	Ultimate parent entity of the Company	Piutang usaha, utang-lain-lain,dan penjualan	Trade receivables, other payables, and sales

Tabel Nama, Sifat Hubungan dan Sifat Transaksi Pihak Berelasi
Table of Name, Nature of Relationship, and Nature of Transactions with Related Parties

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship		Sifat Transaksi Nature of Transaction	
PT PLN Indonesia Power (PIP)	Entitas sepengendali dengan induk Perusahaan	Entity under common control with the parent company	Piutang usaha, piutang non-usaha, dan penjualan	Trade receivables, non-trade receivables, and sales
PT PLN Nusantara Power (PNP)	Entitas sepengendali dengan induk Perusahaan	Entity under common control with the parent company	Piutang usaha, piutang non-usaha, dan penjualan	Trade receivables, non-trade receivables, and sales
PT PLN Batam (PLN Batam)	Entitas sepengendali dengan induk Perusahaan	Entity under common control with the parent company	Piutang usaha dan penjualan	Trade receivables and sales
PT Shenhua Guohua PJB (SGPJB)	Ventura bersama PNP, entitas sepengendali dengan induk	Joint venture of PNP, entity under common control with the parent	Piutang usaha dan penjualan	Trade receivables and sales
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Entity under common control	Utang usaha dan beban pokok penjualan	Trade payables and cost of sales
PT Banyan Koalindo Lestari	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Entity under common control	Utang usaha dan beban pokok penjualan	Trade payables and cost of sales
PT Haleyora Power Indo	Entitas anak PT Haleyora Power, entitas sepengendali dengan Induk Perusahaan	Subsidiary of PT Haleyora Power, entity under common control with the parent company	Utang usaha dan beban umum dan administrasi	Trade payables and general & administrative expenses
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Government related entity	Kas dan setara kas	Cash and cash equivalents
PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk (BNI)	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Government related entity	Kas dan setara kas	Cash and cash equivalents

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

PLN BBN melakukan transaksi dengan pihak berelasi dengan tujuan untuk saling mendukung kelancaran bisnis kedua belah pihak secara profesional dan menguntungkan. Transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Purpose of Related Party Transactions

PLN BBN conducts transactions with related parties to mutually support the smooth operation of both parties' businesses professionally and beneficially. The material transaction is a business activity conducted to generate business revenue and is carried out regularly, repeatedly, and/or continuously.

Nilai Transaksi Pihak Berelasi

Value of Transactions with Related Parties

Tabel Nilai Transaksi Pihak Berelasi (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Value of Transactions with Related Parties (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024
Penjualan	**Sales**		
SGPJB	SGPJB	1.826.723	1.975.247
PIP	PIP	1.374.350	1.800.879
PNP	PNP	1.907.559	1.693.803
PLN	PLN	1.756.345	617.365
PLN Batam	PLN Batam	291.193	210.252
Jumlah	Total	7.156.170	6.297.546

Tabel Nilai Transaksi Pihak Berelasi (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Value of Transactions with Related Parties (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024
Beban Pokok Penjualan	**Cost of Sales**		
BAG	BAG	1.174.447	183.824.432
BKL	BKL	16.412	-
Jumlah	Total	1.190.859	183.824
Beban Umum dan Administrasi	**General and Administrative Expenses**		
HPI	HPI	2.239	-
Jumlah	Total	2.239	-
Piutang Usaha	**Trade Receivables**		
PIP	PIP	49.213	271.993
PLN	PLN	284.176	246.285
SGPJB	SGPJB	515.114	231.405
PNP	PNP	145.273	218.141
PLN Batam	PLN Batam	12.448	36.925
Jumlah	Total	1.006.224	1.004.749
Piutang Non Usaha	**Non-Trade Receivables**		
PIP	PIP	1.638	41.571
PNP	PNP	12.440	12.440
Jumlah	Total	14.078	54.011
Utang Usaha	**Trade Payables**		
BAG	BAG	313.833	55.332
PLN EPI	PLN EPI	42.729	42.729
BKL	BKL	1.412	-
Jumlah	Total	357.974	98.061
Biaya masih harus dibayar	**Accrued Expenses**		
BAG	BAG	219.454	-
HPI	HPI	1.039	
Jumlah	Total	220.493	-
Utang lain-lain	**Other Payables**		
PLN	PLN	567.105	799.276
Jumlah	Total	567.105	799.276

Jumlah kompensasi Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5,51 miliar dan Rp4,50 miliar. Seluruh kompensasi kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

The total compensation for the Company's Commissioners and Board of Directors in 2025 and 2024 amounted to Rp5.51 billion and Rp4.50 billion, respectively. All compensation to the Company's Commissioners and Board of Directors is considered short-term employee benefits.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Kebijakan harga Perusahaan yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada

Arm's Length Transactions with Related Parties

The Company and subsidiaries pricing policy related to transactions with related parties is set based on contracted

harga di dalam kontrak. PLN BBN telah melakukan transaksi secara wajar dengan pihak yang berelasi sesuai dengan PSAK Nomor 224 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal ini dapat terlihat dari kesesuaian seluruh transaksi dengan pihak berelasi yang telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Selama tiga tahun terakhir, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material.

Mekanisme *Review* dan Pemenuhan Peraturan Transaksi Pihak Berelasi

Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh auditor. *Review* atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Kebijakan dan Pernyataan Direksi serta Peran Dewan Komisaris terkait Transaksi Pihak Berelasi

Kebijakan untuk melakukan penelaahan dan persetujuan transaksi dengan pihak berelasi dilakukan mekanisme *review* secara berjenjang dengan menyesuaikan jenis dan pihak berelasi terkait. Selain melewati mekanisme *review* melalui proses audit, seluruh transaksi afiliasi/ berelasi telah melibatkan Manajemen Perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit serta divisi-divisi terkait lainnya.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap transaksi pihak berelasi yang dilakukan Perusahaan selama tahun buku 2025, termasuk transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan. Berdasarkan hasil kajian, Komite Audit menyimpulkan bahwa seluruh transaksi pihak berelasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan prinsip kewajaran usaha, serta tidak mengandung benturan kepentingan yang merugikan Perusahaan maupun pemegang saham minoritas. Dewan Komisaris turut berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Berdasarkan masukan dan arahan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit, Direksi menyatakan seluruh transaksi afiliasi/ berelasi telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

prices. PLN BBN has conducted transactions with related parties on an arm's length basis in accordance with SFAS No. 224 on Related Party Disclosures. This is reflected in the compliance of all related party transactions with the policies and terms mutually agreed upon by both parties.

Over the past three years, there have been no instances of non-compliance with laws, rules, or regulations concerning significant or material related party transactions.

Review Mechanism and Compliance with Related Party Transaction Regulations

To ensure the fairness of transactions and compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia, the affiliated transactions above have been audited by an auditor. Reviews of transactions with related parties are conducted through the audit process, carried out by both internal and external auditors. One of the purposes of disclosing related party transactions is to fulfill SFAS 224 on Related Party Disclosures.

Policies and Statements of the Board of Directors and the Role of the Board of Commissioners Regarding Related Party Transactions

The policy for reviewing and approving transactions with related parties is carried out through a hierarchical review mechanism, adjusted to the type and parties involved. In addition to passing the review mechanism through audit process, all affiliated/related transactions have involved the Company's Management, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and other relevant divisions.

The Board of Commissioners and the Audit Committee have a role in reviewing related party transactions carried out by the Company during the 2025 financial year, including transactions that potentially contain conflicts of interest. Based on the study results, the Audit Committee concluded that all related-party transactions were conducted in accordance with applicable regulations, using the arm's-length principle, and did not contain conflicts of interest detrimental to the Company or minority shareholders. The Board of Commissioners also plays a role in providing guidance and input to the Board of Directors so that transactions with related parties are carried out in accordance with the arms-length principle.

Based on input and guidance from the Board of Commissioners and the Audit Committee, the Board of Directors affirms that all affiliated/related transactions have gone through proper procedures, in line with generally accepted business practices and in compliance with the arm's length principle.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang atau Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt or Capital Restructuring

Investasi

Pada tahun 2025, PLN BBN tidak melakukan aktivitas investasi sehingga tidak terdapat informasi terkait tanggal, nilai, dan objek transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, penjelasan kewajaran transaksi, dan pemenuhan ketentuan terkait.

Ekspansi

Pada tahun 2025, PLN BBN tidak melakukan aktivitas ekspansi sehingga tidak terdapat informasi terkait tanggal, nilai, dan objek transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, penjelasan kewajaran transaksi, dan pemenuhan ketentuan terkait.

Divestasi

Pada tahun 2025, PLN BBN tidak melakukan aktivitas divestasi sehingga tidak terdapat informasi terkait tanggal, nilai, dan objek transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, penjelasan kewajaran transaksi, dan pemenuhan ketentuan terkait.

Akuisisi

Pada tahun 2025, PLN BBN tidak melakukan aktivitas akuisisi sehingga tidak terdapat informasi terkait tanggal, nilai, dan objek transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, penjelasan kewajaran transaksi, dan pemenuhan ketentuan terkait.

Restrukturisasi Utang atau Modal

Pada tahun 2025, PLN BBN tidak melakukan aktivitas restrukturisasi utang atau modal sehingga tidak terdapat informasi terkait tanggal, nilai, dan objek transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, penjelasan kewajaran transaksi, dan pemenuhan ketentuan terkait.

Investment

In 2025, PLN BBN did not carry out investment activities, so there is no information regarding the date, value, and object of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the relationship, explanation of the fairness of the transaction, and compliance with related provisions.

Expansion

In 2025, PLN BBN did not carry out expansion activities, so there is no information regarding the date, value, and object of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the relationship, explanation of the fairness of the transaction, and compliance with related provisions.

Divestment

In 2025, PLN BBN did not carry out divestment activities, so there is no information regarding the date, value, and object of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the relationship, explanation of the fairness of the transaction, and compliance with related provisions.

Acquisition

In 2025, PLN BBN did not carry out acquisition activities, so there is no information regarding the date, value, and object of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the relationship, explanation of the fairness of the transaction, and compliance with related provisions.

Debt or Capital Restructuring

In 2025, PLN BBN did not carry out debt or capital restructuring activities, so there is no information regarding the date, value, and object of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the relationship, explanation of the fairness of the transaction, and compliance with related provisions.

Komponen Substansial Penghasilan/(Beban) Lain-lain

Substantial Component of Other Income/(Expenses)

Pada tahun 2025, jumlah beban lain-lain bersih sebesar (Rp23,45) miliar, yaitu lebih rendah 82,10% dibandingkan tahun 2024 sebesar (Rp131,03) miliar. Berikut ini disajikan komponen yang terdapat dalam (beban)/penghasilan lain-lain:

In 2025, the total net other expenses amounted to (Rp23.45) billion, which is 82.10% lower than in 2024 which was (Rp131.03) billion. The following outlines the components included in other (expenses)/income:

Tabel (Beban)/ Penghasilan Lain-lain (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Table of Other (Expenses)/Income (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description		2025	2024	2023	Peningkatan/ (Penurunan) 2024-2025 Increase/ (Decrease) 2024-2025
Penalti	Penalty	3.867	86.870	-	(95,55)%
Pendapatan/ (beban) lain-lain	Other Income/(Expenses)	19.587	44.158	(8.194)	(55,64)%
Jumlah (Beban)/ Penghasilan Lain-lain, Bersih	Total Other (Expenses)/ Income, Net	23.454	131.028	(8.194)	(82,10)%

Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan atau Pendapatan dan Laba Perusahaan

Impact of Price Changes on Company's Sales or Revenue and Profit

Perkembangan Harga Batubara

Dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur produksi, distribusi, dan pemanfaatan energi primer, termasuk batubara, untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mendukung transisi energi nasional. Secara umum, kebijakan di sektor ini berfokus pada pengamanan pasokan domestik, pengendalian harga, serta pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Namun demikian, dinamika dalam penetapan kebijakan seringkali membawa ketidakpastian yang dapat berdampak baik secara positif maupun negatif terhadap operasional dan bisnis PLN BBN.

Coal Price Development

In an effort to maintain national energy resilience, the Indonesian government implements various policies and regulations that govern the production, distribution, and utilization of primary energy, including coal, to meet domestic needs and support the national energy transition. In general, policies in this sector focus on securing domestic supply, price control, and managing the environmental impact of mining activities. However, the dynamics in policy formulation often bring uncertainty that can have both positive and negative impacts on the operations and business of PLN BBN.

Pemerintah menetapkan Harga Pasokan Batubara (HPB) sebagai referensi harga jual ekspor Batubara untuk semua jenis kalori, berdasarkan kualitas batubara dan kondisi pasar global. HPB diterbitkan secara berkala melalui Keputusan Menteri ESDM, mempengaruhi perhitungan royalti dan kewajiban fiskal lainnya bagi perusahaan batubara. Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara, nilai HBA periode kedua bulan berjalan merupakan rata-rata tertimbang volume harga jual batubara pada titik serah secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel) dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan rentang sampel 6.100-6.500 kcal/kg GAR transaksi penjualan batubara untuk pembayaran royalti pada aplikasi e-PNBP Minerba pada tanggal pengapalan minggu keempat dua bulan sebelumnya hingga minggu ketiga bulan sebelumnya. Sedangkan Harga Batubara Acuan (HBA) merupakan variabel utama dalam penentuan harga jual batubara dan kinerja penjualan Perusahaan, selain variabel lainnya seperti biaya-biaya langsung terkait produksi dan penambangan batubara.

The government sets the Coal Supply Price (HPB) as a reference for the export sale price of coal for all calorific values, based on the quality of the coal and global market conditions. HPB is issued periodically pursuant to the Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources (EMR), affecting the calculation of royalties and other fiscal obligations for coal companies. Based on Decision of the Minister of EMR No. 72 of 2025 concerning Guidelines for Setting Benchmark Prices for the Sale of Metal Mineral and Coal Commodities, the HBA value for the second period of the current month is the weighted average of the sales price volume of coal at the Free on Board (FOB Vessel) delivery point, equivalent to HBA specifications with a sample range of 6,100-6,500 kcal/kg GAR for coal sales transactions for royalty payments in the e-PNBP Minerba application from the fourth week of the second month before the third week of the previous month. Meanwhile, the Reference Coal Price (HBA) is the main variable in determining the selling price of coal and the Company's sales performance, in addition to other variables such as direct costs related to coal production and mining.

Dalam Kepmen ESDM Nomor 72 Tahun 2025 terdapat empat jenis HBA berdasarkan nilai kalori batubara, yaitu: HBA untuk kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR, HBA I untuk kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, HBA II untuk kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, dan HBA III untuk kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR. Berdasarkan HBA selanjutnya dihitung Harga Patokan Batubara (HPB) yang dipengaruhi kualitas batubara, yaitu: nilai kalor batubara, kandungan air, kandungan sulfur, dan kandungan abu. Selain itu kebijakan penting yang secara langsung mempengaruhi sektor Batubara adalah ketentuan *Domestic Market Obligation* (DMO). Kebijakan DMO mewajibkan produsen batubara untuk mengalokasikan sebagian produksi mereka — minimal 25% — untuk kebutuhan dalam negeri, dengan harga patokan sebesar USD 70 per ton. Implikasi dari penerapan Kepmen ESDM Nomor 72 Tahun 2025 dapat mempengaruhi royalti, biaya fiskal, dan perencanaan pendapatan dari Batubara.

In the Decision of the Minister of EMR Number 72 of 2025, there are four types of HBA based on the calorific value of coal, namely: HBA for a calorific value equivalent to 6,322 kcal/kg GAR, HBA I for a calorific value equivalent to 5,300 kcal/kg GAR, HBA II for a calorific value equivalent to 4,100 kcal/kg GAR, and HBA III for a calorific value equivalent to 3,400 kcal/kg GAR. Based on the HBA, subsequently, the Coal Benchmark Price (HPB) is calculated, which is influenced by the quality of the coal, such as calorific value, moisture content, sulfur content, and ash content. Additionally, a crucial policy that directly affects the coal sector is the Domestic Market Obligation (DMO) regulation. The DMO policy requires coal producers to allocate a portion of their production—at least 25%—for domestic needs, with a benchmark price of USD 70 per ton. The implications of the application of that Decision can affect royalties, fiscal costs, and revenue planning from coal.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

Laporan Keuangan PLN BBN telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), guna memastikan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan.

The PLN BBN Financial Statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK), to ensure transparency and accuracy in financial reporting.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

The following are the material accounting policies applied in the preparation of the Company's financial statements. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual.

The financial statements are prepared and presented based on the going concern assumption and historical cost measurement, except for certain accounts that are prepared based on other measurements as described in the accounting policies of each account. The basis for the preparation of the financial statements, except for the statement of cash flows, is the accrual basis.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statement of cash flows is prepared using the direct method by categorizing cash flows into operating, investing, and financing activities.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan rupiah (Rp), kecuali dinyatakan lain. Lihat Catatan 2b dalam Laporan Keuangan Audited Perusahaan untuk informasi mata uang fungsional perusahaan.

All figures in this financial statement are rounded and presented in millions of rupiah (Rp), unless otherwise stated. Please see Note 2b in the Company's Audited Financial Report for information on the Company's functional currency.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Unless stated otherwise below, the accounting policies have been applied consistently in the annual financial statements for the year ended December 31, 2024, which have been in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Untuk memberi pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

To provide a better understanding of the Company's financial performance, due to their significant nature and amount, several revenue and expense items have been presented separately.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3 dalam Laporan Keuangan Audited Perusahaan.

The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain important accounting estimates and assumptions. It also requires management to make judgments in the process of applying the Company's accounting policies. Complex areas or those requiring a higher level of consideration, or areas where assumptions and estimates may significantly impact the financial statements, are disclosed in Note 3 in the Company's Audited Financial Report.

Standar Akuntansi yang Berlaku Efektif pada tanggal 1 Januari 2025

Penerapan dari amendemen berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" - Kekurangan Ketertukaran
- PSAK 117 "Kontrak Asuransi"

Standar Akuntansi yang Berlaku Efektif pada tanggal 1 Januari 2026, Penerapan Dini Diperkenankan

Penerapan dari amendemen berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 "Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 terkait Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- Revisi atas PSAK 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali"

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan Perusahaan.

Accounting Standards Effective on January 1, 2025

The implementation of the following amendment, effective from January 1, 2025, does not result in any substantial changes to the Company's accounting policies and has no material impact on the reported amounts for the current period or previous years.

- Amendment to PSAK 221 "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" - Lack of Exchangeability
- PSAK 117 "Insurance Contracts"

Accounting Standards Effective on January 1, 2026, Early Adoption is Permitted

The implementation of the following amendment, effective from January 1, 2026, does not result in substantial changes to the Company's accounting policies and has no material impact on the reported amounts for the current period or previous years.

- Amendment to PSAK 109 and PSAK 107 "Disclosures on the Classification and Measurement of Financial Instruments"
- Amendment to PSAK 109 and PSAK 107 regarding Contracts Referencing Nature-dependent Electricity
- Revision of PSAK 338 "Business Combination of Entities under Common Control"

The application of the following new standard takes effect on January 1, 2027. Retrospective application is required, so comparative information for the financial year ending December 31, 2026, will be restated in accordance with this standard:

- PSAK 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

On December 31, 2025, the Company was studying the potential impact of the implementation of new standards, amendments, and interpretations on the Company's financial statements.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations and Their Impact on the Company

Sebagai wujud nyata komitmen PT PLN Batubara Niaga dalam menjunjung tinggi aspek kepatuhan, Perusahaan secara konsisten memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan/regulasi eksternal yang berlaku, standar ISO, perjanjian kerja sama, serta peraturan internal dan juga standar operasional prosedur perusahaan. PT PLN Batubara Niaga secara proaktif melakukan updating terhadap regulasi/peraturan baru yang relevan setiap triwulan.

As a concrete reflection of PT PLN Batubara Niaga's commitment to compliance aspects, the Company consistently ensures adherence to all applicable external laws and regulations, ISO standards, cooperation agreements, as well as internal regulations and standard operating procedures. PT PLN Batubara Niaga proactively updates relevant new regulations/rules every quarter.

Berikut ini disampaikan ringkasan mengenai perubahan regulasi dan peraturan baru yang berlaku sepanjang tahun 2025:

The following is a summary of the regulatory changes and new regulations that applied throughout 2025:

Tabel Perubahan Peraturan dan Peraturan Baru yang Berlaku di Tahun 2025
Table of Regulatory Changes and New Regulations Applicable in 2025

No.	Peraturan Regulation	Dampak terhadap Perusahaan dan/atau Tindak Lanjut yang Dilakukan Impact on the Company and/or Follow-up Actions Taken	
1.	UU No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007	Perusahaan memiliki akta pendirian, anggaran dasar, dan Board Manual Perusahaan.	The Company has a deed of establishment, articles of association, and a Board Manual.
2.	UU No. 6 Tahun 2023 Law No. 6 of 2023	Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait penyediaan tenaga kerja.	The Company has collaborated with a third party regarding the provision of labor.
3.	UU No. 20 Tahun 2001 Law No. 20 of 2001	Perusahaan telah menerapkan pencegahan, penindakan, dan perlindungan bagi saksi dan pelapor.	The Company has implemented prevention, enforcement, and protection for witnesses and whistleblowers.
4.	UU No. 7 Tahun 2021 Law No. 7 of 2021	Perusahaan telah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.	The Company has completed tax reporting and payment.
5.	PER-1/MBU/03/2023	Perusahaan telah melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) sesuai dengan aturan BUMN yang berlaku.	The Company has implemented the Corporate Social Responsibility (CSR) program in accordance with the applicable SOE rules.
6.	PP No. 5o Tahun 2012 Government Regulation No. 50 of 2012	Perusahaan telah menerapkan K3 perkantoran dilingkungan kerja.	The Company has implemented office OHS in the workplace.

Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI)

Achievement of Key Performance Indicator (KPI)



Mengacu pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN Batubara Niaga tentang Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Kontrak Manajemen Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025.

Referring to the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN Batubara Niaga regarding the 2025 Company's Work Plan and Budget (WP&B) and the 2025 Contract Management dated January 31, 2025.

Hasil pencapaian selama tahun berjalan tersebut kemudian dinilai berdasarkan Petunjuk Teknis Indikator Kinerja Utama (KPI) Perusahaan tahun 2025 yang disahkan oleh Kepala Satuan Perencanaan Korporat dan Manajemen Energi Primer pada tanggal 31 Mei 2025 yang mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Nomor 0081.P/DIRUT/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi serta PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan KPI pada Badan Usaha Milik Negara.

Pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar 97,86 dengan rincian sebagai berikut:

The achievements during the current year are then evaluated based on the Technical Guidelines for Key Performance Indicators (KPI) of the Company for 2025, approved by the Head of the Corporate Planning and Primary Energy Management Unit on May 31, 2025. These guidelines refer to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Number 0081.P/DIRUT/2023 dated September 22, 2023, regarding Corporate Performance Management and Organizational Performance Assessment, as well as PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, and the Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-306/MBU/11/2023 on Technical Guidelines for KPI Preparation in SOEs.

The Company's performance achievement in 2025 is 97.86 with the following details:

Tabel Realisasi KPI atau Kontrak Manajemen Korporat tahun 2025

Table of KPI Realization or Corporate Management Contract in 2025

No.	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value
A.	**Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia** **Economic and Social Value for Indonesia**		**56**				**51,64**
1.	EBITDA	Rp miliar Rp billion	10	384,92	269,13	69,92%	6,99
2.	*Operating ratio*	%	10	96,00	97,08	98,88%	9,88
3.	Penjualan pasokan batubara Coal supply sales	Juta MT Millions of MT	10	12,01	11,89	99,00%	9,90
4.	Kualitas batubara Coal quality	%	5	100,00	102,82	102,82%	5,14
5.	Feedback Hasil Penanganan Keluhan Pelanggan Feedback on the Resolution of Customer Complaints	%	5	100,00	100,00	100,00%	5,00
6.	Pendapatan dari luar PLN *Group* (*Beyond* kWh) Revenue beyond PLN Group (Beyond kWh)	Rp miliar Rp billion	10	4.747	3.875,14	81,63%	8,16

Tabel Realisasi KPI atau Kontrak Manajemen Korporat tahun 2025

Table of KPI Realization or Corporate Management Contract in 2025

No.	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value
7.	Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara (PLTU PLN) Security of Supply of Primary Energy – Coal (PLN CFPP)	%	6	100,00	109,58	109,58%	6,57
8.	Penyelesaian RJPP Completion of RJPP	**%**	**-**	-	-	-	-
B.	**Inovasi Modal Bisnis | Business Capital Innovation**		12				**12,85**
1.	Sinergi Antar *Sub Holding*, Anak Perusahaan Lain dan Pusharlis Synergy Among Subholding, Subsidiaries, and Pusharlis	Rp miliar Rp billion	4	0,92	4,83	110,00%	4,40
2.	Implementasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Improvement Roadmap	%	4	100,00	102,00	102,00%	4,08
3.	*Maturity Level* Kepatuhan Compliance Maturity Level	Level	4	3,10	3,39	109,35%	4,37
C.	**Kepemimpinan Teknologi | Technology Leadership**		**11**				**11,80**
1.	Ketepatan Waktu Pengiriman Batubara Timeliness in Coal Delivery	%	5	100,00	123,57	110,00%	5,50
2.	*Trial Shipment Coal Blending* Batubara	Waktu Time	3	Trial Shipment pada 31 Des 2025 Trial Shipment on December 31, 2025	• Inventaris Sumber Tambang Potensial pada 04 Juni 2025 • Kajian Kelayakan Tambang Potensial pada 26 Agustus 2025 • Inventory of Potential Mine Source on June 4, 2025 • Feasibility Study on Potential Mine on August 26, 2025		
3.	*Value Creation* - Efisiensi Pengiriman Batubara Melalui *Blending* Value Creation - Efficiency of Coal Shipments through Blending	Rp miliar Rp billion	3	12,00	13,56	110,00%	3,30
D.	**Peningkatan Investasi | Investment Growth**		**7**				**7,32**
1.	*Collecting of Period*	Hari/Day	3	70,00	71,85	97,36%	2,92
2.	*Intermediate Stockpile*	Waktu/Time	4	Initial Delivery pada 31 Des 2025 Initial Delivery on December 31, 2025	COD pada 01 Agustus 2025 COD on August 1, 2025	110,00%	4,40
E.	**Pengembangan Talenta | Talent Development**		**10**				10,60
1.	*Human Capital Readiness* (HCR) & *Organizational Capital Readiness* (OCR)	%	4	100	100,00	100,00%	4,00
2.	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of Compliance with Risk Management Organs' Qualifications	%	4	90	100,00	110,00%	4,40

Tabel Realisasi KPI atau Kontrak Manajemen Korporat tahun 2025
Table of KPI Realization or Corporate Management Contract in 2025

No.	Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value
3.	*Lost Time Injury Frequency Rate*	Indeks (per 1 juta jam kerja) Index (per one million working hours)	2	9,510	0	110,00%	2,20
F.	**Kepatuhan** **Compliance**						(0,26)
1.	*Compliance* (GCG, Kepatuhan HSSE, Auditor, *Reporting*, PACA) Compliance (GCG, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, PACA)	Nilai Pengurang Deduction Value	Max-10	0	-		(0,26)
	Nilai Kinerja Organisasi **Organizational Performance Value**		**96**				**93,95**
	Total (Proporsional) | Total (Proporsional)		**100**				**97,86**

Keterangan/Note:
*) Untuk pencapaian ≥ 110,00% ditulis 110,00%/ For achievements ≥ 110.00%, it is written as 110.00%

Prospek Usaha
Business Outlook

Prospek Perekonomian Global

Pertumbuhan PDB global diproyeksikan tetap stabil di angka 2,9% pada tahun 2026 sebelum sedikit meningkat menjadi 3,0% pada tahun 2027, didukung oleh investasi terkait teknologi yang kuat dan tarif efektif yang secara bertahap lebih rendah. Namun, konflik yang berkembang di Timur Tengah membebani pertumbuhan dan menimbulkan ketidakpastian yang signifikan seputar permintaan global. Proyeksi ini mengasumsikan bahwa gangguan pasar energi saat ini bersifat sementara, dengan harga yang mereda mulai pertengahan tahun 2026 dan seterusnya. Secara umum, Pertumbuhan global tetap tangguh sebelum adanya konflik, tetapi kenaikan harga energi dan ketidakpastian kini membebani prospek ekonomi.

Harga energi yang lebih tinggi akan memperpanjang inflasi global. Tekanan inflasi akan berlanjut lebih lama dengan inflasi G20 yang sekarang diperkirakan lebih tinggi pada tahun 2026 daripada yang diproyeksikan sebelumnya, mencerminkan lonjakan harga energi global. Inflasi G20 diproyeksikan 1,2 poin persentase lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya pada tahun 2026 menjadi 4,0%, sebelum mereda menjadi 2,7% pada tahun 2027 dengan asumsi meredanya tekanan harga energi. Inflasi inti di negara-negara maju G20 diperkirakan akan melemah, dari 2,6% pada tahun 2026 menjadi 2,3% pada

Global Economic Outlook

Global GDP growth is projected to remain stable at 2.9% in 2026 before slightly increasing to 3.0% in 2027, supported by robust technology-related investments and gradually lower effective tariffs. However, the escalating conflict in the Middle East puts pressure on growth and creates significant uncertainty around global demand. This projection assumes that the current disruptions in the energy market are temporary, with prices stabilizing from mid-2026 onward. In general, global growth remained resilient before the conflict, but rising energy prices and uncertainty are now weighing on economic prospects.

Higher energy prices will prolong global inflation. Inflationary pressures persist longer, with G20 inflation now projected to be higher in 2026 than previously estimated, reflecting the surge in global energy prices. G20 inflation is projected to be 1.2 percentage points higher than previously estimated in 2026 at 4.0%, before easing to 2.7% in 2027, assuming the easing of energy price pressures. Core inflation in G20 advanced economies is expected to weaken, from 2.6% in 2026 to 2.3% in 2027. Further increases in energy prices will substantially impact growth and inflation.

tahun 2027. Lonjakan harga energi lebih lanjut akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan inflasi.

Prospek Perekonomian Indonesia

Kinerja sektor manufaktur Indonesia melanjutkan tren ekspansi pada Februari 2026 dengan PMI Manufaktur meningkat ke level 53,8 dari 52,6 pada Januari 2026, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir. Peningkatan ini didorong lonjakan permintaan baru yang diimbangi pertumbuhan produksi yang signifikan.

Resiliensi ekonomi domestik menjadi modal penting bagi Indonesia di tengah dinamika global. Oleh karena itu, berbagai upaya ditempuh untuk menjaga stabilitas dan ketahanan perekonomian domestik akan terus didorong, terutama melalui stimulus fiskal, iklim investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sentimen bisnis tetap solid seiring ekspektasi penguatan permintaan dan stabilitas harga. PMI manufaktur sejumlah mitra dagang utama Indonesia juga berada di zona ekspansif, seperti Vietnam (54,3), Thailand (53,5), India (57,5), Jepang (53,0), dan Amerika Serikat (51,2), sehingga mendukung prospek ekspor manufaktur nasional.

Dari sisi harga, inflasi Februari 2026 tercatat 4,76 persen (yoy), terutama dipengaruhi dampak kebijakan diskon listrik pada awal 2025. Tanpa faktor tersebut, inflasi diperkirakan sekitar 2,59 persen. Pemerintah menilai tekanan harga secara fundamental tetap terkendali dan diperkirakan kembali normal mulai Maret 2026. Pemerintah juga terus memantau risiko global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Prospek Industri Batubara

Permintaan batubara global masih akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan, terutama dari negara-negara industri seperti China. Bahkan, dalam situasi krisis energi global, batubara kerap kembali menjadi pilihan utama karena dinilai lebih ekonomis dan mudah diakses. Di tengah derasnya arus transisi menuju energi bersih, industri batubara Indonesia dinilai masih memiliki masa depan yang kuat.

Di dalam negeri, peran batubara masih sangat vital. Selain menjadi tulang punggung pasokan energi, sektor ini juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, bahkan dalam beberapa periode melampaui sektor migas. Dengan cadangan yang diperkirakan mencapai 26 hingga 35 miliar ton, Indonesia diyakini mampu menjaga ketahanan energi nasional hingga puluhan tahun ke depan. Meskipun pemerintah menargetkan *net zero emission* pada 2060, proses menuju energi bersih tidak bisa dilakukan secara instan. Transisi energi masih membutuhkan waktu panjang, sekitar 30 tahun ke depan. Selama periode itu, batubara tetap akan digunakan. Setidaknya lima tahun ke depan permintaan masih tinggi. Batubara tetap menjadi energi yang

Indonesia Economic Outlook

The performance of Indonesia's manufacturing sector continued its expansion trend in February 2026, with the Manufacturing PMI increasing to 53.8 from 52.6 in January 2026, marking the highest achievement in nearly two years. This increase was caused by a surge in new demand, balanced by significant production growth.

The resilience of the domestic economy has become a crucial asset for Indonesia amidst global dynamics. Therefore, various efforts continue to be made to maintain the stability and resilience of the domestic economy, specifically through a fiscal stimulus, investment climate, and job creation. Business sentiment remains solid in line with expectations of demand strengthening and price stability. The manufacturing PMI of several of Indonesia's main trading partners is also in the expansion zone, such as Vietnam (54.3), Thailand (53.5), India (57.5), Japan (53.0), and the United States (51.2), thereby supporting the prospects for national manufacturing exports.

From the price perspective, inflation in February 2026 was recorded at 4.76 percent (year-on-year), primarily influenced by the impact of the electricity discount policy at the beginning of 2025. Without this factor, inflation is estimated to be around 2.59 percent. The government assesses that fundamental price pressures remain under control and are expected to return to normal starting in March 2026. The government also continuously monitors global risks, including conflicts in the Middle East that could disrupt energy supply chains and increase global financial market volatility.

Coal Industry Outlook

Global demand for coal will continue to persist in the coming years, particularly from industrial countries such as China. In fact, during a global energy crisis, coal often becomes the primary choice again because it is considered more economical and accessible. Amidst the strong current of the transition toward clean energy, Indonesia's coal industry is still considered to have a strong future.

Domestically, the role of coal remains vital. In addition to being the backbone of energy supply, this sector also makes a significant contribution to state revenue, even surpassing the oil and gas sector in some periods. With reserves estimated to reach 26 to 35 billion tons, Indonesia is considered capable of maintaining national energy resilience for decades to come. Although the government has set a target of net-zero emissions by 2060, the transition to clean energy cannot happen overnight. The energy transition requires a long time, around 30 years from now. During that period, coal will continue to be used. Demand will remain high for at least the next five years. Coal remains a relatively cheaper energy

relatif lebih murah dibandingkan sumber energi lainnya.

Oleh karena itu, prospek usaha PT PLN Batubara Niaga di tahun 2026 dinilai sangat strategis dan cerah dengan fokus untuk mengamankan pasokan Batubara domestik, meski di tengah fluktuasi harga global. Khususnya dengan perannya dalam *Security of Supply* batubara ke PLTU PLN dan PLTU IPP. PLN sendiri telah mengamankan kontrak 163 juta ton batubara untuk 2026, menjamin operasional PLTU dan memperkuat bisnis *beyond kWh*.

Informasi Kelangsungan Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki modal kerja negatif sebesar Rp177,12 miliar. Hal ini terutama diakibatkan oleh pemakaian fasilitas *Notional Pooling* dari PLN yang tidak memiliki jadwal pembayaran yang pasti, sehingga Perusahaan mengkategorikan pinjaman ini sebagai pinjaman jangka pendek. Sebagai akibat dari kondisi diatas, manajemen Perusahaan akan mengambil langkah-langkah berikut untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dan posisi keuangan Perusahaan:

1. Percepatan *Days Sales Outstanding* (DSO) melalui perbaikan tata kelola penagihan ke pelanggan.
2. Konsistensi restitusi PPN bulanan agar jatuh tempo pencairan lebih cepat.
3. Melakukan re-negosiasi terkait *term of payment* pada perjanjian jual beli batubara.

Selain itu, Perusahaan telah menerima surat dukungan dari PLN EPI selaku Perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas Perusahaan. Manajemen berpendapat bahwa dukungan keuangan tersebut cukup untuk menutupi liabilitas yang akan jatuh tempo dan dengan demikian memastikan kelangsungan hidup Perusahaan selama dua belas bulan ke depan, sejak tanggal laporan keuangan.

Asesmen Manajemen atas Hal-hal Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Manajemen PLN BBN berpendapat bahwa Perusahaan masih tetap memiliki kemampuan untuk mengelola dan memenuhi semua kewajiban keuangannya kepada pegawai dan krediturnya sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, pada tanggal 22 Mei 2026 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”. Selain itu, PLN BBN juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), aktivitas operasional serta fungsi pendukung bisnis lainnya. Dengan berbagai strategi, upaya, dan inovasi yang dilakukan, Perusahaan berkeyakinan dapat terus menjaga kelangsungan usaha serta meningkatkan kontribusi kepada Pemegang Saham.

source compared to other energy sources.

Therefore, the business prospects of PT PLN Batubara Niaga in 2026 are considered very strategic and bright, with a focus on securing domestic coal supply, despite global price fluctuations. This is particularly true given its role in ensuring the security of coal supply to PLN-owned and IPP-owned CFPPs. PLN itself has secured contracts for 163 million tons of coal for 2026, ensuring the operation of CFPP and strengthening the business beyond kWh.

Business Continuity Information

As of December 31, 2025, the Company had a negative working capital of Rp177.12 billion. This is primarily due to the use of the Notional Pooling facility from PLN, which does not have a definite payment schedule, causing the Company to categorize this loan as a short-term loan. As a result of the above conditions, the Company's management will take the following steps to improve the Company's performance and financial position:

1. Accelerating Days Sales Outstanding (DSO) through improving customer billing governance.
2. The consistency of monthly VAT refunds to ensure faster disbursement.
3. Conducting re-negotiation regarding the terms of payment in the coal sale and purchase agreement.

Additionally, the Company has received a letter of support from PLN EPI, as the parent company and major shareholder of the Company. Management believes that this financial support is sufficient to cover the liabilities that will be due and thus ensure the Company's continuity for the next twelve months from the date of the financial statements.

Management’s Assessment of Matters That Could Significantly Affect the Company’s Going Concern

PLN BBN management believes that the Company remains capable of managing and fulfilling all its financial obligations to employees and creditors as stated in the 2025 fiscal year Financial Statements, which were audited by the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Partners, on May 22, 2026, with an opinion of "fair, in all material respects." In addition, PLN BBN also continuously enhances the quality of Human Resources (HR), operational activities, and other business support functions. With various strategies, efforts, and innovations undertaken, the Company is confident in its ability to continue maintaining business continuity and increasing contributions to Shareholders.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Hingga 31 Desember 2025, PT PLN Batubara Niaga tidak mencatatkan sahamnya di pasar modal dengan melakukan penawaran umum atau menjadi perusahaan terbuka, sehingga tidak terdapat informasi terkait total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dan perubahan penggunaan dana.

As of December 31, 2025, PT PLN Batubara Niaga had not listed its shares on the capital market through a public offering or become a public company. Therefore, there is no information available regarding the total acquisition of proceeds, plans for the use of proceeds, details of the use of proceeds, balances, or changes in the use of proceeds.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts after Accountant's Reporting Date

Setelah tahun buku 2025, tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi sehingga tidak terdapat informasi lebih lanjut.

After the 2025 financial year, no material information or facts have occurred, and therefore, no further details are available.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian, sepanjang tahun 2025, tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi.

According to the Consolidated Financial Statements, throughout 2025, there were no financial information containing extraordinary or rare events.



PLN BATUBARA NIAGA

5

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Komitmen PLN BBN dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terbukti memberikan dampak positif Bagi PLN BBN. Komitmen itu direalisasikan dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui kegiatan *assessment* GCG, menyusun *annual report* Perusahaan, memutakhirkan berbagai kebijakan Perusahaan dan berbagai pengembangan kompetensi karyawan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PLN BBN's commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) has proven to deliver positive impacts for PLN BBN. This commitment is realized through the implementation of GCG practices, including conducting GCG assessments, preparing the Company's annual report, updating various Company policies, and carrying out competency development programs related to Good Corporate Governance for employees.

Dasar dan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Basis and Guidelines for Corporate Governance Implementation

Dasar kebijakan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah mengacu kepada beberapa ketentuan dan peraturan, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Perseroan Terbatas, BUMN.
2. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(GCG Code)* PT Batubara Niaga.

The implementation of Good Corporate Governance is based on various applicable laws, regulations, and internal policies, including:

1. Laws of the Republic of Indonesia concerning Limited Liability Companies and State-Owned Enterprises (SOEs).
2. The Company's Articles of Association and resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
6. Good Corporate Governance Guidelines (GCG Code) of PT Batubara Niaga.

7. Pedoman Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021.
8. Pedoman Perusahaan yang terdiri dari Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional sebagai pedoman kerja dalam kegiatan operasional Perusahaan seperti Pedoman Perilaku; Kebijakan *Whistleblowing System*; Kebijakan Pengendalian Gratifikasi; *Board Manual;* Piagam Komite Audit; Internal Audit Charter; Kebijakan Sistem Pengendalian Internal; Sistem Manajemen Anti Penyuapan; Pedoman Konflik Kepentingan; Pedoman LHKPN; dan lain sebagainya.

7. Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUG-KI) 2021.
8. Company guidelines consisting of policies, procedures, and technical implementation guidelines governing operational activities as working references in the Company's operations, including the Code of Conduct, Whistleblowing System Policy, Gratification Control Policy, Board Manual, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, Internal Control System Policy, Anti-Bribery Management System, Conflict of Interest Guidelines, LHKPN Guidelines, and other relevant policies.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Principles of Good Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan PLN BBN tercermin dalam Prinsip-prinsip GCG yang diakomodasikan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha sehari-hari PLN BBN, dalam hal ini terdiri atas:

The implementation of Good Corporate Governance within PLN BBN is reflected in the GCG principles that are incorporated into the Company's daily business operations, consisting of:

Transparansi | Transparancy

Implementasi prinsip transaparansi senantiasa diterapkan melalui menyampaikan informasi secara tepat waktu, relevan, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders* melalui Laporan Tahunan, *Website* dan media lainnya serta menyediakan jalur komunikasi bagi *stakeholders* ke PLN BBN dengan tidak mengabaikan aspek kehati-hatian dan aspek kerahasiaan.

The implementation of the transparency principle is always applied by conveying information in a timely, relevant, adequate, clear, accurate and comparable manner in a way that is easily accessible and understood by stakeholders through the Annual Report, Website and other media as well as providing communication channels for stakeholders to PLN BBN without neglecting the aspects of prudence and confidentiality.

Akuntabilitas | Accountability

Memeriksa keabsahan setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilaksanakan Perusahaan sehingga selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan segenap elemennya.

Checking the validity of every decision taken and action carried out by the Company so that it can be accounted for to the public and all its elements.

Pertanggungjawaban | Responsibility

Menunaikan tanggung jawab dengan bersikap taat asas kepatuhan yang diwujudkan dengan mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen.*

Fulfilling responsibilities by adhering to the principles of compliance, demonstrated by adhering to and implementing all applicable regulations. Responsibility is necessary to ensure long-term business continuity and to gain recognition as a good corporate citizen.

Independensi | Independence

Menjalankan setiap aktivitas Perusahaan secara independen, tanpa paksaan, atau tekanan dari pihak-pihak manapun agar masing-masing Organ Perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Carrying out every Company activity independently, without coercion or pressure from any party so that each Company Organ and all its subordinate ranks do not dominate each other and cannot be intervened by any party that could influence objectivity and professionalism in carrying out their duties and responsibilities.

Kewajaran | Fairness

Menghormati dan memberikan hak-hak pemangku kepentingan dan mengutamakan keadilan dan kesetaraan serta senantia memperhatikan kepentingan pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Respecting and granting the rights of stakeholders and prioritizing justice and equality and always paying attention to the interests of shareholders, including protection of minority shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality of each party concerned.

Selain itu, penerapan GCG di lingkungan PLN BBN juga telah tercermin dalam 4 (empat) pilar governansi berdasarkan PUGKI yaitu ***Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi dan Keberlanjutan;***

1. **Perilaku Beretika:** Dalam melaksanakan kegiatannya, PLN BBN senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten.
2. **Akuntabilitas:** mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. **Transparansi:** menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
4. **Keberlanjutan:** senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

In addition, the implementation of GCG within PLN BBN is also reflected in the four governance pillars set forth in the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUG-KI), namely **Ethical Behavior, Accountability, Transparency, and Sustainability:**

1. **Ethical Behavior:** In carrying out its activities, PLN BBN consistently upholds honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and continuously builds and maintains moral values and trust.
2. **Accountability:** PLN BBN is accountable for its performance in a transparent and fair manner.
3. **Transparency:** PLN BBN provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understandable to stakeholders.
4. **Sustainability:** PLN BBN consistently complies with applicable laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities toward society and the environment. Through collaboration with all relevant stakeholders, the Company contributes to sustainable development and seeks to improve community welfare in a manner aligned with business interests and sustainable development objectives.

Struktur Tata Kelola
Governance Structure

Struktur dan mekanisme Tata Kelola Perusahaan PLN BBN disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan *best practices*. Struktur dan mekanisme tata kelola ditetapkan untuk memastikan penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan dapat berjalan efektif dengan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola Perusahaan di PLN BBN terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan.

The governance structure and mechanisms of PLN BBN are established in accordance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and best practices. The governance structure and mechanisms are designed to ensure the effective implementation of Corporate Governance through a clear division of roles, duties, and responsibilities. The governance structure of PLN BBN consists of the Company's Main Organs and Supporting Organs.

Tujuan Penerapan GCG
Objectives of GCG Implementation

Penerapan GCG bagi PLN BBN bukan hanya sekedar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga mempunyai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan.
2. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri.
3. Terciptanya pengambilan keputusan seluruh organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

For PLN BBN, the implementation of GCG is not merely a matter of regulatory compliance but also serves the following strategic objectives:

1. Maximizing Company value by enhancing the implementation of the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness in conducting the Company's activities.
2. Ensuring professional and independent Company management.
3. Promoting decision-making by all Company organs based on high ethical standards and compliance with applicable laws and regulations.

Komitmen terhadap Penerapan GCG secara Berkelanjutan
Commitment to Sustainable GCG Implementation

Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik PLN BBN yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari seluruh jajaran manajemen dan pegawai PLN BBN. Oleh karena itu Seluruh jenjang organisasi PLN BBN mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan seluruh pegawai memiliki kemauan dan komitmen untuk mengupayakan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan, wujud komitmen tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik bersama-sama dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Pegawai.

2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada tanggal 11 Maret 2025.

The sustainable implementation of Good Corporate Governance within PLN BBN can only be achieved through strong commitment from all levels of management and employees. Therefore, all levels of the organization, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and employees, are committed to continuously promoting and strengthening the implementation of Good Corporate Governance. This commitment is demonstrated through various initiatives, including:

1. Implementing the principles of Good Corporate Governance in collaboration with Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, Management, and employees.
2. Conducting awareness and socialization programs for all employees regarding the importance of Good Corporate Governance on March 11, 2025.

3. Melakukan proses perbaikan, penyempurnaan, pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Perusahaan.
4. Membentuk Organ Pendukung Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.
5. Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat eksekutif telah mengucapkan serta menandatangani pakta integritas.
6. Secara berkala yaitu setiap awal tahun Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani Surat Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan pernyataan kepemilikan saham.
7. Melakukan penyampaian laporan LHKPN. Pada tahun 2025, Pejabat PLN BBN yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 16 orang Pejabat dari total Jumlah Wajib Lapor LHKPN sebanyak 16 Pejabat.
8. Melakukan penilaian penerapan GCG.
   Pada tahun 2025, PLN BBN secara berkelanjutan melakukan pengukuran implementasi tata kelola Perusahaan yang baik (GCG *Assessment*) dengan mengacu pada *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

Pada tahun 2025, PLN BBN melaksanakan *assessment* implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) berdasarkan dua kerangka penilaian, yaitu Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS), untuk Periode Tahun Buku 2024. Penilaian dilakukan oleh Pihak Independen. Berdasarkan hasil *assessment* atas Periode Tahun Buku 2024, PLN BBN memperoleh skor sebesar 63,409 dari bobot maksimum 100 berdasarkan indikator SK-16, atau setara dengan 63,409%, sehingga secara keseluruhan memperoleh klasifikasi kualitas penerapan GCG "Cukup Baik". Sementara itu, berdasarkan indikator ACGS, PLN BBN memperoleh skor sebesar 38,68 poin.

Adapun penilaian penerapan GCG PLN BBN untuk Periode Tahun Buku 2025 saat ini masih dalam proses *assessment*. Rincian hasil *assessment* GCG untuk Periode Tahun Buku 2024 disajikan pada tabel berikut:

3. Continuously carrying out improvements, enhancements, updates, and reviews in line with regulatory developments, business growth, and the increasing complexity of the Company's operational activities.
4. Establishing supporting organs for the Board of Commissioners, namely the Corporate Secretary to the Board of Commissioners and the Audit Committee.
5. Ensuring that the Board of Commissioners, Board of Directors, and executive officers have declared and signed Integrity Pacts.
6. Requiring the Board of Commissioners and Board of Directors to annually sign statements confirming the absence of conflicts of interest and disclosing share ownership at the beginning of each year.
7. Submitting State Officials' Wealth Reports (LHKPN). In 2025, all 16 PLN BBN officials who were required to submit LHKPN reports fulfilled their reporting obligations.
8. Conducting assessments of GCG implementation. In 2025, PLN BBN continuously measured the implementation of Good Corporate Governance through GCG Assessments based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

In 2025, PLN BBN conducted an assessment of its implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on two evaluation frameworks: the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), for the 2024 fiscal year. The assessment was conducted by an independent party. Based on the results of the assessment for the 2024 fiscal year, PLN BBN received a score of 63.409 out of a maximum of 100 based on the SK-16 indicators, or equivalent to 63.409%, thereby receiving an overall “Fairly Good” classification for the quality of its GCG implementation. Meanwhile, based on the ACGS indicators, PLN BBN received a score of 38.68 point.

The assessment of PLN BBN’s GCG implementation for the 2025 fiscal year is currently still in progress. The details of the GCG assessment results for the 2024 fiscal year are presented in the following table:

Tabel Hasil *Assessment* GCG Standar Kementerian BUMN PLN BBN

GCG Assessment Results Table of Ministry of State-Owned Enterprises Standards PLN BBN

Aspek Pengujian Testing Aspect			Bobot Weight	Capaian Tahun 2024 Achievement Year 2024		Penjelasan Description
				Skor Score	% Capaian % Achievement	
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,000	5.433	77.619	Baik/Good
II	Pemegang Saham dan RUPS	Shareholders and GMS	9,000	6.913	76.807	Baik/Good
III	Dewan Komisaris	Board of Commissioners	35,000	24.805	70.872	Cukup Baik Fairly Good
IV	Direksi	Board of Directors	35,000	24.002	68.578	Cukup Baik Fairly Good
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	Disclosure of Information and Transparency	9,000	2.256	25.061	Tidak Baik Fairly Good
VI	Aspek Lainnya	Other Aspects	5,000			
Skor Keseluruhan Overall Score			**100,000**	**63,409**	**63.409**	**Cukup baik** **Fairly Good**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Qualification of GCG Implementation Quality				**Cukup baik** **Fairly Good**		

Penilaian GCG Berdasarkan Indikator ACGS

GCG Assessment Based on ACGS Indicators

Prinsip Penilaian ACGS ACGS Grading Principles		Jumlah Pertanyaan Total Questions	Skor Maksimal Maximal Score	Pemenuhan Comply		
				Not Applicable (N/A)	Tidak No	Ya Yes
LEVEL 1						
Bagian A Part A	Hak-hak dan perlakuan setara terhadap Pemegang Saham Shareholder Rights and Equal Treatment	30	20,00	4	15	11
Bagian B Part B	Keberlanjutan dan ketahanan Sustainability and Resilience	22	15,00	0	16	6
Bagian C Part C	Transparansi dan Pengungkapan Sustainability and Resilience	34	25,00	1	23	10
Bagian D Part D	Tanggung Jawab Dewan Board Responsibilities	63	40,00	1	37	25
TOTAL LEVEL 1		**149**	**100,00**	**6**	**91**	**52**
LEVEL 2						
Bonus	Bonus	18	30	0	18	0
Penalti	Penalty	26	-67	3	23	0
TOTAL LEVEL 2		**44**	**30,00**	**3**		
TOTAL		**193**	**130,00**	**9**		

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders



Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Utama Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS menjadi wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

As providers of capital, Shareholders have rights and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations as well as the Company's Articles of Association. The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's primary governing body and holds authorities that are not vested in the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits stipulated by law and/or the Company's Articles of Association. The GMS serves as a forum for Shareholders to make important decisions while taking into consideration the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

RUPS dilaksanakan sebagai sarana bagi para pemegang saham yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan-keputusan penting bagi Perusahaan.

The GMS is conducted as a mechanism through which Shareholders participate in making strategic decisions that are significant to the Company.

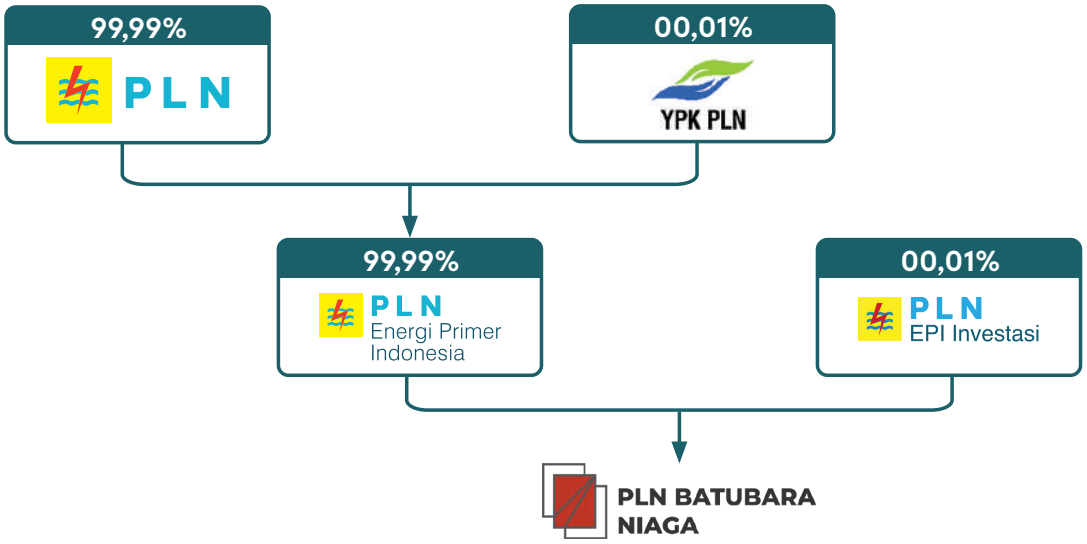
Pemegang Saham
Shareholders

Komposisi Pemegang Saham PLN BBN per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada bagian diagram dibawah ini:

The composition of PLN BBN's Shareholders as of December 31, 2025, is presented below:

Komposisi Pemegang Saham PLN BBN per 31 Desember 2025
Composition of PLN BBN Shareholders as of December 31, 2025

	Pemegang Saham Shareholders	Lebar Saham Number of Shares	Nominal (Rp) Nominal (Rp)	% Saham % Share Ownership
1.	PT PLN Energi Primer Indonesia	49.950	49.950.000.000	99,9%
2.	PT PLN EPI Investasi	50	50.000.000	0,1%
	TOTAL	50.000	50.000.000.000	100%



Pemegang Saham Utama Pengendali
Major or Controlling Shareholders

Pemegang Saham Utama/Pengendali PLN BBN adalah PT Energi Primer Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 99,9% atau 49.950 lembar saham.

PLN BBN's Major/Controlling shareholder is PT PLN Energi Primer Indonesia, which owns 49,950 shares or 99.9% of the Company's total issued shares.

Jenis-jenis dan Penyelenggaraan RUPS
Types of GMS and Their Implementation

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan setiap waktu untuk membahas hal-hal yang tidak termasuk dalam agenda RUPST. Selain itu, pemegang saham dapat mengambil suatu keputusan sirkuler yang merupakan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dianggap diperlukan.

In accordance with applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association, the GMS consists of: Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which must be convened no later than six months after the end of the financial year. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), which may be convened at any time to discuss matters not included in the AGMS agenda. In addition, Shareholders may adopt binding resolutions outside a GMS through Circular Shareholders' Resolutions whenever deemed necessary.

Pelaksanaan RUPS
GMS Implementation

Sepanjang tahun 2025 Perusahaan telah melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali dan telah mengeluarkan 2 keputusan RUPS secara sirkuler. Pada penyelenggaraan RUPS tahun 2025, PLN BBN belum menggunakan pihak independen dalam perhitungan suara.

Throughout 2025, the Company conducted two Annual General Meetings of Shareholders and adopted two Circular Shareholders' Resolutions. During the implementation of GMS meetings in 2025, PLN BBN did not engage an independent party to calculate voting results.

RUPST Tahun 2025
Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Jenis RUPS GMS Types	Agenda dan Keputusan Agenda and Resolutions	
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2024 Approval of the Annual Report and Ratification of the 2024 Financial Statements	Agenda: 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya *(Volledig Acquit et de Charge)* kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perusahaan yang dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku Perusahaan, termasuk Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2024. 2. Penetapan Gaji Laba Bersih Tahun Buku 2024. 3. Persetujuan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/ Insentif Kinerja Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024. 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2025.	Agenda: 1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements, approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Financial Year 2024, and granting of a full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions performed during Financial Year 2024, provided that such actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Company's books, including the Company's Financial Statements for Financial Year 2024. 2. Determination of the appropriation of net profit for Financial Year 2024. 3. Approval of salaries/honoraria, facilities, and allowances for Financial Year 2025, as well as tantiem, performance incentives, special performance incentives for Financial Year 2024 for the Board of Directors and Board of Commissioners, and employee bonuses for Financial Year 2024. 4. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2025.
	Keputusan: 1. RUPS memberikan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya *(Volledig Acquit et de Charge)* kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perusahaan yang dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku Perusahaan, termasuk Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2024. 2. RUPS menetapkan Gaji Laba Bersih Tahun Buku 2024. 3. RUPS memberikan persetujuan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024. 4. RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2025.	Resolutions: 1. The GMS approved the Annual Report and ratified the Company's Financial Statements, approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Financial Year 2024, and granted a full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their respective management and supervisory actions during Financial Year 2024, provided that such actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Company's books, including the Company's Financial Statements for Financial Year 2024. 2. The GMS approved the appropriation of net profit for Financial Year 2024. 3. The GMS approved the salaries/honoraria, facilities, and allowances for Financial Year 2025, as well as tantiem, performance incentives, special performance incentives for Financial Year 2024 for the Board of Directors and Board of Commissioners, and employee bonuses for Financial Year 2024. 4. The GMS appointed a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2025.
RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2025 GMS for the Approval of the 2025 RKAP	Agenda: 1. RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2025. 2. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) 2025 antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perusahaan.	Agenda: 1. The GMS approved and ratified the Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP). 2. The GMS approved and ratified the 2025 Management Contract/Key Performance Indicators (KPIs) between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Company's Shareholders.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara Sirkuler pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara Sirkuler pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RUPS Sirkuler/Akta Tahun 2025
Circular GMS 2025

RUPS Sirkuler Circular GMS	Keputusan Resolution	
Keputusan Pemegang Saham diluar rapat umum pemegang saham (Sirkuler) PLN BBN tanggal 01 Januari 2025 Circular Shareholders' Resolution of PLN BBN on January 1, 2025	Mengangkat dan menetapkan Saudara Rahmat Dian Amir sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Niaga & Operasi.	Appointment of Mr. Rahmat Dian Amir as Act. Director of Commercial & Operations.
Keputusan Pemegang Saham diluar rapat umum pemegang saham (Sirkuler) PLN BBN tanggal 31 Desember 2025 Circular Shareholders' Resolution of PLN BBN on December 31, 2025	1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Tri Joko Supriyatno sebagai Plt. Komisaris Utama 2. Mengangkat dan menetapkan: a. Saudari Ratnasari Sjamsuddin sebagai Plt. Komisaris Utama dan Menetapkan b. Saudara Tri Joko Supriyatno sebagai Plt. Komisaris	1. Honorable dismissal of Mr. Tri Joko Supriyatno from his position as Act. President Commissioner. 2. Appointment and designation of: a. Ms. Ratnasari Sjamsuddin as Act. President Commissioner; and b. Mr. Tri Joko Supriyatno as Act. Commissioner.

Tindak Lanjut Manajemen Tahun 2025 atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Pelaksanaan RUPS tahunan tahun buku 2024 menghasilkan beberapa arahan dan keputusan dari Pemegang Saham dan telah direalisasikan oleh Perusahaan, sebagaimana tabel berikut:

Follow-up Actions on the Resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

The implementation of the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2024 resulted in several directives and resolutions from the Shareholders, all of which have been implemented by the Company, as summarized below:

RUPS GMS	Keputusan Resolutions			
	Jumlah Arahan Pemegang Saham & Dewan Komisaris Number of Directives from Shareholders and Board of Commissioners	Realisasi Hasil RUPS Implemented Resolutions	Persentase Progres Progress (%)	Alasan Keputusan RUPS yang belum direalisasikan Explanation for Unimplemented Resolutions
RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 GMS on the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for Financial Year 2024	6	6	100%	

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun jalannya usaha Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Anggaran Dasar Perusahaan.

The Board of Commissioners is a Company organ responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors in managing the Company's operations. The Board of Commissioners is authorized and responsible for overseeing management policies, the overall management of the Company, and the conduct of the Company's business activities, as well as providing advice to the Board of Directors. In carrying out its duties, the Board of Commissioners must comply with applicable laws and regulations as well as the Company's Articles of Association.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
Appointment and Dismissal Mechanism of the Board of Commissioners

Dalam pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan materiil, formal dan persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PLN BBN dan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Dewan Komisaris PLN BBN telah mempertimbangkan kriteria dan persyaratan serta kelulusan dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* oleh fungsi *Talent Pool* yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris telah dilakukan melalui RUPS.

In appointing members of the Board of Commissioners, prospective members must fulfill substantive, formal, and other requirements as stipulated in PLN BBN's Articles of Association and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The appointment of PLN BBN's Board of Commissioners has taken into consideration the applicable criteria and requirements, including successful completion of the Fit and Proper Test conducted through the Talent Pool function organized by the Shareholders. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are carried out through the General Meeting of Shareholders (GMS).

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris
Number and Composition of the Board of Commissioners

Selama periode 2025 dan sampai Laporan ini diterbitkan, terdapat pergantian Dewan Komisaris. Terdapat pengangkatan Dewan Komisaris melalui Keputusan RUPS

During 2025 and up to the issuance date of this Annual Report, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. Pursuant to the Circular Resolution of

Sirkuler tanggal 31 Desember 2025, yaitu mengangkat Sdri. Ratnasari Sjamsuddin menggantikan Sdr. Tri Joko Supriyatno sebagai Plt. Komisaris Utama PLN BBN. Kemudian Sdr. Tri Joko Supriyatno diangkat kembali sebagai Plt. Komisaris, Sehingga komposisi Dewan Komisaris PLN BBN berjumlah tanggal 31 Desember 2025 adalah 3 (orang), dengan komposisi sebagai berikut:

the Shareholders on December 31, 2025, Ms. Ratnasari Sjamsuddin was appointed as Act. President Commissioner of PLN BBN, replacing Mr. Tri Joko Supriyatno. Subsequently, Mr. Tri Joko Supriyatno was reappointed as Act. Commissioner. Accordingly, as of December 31, 2025, the Board of Commissioners consisted of three members with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment		Periode Menjabat Term of Office
Ratnasari Sjamsuddin	Plt. Komisaris Utama Act. President Commissioner	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Batubara Niaga tanggal 31 Desember 2025	Circular Resolution of the Shareholders of PT PLN Batubara Niaga on December 31, 2025	4 tahun 4 years
Tri Joko Supriyatno	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Batubara Niaga tanggal 31 Desember 2025	Circular Resolution of the Shareholders of PT PLN Batubara Niaga on December 31, 2025	4 tahun 4 years
Noor Adi Baroto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Batubara Niaga tanggal 26 November 2024	Circular Resolution of the Shareholders of PT PLN Batubara Niaga on November 26, 2024	4 tahun 4 years

Jumlah dan komposisi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan serta diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif dan independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, Profil Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Sub Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan Ini.

The number and composition of the Board of Commissioners have been aligned with the Company's needs and are expected to enable the effective, objective, and independent execution of supervisory functions and responsibilities. Profiles of the Board of Commissioners are presented in the Company Profile section of this Annual Report.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Penetapan Komisaris Independen mengacu pada Permen BUMN 2/2023 Pasal 15 Ayat (3) dimana Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan hubungan keluarga dengan saham, anggota dan/atau Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dengan posisinya yang netral, Komisaris Independen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh manajemen mencerminkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan senantiasa sejalan dengan kepentingan terbaik Perusahaan serta para pemangku kepentingan.

PLN BBN telah menetapkan 1 orang Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 26 November 2024 yang dijabat oleh Sdr. Noor Adi Baroto.

The appointment of an Independent Commissioner refers to Article 15 Paragraph (3) of Ministerial Regulation of State-Owned Enterprises No. 2/2023, which stipulates that an Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, ownership, family, or other relationships with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, controlling shareholders, or the Company that may affect their ability to act independently.

Through this independent position, the Independent Commissioner is responsible for ensuring that management policies and strategic decisions reflect the principles of Good Corporate Governance and remain aligned with the best interests of the Company and its stakeholders.

PLN BBN has appointed one Independent Commissioner based on the Circular Resolution of the Shareholders on November 26, 2024, namely Mr. Noor Adi Baroto.

Ketentuan Masa Jabatan
Term of Office

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Members of the Board of Commissioners serve a term of four years without prejudice to the authority of the GMS to dismiss them at any time. Upon completion of their term, members of the Board of Commissioners may be reappointed for one additional term.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan
Independence Statement and Potential Conflicts of Interest

Setiap Anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independesi dan bebas benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya setiap tahun dengan menandatangani Pakta Integritas.

Each member of the Board of Commissioners annually submits a statement confirming independence and the absence of conflicts of interest in performing their duties and responsibilities through the signing of an Integrity Pact.

Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Integrity Pact Signing

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Penandatanganan Signing Date
Ratnasari Sjamsuddin	Plt. Komisaris Utama Act. President Commissioner	08 Januari 2026 8 January 2026
Tri Joko Supriyatno	Plt. Komisaris Act. Commissioner	13 Februari 2025 13 February 2025
Noor Adi Baroto	Komisaris Independen Independent Commissioner	13 Februari 2025 13 February 2025







Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris
Affiliation Relationships of the Board of Commissioners

Hubungan afiliasi yang dimaksud mencakup hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi serta anggota Dewan

Affiliation relationships include family and financial relationships among members of the Board of Commissioners, between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, and between members of

Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perusahaan. Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

the Board of Commissioners and the Company's controlling and/or major shareholders. The affiliation relationships of members of the Board of Commissioners serving throughout 2025 are as follows:

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris
Affiliation Relationof Members of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family relationship with			Hubungan Keluarga dengan Financial relationship with		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholder
Ratnasari Sjamsuddin	Plt. Komisaris Utama Act. President Commissioner	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Tri Joko Supriyatno	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Noor Adi Baroto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sepanjang tahun 2025 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In addition, all members of the Board of Commissioners serving during 2025 had no prohibited affiliations with other companies in accordance with the Company's internal regulations and applicable laws and regulations.

Anggota Dewan Komisaris secara berkala melaporkan kepemilikan sahamnya baik atas nama pribadi maupun keluarga pada Perusahaan dan/atau perusahaan lainnya untuk dicatat dalam Daftar Khusus. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Commissioners periodically report their share ownership, both personally and through family members, in the Company and/or other companies for recording in the Special Register.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Beserta Keluarga
Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and Their Families

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham oleh Pribadi Pada Personal Share Ownership in		Kepemilikan Saham oleh Keluarga Pada Family Share Ownership in	
		Perusahaan The Company	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan The Company	Perusahaan Lain Other Companies
Ratnasari Sjamsuddin	Plt. Komisaris Utama Act. President Commissioner	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Tri Joko Supriyatno	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Noor Adi Baroto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None

Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Charter

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* yang ditetapkan melalui Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Batubara Niaga yang telah disahkan pada Bulan Desember 2020. Muatan yang diatur dalam *Board Manual* tersebut antara lain:

The Board of Commissioners Charter is stipulated in the Board Manual, which was approved through a Joint Agreement between the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PLN Batubara Niaga in December 2020. The Board Manual covers, among others:

a. Pendahuluan
b. Etika Jabatan
c. Direksi
d. Dewan Komisaris
   - Fungsi Dewan Komisaris
   - Persyaratan Dewan Komisaris
   - Keanggotaan Dewan Komisaris
   - Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
   - Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
   - Wewenang Dewan Komisaris
   - Kewajiban Dewan Komisaris
   - Hak Dewan Komisaris
   - Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
e. Kegiatan Antar Organ Perusahaan

a. Introduction
b. Code of Conduct
c. Board of Directors
d. Board of Commissioners, including:
   - Functions of the Board of Commissioners
   - Qualifications of the Board of Commissioners
   - Membership of the Board of Commissioners
   - Orientation and Capability Enhancement Programs
   - Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
   - Authorities of the Board of Commissioners
   - Obligations of the Board of Commissioners
   - Rights of the Board of Commissioners
   - Performance Evaluation of the Board of Commissioners
e. Interactions Among Company Organs

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Tugas Dewan Komisaris berdasarkan *Board Manual* Perusahaan antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan dan maksud tujuan Perusahaan;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya;
3. Bila dipandang perlu, dapat menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;
4. Menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten;
5. Memantau efektivitas praktek GCG antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance* di Perusahaan;
6. Melakukan pembagian kerja diantara para Anggota Dewan Komisaris yang diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.

Based on the Company's Board Manual, the duties of the Board of Commissioners include:

1. Supervising management policies and the overall management of the Company and its business activities carried out by the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors, including oversight of the implementation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP), the Work Plan and Budget (RKAP), the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations in the interests of the Company and in line with its objectives.
2. Monitoring developments in the Company's activities through both internal information provided by the Company and external information obtained from the media and other sources.
3. Attending work meetings and coordination meetings with the Board of Directors and management whenever deemed necessary.
4. Consistently implementing Good Corporate Governance principles.
5. Monitoring the effectiveness of GCG practices, including through regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss GCG implementation within the Company.
6. Allocating duties among members of the Board of Commissioners. To support its effectiveness, the Board of Commissioners may be assisted by a Corporate Secretary to the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners at the Company's expense.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris
Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris telah menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk secara khusus melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan pada bidang-bidang tertentu sebagai upaya mendorong efektifitas fungsi pengawasan.

The Board of Commissioners has established specific supervisory assignments for each member to enhance the effectiveness of its oversight function.

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengawasan Supervisory Responsibilities	
Ratnasari Sjamsuddin	Plt. Komisaris Utama Act. President Commissioner	a. Memimpin dan mengkoordinasikan Dewan Komisaris. b. Menjadi wakil resmi Dewan Komisaris dalam hubungan dengan Direksi, pemegang saham, dan pihak luar. c. Menjaga independensi, integritas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	a. Lead and coordinate the Board of Commissioners. b. Serve as the official representative of the Board of Commissioners in its relations with the Board of Directors, shareholders, and external stakeholders. c. Uphold the independence and integrity of the Board of Commissioners while promoting the implementation of Good Corporate Governance (GCG).
Tri Joko Supriyatno	Plt. Komisaris Act. Commissioner	a. Melakukan tinjauan, pengawasan, dan evaluasi terkait *Whistleblowing System*, Pengaduan, Kepatuhan Direksi terhadap perjanjian kerjasama, dan sistem teknologi informasi b. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal. c. Memastikan telah terdapatnya prosedur/ kebijakan terkait laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan informasi keuangan lainnya d. Menilai pelaksanaan kegiatan & hasil audit internal yang dilakukan baik oleh auditor internal maupun eksternal. e. Melakukan penyempurnan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya f. Melaksanakan rapat komite dan meyiapkan rencana kegiatan dan anggaran Komite Audit	a. Conducting reviews, supervision, and evaluations related to the Whistleblowing System, Complaints, the Board of Directors' Compliance with Cooperation Agreements, and the information technology system. b. Ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external auditor's duties. c. Ensuring the existence of procedures/ policies related to periodic financial reports, projections/forecasts, and other financial information. d. Assessing the implementation of internal audit activities and results by both internal and external auditors. e. Improving the management control system and its implementation. f. Conducting committee meetings and preparing the Audit Committee's activity plan and budget.
Noor Adi Baroto	Komisaris Independen Independent Commissioner	a. Melakukan tinjauan, pengawasan, dan evaluasi terkait kebijakan, pedoman,strategi manajemen risiko, kepatuhan, manajemen talenta dan remunerasi b. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta terseleksi untuk menghasilkan daftar talenta ternominasi c. Melakukan evaluasi atas usulan KPI Perusahaan d. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan e. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi karyawan f. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris g. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	a. Review, supervise, and evaluate policies, guidelines, risk management strategies, compliance, talent management, and remuneration. b. Validate and calibrate selected talent to produce a list of nominated talent. c. Evaluate the Company's proposed KPIs. d. Evaluate the Board of Directors' proposals regarding the Company's organizational structure. e. Evaluate employee remuneration policies. f. Prepare development program proposals for the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. g. Prepare individual performance evaluation system proposals for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Dewan Komisaris juga memastikan organ pendukung fungsi pengawasan yang telah dibentuk menjalankan tugasnya sejalan dengan rencana kerja Dewan Komisaris dan pedoman kerja yang telah didetakan dengan menempatkan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua dan wakil ketua pada komite di bawah organ Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku bagi Perusahaan. Susunan anggota Dewan Komisaris yang didelegasikan pada komite di bawah organ Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners also ensures that all supporting organs established to assist the supervisory function perform their duties in line with the Board of Commissioners' work plan and established governance guidelines. Members of the Board of Commissioners are assigned as Chairpersons of committees under the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations.

Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners in Committees

Komite Committees		Ketua Chairperson	Wakil Ketua Vice Chairperson
Komite Audit	Audit Committee	Tri Joko Supriyatno	-
Komite Nominasi & Manajemen Risiko	Nomination & Risk Management Committee	Noor Adi Baroto	-
Komite Remunerasi	Remuneration Committee	-	-

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Supervisory Report of The Board of Commissioners

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan antara lain sebagai berikut:

Throughout 2025, the Board of Commissioners carried out various supervisory activities and fulfilled its oversight responsibilities, including the following:

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat mengacu pada *Board Manual*. Rapat Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Komisaris baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Komisaris secara teratur sekurang-kurangnya sebulan sekali mengadakan rapat untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Rapat Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris serta Rapat Koordinasi Dewan dengan Direksi. Di samping rapat terjadwal, Rapat Komisaris dapat dilakukan setiap saat apabila diperlukan.

Meetings of the Board of Commissioners

The meeting policy refers to the Company's Board Manual. Meetings of the Board of Commissioners may be conducted on a regular or ad hoc basis. The Board of Commissioners convenes meetings at least once a month to discuss various business issues, evaluate the Company's performance, and provide strategic direction regarding the Company's operations. Meetings of the Board of Commissioners consist of Internal Meetings of the Board of Commissioners and Coordination Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. In addition to scheduled meetings, meetings may also be convened whenever necessary.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 24 kali rapat yang terdiri dari rapat internal 12 kali dan rapat bersama Direksi (gabungan) sebanyak 12 kali rapat. Pelaksanaan rapat gabungan selalu diawali dengan rapat internal Direksi. Berikut adalah tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal maupun rapat gabungan bersama Direksi.

Frequency of Meetings of the Board of Commissioners

During 2025, the Board of Commissioners held a total of 24 meetings, consisting of 12 Internal Meetings of the Board of Commissioners and 12 Joint Meetings with the Board of Directors. Joint meetings were consistently preceded by internal meetings of the Board of Directors.

Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2025
Internal Meetings of the Board of Commissioners in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda	
1	21 Januari 2025 January 21, 2025	1. Realisasi KPI s.d Desember 2024 2. Update Progres Arahan Dekom (Konsinyering Dekom & Direksi) 3. Diskusi Persiapan RUPS RKAP Tahun 2025	1. KPI Achievement through December 2024 2. Progress Update on the Board of Commissioners' Directives (Joint Session of the Board of Commissioners and Board of Directors) 3. Discussion on Preparation for the 2025 RKAP GMS
2	28 Februari 2025 February 28, 2025	1. Realisasi KPI s.d Januari 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Januari 2025 3. Isu - Isu Strategis Perusahaan	1. KPI Achievement through January 2025 2. Financial Performance through January 2025 3. Strategic Corporate Issues
3	21 Maret 2025 March 21, 2025	1. Kinerja KPI s.d Februari 2025 2. Pembahasan Progres Audit LK Tahun 2024 3. Isu - Isu Strategis Perusahaan	1. KPI Achievement through February 2025 2. Progress of the 2024 Financial Statement Audit 3. Strategic Corporate Issues
4	28 April 2025 April 28, 2025	1. Paparan simulasi dari LK Audit PLN BBN Tahun 2024 2. Tindaklanjut atas 3 isu audit di Tahun 2024	1. Presentation of PLN BBN's 2024 Audited Financial Statements Simulation 2. Follow-up on Three Audit Issues Identified in 2024
5	28 Mei 2025 May 28, 2025	1. Kinerja s.d April 2025. 2. Persiapan RUPS LPT 2024	1. Performance through April 2025 2. Preparation for the 2024 Annual Report GMS
6	28 Juni 2025 June 28, 2025	1. Persiapan RUPS LPT 2024 2. Kinerja KPI s.d Mei 2025 3. Kinerja Keuangan s.d Mei 2025	1. Preparation for the 2024 Annual Report GMS 2. KPI Achievement through May 2025 3. Financial Performance through May 2025
7	25 Juli 2025 July 25, 2025	1. Kinerja KPI s.d Juni 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Juni 2025	1. KPI Achievement through June 2025 2. Financial Performance through June 2025
8	30 Agustus 2025 August 30, 2025	1. Kinerja KPI s.d Juli 2025 2. Tinjauan Dewan Pengarah s.d Tahun 2025 3. *Check Point Beyond kWh*, Piutang IPP bermasalah, Volume Pasokan, perbaikan likuiditas	1. KPI Achievement through July 2025 2. Advisory Board Review through 2025 3. Checkpoint on Beyond kWh Business, Problematic IPP Receivables, Supply Volume, and Liquidity Improvement
9	20 September 2025 September 20, 2025	1. Kinerja KPI s.d Agustus 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Agustus 2025 3. Persiapan Audit Interim LK 2025 4. *Check Point Beyond* kWh, Piutang IPP bermasalah, Perbaikan likuiditas	1. KPI Achievement through August 2025 2. Financial Performance through August 2025 3. Preparation for the 2025 Interim Financial Statement Audit 4. Checkpoint on Beyond kWh Business, Problematic IPP Receivables, and Liquidity Improvement
10	18 Oktober 2025 October 18, 2025	1. Kinerja KPI s.d September 2025 2. Paparan Implementasi ISO 9001:2015 3. *Action Plan* Tahun 2026 & Evaluasi Margin 4. *Check Point Beyond* kWh, Piutang IPP bermasalah, perbaikan likuiditas 5. Tindaklanjut Audit Internal	1. KPI Achievement through September 2025 2. ISO 9001:2015 Implementation Update 3. 2026 Action Plan and Margin Evaluation 4. Checkpoint on Beyond kWh Business, Problematic IPP Receivables, and Liquidity Improvement 5. Follow-up on Internal Audit Findings
11	18 November 2025 November 18, 2025	1. Kinerja KPI s.d Oktober 2025 & Prognosa Desember 2025 2. Kinerja Operasi s.d Oktober 2025 & Prognosa Desember 2025 3. Kinerja Keuangan s.d Oktober 2025 & Prognosa Desember 2025 4. *Check Point Beyond* kWh, Piutang IPP bermasalah, perbaikan likuiditas 5. Paparan Strategi Risiko PLN BBN 6. Tindaklanjut Arahan Rawas Periode Sebelumnya	1. KPI Achievement through October 2025 and December 2025 Forecast 2. Operational Performance through October 2025 and December 2025 Forecast 3. Financial Performance through October 2025 and December 2025 Forecast 4. Checkpoint on Beyond kWh Business, Problematic IPP Receivables, and Liquidity Improvement 5. PLN BBN Risk Strategy Presentation 6. Follow-up on Previous Supervisory Directives
12	08 Desember 2025 December 8, 2025	Kinerja KPI s.d November 2025	KPI Achievement as of November 2025

Rapat Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Supervisory Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda	
1	21 Januari 2025 January 21, 2025	1. Realisasi KPI s.d Desember 2024 2. Update Progres Arahan Dekom (Konsinyering Dekom & Direksi) 3. Diskusi Persiapan RUPS RKAP Tahun 2025	1. KPI Achievement as of December 2024 2. Progress Update on the Board of Commissioners' Directives (Consultations between the Board of Commissioners and Board of Directors) 3. Discussion on Preparations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Regarding the Work Plan & Budget
2	28 Februari 2025 February 28, 2025	1. Realisasi KPI s.d Januari 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Januari 2025 3. Isu - Isu Strategis Perusahaan	1. KPI Achievement as of January 2025 2. Financial Performance as of January 2025 3. Strategic Issues of the Company
3	21 Maret 2025 March 21, 2025	1. Kinerja KPI s.d Februari 2025 2. Pembahasan Progres Audit LK Tahun 2024 3. Isu - Isu Strategis Perusahaan	1. KPI Performance as of February 2025 2. Discussion of the Progress of the 2024 Financial Statement Audit 3. Strategic Issues of the Company
4	28 April 2025 April 28, 2025	1. Paparan simulasi dari LK Audit PLN BBN Tahun 2024 2. Tindaklanjut atas 3 isu audit di Tahun 2024	1. Presentation of the simulation of the 2024 PLN BBN Audited Financial Statements 2. Follow-up on the three audit issues identified in 2024
5	28 Mei 2025 May 28, 2025	1. Kinerja s.d April 2025. 2. Persiapan RUPS LPT 2024	1. Performance as of April 2025. 2. Preparations for the 2024 GMS for the Accountability Report
6	28 Juni 2025 June 28, 2025	1. Persiapan RUPS LPT 2024 2. Kinerja KPI s.d Mei 2025 3. Kinerja Keuangan s.d Mei 2025	1. Preparations for the 2024 GMS for the Accountability Report 2. KPI Performance as of May 2025 3. Financial Performance as of May 2025
7	25 Juli 2025 July 25, 2025	1. Kinerja KPI s.d Juni 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Juni 2025	1. KPI Performance as of June 2025 2. Financial Performance as of June 2025
8	30 Agustus 2025 August 30, 2025	1. Kinerja KPI s.d Juli 2025 2. Tinjauan Dewan Pengarah s.d Tahun 2025 3. *Check Point Beyond* kWh, Piutang IPP bermasalah, Volume Pasokan, perbaikan likuiditas	1. KPI Performance as of July 2025 2. Steering Committee Review as of 2025 3. Check Point Beyond kWh, Bad IPP Debt, Supply Volume, Liquidity Improvement
9	20 September 2025 September 20, 2025	1. Kinerja KPI s.d Agustus 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Agustus 2025 3. Persiapan Audit Interim LK 2025 4. *Check Point Beyond* kWh, Piutang IPP bermasalah, Perbaikan likuiditas	1. KPI Performance as of August 2025 2. Financial Performance as of August 2025 3. Preparation for the 2025 Interim Financial Statement Audit 4. Check Point Beyond kWh, Bad IPP Debt, Liquidity Improvements
10	18 Oktober 2025 October 18, 2025	1. Kinerja KPI s.d September 2025 2. Paparan Implementasi ISO 9001:2015 3. *Action Plan* Tahun 2026 & Evaluasi Margin 4. *Check Point Beyond* kWh, Piutang IPP bermasalah, perbaikan likuiditas 5. Tindaklanjut Audit Internal	1. KPI Performance as of September 2025 2. Presentation on the Implementation of ISO 9001:2015 3. 2026 Action Plan & Margin Evaluation 4. Checkpoints Beyond kWh, Bad IPP Debt, Liquidity Improvements 5. Follow-up on Internal Audits
11	18 November 2025 November 18, 2025	1. Kinerja KPI s.d Oktober 2025 & Prognosa Desember 2025 2. Kinerja Operasi s.d Oktober 2025 & Prognosa Desember 2025 3. Kinerja Keuangan s.d Oktober 2025 & Prognosa Desember 2025 4. *Check Point Beyond* kWh, Piutang IPP bermasalah, perbaikan likuiditas 5. Paparan Strategi Risiko PLN BBN 6. Tindaklanjut Arahan Rawas Periode Sebelumnya	1. KPI Performance as of October 2025 & Forecast for December 2025 2. Operational Performance as of October 2025 & Forecast for December 2025 3. Financial Performance as of October 2025 & Forecast for December 2025 4. Key Issues Beyond kWh, Bad IPP Debt, Liquidity Improvements 5. Presentation on PLN BBN's Risk Strategy 6. Follow-up on Supervisory meeting's Directives from the Previous Period
12	08 Desember 2025 December 8, 2025	Kinerja KPI s.d November 2025	KPI Performance as of November 2025

Tabel Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Gabungan Tahun 2025
Attendance of the Board of Commissioners at Meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meetings of the Board of Commissioners			Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi* Joint Meetings with the Board of Directors*		
		Jumlah dan (%) Kehadiran Total and Attendance Rate (%)			Jumlah dan (%) Kehadiran Total and Attendance Rate (%)		
		Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	%	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	%
Ratnasari Sjamsuddin*	Plt. Komisaris Utama Act. President Commissioner	-	-	-	-	-	-
Tri Joko Supriyatno**	Plt. Komisaris Act. Commissioner	12	12	100%	12	12	100%
Noor Adi Baroto	Komisaris Independen Commissioner	12	12	100%	12	12	100%

*Sdri. Ratnasari Sjamsuddin diangkat pada tanggal 31 Desember 2025
** Sebelum menjabat sebagai Plt. Komisaris, Sdr. Tri Joko Supriyatno menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama dari tanggal 1 Januari 2025-30 Desember 2025

*Ms. Ratnasari Sjamsuddin was appointed on December 31, 2025.
** Prior to serving as Act. Commissioner, Mr. Tri Joko Supriyatno served as Act. President Commissioner from January 1, 2025 to December 30, 2025.

Rekomendasi, Arahan dan Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2025

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat antara lain terkait:

- Memastikan pemindahan secara bertahap jasa transport dari PT PLN Batubara Niaga ke PT Pelayaran Bahtera Adhiguna sesuai dengan RJPP PT PLN Energi Primer Indonesia untuk optimalisasi sinergi anak Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia.
- Memastikan keamanan pasokan batubara 2025, meskipun dari sisi pasokan dan regulasi penugasan DMO dapat dikatakan aman, namun perlu memperkuat bisnis *coal blending* dan mata rantai transportasi dari tambang sampai ke transportasi laut.
- Mendorong pengembangan bisnis trading batubara sebagai pendapatan *Beyond* Kwh.
- Melakukan penguatan dan pengembangan human capital secara komprehensif termasuk melakukan *review* organisasi agar selaras dengan strategi Perusahaan dan meningkatkan *engagement* pegawai.
- Memastikan dan menjaga keberlangsungan usaha perusahaan, baik dalam kecukupan modal kerja dan likuiditas perusahaan dalam bisnis Batubara.
- Mendorong digitalisasi tata kelola Perusahaan.
- Mengevaluasi dan menyusun kajian terkait kebutuhan/ penyesuaian transaksi Perusahaan yang menjadi kewenangan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendukung operasional Perusahaan.

Recommendations, Directives, and Decisions of the Board of Commissioners in 2025

Throughout 2025, the Board of Commissioners provided oversight, recommendations, and strategic guidance on various matters, including:

- Ensuring the gradual transfer of transportation services from PT PLN Batubara Niaga to PT Pelayaran Bahtera Adhiguna in accordance with the Long-Term Corporate Plan (RJPP) of PT PLN Energi Primer Indonesia to optimize synergy among subsidiaries of PT PLN Energi Primer Indonesia.
- Ensuring the security of coal supply in 2025. Although coal supply and DMO assignment regulations remained relatively secure, the Company was encouraged to strengthen its coal blending business and transportation value chain from mining sites to marine transportation.
- Encouraging the development of coal trading activities as a source of Beyond kWh revenue.
- Strengthening and developing human capital comprehensively, including reviewing the organizational structure to ensure alignment with corporate strategy and improving employee engagement.
- Ensuring business continuity through adequate working capital and liquidity management to support the Company's coal business operations.
- Promoting the digitalization of corporate governance processes.
- Reviewing and evaluating transaction thresholds and authorities assigned to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders to support efficient corporate operations.

- Mendorong peningkatan *maturity level* pengelolaan perusahaan sesuai prinsip GCG dan memastikan bahwa seluruh program kerja dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan prinsip penganggaran berpedoman kepada aspek GCG, yaitu bahwa anggaran biaya merupakan pagu maksimal yang dapat digunakan, sedangkan anggaran pendapatan merupakan target minimal yang harus dicapai.
- Memastikan dalam setiap pengambilan keputusan memperhatikan dan secara berkelanjutan melakukan penguatan implementasi tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan *(Governance Risk Management and Compliance*/GRC).
- Memastikan bahwa seluruh program kerja dalam RKAP 2025 dilaksanakan, dievaluasi secara berkala dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris sesuai periode laporan yang telah ditentukan serta menyiapkan langkah antisipatif jika ada kondisi di luar parameter dan asumsi yang telah ditetapkan.

- Encouraging improvements in corporate governance maturity levels and ensuring that all work programs are implemented effectively and efficiently in accordance with GCG principles, whereby expense budgets represent maximum spending limits while revenue budgets represent minimum performance targets.
- Ensuring that all decision-making processes continuously strengthen the implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC).
- Monitoring the implementation of all programs outlined in the 2025 RKAP, ensuring periodic evaluations and reporting to the Board of Commissioners, and preparing anticipatory measures for conditions beyond established assumptions and parameters.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Kebijakan pelatihan Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. Program peningkatan pengetahuan Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, *workshop*, *short course*. Selama tahun 2025, Komisaris PLN BBN telah mengikuti berbagai peningkatan pengetahuan sebagai berikut:

Training and Competency Development Programs for the Board of Commissioners

Training policies for the Board of Commissioners are governed by the Board Manual. Competency enhancement programs may be conducted through training courses, seminars, workshops, and short courses. During 2025, members of the Board of Commissioners participated in the following competency development programs:

Nama Name	Nama *Workshop*/Seminar Workshop/Seminar Name	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Tri Joko Supriyatno	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	LSP MKS	15 s.d 17 April 2025 April 15–17, 2025	Jakarta
Noor Adi Baroto	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	LSP MKS	15 s.d 17 April 2025 April 15–17, 2025	Jakarta

Pengenalan Dewan Komisaris Baru

Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan. Kebijakan Program Pengenalan Dewan Komisaris Baru PLN BBN diatur dalam *Board Manual*. Agar Komisaris perusahaan selalu dapat bekerja selaras dengan Organ Perusahaan yang lain, maka bagi anggota Komisaris yang baru diangkat akan diberikan program pengenalan. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas perusahaan, kunjungan ke cabang-cabang atau program lainnya. Tanggung jawab pengadaan program pengenalan ini berada pada Komisaris Utama. Perusahaan akan secara teratur mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan bagi Komisaris dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Komisaris. Program pengenalan yang diberikan kepada Anggota Komisaris, antara lain akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

Orientation Program for Newly Appointed Commissioners

Newly appointed members of the Board of Commissioners are required to participate in an orientation program introducing them to the Company. The orientation policy is governed by the Company's Board Manual. To ensure alignment with other Company organs, newly appointed Commissioners are provided with orientation programs that may include presentations, meetings, visits to Company facilities, visits to branch offices, and other relevant programs. Responsibility for organizing the orientation program rests with the President Commissioner. The Company also conducts continuous learning programs for Commissioners based on their specific development needs. The orientation program generally covers:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN.
2. Gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2025 terdapat Dewan Komisaris baru yaitu Sdri, Ratnasari Sjamsuddin. Program pengenalan untuk Dewan Komisaris baru dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2026.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan Komisaris, Komite, dan setiap individu Komisaris yang berdasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan membandingkan realisasi *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris terhadap targetnya. Selanjutnya evaluasi tahunan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS. Kebijakan mengenai penilaian serta evaluasi kinerja Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual* Perusahaan. Berdasarkan kebijakan tersebut Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *Key Performance Indicator* (KPI).

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisari untuk ditetapkan dalam RUPS adalah setidak-tidaknya sebagai berikut:

- Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
- Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Kontribusinya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perusahaan.
- Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
- Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.

1. Implementation of Good Corporate Governance principles within State-Owned Enterprises.
2. Overview of the SOE, including objectives, business characteristics, operational scope, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic matters.
3. Information regarding delegated authorities, internal and external audits, internal control systems, and related policies.
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, including prohibited conduct.

In 2025, PLN BBN appointed a new member of the Board of Commissioners, Ms. Ratnasari Sjamsuddin. The orientation program for the newly appointed Commissioner was conducted on January 12, 2026.

Performance Assessment of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners conducts annual objective evaluations to determine the effectiveness of the Board, its Committees, and individual Commissioners based on specific, measurable, achievable, and relevant performance indicators. The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted annually by the Shareholders through the GMS by comparing the realization of the Board's Key Performance Indicators (KPIs) against established targets. The annual evaluation results are subsequently submitted to the GMS.

Policy and Procedure for Performance Assessment

Performance assessments of the Board of Commissioners are conducted by Shareholders through the GMS. The assessment and evaluation process refers to the Company's Board Manual and is based on predetermined KPIs.

The evaluation criteria proposed by the Board of Commissioners for approval by the GMS include, at a minimum:

- Preparation of KPIs at the beginning of the year and evaluation of their achievement.
- Attendance at meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- Contributions to supervisory activities and advisory functions provided to the Board of Directors.
- Participation in specific assignments and initiatives.
- Commitment to advancing the interests of the Company.

- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perusahaan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. EBITDA.
2. Laba Bersih.
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta KPI Dewan Komisaris.
4. Pemberian Evaluasi terhadap Kinerja Operasional dan Keuangan Perusahaan
5. Pemberian Tanggapan/Rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap RJPP, RKAP, Laporan Tahunan dan Analisis Laporan Triwulanan.
6. Pemberian Arahan, Nasehat, maupun Rekomendasi kepada Direksi sesuai bidang Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris.
7. Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi Perusahaan
8. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
9. Pemberian Review, Evaluasi dan Persetujuan terhadap Hal-Hal yang wajib mendapatkan persetujuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.
10. Pencapaian *Assessment* GCG Aspek Dewan Komisaris.
11. Peningkatan Kapabilitas melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris Perusahaan berhasil mencatatkan pencapaian KPI sebesar 97,98%. Pencapaian KPI tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 96.60%. Peningkatan KPI Dewan Komisaris pada tahun 2025 dikarenakan optimalisasi fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang dilakukan secara lebih efektif dan terukur, penguatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance),* peningkatan kualitas rapat dan tindak lanjut rekomendasi strategis, serta konsistensi dalam melakukan monitoring terhadap pencapaian target kinerja Perusahaan, termasuk pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penilaian Kinerja Direksi

Dalam rangka memastikan memastikan bahwa Direksi dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan efektif, maka Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi dengan mengacu pada *Board Manual* Perusahaan.

- Compliance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, GMS resolutions, and Company policies.

Performance Assessment Criteria

The performance of the Board of Commissioners is evaluated based on the following criteria:

1. EBITDA achievement.
2. Net Profit achievement.
3. Preparation of the Annual Work Plan and Budget (WP&B) and Board of Commissioners' KPIs.
4. Evaluation of the Company's operational and financial performance.
5. Provision of responses and recommendations to Shareholders regarding the RJPP, RKAP, Annual Report, and Quarterly Report Analysis.
6. Provision of directives, advice, and recommendations to the Board of Directors within the scope of the Board of Commissioners' authority.
7. Conduct of Internal Meetings of the Board of Commissioners and Coordination Meetings with the Board of Directors.
8. Preparation and submission of the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
9. Review, evaluation, and approval of matters requiring approval under applicable regulations and the Company's Articles of Association.
10. Achievement of GCG Assessment targets relating to the Board of Commissioners.
11. Capability enhancement through participation in seminars and training programs relevant to their duties.

Results of the Performance Assessment

In 2025, the Board of Commissioners achieved a KPI realization of 97.98%, an increase from 96.60% in the previous year. This improvement was driven by enhanced effectiveness in supervisory and advisory functions, strengthened implementation of Good Corporate Governance, improved quality of meetings and follow-up actions on strategic recommendations, and consistent monitoring of Company performance targets, including risk management and regulatory compliance.

Performance Assessment of the Board of Directors

To ensure that the Board of Directors performs its roles and responsibilities effectively, the Board of Commissioners conducts a performance assessment based on the Company's Board Manual.

Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham dan dibahas dalam forum RUPS.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi ditetapkan dalam RUPS berdasarkan KPI. Disamping itu kriteria kinerja Direksi juga dilakukan secara individu yang diajukan oleh Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS adalah setidak-tidaknya sebagai berikut:

1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
2. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris.
3. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perusahaan.
4. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
6. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
7. Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi tahun 2025 mencapai 97,98% dari target awal sebesar 100%. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

Penilaian Atas Kinerja Masing-Masing Komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Sampai dengan akhir Desember 2025, PLN BBN hanya memiliki Komite Audit dan Komite Nominasi & Manajemen Risiko. Penilaian Kinerja terhadap Komite Audit ditentukan berdasarkan:

1. Realisasi laporan pelaksanaan tugas komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,
2. Rekomendasi yang diberikan dan
3. Frekuensi rapat yang dilakukan komite sesuai yang tercantum dalam Piagam Komite dan Program Kerja Komite.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip GCG. Untuk periode tahun buku 2025, Komite Audit Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta Piagam Komite Audit. Pelaksanaan kinerja Komite Audit juga diukur dari tingkat kehadirannya dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Audit PLN BBN telah melaksanakan rapat khusus Komite Audit sebanyak 12 kali serta telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai

The evaluation process is conducted by the Board of Commissioners before the results are submitted to the Shareholders and discussed at the GMS.

Assessment Criteria

Performance criteria for the Board of Directors are established by the GMS based on KPIs. In addition, individual performance evaluations are conducted based on criteria that include:

1. Preparation of KPIs at the beginning of the year and evaluation of their achievement.
2. Attendance at Board of Directors meetings and meetings with the Board of Commissioners.
3. Contribution to the Company's business activities.
4. Participation in specific assignments.
5. Commitment to advancing the Company's interests.
6. Compliance with applicable laws, regulations, and Company policies.
7. Achievement of Company targets as stipulated in the RKAP and Management Contract.

Results of the Performance Assessment

The Board of Directors achieved a performance realization of 97.98% in 2025 against the target of 100%. The results of the performance assessment form an integral part of the compensation and incentive scheme for members of the Board of Directors.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

As of December 31, 2025, PLN BBN had established an Audit Committee and a Nomination & Risk Management Committee. Committee performance is assessed based on:

1. Realization of duties and responsibilities in accordance with each Committee's charter.
2. Recommendations provided to the Board of Commissioners.
3. Frequency of meetings conducted in accordance with the Committee Charter and Annual Work Program.

Audit Committee

The Audit Committee was established to strengthen the supervisory function of the Board of Commissioners over the management of the Company in accordance with GCG principles. During Fiscal Year 2025, the Audit Committee carried out its duties and responsibilities in compliance with applicable regulations and the Audit Committee Charter. The performance of the Audit Committee was also measured through attendance at Internal Meetings of the Board of Commissioners and Coordination Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Throughout 2025, the Audit Committee held 12 dedicated

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dirinci lebih lanjut di bagian pembahasan Komite Audit pada bab ini dari Laporan Tahunan ini.

Audit Committee meetings and carried out various activities in fulfilling its duties and responsibilities, as further described in the Audit Committee section of this Annual Report.

Rapat Internal Komite Audit
Internal Audit Committee Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	
1	21 Januari 2025 January 21, 2025	1. Realisasi KPI s.d Desember 2024 2. Update Progres Arahan Dekom (Konsinyering Dekom & Direksi) 3. Diskusi Persiapan RUPS RKAP Tahun 2025	1. KPI Achievement through December 2024 2. Progress Update on the Board of Commissioners' Directives (Joint Session of the Board of Commissioners and Board of Directors) 3. Discussion on Preparation for the 2025 RKAP GMS
2	28 Februari 2025 February 28, 2025	1. Realisasi KPI s.d Januari 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Januari 2025 3. Isu - Isu Strategis Perusahaan	1. KPI Achievement through January 2025 2. Financial Performance through January 2025 3. Strategic Corporate Issues
3	21 Maret 2025 March 21, 2025	1. Kinerja KPI s.d Februari 2025 2. Pembahasan Progres Audit LK Tahun 2024 3. Isu - Isu Strategis Perusahaan	1. KPI Achievement through February 2025 2. Discussion on the Progress of the 2024 Financial Statement Audit 3. Strategic Corporate Issues
4	28 April 2025 April 28, 2025	1. Paparan simulasi dari LK Audit PLN BBN Tahun 2024 2. Tindaklanjut atas 3 isu audit di Tahun 2024	1. Presentation of the Simulation of PLN BBN's 2024 Audited Financial Statements 2. Follow-up on Three Audit Issues Identified in 2024
5	28 Mei 2025 May 28, 2025	1. Kinerja s.d April 2025. 2. Persiapan RUPS LPT 2024	1. Company Performance through April 2025 2. Preparation for the 2024 Annual Report GMS
6	28 Juni 2025 June 28, 2025	1. Persiapan RUPS LPT 2024 2. Kinerja KPI s.d Mei 2025 3. Kinerja Keuangan s.d Mei 2025	1. Preparation for the 2024 Annual Report GMS 2. KPI Achievement through May 2025 3. Financial Performance through May 2025
7	25 Juli 2025 July 25, 2025	1. Kinerja KPI s.d Juni 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Juni 2025	1. KPI Achievement through June 2025 2. Financial Performance through June 2025
8	30 Agustus 2025 August 30, 2025	1. Kinerja KPI s.d Juli 2025 2. Tinjauan Dewan Pengarah s.d Tahun 2025 3. *Check Point Beyond kWh,* Piutang IPP bermasalah, *Volume* Pasokan, perbaikan likuiditas	1. KPI Achievement through July 2025 2. Advisory Board Review through 2025 3. Checkpoint on Beyond kWh Business, Problematic IPP Receivables, Supply Volume, and Liquidity Improvement
9	20 September 2025 September 20, 2025	1. Kinerja KPI s.d Agustus 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Agustus 2025 3. Persiapan Audit Interim LK 2025 4. *Check Point Beyond kWh,* Piutang IPP bermasalah, Perbaikan likuiditas	1. KPI Achievement through August 2025 2. Financial Performance through August 2025 3. Preparation for the 2025 Interim Financial Statement Audit 4. Checkpoint on Beyond kWh Business, Problematic IPP Receivables, and Liquidity Improvement
10	18 Oktober 2025 October 18, 2025	1. Kinerja KPI s.d September 2025 2. Paparan Implementasi ISO 9001:2015 3. *Action Plan* Tahun 2026 & Evaluasi Margin 4. *Check Point Beyond kWh,* Piutang IPP bermasalah, perbaikan likuiditas 5. Tindaklanjut Audit Internal	1. KPI Achievement through September 2025 2. Presentation on ISO 9001:2015 Implementation 3. 2026 Action Plan and Margin Evaluation 4. Checkpoint on Beyond kWh Business, Problematic IPP Receivables, and Liquidity Improvement 5. Follow-up on Internal Audit Findings
11	18 November 2025 November 18, 2025	1. Kinerja KPI s.d Oktober 2025 & Prognosa Desember 2025 2. Kinerja Operasi s.d Oktober 2025 & Prognosa Desember 2025 3. Kinerja Keuangan s.d Oktober 2025 & Prognosa Desember 2025 4. *Check Point Beyond kWh,* Piutang IPP bermasalah, perbaikan likuiditas 5. Paparan Strategi Risiko PLN BBN 6. Tindaklanjut Arahan Rawas Periode Sebelumnya	1. KPI Achievement through October 2025 and December 2025 Forecast 2. Operational Performance through October 2025 and December 2025 Forecast 3. Financial Performance through October 2025 and December 2025 Forecast 4. Checkpoint on Beyond kWh Business, Problematic IPP Receivables, and Liquidity Improvement 5. Presentation on PLN BBN's Risk Strategy 6. Follow-up on Previous Supervisory Directives
12	08 Desember 2025 December 8, 2025	Kinerja KPI s.d November 2025	KPI Achievement as of November 2025

Direksi
Board of Directors



Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para Pemangku Kepentingan.

The Board of Directors is the Company organ responsible for managing the Company in the interests of and in line with the objectives of the Company, as well as representing the Company both inside and outside the court of law. The Board of Directors carries out its roles and responsibilities independently to create sustainable value for the long term interests of the corporation and Shareholders, while taking into account the interests of Stakeholders.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Para Pemegang Saham melalui RUPS. Hal ini mencerminkan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi Perusahaan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

The Board of Directors is accountable to the Shareholders through the GMS for the performance of its duties. This reflects accountability and transparency in the management of the Company in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles. The performance of the Company's Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners and reported to the GMS.

Mekanisme Pengangkatan & Pemberhentian Direksi
Mechanism for the Appointment and Dismissal of the Board of Directors

Dalam pengangkatan Anggota Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan materiil, formal dan persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Direksi PLN BBN telah mempertimbangkan kriteria dan persyaratan serta kelulusan dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh fungsi *Talent Pool* yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi telah dilakukan melalui RUPS.

In appointing members of the Board of Directors, candidates must meet the substantive, formal, and other requirements stipulated in the Articles of Association and the provisions of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning State-Owned Enterprise Organs and Human Resources. The appointment of PLN BBN's Board of Directors has taken into account the applicable criteria and requirements, including successful completion of the Fit and Proper Test conducted through the Talent Pool function organized by the Shareholders. The appointment and dismissal of members of the Board of Directors are carried out through the GMS.

Jumlah dan Komposisi Direksi
Number and Composition of the Board of Directors

Selama tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Direksi PLN BBN. Terdapat pemberhentian dan pengangkatan Direksi PLN BBN pada tanggal 01 Januari 2025 yaitu pengangkatan Sdr. Rahmat Dian Amir sebagai Plt. Direktur Niaga & Operasi. Sehingga komposisi Direksi PLN BBN sampai Laporan ini diterbitkan berjumlah 3 (tiga). Jumlah dan komposisi tersebut juga telah disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan serta diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif dan independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah dan komposisi Direksi PLN BBN selama tahun 2025, sebagai berikut:

During 2025, there were changes in the composition of PLN BBN's Board of Directors. The changes included the dismissal and appointment of a Director on January 1, 2025, namely the appointment of Mr. Rahmat Dian Amir as Act. Director of Commerce & Operations. As a result, the composition of PLN BBN's Board of Directors consisted of 3 (three) members as of the issuance of this Report. The number and composition have been aligned with the Company's needs and are expected to enable the Board of Directors to carry out its management functions effectively, objectively, and independently in performing its duties and responsibilities. The composition of PLN BBN's Board of Directors during 2025 was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Apppointment	
Rolly	Plt. Direktur Utama Act. President Director	Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PLN BBN tanggal 01 Oktober 2024	PLN BBN Circular Shareholders' Resolution on October 1, 2024
Joni Arifin	Plt. Direktur Keuangan & Human Capital Act. Director of Finance & Human Capital	Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PLN BBN tanggal 01 Oktober 2024	PLN BBN Circular Shareholders' Resolution on October 1, 2024
Rahmat Dian Amir	Plt. Direktur Niaga & Operasi Act. Director of Commerce & Operations	Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PLN BBN tanggal 01 Januari 2025	PLN BBN Circular Shareholders' Resolution on January 1, 2025

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan
Statement of Independence and Potential Conflicts of Interest

Perusahaan mendorong Direksi untuk menjaga independensi dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam melaksanakan fungsinya semata-mata demi kepentingan terbaik Perusahaan. Anggota Direksi Perusahaan membuat Pakta Integritas dan menyampaikan kepada Perusahaan terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga di PLN BBN dan Perusahaan lainnya.

The Company encourages the Board of Directors to maintain independence and avoid any form of conflict of interest in carrying out its functions solely for the best interests of the Company. Members of the Board of Directors signed an Integrity Pact and disclosed to the Company information regarding personal and family share ownership in PLN BBN and other companies.

Penandatanganan Pakta Integritas Direksi
Signing of the Board of Directors' Integrity Pact

Nama Name	Jabatan Position		Dasar Pengangkatan Date of Signing
Rolly	Plt. Direktur Utama	Act. President Director	13 Januari 2025 January 13, 2025
Joni Arifin	Plt. Direktur Keuangan & Human Capital	Act. Director of Finance & Human Capital	13 Januari 2025 January 13, 2025
Rahmat Dian Amir	Plt. Direktur Niaga & Operasi	Act. Director of Commerce & Operations	20 Januari 2025 January 13, 2025





Rangkap Jabatan Anggota Direksi
Concurrent Positions of Members of the Board of Directors

Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual* memuat ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan, dimana Direksi dilarang memangku rangkap jabatan (jabatan rangkap) sebagaimana tersebut di bawah ini, antara lain:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/atau calon/anggota legislatif ; dan/atau
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

The Company's Articles of Association and Board Manual contain provisions regarding the prohibition of concurrent positions. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as follows:

1. Member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise, Regional-Owned Enterprise, or Private Enterprise;
2. Member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of a State-Owned Enterprise;
3. Other structural or functional positions within central and/or regional government institutions/agencies;
4. Other positions prohibited under prevailing laws and regulations, including positions as management and/or candidates/members of legislative bodies; and/or
5. Other positions that may create conflicts of interest.

Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Affiliation Relationships and Share Ownership of Members of the Board of Directors

Hubungan afiliasi yang dimaksud mencakup hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi serta anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perusahaan. Hubungan afiliasi anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Affiliation relationships include family and financial relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, among fellow Directors, and between Directors and the Company's controlling and/or major Shareholders. The affiliation relationships of members of the Board of Directors serving during 2025 were as follows:

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi
Affiliation Relationships of Members of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with			Hubungan Keluarga Dengan Financial Relationship with		
		Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pemegang Saham Shareholder	Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pemegang Saham Shareholde
Rolly	Plt. Direktur Utama Act. President Director	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Joni Arifin	Plt. Direktur Keuangan & Human Capital Act. Director of Finance & Human Capital	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Rahmat Dian Amir	Plt. Direktur Niaga & Operasi Act. Director of Commerce & Operations	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None

Selain itu, seluruh anggota Direksi Perusahaan yang menjabat sepanjang tahun 2025 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In addition, all members of the Board of Directors serving during 2025 had no prohibited affiliation relationships with other companies as stipulated under the Company's internal regulations and prevailing laws and regulations.

Anggota Direksi secara berkala melaporkan kepemilikan sahamnya baik atas nama pribadi maupun keluarga pada Perusahaan dan/atau perusahaan lainnya untuk dicatat dalam Daftar Khusus. Kepemilikan saham Anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Directors periodically report their personal and family share ownership in the Company and/or other companies for recording in the Special Register. Share ownership of members of the Board of Directors serving during 2025 was as follows:

Kepemilikan Saham Anggota Direksi Beserta Keluarga
Share Ownership of Board of Directors and Their fFamilies

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Oleh Pribadi Pada Personal Share Ownership		Kepemilikan Saham Oleh Keluarga Pada Family Share Ownership	
		Perusahaan In the Company	Perusahaan Lain In other companies	Perusahaan In the Company	Perusahaan Lain In other companies
Rolly	Plt. Direktur Utama Act. President Director	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Joni Arifin	Plt. Direktur Keuangan & Human Capital Act. Director of Finance & Human Capital	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Rahmat Dian Amir	Plt. Direktur Niaga & Operasi Act. Director of Commerce & Operations	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None

Pedoman Kerja Direksi
Board of Directors Work Guidelines

Pedoman kerja Direksi diatur dalam *Board Manual* yang ditetapkan melalui Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Batubara Niaga yang telah disahkan pada Bulan Desember 2020. Muatan yang diatur dalam *Board Manual* tersebut antara lain:

The Board of Directors' work guidelines are stipulated in the Board Manual established through the Joint Agreement of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PLN Batubara Niaga, which was approved in December 2020. The Board Manual covers, among others:

a. Pendahuluan
b. Etika Jabatan
c. Direksi
   - Fungsi Direksi
   - Persyaratan Direksi
   - Keanggotaan Direksi
   - Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
   - Tugas dan Kewajiban Direksi
   - Wewenang Direksi
   - Hak Direksi
   - Evaluasi Kinerja Direksi
d. Dewan Komisaris
f. Kegiatan Antar Organ Perusahaan

a. Introduction
b. Code of Conduct
c. Board of Directors
   - Functions of the Board of Directors
   - Requirements for the Board of Directors
   - Membership of the Board of Directors
   - Induction and Capability Enhancement Programs
   - Duties and Responsibilities of the Board of Directors
   - Authority of the Board of Directors
   - Rights of the Board of Directors
   - Performance Evaluation of the Board of Directors
d. Board of Commissioners
e. Activities Among Company Organs

Tugas dan Kewajiban Direksi
Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.

Sebagaimana juga diatur dalam *Board Manual* Perusahaan, Tugas dan Kewajiban Direksi adalah sebagai berikut :

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
4. Membuat daftar pemegang saham, Daftar khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan bedasarkan standar akutansi keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporang Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan.
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

The Board of Directors is responsible for undertaking all actions related to the management of the Company in accordance with its objectives and business activities and for representing the Company both inside and outside the court of law in all matters and events, subject to the limitations stipulated by laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the GMS.

As stipulated in the Company's Board Manual, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. To endeavor and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its objectives and business activities.
2. To prepare, in a timely manner, the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget, including any amendments thereto, and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for approval by the GMS.
3. To provide explanations to the GMS regarding the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget.
4. To prepare the Shareholders Register, Special Register, Minutes of GMS Meetings, and Minutes of Board of Directors Meetings.
5. To prepare the Annual Report as a form of accountability for the management of the Company and the Company's financial documents as required under the law governing corporate documents.
6. To prepare Financial Statements in accordance with financial accounting standards and submit them to a Public Accountant for audit.
7. To submit the Annual Report, including the Financial Statements, to the GMS for approval and ratification.
8. To submit the Balance Sheet and Profit and Loss Statement approved by the GMS to the Minister of

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan dan dokumen Perusahaan lainnya.
10. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar pemegang saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
11. Menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan.
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan bedasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
13. Memberikan Laporan secara berkala menurut cara dan waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta Oleh Dewan Komisaris dan / atau Pemegang Saham.
14. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan perundang-undangan.

Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with prevailing laws and regulations.

9. To maintain and keep at the Company's domicile the Shareholders Register, Special Register, Minutes of GMS Meetings, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports, financial documents, and other Company documents.
10. To keep at the Company's domicile the Shareholders Register, Special Register, Minutes of GMS Meetings, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports, financial documents, and other Company documents.
11. To consistently and sustainably implement GCG based on prevailing regulations while observing applicable provisions, norms, and the Company's Articles of Association.
12. To establish an accounting system in accordance with financial accounting standards and internal control principles, particularly concerning management, recording, safekeeping, and supervision functions.
13. To provide periodic reports in accordance with prevailing provisions and at other times upon request by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
14. To prepare the Company's organizational structure, including detailed duties and responsibilities.
15. To provide explanations regarding all matters requested by the Board of Commissioners and Shareholders.
16. To perform other obligations stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS in accordance with prevailing laws and regulations.

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Distribution of Duties of the Board of Directors

Pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang tetang Perseroan Terbatas. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka hal tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi Perusahaan telah menetapkan pembagian tugas melalui Peraturan Direksi Nomor: 012.P/DIRPLNBBN/2023 Organisasi dan Tata Kerja di PT PLN Batubara Niaga tentang Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut:

The division of duties of the Board of Directors is determined based on the decision of the GMS as stated in the Law on Limited Liability Companies. If the GMS does not determine the division of duties and authorities of members of the Board of Directors, then it is determined based on the decision of the Board of Directors. The Company's Board of Directors has determined the division of duties through the Board of Directors Regulation Number: 012.P/DIRPLNBBN/2023 Organization and Work Procedures at PT PLN Batubara Niaga concerning the Division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is determined as follows:

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Distribution of Duties of the Board of Directors

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
Direktur Utama President Director	1. Memastikan arah pengelolaan Perusahaan berjalan dengan benar menuju terwujudnya visi, misi dan tujuan Perusahaan; 2. Memastikan Perusahaan dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance);* 3. Memastikan nilai Perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan; 4. Menetapkan dan memastikan program kerja dan anggaran Perusahaan mendukung Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP); 5. Menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan yang meliputi tapi tidak terbatas pada perencanaan korporat (jangka panjang, menengah, dan pendek); 6. Mensinergikan perencanaan pengembangan strategis korporat untuk jangka panjang dan menengah yang komprehensif, *roadmap* strategi Perusahaan, serta melakukan penyelarasan kebijakan strategi korporat dengan Program Kerja Tahunan Perusahaan; 7. Menyelaraskan dan menetapkan kebijakan, pengembangan dan implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi; 8. Menetapkan dan memastikan perencanaan, serta konsolidasi permintaan pengadaan bahan bakar dari sektor Ketenagalistrikan dan Non Ketenagalistrikan; 9. Memastikan kinerja Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3KL) seluruh kegiatan operasional Perusahaan; 10. Melaksanakan fungsi *corporate leader* untuk memastikan *engagement* seluruh anggota Perusahaan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan seluruh sumber daya Perusahaan melangkah mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan; 11. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di seluruh Direktorat berbasiskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance),* manajemen risiko, dan kepatuhan.	1. Ensure that the Company's management direction is properly aligned with the realization of the Company's vision, mission, and objectives; 2. Ensure that the Company is managed in accordance with sound business practices and Good Corporate Governance (GCG) principles; 3. Ensure that the Company's value continues to grow and provides added value to stakeholders; 4. Establish and ensure that the Company's work programs and budget support the Company's Long-Term Plan (RJPP); 5. Formulate plans, implement, evaluate, and oversee activities including, but not limited to, corporate planning for the long, medium, and short term; 6. Integrate comprehensive long-term and medium-term corporate strategic development planning, the Company's strategic roadmap, and align corporate strategic policies with the Company's Annual Work Program; 7. Align and establish policies, development, and implementation of the Integrated Management System; 8. Establish and ensure planning and consolidation of fuel procurement requirements from both electricity and non-electricity sectors; 9. Ensure Occupational Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE) performance across all Company operations; 10. Perform the role of corporate leader to ensure engagement among all Company personnel and serve as an inspirer and motivator who directs all Company resources toward achieving the Company's vision, mission, and objectives; 11. Ensure that the planning, implementation, and evaluation of all business processes across all Directorates are based on Good Corporate Governance principles, risk management, and compliance.
Direktur Niaga dan Operasi Director of Commerce and Operations	1. Menetapkan dan memastikan manajemen strategi dan kebijakan dalam aspek teknis agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat kualitas, tepatjumlah, tepat waktu, ekonomis, serta sesuai dengan regulasi; 2. Menetapkan dan memastikan proyek pengembangan terkait penyediaan energi primer; 3. Memastikan perencanaan kebutuhan pasokan batubara jangka panjang sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP); 4. Menetapkan dan mengawasi pengadaan dalam *supply chain* energi primer, termasuk menetapkan rencana strategis jangka pendek, kebijakan, prosedur, standar sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan;	1. Establish and ensure strategic management and policies in technical aspects to meet customer requirements in terms of quality, quantity, timeliness, cost efficiency, and regulatory compliance; 2. Establish and ensure the implementation of development projects related to primary energy supply; 3. Ensure long-term coal supply planning in line with the Company's Long-Term Plan (RJPP); 4. Establish and oversee procurement activities within the primary energy supply chain, including strategic short-term plans, policies, procedures, and standards aligned with the Company's business requirements

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Distribution of Duties of the Board of Directors

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
	5. Mengawasi pengadaan dalam *supply chain* energi primer yang sesuai dengan rencana strategis, anggaran; 6. Memastikan bahwa aktivitas pengadaan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan penting keuangan; 7. Mengevaluasi dan mengoordinasikan pasokan energi primer sesuai dengan komitmen di dalam kontrak dengan pelanggan; 8. Memastikan penerapan teknologi dan riset pasar untuk mengantisipasi potensi peluang dan disrupsi dalam *supply chain* energi primer; 9. Mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi pasokan energi primer dari mitra pemasok yang akan dan sudah berkontrak; 10. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Direktorat Niaga dan Operasi berbasiskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance),* manajemen risiko, dan kepatuhan.	5. Supervise procurement activities within the primary energy supply chain in accordance with strategic plans and budgets; 6. Ensure that procurement activities remain aligned with key financial objectives; 7. Evaluate and coordinate primary energy supply in accordance with contractual commitments to customers; 8. Ensure the adoption of technology and market research to anticipate opportunities and disruptions within the primary energy supply chain; 9. Supervise and evaluate primary energy supply from supplier partners before and after contractual engagement; 10. Ensure that the planning, implementation, and evaluation of all business processes within the Directorate of Commerce & Operations are based on Good Corporate Governance principles, risk management, and compliance.
Direktur Keuangan dan Human Capital Director of Finance & Human Capital	1. Menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan yang meliputi tapi tidak terbatas pada pengelolaan keuangan korporat, anggaran, pendanaan, perbendaharaan, pajak, pendapatan dan akuntansi agar seralas dengan pengelolaan yang berlaku di PT PLN Batubara Niaga; 2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pengelolaan *treasury*, pengelolaan kas dan likuiditas, pengelolaan pendapatan, pengelolaan piutang, pengelolaan akuntansi, serta pengelolaan pajak dan asuransi; 3. Menyelaraskan dan menetapkan kebijakan, pengembangan dan implementasi pengelolaan keuangan yang menyeluruh; 4. Memastikan pengembangan strategi, kebijakan, dan pendapatan yang selaras dengan strategi, target dan KPI penjualan; 5. Menetapkan, mengembangkan, dan mengontrol pengelolaan strategi, organisasi, dan kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia; 6. Memastikan, mengatur dan mengontrol terlaksananya manajemen dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kegiatan operasional pengelolaan SDM dan hubungan dengan pegawai; 7. Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pelayanan umum dan pengadaan *non* energi primer, serta Perencanaan penggunaan *asset property* Perusahaan; 8. Merencanakan, menetapkan, dan mengembangkan strategi dan kebijakan Perusahaan yang sesuai dengan peraturan dan standar berlaku, dalam hal pengelolaan Kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan pengelolaan lingkungan Perusahaan;	1. Formulate plans, implement, evaluate, and oversee financial management activities, including but not limited to corporate finance, budgeting, funding, treasury, taxation, revenue, and accounting, in line with the management practices of PT PLN Batubara Niaga; 2. Establish and ensure the implementation of corporate policies and strategies in budget management to support the Company's Work Plan and Budget (RKAP), treasury management, cash and liquidity management, revenue management, receivables management, accounting management, as well as tax and insurance management; 3. Align and establish policies, development, and implementation of comprehensive financial management practices; 4. Ensure the development of strategies, policies, and revenue initiatives aligned with sales strategies, targets, and KPIs; 5. Establish, develop, and control the management of Human Resource Management strategies, organizational structures, and policies; 6. Ensure, regulate, and supervise the implementation of human resource management and development, as well as HR operational activities and employee relations; 7. Plan, develop, and establish policies and strategies for general services, non-primary energy procurement, and the planning of Company property asset utilization; 8. Plan, establish, and develop Company policies and strategies in accordance with applicable regulations and standards related to occupational health, safety, security, and environmental management;

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Distribution of Duties of the Board of Directors

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
	9. Memastikan, mengatur dan mengontrol terlaksananya strategi dan kebijakan Perusahaan dalam pembinaan penerapan sistem Kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan pengelolaan lingkungan;	9. Ensure, regulate, and supervise the implementation of Company strategies and policies regarding occupational health, safety, security, and environmental management systems;
	10. Mengarahkan, mengontrol, dan mengembangkan kebijakan, strategi dan *roadmap* Perusahaan dalam hal pengelolaan system dan teknologi informasi (termasuk aplikasi tekonologi Informasi Perusahaan) agar selaras dan sesuai dengan strategi Perusahaan;	10. Direct, supervise, and develop Company policies, strategies, and roadmaps related to information systems and information technology, including the Company's IT applications, to ensure alignment with the Company's strategy;
	11. Memastikan, mengatur, dan mengontrol ketersediaan analisis kebutuhan teknologi informasi berdasarkan strategi Perusahaan dan kebutuhan pemilik proses bisnis;	11. Ensure, regulate, and supervise the availability of information technology needs analysis based on the Company's strategy and the requirements of business process owners;
	12. Memastikan dan mensinergikan prosedur, kebijakan, tata kelola, infrastruktur risiko di Perusahaan telah sesuai dengan arahan PT PLN (Persero) untuk mencapai penerapan *Integrated Enterprise Risk Management* (IERM) yang efektif;	12. Ensure and align risk procedures, policies, governance, and infrastructure within the Company with the directives of PT PLN (Persero) to achieve effective implementation of Integrated Enterprise Risk Management (IERM);
	13. Memastikan integrasi dan implementasi dari kajian terkait pengelolaan risiko, profil risiko, ke dalam pengembangan kebijakan, prosedur, tata kelola dan infrastruktur risiko di Organisasi Perusahaan dengan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) melalui kerangka *Risk Control Matrix* (RCM);	13. Ensure the integration and implementation of risk management studies and risk profiles into the development of risk policies, procedures, governance, and infrastructure within the Company through coordination with PT PLN (Persero) under the Risk Control Matrix (RCM) framework;
	14. Memastikan level risiko di perusahaan dengan penajaman penambahan, perubahan dan penajaman *risk mitigation plan* untuk menjaga level risiko di Perusahaan;	14. Ensure risk levels within the Company remain under control through the refinement, enhancement, and adjustment of risk mitigation plans;
	15. Memastikan pembinaan kepada Bidang lain dalam penyusunan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan membangun budaya sadar risiko;	15. Provide guidance to other functions in preparing Work Plans and Follow-Up Actions to improve risk management maturity and foster a risk-aware culture;
	16. Melakukan pendampingan proses asesmen oleh *independent assessor* manajemen risiko;	16. Facilitate risk management assessment processes conducted by independent assessors;
	17. Merumuskan indikator Kinerja Korporat dan melakukan cascading Kinerja Korporat ke daiam Kinerja Direktorat dan Kinerja Divisi/Bidang/Satuan dan Unit Setara BoD minus 1 serta Kinerja Anak Perusahaan yang selaras dengan RJPP;	17. Formulate Corporate Performance Indicators and cascade Corporate Performance targets to Directorate, Division/Department/Unit levels equivalent to one level below the Board of Directors, as well as Subsidiary performance indicators, in line with the RJPP;
	18. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Perusahaan, kinerja Direktorat, kinerja Divisi/Bidang/Satuan dan Unit Setara BOD minus 1 dan kinerja Anak Perusahaan, serta melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan *action plan* yang diperlukan dengan Direktorat/Divisi/Bidang/Satuan dan Unit Teknis terkait;	18. Monitor and evaluate the achievement of Company performance, Directorate performance, Division/Department/Unit performance equivalent to one level below the Board of Directors, and Subsidiary performance, while coordinating and communicating the necessary action plans with relevant Directorates, Divisions, Departments, Units, and technical functions;
	19. Memastikan pelaporan pencapaian kinerja ke *Stakeholder* terkait;	19. Ensure the reporting of performance achievement to relevant stakeholders;
	20. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas seluruh proses bisnis Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi berbasiskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance),* manajemen risiko dan kepatuhan	20. Ensure that the planning, implementation, and evaluation of all business processes within the Human Capital Management and Administration Directorate are based on Good Corporate Governance principles, risk management, and compliance.

Laporan Pelaksanaan Tugas Kegiatan Direksi
Report on the Implementation of the Duties of the Board of Directors

Kegiatan pelaksanaan tugas Direksi Perusahaan selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

The Board of Directors carried out the following activities during 2025:

Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Direksi. Kebijakan rapat Direksi mengacu pada *Board Manual* dan Pedoman Manajemen Rapat. Rapat Direksi diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.

Frekuensi Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 kali rapat dan rapat bersama Dewan Komisaris (rapat gabungan) sebanyak 12 kali rapat. Berikut adalah tingkat kehadiran Direksi dalam rapat internal maupun rapat gabungan Bersama Dewan Komisaris.

Board of Directors Meetings

Board of Directors Meetings are meetings organized and attended by members of the Board of Directors. The meeting policy refers to the Board Manual and Meeting Management Guidelines. Board of Directors Meetings are held regularly, at least once every month.

Frequency of Board of Directors Meetings

Throughout 2025, the Board of Directors conducted 12 internal meetings and 12 joint meetings with the Board of Commissioners. The attendance level of members of the Board of Directors at internal and joint meetings is presented below.

Rapat Internal Direksi Tahun 2025
Board of Directors Internal Meetings in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda	
1	14 Januari 2025 January 14, 2025	1. Progres Kontrak Tahun 2025 2. Kinerja Operasi & Keuangan Tahun 2024 3. Progres Tindaklanjut Audit SPI 4. Tinjauan Manajemen Puncak atas Kepatuhan Semester II 2024	1. Progress of 2025 Contracts 2. 2024 Operational & Financial Performance 3. Follow-up Progress on Internal Audit Findings 4. Top Management Review of Compliance for Second Semester 2024
2	12 Februari 2025 February 12, 2025	1. Kinerja KPI s.d Januari 2025 2. Tindaklanjut arahan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan temuan audit 3. Usulan perubahan organisasi	1. KPI Performance through January 2025 2. Follow-up on directives from Shareholders, Board of Commissioners, and audit findings 3. Proposed organizational changes
3	18 Maret 2025 March 18, 2025	1. Kinerja KPI s.d Februari 2025 2. Pembahasan Denda PT Jhonlin Group 3. Tindak lanjut arahan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan temuan audit	1. KPI Performance through February 2025 2. Discussion of PT Jhonlin Group Penalty 3. Follow-up on directives from Shareholders, Board of Commissioners, and audit findings
4	28 April 2025 April 28, 2025	1. Kinerja KPI s.d Maret 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Maret 2025 3. Kinerja Operasi s.d Maret 2025	1. KPI Performance through March 2025 2. Financial Performance through March 2025 3. Operational Performance through March 2025
5	26 Mei 2025 May 26, 2025	1. Kinerja KPI s.d April 2025 2. Kinerja Keuangan s.d April 2025 3. Kinerja Operasi s.d April 2025	1. KPI Performance through April 2025 2. Financial Performance through April 2025 3. Operational Performance through April 2025
6	28 Juni 2025 June 28, 2025	1. Kinerja KPI s.d Mei 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Mei 2025 3. Kinerja Operasi s.d Mei 2025	1. KPI Performance through May 2025 2. Financial Performance through May 2025 3. Operational Performance through May 2025
7	22 Juli 2025 July 22, 2025	1. Kinerja KPI s.d Juni 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Juni 2025 3. Kinerja Operasi s.d Juni 2025	1. KPI Performance through June 2025 2. Financial Performance through June 2025 3. Operational Performance through June 2025
8	19 Agustus 2025 August 19, 2025	1. Kinerja KPI s.d Juli 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Juli 2025 3. Kinerja Operasi s.d Juli 2025 4. Tinjauan Manajemen Puncak terkait SMAP & SMK PLN BBN	1. KPI Performance through July 2025 2. Financial Performance through July 2025 3. Operational Performance through July 2025 4. Top Management Review of the Anti-Bribery Management System (ABMS) and Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) of PLN BBN

Rapat Internal Direksi Tahun 2025
Board of Directors Internal Meetings in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda	
9	29 September 2025 September 29, 2025	1. Kinerja KPI s.d Agustus 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Agustus 2025 3. Kinerja Operasi s.d Agustus 2025 4. Pembahasan URKAP Tahun 2026	1. KPI Performance through August 2025 2. Financial Performance through August 2025 3. Operational Performance through August 2025 4. Discussion of the 2026 Draft Work Plan and Budget
10	13 Oktober 2025 October 13, 2025	1. Kinerja KPI s.d September 2025 2. Kinerja Keuangan s.d September 2025 3. Kinerja Operasi s.d September 2025 4. Pembahasan URKAP Tahun 2026	1. KPI Performance through September 2025 2. Financial Performance through September 2025 3. Operational Performance through September 2025 4. Discussion of the 2026 Draft Work Plan and Budget
11	26 November 2025 November 26, 2025	1. Kinerja KPI s.d Oktober 2025 2. Kinerja Keuangan s.d Oktober 2025 3. Kinerja Operasi s.d Oktober 2025 4. Tinjauan Manajemen terkait Implementasi SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	1. KPI Performance through October 2025 2. Financial Performance through October 2025 3. Operational Performance through October 2025 4. Management Review of the Implementation of ISO 9001:2015 Quality Management System
12	08 Desember 2025 December 8, 2025	1. Kinerja KPI s.d November 2025 2. Kinerja Keuangan s.d November 2025 3. Kinerja Operasi s.d November 2025	1. KPI Performance through November 2025 2. Financial Performance through November 2025 3. Operational Performance through November 2025

Tabel Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal dan Gabungan Tahun 2025
Attendance of the Board of Directors at Internal and Joint Meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi BOD Internal Meetings			Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi* Joint Meetings with BOC		
		Jumlah dan (%) Kehadiran Attendance Rate			Jumlah dan (%) Kehadiran Attendance Rate		
		Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Rolly	Plt Direktur Utama Act. President Director	12	12	100%	12	12	100%
Joni Arifin	Plt Direktur Keuangan & Human Capital Act. Director of Finance & Human Capital	12	12	100%	12	12	100%
Rahmat Dian Amir	Plt Direktur Niaga & Operasi Act. Director of Commerce & Operations	12	11	91%	12	12	100%

Keputusan Direksi Tahun 2025

Selama tahun 2025, Direksi PLN BBN telah mengeluarkan 8 keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi No. 008.K/DIRPLNBBN/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Evaluasi RJPP Tahun buku 2024 - 2028;
2. Keputusan Direksi No. 087.K/DIRPLNBBN/2025 tentang Penetapan RJPP Tahun Buku 2024 - 2028;
3. Keputusan Direksi No. 046.K/DIRPLNBBN/2025 tentang Pembentukan P2K3 di Lingkungan PT PLN Batubara Niaga;

Board of Directors Resolutions in 2025

During 2025, PLN BBN's Board of Directors issued 8 resolutions, including the following:

1. Board of Directors Resolution No. 008.K/DIRPLNBBN/2025 concerning the Establishment of the Team for the Preparation and Evaluation of the 2024–2028 Long-Term Corporate Plan (RJPP);
2. Board of Directors Resolution No. 087.K/DIRPLNBBN/2025 concerning the Approval of the 2024–2028 Long-Term Corporate Plan (RJPP);
3. Board of Directors Resolution No. 046.K/DIRPLNBBN/2025 concerning the Establishment of the Occupational Safety and Health Development Committee (P2K3) within PT PLN Batubara Niaga;



4. Keputusan Direksi No. 045.K/DIRPLNBBN/2025 tentang Pembentukan Tim Tanggap Darurat PLN BBN;
5. Keputusan Direksi No. 059.K/DIRPLNBBN/2025 tentang Usulan Peningkatan Batas Kewenangan di Lingkungan PLN BBN;
6. Keputusan Direksi No. 0186.K/DIRPLNBBN/2025 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Penyediaan Energi Primer Batubara tahun 2026;
7. Keputusan Dieksi No. 221.K/DIRPLNBBN/2025 tentang KEPDIR *Maturity Level* Pengelolaan GCG PLN BBN;
8. Keputusan Direksi No. 212.K/DIRPLNBBN/2025 tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di lingkungan PT PLN Batubara Niaga.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Kebijakan pelatihan Direksi diatur dalam *Board Manual*. Selama tahun 2025, Direksi PLN BBN telah mengikuti berbagai pengembangan kompetensi sebagai berikut:

4. Board of Directors Resolution No. 045.K/DIRPLNBBN/2025 concerning the Establishment of the Emergency Response Team of PLN BBN;
5. Board of Directors Resolution No. 059.K/DIRPLNBBN/2025 concerning the Proposal for Increasing Authority Limits within PLN BBN;
6. Board of Directors Resolution No. 0186.K/DIRPLNBBN/2025 concerning the Establishment of the Coal Primary Energy Supply Security Team for 2026;
7. Board of Directors Resolution No. 221.K/DIRPLNBBN/2025 concerning the GCG Management Maturity Level Determination at PLN BBN;
8. Board of Directors Resolution No. 212.K/DIRPLNBBN/2025 concerning the Establishment of the ISO 9001:2015 Quality Management System Implementation Team within PT PLN Batubara Niaga.

Board of Directors Training and Competency Development Program

The Board of Directors training policy is governed by the Board Manual. During 2025, PLN BBN's Board of Directors participated in the following competency development programs:

Nama Name	Nama *Workshop*/Seminar Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Rolly	*Qualified Risk Governance Professional*	LSP MKS	15 s.d 17 April 2025 April 15–17, 2025	Jakarta
Joni Arifin	*Qualified Risk Governance Professional*	LSP MKS	15 s.d 17 April 2025 April 15–17, 2025	Jakarta
Rahmat Dian Amir	*Qualified Risk Governance Professional*	LSP MKS	15 s.d 17 April 2025 April 15–17, 2025	Jakarta

Program Pengenalan Direksi Baru

Direksi memastikan bahwa anggota Direksi yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran tanggung jawab mereka. Penanggung jawab Program Pengenalan berada pada Fungsi Tatakelola & Kesekretariatan dan Human Capital, Administrasi, dan Umum. Sejalan dengan *Board Manual* materi program pengenalan setidaknya memuat:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh Perusahaan.
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, tingkat risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan hubungan kerja dengan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang anggota Direksi.

Pada tahun 2025 terdapat pengangkatan Direksi baru yaitu Sdr. Rahmat Dian Amir yang diangkat menjadi Plt. Direktur Niaga & Operasi pada tanggal 01 Januari 2025. Perusahaan telah melaksanakan program pengenalan bagi Direksi yang baru pada tanggal 02 Januari 2025.

Penilaian Atas Kinerja Masing-Masing Komite yang Berada di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Sampai dengan tahun 2025, Direksi belum membentuk Komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi mengenai Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Direksi berikut dasar penilaiannya.

Induction Program for Newly Appointed Directors

The Board of Directors ensures that newly appointed Directors receive a formal and adequate induction program, along with all information relevant to their roles and responsibilities. The Governance & Corporate Secretariat Function and the Human Capital, Administration, and General Function are responsible for the implementation of the induction program. In accordance with the Board Manual, the induction program materials include at least the following:

1. The implementation of Good Corporate Governance principles by the Company;
2. An overview of the Company, including its objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risk profile, and other strategic issues;
3. Information regarding delegated authority, internal and external audit functions, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors, working relationships with the Board of Commissioners, and matters prohibited for members of the Board of Directors.

In 2025, a new Director was appointed, namely Mr. Rahmat Dian Amir, who was appointed as Act. Director of Commerce & Operations on January 1, 2025. The Company conducted an induction program for the newly appointed Director on January 2, 2025.

Assessment of the Performance of Committees Under the Board of Directors and the Basis for the Assessment

As of 2025, the Board of Directors had not established any committees under the Board of Directors. Therefore, there is no information regarding the performance assessment of committees under the Board of Directors or the basis for such assessments.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination of the Board of Directors and Board of Commissioners

Nominasi adalah suatu proses pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Kebijakan suksesi atau nominasi Direksi dan Dewan Komisaris PLN BBN mengacu pada ketentuan Pemegang Saham Perusahaan dan Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Mekanisme suksesi Direksi dan Dewan Komisaris PLN BBN dilakukan oleh Pemegang Saham Mayoritas atau Pengendali yaitu PT Energi Primer Indonesia. Dalam pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mempertimbangkan kriteria dan persyaratan serta kelulusan dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* serta harus memenuhi persyaratan umum, diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

Berikut proses Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris PLN BBN:

1. Inisiasi kebutuhan perusahaan dalam mengidentifikasi untuk pengisian jabatan;
2. Melakukan pengumuman dan pemetaan kandidat baik dari eksternal maupun internal;
3. Melakukan verifikasi administrasi dan persyaratan dalam memastikan kandidat telah memenuhi kriteria;
4. Melakukan penilaian kompetensi dan uji kelayakan.
5. Menyusun rekomendasi dan daftar nominasi;
6. Meminta persetujuan kepada dewan komisaris atau RUPS;
7. Penandatanganan Surat Keputusan melalui RUPS Sirkuler.

Nomination is the process of proposing an individual for appointment as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners. The succession and nomination policy for PLN BBN's Board of Directors and Board of Commissioners refers to the Company's Shareholders' policies and Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning State-Owned Enterprise Organs and Human Resources.

The succession process for PLN BBN's Board of Directors and Board of Commissioners is carried out by the majority or controlling shareholder, namely PT Energi Primer Indonesia. In appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners, due consideration is given to applicable criteria and requirements, including successful completion of the Fit and Proper Test. Candidates must also satisfy general requirements, including expertise, integrity, leadership capability, honesty, good conduct, and a strong commitment to advancing and developing the Company in accordance with applicable regulations.

The nomination process for PLN BBN's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

1. Identifying the Company's needs for filling vacant positions;
2. Announcing and mapping potential candidates from both internal and external sources;
3. Conducting administrative verification and qualification assessments to ensure candidates meet the required criteria;
4. Conducting competency assessments and fit and proper evaluations;
5. Preparing recommendations and nomination lists;
6. Obtaining approval from Board of Commissioners or the GMS;
7. Signing the appointment resolution through a Circular GMS Resolution.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2025

Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2025

Kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada:

1. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (1);

The remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners refers to::

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 96 paragraph (1);

2. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 23 Maret 2023;
3. Kebijakan Pemegang Saham; dan
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditentukan sepenuhnya oleh Pemegang Saham dengan mengacu:

1. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Surat Pemegang Saham PT PLN Energi Primer Indonesia Nomor 11938/MNJ.01.02/PLNEPI0100/2024-SR Tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 PT PLN Batubara Niaga.

Indikator untuk Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sejalan dengan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) PLN BBN Tentang Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan yang mencakup aspek-aspek berikut ini:

1. Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI), baik KPI Kolegial maupun KPI Individual;
2. Tingkat kesehatan Perusahaan;
3. Kemampuan keuangan Perusahaan; dan
4. Faktor-faktor lain yang dianggap relevan.

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemberian Remunerasi kepada setiap Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2025 telah dilaksanakan berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024. Berikut struktur dan komponen remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/2023 concerning SOE Organs and Human Resources, issued on March 23, 2023;
3. Shareholders' policies; and
4. The Company's Articles of Association.

Procedures and Mechanism for Proposing and Determining Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration determination process for the Board of Directors and Board of Commissioners is fully determined by the Shareholders with reference to:

1. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 concerning State-Owned Enterprise Organs and Human Resources; and
2. Letter of PT PLN Energi Primer Indonesia as Shareholder No. 11938/MNJ.01.02/PLNEPI0100/2024-SR on October 10, 2024 concerning the Determination of Tantiem for Fiscal Year 2023 and Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PLN Batubara Niaga for Fiscal Year 2024.

Indicators for Determining Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

In accordance with the PLN BBN Circular Shareholders' Resolution concerning the Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, the remuneration structure considers the results of studies conducted by the Company covering the following aspects:

1. Achievement of Key Performance Indicators (KPIs), both collective and individual KPIs;
2. The Company's level of financial and operational soundness;
3. The Company's financial capability; and
4. Other relevant factors deemed appropriate.

Structure and Components of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration provided to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2025 was determined based on resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024. The remuneration structure and components received by the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

Keterangan Description	Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Structure		Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration Structure	
Struktur Remunerasi Jangka Pendek Short-Term Remuneration Structure	1. Gaji 2. Tunjangan Transportasi 3. Tunjangan Hari Raya	1. Salary/Honorarium 2. Transportation Allowance 3. Religious Holiday Allowance	1. Gaji 2. Tunjangan Perumahan 3. Fasilitas Operasional Kendaraan 4. Bantuan Komunikasi 5. Tunjangan Hari Raya	1. Salary 2. Housing Allowance 3. Vehicle Operational Facility 4. Telecommunication Allowance 5. Religious Holiday Allowance
Struktur Remunerasi Jangka Panjang Long-Term Remuneration Structure	Hingga akhir tahun 2025, PLN BBN belum menerapkan Remunerasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka Panjang untuk Dewan Komisaris	As of the end of 2025, PLN BBN had not implemented remuneration linked to the Company's long-term performance for the Board of Commissioners.	Hingga akhir tahun 2025, PLN BBN belum menerapkan Remunerasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka Panjang untuk Direksi	As of the end of 2025, PLN BBN had not implemented remuneration linked to the Company's long-term performance for the Board of Directors.

Jenis Remunerasi Type of Remuneration		Jumlah Anggota Number of Members	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Total Amount Received in One Year
Dewan Komisaris	Board of Commissioners	2	1.185.030.000
Direksi	Board of Directors	3	4.041.000.000
Total Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 2025	Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025	5	5.226.030.000

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Remuneration Components of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Remuneration Components of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

No.	Jenis Remunerasi Remuneration Component		Jumlah Diterima dalam 1 Tahun 2025 Total Received in 2025	
			Dewan Komisaris Board of Commussioners	Direksi Board of Directors
1	Honorarium/Gaji	Honorarium/Salary	923.400.000	2.916.000.000
2	Tunjangan	Allowances		
	• Tunjangan Hari Raya	• Religious Holiday Allowance	76.950.000	243.000.000
	• Tunjangan Perumahan	• Housing Allowance	-	648.000.000
	• Tunjangan Telekomunikasi	• Telecommunication Allowance	-	72.000.000
	• Asuransi Purna Jabatan	• Post-Employment Insurance	-	-
	• Tunjangan Transportasi	• Transportation Allowance	184.680.000	162.000.000
3	Fasilitas	Facilities		
	• Kendaraan	• Vehicle	-	-
	• Kesehatan	• Health	-	-
	• Bantuan Hukum	• Legal Assistance	-	-
	• Komunikasi	• Communication	-	-
	• Seragam	• Uniform	-	-
4	Tantiem *	Tantiem *	-	-

Keterangan:
*Belum ada pemberian Tantiem untuk Tahun Buku 2024 dan 2025

Note:
* No tantiem was granted for Fiscal Years 2024 and 2025.

Organ dan Komite Dewan Komisaris

Supporting Organs and Committees of the Board of Commissioners



Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta fungsi pengawasan secara berkelanjutan, Dewan Komisaris wajib membentuk Organ Pendukung Dewan Komisaris. Organ Pendukung Dewan Komisaris merupakan organ yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara optimal, independen, dan profesional. Seluruh Organ Pendukung Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif kepada Dewan Komisaris, serta berperan penting dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance),* kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pencapaian tujuan dan keberlanjutan usaha Perusahaan.

To support the effective implementation of its duties, responsibilities, and supervisory functions on an ongoing basis, the Board of Commissioners is required to establish Supporting Organs of the Board of Commissioners. These supporting organs are established to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions toward the Board of Directors in an optimal, independent, and professional manner. All Supporting Organs of the Board of Commissioners are collectively accountable to the Board of Commissioners and play an important role in ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG), compliance with applicable laws and regulations, and the achievement of the Company's objectives and business sustainability.

Sampai dengan tahun 2025, Perusahaan telah memiliki Organ dan Komite dibawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit (KA) dan Komite Nominasi dan Manajemen Risiko.

As of 2025, the Company has established supporting organs and committees under the Board of Commissioners consisting of the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Nomination and Risk Management Committee.

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan administratif, seperti penyusunan agenda rapat, pencatatan notulen rapat, serta memastikan bahwa semua dokumentasi penting yang berkaitan dengan Dewan Komisaris terkelola dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris tercatat dengan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretaris Dewan Komisaris juga bertugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh anggota Dewan Komisaris. Mereka memastikan bahwa informasi yang relevan dan tepat waktu disampaikan kepada Dewan Komisaris, baik itu mengenai laporan kinerja perusahaan, perkembangan industri, ataupun isu-isu strategis lainnya. Pemberian informasi yang akurat sangat

The Secretary to the Board of Commissioners is responsible for managing administrative activities, including preparing meeting agendas, recording meeting minutes, and ensuring that all important documentation related to the Board of Commissioners is properly maintained in accordance with applicable procedures. This ensures that all decisions made by the Board of Commissioners are properly documented and accountable.

The Secretary to the Board of Commissioners is also responsible for providing information required by members of the Board of Commissioners and ensuring that relevant and timely information is delivered to the Board of Commissioners, including reports on Company performance, industry developments, and other strategic issues. The provision of accurate information

penting bagi Dewan Komisaris untuk membuat keputusan yang berbasis data dan analisis yang kuat.

Hingga 31 Desember 2025, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sdr. Redy Iman Tenar berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Batubara Niaga Nomor 001.SK/DK-PLNBBN/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN Batubara Niaga.

is essential to enable the Board of Commissioners to make decisions based on reliable data and sound analysis.

As of December 31, 2025, the position of Secretary to the Board of Commissioners was held by Mr. Redy Iman Tenar based on Board of Commissioners Resolution No. 001. SK/DK-PLNBBN/2024 on March 21, 2024, concerning the Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT PLN Batubara Niaga.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners Profile



REDY IMAN TENAR	
Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang Selatan, Usia 39 tahun.	An Indonesian citizen, domiciled in South Tangerang, and 39 years old.
Riwayat Pendidikan: • Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya Tahun 2006 • Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2017	**Educational Background** • Bachelor of Law from Brawijaya University, 2006 • Master of Laws from Universitas Gadjah Mada, 2017
Riwayat Jabatan: Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris di PLN BBN, beberapa jabatan yang pernah didudukinya antara lain: • Manager Regulasi Litigasi perizinan PT PLN Energi Primer Indonesia (2022 - Sekarang)	**Professional Background** Prior to serving as the Corporate Secretary to the Board of Commissioners of PLN BBN, she/he held several positions, including: • Manager of Licensing, Litigation, and Regulatory Affairs, PT PLN Energi Primer Indonesia (2022–Present)
Rangkap Jabatan: Tidak ada	**Concurrent Positions:** None

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya berupa:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi Tata Laksana Surat dan Kearsipan di lingkungan Dewan Komisaris;
2. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan serta laporan-laporan Dewan Komisaris sesuai prinsip tata kelola perusahan yang baik;
3. Mempersiapkan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
5. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
   a. *Monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
   b. Bahan/materi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan;
   c. Dukungan adminstrasi serta *monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

The Secretary to the Board of Commissioners assists the Board of Commissioners in carrying out its duties through the following activities:

1. Administering correspondence management and archival activities within the Board of Commissioners;
2. Preparing draft annual work plans, budgets, and reports of the Board of Commissioners in accordance with Good Corporate Governance principles;
3. Preparing meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, Board of Directors, and other related parties;
4. Acting as the liaison officer between the Board of Commissioners and other parties;
5. Providing data and information required by the Board of Commissioners, including:
   a. Monitoring follow-up actions on decisions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners;
   b. Materials and information related to reports and activities of the Board of Directors in managing the Company;
   c. Administrative support and monitoring of matters requiring approval or recommendations from the Board of Commissioners in relation to Company management

dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
6. Melakukan analisa atas prosedur dan peraturan perusahaan yang menjamin ketaatan terhadap GCG (*Good Corporate Governance*) serta merekomendasikan kepada Dewan Komisaris langkah - langkah perbaikan dan penyempurnaannya;
7. Mengkoordinasikan anggota komite (apabila diperlukan), dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
8. Berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
9. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan;
10. Melaporkan setiap hasil pelaksaaan tugasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala (triwulan) maupun sewaktu-waktu dibutuhkan, sebagai bagian dari evaluasi atas penugasan yang bersangkutan;
11. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam *Board Manual*, yaitu diantaranya adalah:

1. Mempersiapkan dan menghadiri kegiatan RUPS;
2. Mengadministrasikan surat Dewan Komisaris sebanyak 26 surat, baik surat keluar maupun surat masuk;
3. Menyelenggarakan dan menyusun risalah rapat atas rapat internal Dewan Komisaris dengan Komite Audit sebanyak 17 kali rapat, rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 12 kali rapat;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2025;
5. Mengadministrasikan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris.

activities carried out by the Board of Directors;
6. Analyzing Company procedures and regulations to ensure compliance with Good Corporate Governance principles and recommending improvements and enhancements to the Board of Commissioners;
7. Coordinating committee members (when necessary) to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
8. Based on written authorization from the Board of Commissioners, accessing records or information concerning employees, funds, assets, and other Company resources related to the execution of duties;
9. Maintaining the confidentiality of Company data and information in accordance with applicable provisions;
10. Reporting the results of duties performed to the Board of Commissioners periodically (quarterly) or whenever required as part of the evaluation of assigned responsibilities;
11. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners.

Activities of the Secretary to the Board of Commissioners

During 2025, the Secretary to the Board of Commissioners carried out activities as stipulated in the Board Manual, including:

1. Preparing and attending General Meeting of Shareholders (GMS) activities;
2. Administering 26 correspondence documents of the Board of Commissioners, including both incoming and outgoing letters;
3. Organizing meetings and preparing minutes for 17 internal meetings of the Board of Commissioners with the Audit Committee and 12 joint meetings with the Board of Directors;
4. Preparing the 2025 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
5. Administering and monitoring follow-up actions arising from decisions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners.

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk mengkaji dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal serta memastikan tata kelola perusahaan dijalankan sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance*.

The Audit Committee was established by the Board of Commissioners to assist in carrying out its duties and functions, particularly in reviewing and ensuring the effectiveness of the internal control system, the effectiveness of internal and external audit activities, and ensuring that corporate governance is implemented in accordance with Good Corporate Governance principles.

Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Susunan Komite Audit PT PLN Batubara Niaga berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No. 007.SK/DK/PLNBBN/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dengan masa jabatan 4 tahun.

Composition of the Audit Committee

The composition of the Audit Committee of PT PLN Batubara Niaga is based on Board of Commissioners Resolution No. 007.SK/DK/PLNBBN/2024 on December 31, 2024, with a term of office of four years.

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan Komite Audit Position in Audit Committee	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Periode Jabatan Term
Tri Joko Supriyatno	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	SK Pembentukan Komite Audit Tanggal 31 Desember 2024 Decree on the Establishment of the Audit Committee dated December 31, 2024	Pertama First
Rixa Kumara	Komite Audit Audit Committee Member	Komite Audit Audit Committee Member	SK Pembentukan Komite Audit Tanggal 31 Desember 2024 Decree on the Establishment of the Audit Committee dated December 31, 2024	Pertama First

Profil Ketua dan Anggota Komite Audit

Profile of the Chairman and Members of the Audit Committee



TRI JOKO SUPRIYATNO

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang Selatan Usia 57 tahun.	Indonesian citizen, domiciled in South Tangerang, 57 years old.
Profil disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.	The profile is presented in the Board of Commissioners Profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.



RIXA KUMARA

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi. Usia 43 tahun.	Indonesian citizen, domiciled in Bekasi, 43 years old.
Riwayat Pendidikan: Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Pancasila pada Tahun 2004.	**Educational Background** Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Pancasila, 2004.
Riwayat Jabatan: Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PLN BBN, beberapa jabatan yang pernah didudukinya antara lain : • Manager Akuntansi Financial Pada Sub Bidang Akuntansi Financial Bidang Akuntansi Direktorat Keuangan PLN Energi Primer Indonesia (2024-Sekarang)	**Professional Background** Prior to serving as an Audit Committee Member at PLN BBN, positions held include: • Manager of Financial Accounting, Financial Accounting Subdivision, Accounting Division, Finance Directorate, PLN Energi Primer Indonesia (2024–Present)
Rangkap Jabatan: Tidak ada	**Concurrent Positions:** None

Independensi Anggota Komite Audit

Dalam Pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bekerja secara profesional dan independen. Komite Audit yang dijabat oleh pihak independen tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Audit.

Independence of Audit Committee Members

In carrying out its duties, the Audit Committee operates professionally and independently. Independent Audit Committee members do not have personal interests or relationships that could create negative impacts or conflicts of interest for the Company and have fulfilled all requirements for appointment as Audit Committee members.

Kriteria independensi anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan *non*-audit atau jasa konsultasi lain kepada PLN BBN dalam waktu 6 bulan terakhir;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di PLN BBN;
3. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan
5. Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan SK Dewan Komisaris No. 007.SK/DK/PLNBBN/2024 Tanggal 31 Desember 2024.

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite Audit diantaranya adalah:

1. Melakukan tinjauan secara berkala, pengawasan dan evaluasi serta memberikanrekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain *Whistleblowing System* (WBS), Pengaduan, Kepatuhan Direksi terhadap Perjanjian dengan Pihak Ketiga, Sistem Teknologi informasi;
2. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
3. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal dan auditor eksternal termasuk namun tidak terbatas penunjukan auditor independen, ruang lingkup dan biaya;
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
5. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Perusahaan antara lain laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan informasi keuangan lainnya;
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris;
7. Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran Komite Audit, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris;
8. Bersama Komite lainnya melakukan tinjauan secara berkala, pengawasan dan evaluasi;

The independence criteria for Audit Committee members are as follows:

1. Not affiliated with a public accounting firm, law firm, or any other party providing audit, non-audit, or consulting services to PLN BBN within the last six months;
2. Do not own shares, either directly or indirectly, in PLN BBN;
3. Have not held authority and responsibility for planning, leading, and/or controlling the Company within the last six months;
4. Do not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities; and
5. Are not affiliated with institutions that provide services to the Company.

Audit Committee Charter, Duties, and Responsibilities

In carrying out its duties, the Audit Committee refers to the duties and responsibilities stipulated in Board of Commissioners Resolution No. 007.SK/DK/PLNBBN/2024 on December 31, 2024.

The primary duties and responsibilities of the Audit Committee include:

1. Conducting periodic reviews, supervision, evaluations, and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding, among others, the Whistleblowing System (WBS), complaints handling, compliance of the Board of Directors with agreements involving third parties, and information technology systems;
2. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of internal and external auditors;
3. Evaluating audit activities and audit results conducted by internal and external auditors, including but not limited to the appointment of independent auditors, audit scope, and audit fees;
4. Providing recommendations regarding improvements to the management control system and its implementation;
5. Ensuring the existence of satisfactory evaluation procedures for information disclosed by the Company, including periodic financial statements, forecasts, and other financial information;
6. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and supporting the execution of the Board of Commissioners' duties;
7. Preparing Audit Committee work plans and budgets, conducting committee meetings, preparing meeting minutes, and periodically reporting committee activities to the Board of Commissioners;
8. Together with other committees, conducting periodic reviews, supervision, evaluations, and providing recommendations to the Board of Commissioners;

9. serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain atas :
   - Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Board Manual;
   - RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan);
   - RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan)
   - Laporan Perusahaan antara lain namun tidak terbatas pada: Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan; Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan;
   - GCG *(Good Corporate Governance);*
   - Sistim Informasi;
   - KPI Dewan Komisaris;
   - Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris;
   - Arahan/tanggapan RUPS.
10. Menjaga kerahasiaan data serta informasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu dibutuhkan, sebagai bagian dari evaluasi atas penugasan yang bersangkutan;
11. Berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

9. Providing recommendations regarding:
   - Implementation of the Articles of Association and Board Manual;
   - RJPP (Long-Term Corporate Plan);
   - RKAP (Corporate Work Plan and Budget);
   - Company reports, including but not limited to Performance Reports and Financial Statements, as well as Quarterly and Annual Management Reports;
   - Good Corporate Governance (GCG);
   - Information Systems;
   - Board of Commissioners KPIs;
   - Actions of the Board of Directors requiring approval or recommendations from the Board of Commissioners;
   - Directives or responses from the GMS.
10. Maintaining the confidentiality of Company data and information in accordance with applicable provisions and reporting the results of its duties to the Board of Commissioners periodically or whenever required;

11. Based on written authorization from the Board of Commissioners, accessing records or information concerning employees, funds, assets, and other Company resources related to the execution of its duties;

12. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners insofar as they remain within the scope of the Board of Commissioners' responsibilities.

Laporan Singkat Pelaksanaan Komite Audit

Rapat Komite Audit

Selama Tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan Rapat Internal maupun Rapat Koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi dengan ikhtisar sebagai berikut:

Summary of Audit Committee Activities

Audit Committee Meetings

During 2025, the Audit Committee conducted both internal meetings and coordination meetings involving the Board of Commissioners and the Board of Directors, with the following attendance record:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Bersama Dewan Komisaris Meetings with the Board of Commissioners			Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi Meetings with the Board of Commissioners and Board of Directors		
		Jumlah dan (%) Kehadiran Attendance Rate			Jumlah dan (%) Kehadiran Attendance Rate		
		Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Tri Joko Supriyatno	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	12	12	100%	12	12	100%
Rixa Kumara	Komite Audit Audit Committee Member	12	12	100%	12	12	100%

Rekomendasi Komite Audit

Selama tahun 2025, Komite Audit telah memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain meliputi:

Audit Committee Recommendations

During 2025, the Audit Committee provided recommendations to the Board of Commissioners, including:

1. Agar memonitor tindak lanjut penyelesaian Audit SPI PLN EPI sesuai dengan LHP dan memastikan hasil temuan audit diselesaikan sebelum tanggal *due date;*
2. Agar menyusun prognosa laporan keuangan berdasarkan isu-isu audit laporan keuangan tahun 2024 dan kondisi operasi sampai dengan 2025 (termasuk progress program kerja *Beyond* kWh dan program kerja *volume* PLN);
3. Agar melakukan pengawalan penyelesaian isu audit tahun 2024 terkait piutang IPP bermasalah;
4. Agar Manajemen PLN BBN berkoordinasi dengan PLN EPI terkait persiapan dan pendampingan audit 2025.

1. Monitoring the follow-up and completion of PLN EPI Internal Audit findings in accordance with the Audit Report and ensuring that audit findings are resolved before the due date;
2. Preparing financial statement projections based on issues identified during the 2024 financial statement audit and operational conditions through 2025, including the progress of the Beyond kWh program and PLN volume programs;
3. Supervising the resolution of 2024 audit issues related to problematic IPP receivables;
4. Ensuring PLN BBN Management coordinates with PLN EPI regarding preparation for and assistance during the 2025 audit process.

Komite Nominasi dan Manajemen Risiko
Nomination and Risk Management Committee

Komite Nominasi dan Manajemen Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam proses penunjukan dan evaluasi pimpinan perusahaan, seperti Direksi dan Komisaris Perusahaan, selain itu Komite Nominasi dan Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terkait penerapan manajemen risiko di PLN BBN.

The Nomination and Risk Management Committee was established by the Board of Commissioners to assist in carrying out its duties and functions related to the appointment and evaluation of Company leadership, including members of the Board of Directors and Board of Commissioners. In addition, the Committee supports the Board of Commissioners in overseeing the implementation of risk management within PLN BBN.

Jumlah dan Komposisi Komite Nominasi dan Manajemen Risiko

Susunan Komite Nominasi dan Manajemen Risiko PT PLN Batubara Niaga berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No. 006.SK/DK-PLNBBN/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dengan masa jabatan 4 tahun.

Composition of the Nomination and Risk Management Committee

The composition of the Nomination and Risk Management Committee of PT PLN Batubara Niaga is based on Board of Commissioners Resolution No. 006.SK/DK-PLNBBN/2024 on December 31, 2024, with a four-year term of office.

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan Komite Nominasi dan Manajemen Risiko Position in the Nomination and Risk Management Committee	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Periode Jabatan Term
Noor Adi Baroto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Nominasi dan Manajemen Risiko Chairman of the Nomination and Risk Management Committee	SK Pembentukan Komite Nominasi dan Manajemen Risiko Tanggal 31 Desember 2024 Committee Establishment Resolution on December 31, 2024	Pertama First
Akhmad Ma'arif	Komite Nominasi dan Manajemen Risiko Nomination and Risk Management Committee Member	Komite Nominasi dan Manajemen Risiko Nomination and Risk Management Committee Member	SK Pembentukan Komite Nominasi dan Manajemen Risiko Tanggal 31 Desember 2024 Committee Establishment Resolution on December 31, 2024	Pertama First

Profil Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Manajemen Risiko

Profile of the Chairman and Members of the Nomination and Risk Management Committee



NOOR ADI BAROTO

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Depok Usia 53 tahun.	Indonesian citizen, domiciled in Depok, 53 years old.
Profil disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.	The profile is presented in the Board of Commissioners Profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.



AKHMAD MA'ARIF

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bambu Apus. Usia 38 tahun.	Indonesian citizen, domiciled in Bambu Apus, 38 years old.
Riwayat Pendidikan: Diploma Tiga dari Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2009.	**Educational Background** Diploma III from Universitas Gadjah Mada, 2009.
Riwayat Jabatan: Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Manajemen Risiko di PLN BBN, beberapa jabatan yang pernah didudukinya antara lain: • Manager Delivery & Logistik Jawa Bali pada Sub Bidang Delivery & Logistik Jawa Bali Bidang Pengendalian Operasional Batubara Divisi Pengendalian Kontrak dan Logistik Batubara Direktorat Batubara PLN Energi Primer Indonesia (2024-Sekarang).	**Professional Background** Prior to serving as a Member of the Nomination and Risk Management Committee at PLN BBN, positions held include: • Manager of Delivery & Logistics for Java-Bali, Delivery & Logistics for Java-Bali Subdivision, Coal Operational Control Division, Coal Contract and Logistics Control Division, Coal Directorate, PLN Energi Primer Indonesia (2024–Present).
Rangkap Jabatan: Tidak ada	**Concurrent Positions:** None

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Manajemen Risiko

Dalam Pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Manajemen Risiko bekerja secara profesional dan independen. Komite Nominasi dan Manajemen Risiko yang dijabat oleh pihak independen tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Manajemen Risiko. Kriteria independensi anggota Komite Nominasi dan Manajemen Risiko sebagai berikut, yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan *non*-audit atau jasa konsultasi lain kepada PLN BBN dalam waktu 6 bulan terakhir;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di PLN BBN;
3. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir;

Independence of Nomination and Risk Management Committee Members

In carrying out its duties, the Nomination and Risk Management Committee operates professionally and independently. Independent members of the Committee do not have personal interests or relationships that could create negative impacts or conflicts of interest for the Company and have fulfilled all requirements for appointment. independence criteria are as follows:

1. Not affiliated with a public accounting firm, law firm, or other party providing audit, non-audit, or consulting services to PLN BBN within the last six months;
2. Do not own shares, directly or indirectly, in PLN BBN;
3. Have not held authority and responsibility for planning, leading, and/or controlling the Company within the last six months;

4. Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan
5. Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Manajemen Risiko

Komite Nominasi dan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan SK Dewan Komisaris No. 006.SK/DK-PLNBBN/2024 Tanggal 31 Desember 2024.

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Manajemen Risiko diantaranya adalah:

1. Melakukan tinjauan secara berkala, pengawasan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain terkait kebijakan, pedoman, strategi sistem manajemen risiko, kepatuhan, Barang dan jasa, Kebijakan mutu, Lingkungan & K3, Perjanjian dengan pihak ketiga, manajemen talenta dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi *(selected talent),* untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi *(nominated talent)* yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris.
4. Melakukan evaluasi atas usulan KPI Perusahaan.
5. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran Komite Nominasi dan Manajemen Risiko, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.
10. Bersama Komite lainnya melakukan tinjauan secara berkala, pengawasan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain atas:
    - Pelaksanaan Anggaran Dasar dan *Board Manual;*

4. Do not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities; and
5. Are not affiliated with institutions that provide services to the Company.

Charter, Duties, and Responsibilities of the Nomination and Risk Management Committee

In carrying out its duties, the Nomination and Risk Management Committee refers to the duties and responsibilities stipulated in the Board of Commissioners Decree No. 006.SK/DK-PLNBBN/2024 on December 31, 2024.

The principal duties and responsibilities of the Nomination and Risk Management Committee include:

1. Conducting periodic reviews, supervision, and evaluations, as well as providing recommendations to the Board of Commissioners regarding policies, guidelines, risk management system strategies, compliance, procurement of goods and services, quality policies, Environmental, Health and Safety (EHS) policies, agreements with third parties, talent management, and remuneration implemented by the Company.
2. Evaluating the talent classification system and procedures implemented by the Board of Directors.
3. Conducting validation and calibration of Selected Talent to produce a list of Nominated Talent to be nominated by the Board of Commissioners.
4. Evaluating the Company's proposed Key Performance Indicators (KPIs).
5. Preparing proposals for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
6. Preparing proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
7. Preparing the work plan and budget of the Nomination and Risk Management Committee, conducting committee meetings, preparing meeting minutes, and periodically reporting the implementation of committee duties to the Board of Commissioners.
8. Evaluating remuneration policies for employees that require approval and/or feedback from the Board of Commissioners.
9. Evaluating proposals from the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.
10. Together with other committees, conducting periodic reviews, supervision, and evaluations, and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding, among others:
    - Implementation of the Articles of Association and Board Manual;

- RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan);
- RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan);
- Laporan Perusahaan antara lain namun tidak terbatas pada: Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan; Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan;
- GCG *(Good Corporate Governance);*
- Sistem Informasi;
- KPI Dewan Komisaris;
- Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris; dan
- Arahan/tanggapan RUPS.

11. Menjaga kerahasiaan data serta informasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan.
12. Melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu dibutuhkan, sebagai bagian dari evaluasi atas penugasan yang bersangkutan.
13. Berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

- Long-Term Corporate Plan (RJPP);
- Company Work Plan and Budget (RKAP);
- Company reports, including but not limited to Performance Reports and Financial Statements, as well as Quarterly and Annual Management Reports;
- Good Corporate Governance (GCG);
- Information Systems;
- Board of Commissioners' KPIs;
- Actions of the Board of Directors requiring approval and/or recommendations from the Board of Commissioners; and
- Directions and responses arising from the GMS.

11. Maintaining the confidentiality of Company data and information in accordance with applicable regulations.
12. Reporting the results of the implementation of its duties to the Board of Commissioners on a periodic basis or whenever required, as part of the evaluation of the relevant assignment.
13. Based on written assignments from the Board of Commissioners, accessing records or information regarding employees, funds, assets, and other Company resources related to the performance of its duties.
14. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners, provided such duties remain within the scope of the Board of Commissioners' responsibilities.

Laporan Singkat Pelaksanaan Komite Nominasi dan Manajemen Risiko

Rapat Komite Nominasi dan Manajemen Risiko

Kebijakan rapat Komite Nominasi dan Manajemen Risiko diatur dalam keputusan dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Selama Tahun 2025, Komite Nominasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan Rapat Internal maupun Rapat Koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi dengan ikhtisar sebagai berikut:

Summary Report on the Activities of the Nomination and Risk Management Committee

Nomination and Risk Management Committee Meetings

The meeting policies of the Nomination and Risk Management Committee are regulated in the decisions and Work Guidelines of the Board of Commissioners.

Throughout 2025, the Nomination and Risk Management Committee conducted both Internal Meetings and Coordination Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors, with the following attendance record:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Bersama Dewan Komisaris Meetings with the Board of Commissioners			Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors		
		Jumlah dan (%) Kehadiran Attendance Ratio			Jumlah dan (%) Kehadiran Attendance Ratio		
		Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Noor Adi Baroto	Ketua Komite Nominasi dan Manajemen Risiko Chairman of the Nomination and Risk Management Committee	12	12	100%	12	12	100%
Akhmad Ma'arif	Komite Nominasi dan Manajemen Risiko Member of the Nomination and Risk Management Committee	12	12.	100%	12	12	100%

Rekomendasi Komite Nominasi dan Manajemen Risiko

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Manajemen Risiko telah memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Agar Manajemen PLN BBN mereview strategi Risiko PLN BBN Tahun 2026 dan Penyusunan Profil Risiko 2026 bersamaan dengan Penyusunan RKAP 2026
2. Agar Manajemen PLN BBN mengidentifikasi risiko yang sesuai sasaran pada RKAP 2026
3. Agar Manajemen PLN BBN memastikan, memantau, dan mengevaluasi level risiko inheren pada akhir tahun supaya dapat turun sesuai dengan target level risiko residu perusahaan

Recommendations of the Nomination and Risk Management Committee

During 2025, the Nomination and Risk Management Committee provided recommendations to the Board of Commissioners, including:

1. PLN BBN Management should review PLN BBN's 2026 Risk Strategy and prepare the 2026 Risk Profile concurrently with the preparation of the 2026 RKAP.
2. PLN BBN Management should identify risks that are aligned with the objectives set out in the 2026 RKAP.
3. PLN BBN Management should ensure, monitor, and evaluate the level of inherent risk at year-end so that it can be reduced in accordance with the Company's targeted residual risk level.

Komite Lainnya
Other Committees

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perusahaan hanya memiliki Komite Audit dan Komite Nominasi dan Manajemen Risiko. Sehingga tidak terdapat informasi terkait nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat, independensi, tugas dan tanggung jawab, frekuensi pertemuan, tingkat kehadiran serta laporan pelaksanaan kegiatan Komite Lainnya yang dimiliki Perusahaan.

As of the end of 2025, the Company only had the Audit Committee and the Nomination and Risk Management Committee. Therefore, there is no information regarding the names, positions, brief profiles, independence, duties and responsibilities, meeting frequency, attendance rates, or activity reports of any other committees within the Company.

Tata Kelola dan Kesekretariatan

Governance and Secretariat



Tata Kelola dan Kesekretariatan merupakan organ pendukung Direksi yang memiliki tugas untuk membantu Direksi dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik. Tata Kelola dan Kesekretariatan juga memiliki tugas untuk melakukan reviu berkala terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang akan berlaku, agar jalannya usaha Perusahaan masih dalam koridor yang ditetapkan.

The Governance and Secretariat serves as a supporting organ of the Board of Directors and is responsible for assisting the Board of Directors in implementing Good Corporate Governance. The Governance and Secretariat is also tasked with conducting periodic reviews of prevailing and upcoming laws and regulations to ensure that the Company's business activities remain within the applicable regulatory framework.

PLN BBN telah memiliki Tata Kelola dan Kesekretariatan yang bertanggung jawab dalam memelihara citra Perusahaan, melindungi kepentingan Perusahaan dengan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan pemegang saham, investor dan *stakeholders* lainnya serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Fungsi Tata Kelola dan Kesekretariatan PLN BBN dijalankan oleh Manager Tata Kelola dan Kesekretariatan.

Manager Tata Kelola dan Kesekretariatan PLN BBN dijabat oleh Sdr. Raditya Aji Habsoro berdasarkan SK Direksi PT PLN Batubara Niaga Nomor 108.K/DIRPLNBBN/2025 pada tanggal 30 Juni 2025 tentang Mengangkat Raditya Aji Habsoro No. Induk Pegawai 93161407ZY sebagai Manager Tata Kelola & Kesekretariatan. Berikut Profil Manager Tata Kelola dan Kesekretariatan PLN BBN:

PLN BBN has established a Governance and Secretariat function responsible for maintaining the Company's image, protecting the Company's interests by fostering communication and maintaining good relationships with shareholders, investors, and other stakeholders, as well as ensuring the timely and accurate disclosure of information to all stakeholders.

The Governance and Secretariat function at PLN BBN is carried out by the Governance and Secretariat Manager.

The position of Governance and Secretariat Manager of PLN BBN is held by Mr. Raditya Aji Habsoro pursuant to the Decree of the Board of Directors of PT PLN Batubara Niaga No. 108.K/DIRPLNBBN/2025 on June 30, 2025, concerning the appointment of Raditya Aji Habsoro, Employee Identification Number 93161407ZY, as Governance & Secretariat Manager. The profile of PLN BBN's Governance and Secretariat Manager is as follows:



RADITYA AJI HABSORO

Manager Tata Kelola & Kesekretariatan

Governance & Secretariat Manager

Warga Negara Indonesia kelahiran Magelang, tanggal 29 Januari 1993. Usia 33 Tahun

Riwayat Pendidikan:

- Menyelesaikan pendidikan S2 pada Tahun 2025 dengan jurusan Teknik Elektro (Tenaga Listrik Sistem Cerdas) di Universitas Indonesia.

Indonesian citizen, born in Magelang on January 29, 1993, aged 33 years.

Education:

- He completed his Master's Degree in Electrical Engineering (Intelligent Power Systems) from the University of Indonesia in 2025.

Riwayat Jabatan: Diangkat sebagai Manager Tata Kelola & Kesekretariatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN BBN Nomor 108.K/DIRPLNBBN/2025 pada tanggal 30 Juni 2025 tentang Mengangkat Raditya Aji Habsoro No. Induk Pegawai 93161407ZY sebagai Manager Tata Kelola & Kesekretariatan. Sebelumnya, Ia juga pernah menjabat sebagai Assisstant Manager Service Desk & Shared Services di PT PLN Energi Primer Indonesia.	**Riwayat Jabatan:** He was appointed as Governance and Secretariat Manager pursuant to the Decree of the Board of Directors of PLN BBN No. 108.K/DIRPLNBBN/2025 on June 30, 2025, concerning the appointment of Raditya Aji Habsoro, Employee Identification Number 93161407ZY, as Governance & Secretariat Manager. Prior to this appointment, he served as Assistant Manager of Service Desk & Shared Services at PT PLN Energi Primer Indonesia.

Kedudukan dan Keberadaan Tata Kelola dan Kesekretariatan
Structural Position of the Governance and Secretariat

Posisi Tata Kelola dan Kesekretariatan dalam struktur organisasi Perusahaan berada langsung dibawah Direktur dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

Within the Company's organizational structure, the Governance and Secretariat reports directly to the Director, as reflected in the following organizational structure:

STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA DAN KESEKRETARIATAN
Governance and Secretariat Organizational Structure



Sejalan dengan struktur organisasi tersebut, kedudukan Tata Kelola dan Kesekretariatan dalam struktur organisasi Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi Perusahaan, dan memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

In line with the organizational structure above, the Governance and Secretariat reports directly to the Board of Directors and maintains a functional relationship with, and may communicate directly with, the Board of Commissioners.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Tata Kelola dan Kesekretariatan
Functions, Duties, and Responsibilities of the Governance and Secretariat

Tugas dan tanggung jawab Tata Kelola dan Kesekretariatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun program & rencana komunikasi untuk identitas Perusahaan, komunikasi internal, media relations, *opinion leader, stakeholder,* peraturan komunikasi Perusahaan, media digital, media sosial, dan manajemen isu.

The duties and responsibilities of the Governance and Secretariat include:

1. Preparing communication programs and plans covering the Company's identity, internal communications, media relations, opinion leaders, stakeholders, corporate communication regulations, digital media, social media, and issue management.

2. Merencanakan dan memantau riset dan analisis komunikasi, seperti survey persepsi, komunikasi internal, dan *stakeholder*.
3. Melakukan *stakeholder Mapping.*
4. Mengkoordinasikan ketersediaan materi komunikasi Perusahaan.
5. Mengelola, membina, dan memonitor pelaksanaan rencana kerja komunikasi internal dan eksternal, serta mengevaluasi kinerja komuniikasi Perusahaan.
6. Mengelola *feedback* dari *stakeholder* eksternal.
7. Menyusun dan mengelola *stakeholder perception index.*

8. Mengelola komunikasi internal, eksternal *below the line, sponsorship,* event Perusahaan, dan hubungan masyarakat.
9. Mengoptimalkan, memonitor, dan mengevaluasi pengembangan pemanfaatan media Perusahaan, antara lain media digital dan media sosial Perusahaan.
10. Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu terkait kebijakan Perusahaan dan membuat rekomendasi program komunikasi yang tepat untuk mempertahankan posisi Perusahaan.
11. Menyusun alternatif solusi dan memberikan masukan terkait komunikasi internal dan eksternal untuk manajemen, serta menyediakan konten pesan kunci.

12. Memonitor dan mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan program komunikasi Perusahaan.
13. Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

14. Menyiapkan *draft* pedoman yang berkaitan dengan kegiatan Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
15. Menyiapkan rapat Perusahaan yang meliputi jadwal, dokumentasi dan tata tertibnya.
16. Menyiapakan program *event* Perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan Direksi, Komisaris, dan RUPS.
17. Melakukan aktivitas layanan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait kebijakan dan pemberian hak dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris.
18. Melaksanakan kesekretariatan Direksi & Dewan Komisaris untuk mendukung kelancaran tugas Direksi & Dewan Komisaris.
19. Menyiapkan informasi untuk verifikasi dan validasi pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan kearsipan Perusahaan.
20. Mengelola keprotokoleran.
21. Mengelola kebutuhan fasilitas dan sarana rapat korporat.

22. Mengelola agenda rapat korporat.
23. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di unit kerjanya berbasiskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance)*, manajemen risiko, dan kepatuhan.

2. Planning and monitoring communication research and analysis, including perception surveys, internal communications, and stakeholder surveys.
3. Conducting stakeholder mapping.
4. Coordinating the availability of corporate communication materials.
5. Managing, developing, and monitoring the implementation of internal and external communication work plans and evaluating the Company's communication performance.
6. Managing feedback from external stakeholders.
7. Developing and managing the stakeholder perception index.
8. Managing internal communications, below-the-line external communications, sponsorships, corporate events, and public relations activities.
9. Optimizing, monitoring, and evaluating the development and utilization of Company media, including digital and social media platforms.
10. Identifying and analyzing issues related to Company policies and recommending appropriate communication programs to maintain the Company's position.

11. Developing alternative solutions and providing recommendations regarding internal and external communications for management, as well as preparing key messages and communication content.
12. Monitoring and evaluating compliance with the implementation of the Company's communication programs.
13. Implementing Corporate Social Responsibility (CSR) programs.
14. Preparing draft guidelines related to the activities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and General Meetings of Shareholders (GMS).
15. Organizing Company meetings, including scheduling, documentation, and meeting procedures.
16. Preparing corporate event programs related to the activities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and GMS.
17. Providing services to the Board of Directors and Board of Commissioners concerning policies and the provision of rights and facilities for Directors and Commissioners.
18. Performing secretarial functions for the Board of Directors and Board of Commissioners to support the effective execution of their duties.
19. Preparing information for the verification and validation of corporate secretarial and records management activities.

20. Managing protocol affairs.
21. Managing facilities and logistical requirements for corporate meetings.
22. Managing the corporate meeting agenda.
23. Ensuring that the planning, implementation, and evaluation of all business processes within the work unit are carried out in accordance with Good Corporate Governance principles, risk management practices, and compliance requirements.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola dan Kesekretariatan
Report on Governance and Secretariat Activities

Kegiatan Tata Kelola dan Kesekretariatan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Kerja dan *Focus Group Discussion* (FGD) KPI Tahun 2025.
2. Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan yaitu berbagi santunan dan sembako kepada panti asuhan.
3. Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan yaitu berbagi Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha.
4. Hari Ulang Tahun yang ke - 6 PT PLN Batubara Niaga.
5. Implementasi SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
6. Mengadakan Upacara Bendera sesuai dengan arahan PLN *Group*.
7. Menyelenggarakan Rapat Direksi Perseoran dan Rapat Dewan Komisaris.

The Governance and Secretariat carried out the following activities throughout 2025:

1. Organized the 2025 Work Meeting and KPI Focus Group Discussion (FGD).
2. Implemented a Corporate Social and Environmental Responsibility program through the distribution of donations and basic necessities to orphanages.
3. Implemented a Corporate Social and Environmental Responsibility program through the donation of sacrificial animals during Eid al-Adha.
4. Organized the 6th Anniversary celebration of PT PLN Batubara Niaga.
5. Supported the implementation of the SNI ISO 9001:2015 Quality Management System.
6. Organized flag ceremonies in accordance with directives from the PLN Group.
7. Organized meetings of the Board of Directors and meetings of the Board of Commissioners.

Pengembangan Kompetensi Tata Kelola dan Kesekretariatan

Berikut program pengembangan kompetensi yang diikuti Tata Kelola dan Kesekretariatan sepanjang tahun 2025:

Governance and Secretariat Competency Development

The following competency development program was attended by the Governance and Secretariat during 2025:

Nama Workshop/Seminar Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Awareness SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Awareness SNI ISO 9001:2015 Quality Management System	-	01 Oktober 2025 October 1, 2025	PT PLN Batubara Niaga

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System



Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh personil Perusahaan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Internal control is a process designed and implemented by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Company personnel to provide reasonable assurance regarding the achievement of operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations.

Perusahaan mengembangkan sistem pengendalian intern yang merupakan sebuah proses yang dihasilkan oleh Manajemen yang didesain untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan Perusahaan dengan memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi operasi, terpercaya nya (*reliability*) Laporan Keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku.

Perusahaan menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Sistem Pengendalian Intern mencakup:

- Lingkungan pengendalian intern di PLN BBN yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur.
- Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*).
- Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi PLN BBN.
- Proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi.

The Company develops an internal control system that constitutes a management-driven process designed to provide assurance that corporate objectives are achieved while maintaining operational effectiveness and efficiency, financial reporting reliability, and compliance with applicable laws and regulations.

The Company has established an effective internal control system to safeguard its investments and assets. The Internal Control System includes:

- An internal control environment at PLN BBN implemented in a disciplined and structured manner.
- Assessment of business risk management activities.
- Control activities, namely actions performed within the control process over Company activities at every level and unit within PLN BBN's organizational structure.
- Reporting processes concerning operational activities, financial activities, and compliance with laws and regulations.
- Assessment processes regarding the quality of the internal control system, including the internal audit function at every level and unit within the organizational structure.

Dasar Kebijakan Sistem Pengendalian Internal
Basis of the Internal Control System Policy

Untuk menjamin Perusahaan melakukan kegiatan pengelolaan Perusahaan sesuai aktivitas yang dilakukan selalu berada dalam penugasan dan kendali yang baik serta tidak menyimpang dari semua ketentuan dan peraturan yang ada, Direksi telah menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT PLN Batubara Niaga

To ensure that the Company's management activities remain properly supervised and controlled and do not deviate from applicable provisions and regulations, the Board of Directors has established a Board of Directors Regulation concerning General Guidelines for the Internal Control System within PT PLN Batubara Niaga.

Sejalan dengan Pedoman tersebut, didalamnya mengatur tentang pedoman pengumpulan data umum, penyampaian kuesioner kepada auditi, langkah kerja audit beserta formulir sub kertas kerja audit sebagai media untuk menuangkan langkah kerja audit dan pedoman penyusunan laporan hasil audit.

In line with these guidelines, the regulation also governs procedures for general data collection, distribution of questionnaires to auditees, audit work procedures, audit working paper templates, and guidelines for preparing audit reports.

Pelaksanaan Pengendalian Keuangan dan Operasional
Implementation of Financial and Operational Controls

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan operasional bisnis dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan strategis, menjamin keandalan informasi, serta menjaga keamanan dan keberlangsungan aset-aset Perusahaan. PLN BBN menerapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan operasional yang berbasis pada Kerangka Pengendalian Internal COSO serta kerangka manajemen risiko yang mengacu pada *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis ISO 31000:2009.

The Company continuously ensures that all business operational activities are conducted effectively and efficiently to achieve strategic objectives, ensure information reliability, and safeguard the security and sustainability of Company assets. PLN BBN implements internal controls over financial and operational reporting based on the COSO Internal Control Framework and a risk management framework referring to Enterprise Risk Management (ERM) based on ISO 31000:2009.

Pengendalian internal atas pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap keandalan data dan informasi keuangan, serta memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Direksi bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang wajar sesuai standar *International Financial Reporting Standards* (IFRS), termasuk memberikan sertifikasi atas laporan keuangan tahunan guna menjamin akurasi dan transparansi, serta bebas dari salah saji material akibat kesalahan maupun kecurangan.

Internal controls over financial reporting are designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial data and information and to ensure that financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles. The Board of Directors bears full responsibility for the preparation and fair presentation of consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), including certifying annual financial statements to ensure accuracy, transparency, and freedom from material misstatements resulting from either error or fraud.

Selain aspek keuangan, sistem pengendalian internal juga mendukung efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan. Melalui pemantauan berkelanjutan, PLN BBN memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan kebijakan internal serta ketentuan hukum dan regulasi eksternal yang berlaku. Hingga akhir periode pelaporan, tidak terdapat pelanggaran atau sanksi hukum yang dikenakan kepada Perusahaan, sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan dan integritas.

Beyond financial aspects, the internal control system also supports operational effectiveness and efficiency. Through ongoing monitoring, PLN BBN ensures that all operational activities are conducted in accordance with internal policies and applicable laws and regulations. As of the end of the reporting period, the Company had not been subject to any legal violations or sanctions, reflecting its commitment to compliance and integrity.

.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Compliance with Laws and Regulations

Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kontrak yang berlaku bagi Perusahaan yang dalam penerapannya didelegasikan dan dijalankan oleh unit-unit terkait. Sebagai upaya dalam memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, maka Perusahaan menunjuk auditor eksternal untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan Perusahaan atas pasal-pasal tertentu hukum peraturan dan kontrak. Hasil pengujian oleh auditor eksternal menunjukan bahwa Perusahaan sepanjang tahun buku 2025 mematuhi dalam semua hal yang material. Selain itu, PLN BBN pada tahun 2025 juga melaksanakan Audit Sertifikasi SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan telah tersertifikasi SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan.

The Board of Directors is responsible for ensuring compliance with laws, regulations, and contracts applicable to the Company, with implementation delegated to the relevant units. To obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, the Company appoints an external auditor to assess compliance with specific legal, regulatory, and contractual provisions. The external auditor's examination concluded that the Company complied, in all material respects, throughout fiscal year 2025. In addition, during 2025 PLN BBN conducted an audit for SNI ISO 37301:2021 Compliance Management System certification and successfully obtained SNI ISO 37301:2021 Compliance Management System certification.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

Perusahaan secara berkesinambungan melakukan evaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian internal atas terjadinya perubahan kondisi internal dan eksternal sehubungan dengan ekspansi usaha dan peningkatan kapasitas yang terus berjalan. Evaluasi dilakukan oleh Audit Internal yang berdasar pada 5 (lima) komponen pengendalian yang saling berkaitan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

The Company continuously evaluates the effectiveness of the implementation of its internal control system in response to changes in internal and external conditions arising from ongoing business expansion and capacity enhancement. The evaluation is conducted by Internal Audit based on five interrelated control components, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication systems, and monitoring.

Pernyataan atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal
Statement on the Adequacy of the Internal Control System

Dalam upaya memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan rapat dengan Satuan Audit Internal dan Audit Eksternal secara berkala. Berdasarkan evaluasi Komite Audit, Direksi bersama Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah dijalankan secara memadai, yang diturunkan mulai dari kode etik, kebijakan, prosedur hingga Instruksi Kerja yang disinergikan dengan penerapan penilaian *Key Performance Indicator* (KPI).

To ensure the effectiveness of the internal control system, the Board of Directors and the Board of Commissioners, through the Audit Committee, periodically hold meetings with Internal Audit and External Audit. Based on the Audit Committee's evaluation, the Board of Directors and the Board of Commissioners conclude that the Company's internal control system has been implemented adequately, beginning with the Code of Ethics, policies, procedures, and work instructions, all of which are aligned with the implementation of Key Performance Indicator (KPI) assessments.

Internal Audit

Internal Audit

Perusahaan telah memiliki Fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh Bidang Audit Internal yang dipimpin oleh Manager Audit Internal. Dalam melaksanakan fungsinya, Internal Audit selalu diposisikan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dipercaya, profesional, obyektif, dan independen yang dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan perusahaan dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian kepatuhan terhadap peraturan maupun proses tata kelola Perusahaan yang baik.

The Company has established an Internal Audit Function carried out by the Internal Audit Division, which is led by the Internal Audit Manager. In performing its role, Internal Audit is positioned as a trusted, professional, objective, and independent strategic partner to management, providing added value in achieving corporate objectives through enhancing the effectiveness of risk management, compliance controls, and good corporate governance processes.

Manager Audit Internal telah memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat. Berikut profil Manager Audit Internal:

The Internal Audit Manager possesses recognized expertise in the internal auditing profession and has obtained the appropriate professional certifications. The profile of the Internal Audit Manager is as follows:



RIO OCTOGI SIREGAR

Manager Audit Internal
Internal Audit Manager

Warga Negara Indonesia kelahiran Pekanbaru, tanggal 05 Oktober 1990 usia 35 tahun.	An Indonesian citizen born in Pekanbaru on October 5, 1990, aged 35 years.
Riwayat Pendidikan: Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro Universitas Darma Agung Medan tahun 2015.	**Education** He obtained a Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Darma Agung University, Medan, in 2015.
Riwayat Jabatan: Menjabat sebagai Manager Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 149.K/DIRPLNBBN/2025 tanggal 19 Agustus 2025.	**Riwayat Jabatan:** He has served as Internal Audit Manager based on Board of Directors Decree No. 149.K/DIRPLNBBN/2025 dated August 19, 2025.
Sebelumnya, Ia sebagai Auditor SPI PLN Pusat.	Previously, he served as an Internal Auditor at PLN Headquarters.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Internal Audit
Organizational Structure and Position of Internal Audit

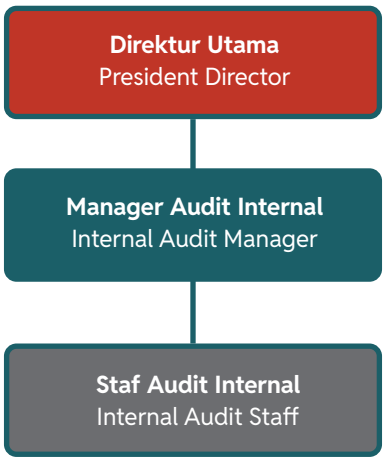
Fungsi Internal Audit dipimpin oleh Manager Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Keberadaan dan struktur fungsi Internal Audit ditetapkan sebagaimana terakhir diperbaharui berdasarkan Peraturan Direksi No. 012.P/DIRPLNBBN/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di PT PLN Batubara Niaga.

Kedudukan SPI secara struktural berada di bawah Direktur Utama dan secara fungsional memiliki akses komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil audit.

The Internal Audit Function is led by the Internal Audit Manager, who is appointed and dismissed by the President Director. The existence and organizational structure of the Internal Audit Function are stipulated under Board of Directors Regulation No. 012.P/DIRPLNBBN/2023 dated October 16, 2023, concerning the Organization and Work Procedures of PT PLN Batubara Niaga.

Structurally, the Internal Audit Unit reports directly to the President Director and functionally has direct communication access to the Board of Commissioners through the Audit Committee for coordination purposes and the reporting of information related to audit implementation and results.

STRUKTUR ORGANISASI INTERNAL AUDIT
Internal Audit Organizational Structure



SDM dan Sertifikasi Profesi
Human Resources and Professional Certifications

Hingga akhir 31 Desember 2025, Personil Auditor Internal Audit berjumlah 2 (dua) orang. Untuk menjaga kualitas hasil pengawasan oleh Audit Internal diperlukan sertifikasi profesi yang menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta perkembangan industri. Berikut ini informasi sertifikasi profesi yang dimiliki personil Fungsi Internal Audit hingga akhir tahun 2025:

As of December 31, 2025, the Internal Audit Function consisted of 2 (two) personnel. To maintain the quality of oversight performed by Internal Audit, professional certification is considered an important aspect for auditors in understanding developments in auditing practices, particularly regarding regulatory compliance and industry developments. The professional certifications held by Internal Audit personnel as of the end of 2025 are as follows:

Jabatan Position		Jumlah (orang) Number of Personnel	Sertifikasi Certification		
			QIA	QRMO	CFrA
Manager Audit Internal	Internal Audit Manager	1	1	1	1
Staf Audit Internal	Internal Audit Staff	1	-	-	-
Jumlah	Total	2	1	1	1

QIA : *Qualified Internal Auditor*
QRMO : *Qualified Risk Management Officer*
CFrA : *Certified Forensic Auditor*

QIA : *Qualified Internal Auditor*
QRMO : *Qualified Risk Management Officer*
CFrA : Certified Forensic Auditor

Pedoman Internal Audit
Internal Audit Guidelines

Dalam pelaksanaan tugasnya, Internal Audit telah memiliki Pedoman Internal Audit dan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).

Ruang lingkup yang diatur dalam Piagam Internal Audit mencakup semua area kegiatan operasional pada seluruh bidang kerja PLN BBN.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman Internal Audit diantaranya mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pemantauan Tindak Lanjut & Rekomendasi.

In carrying out its duties, Internal Audit is guided by the Internal Audit Guidelines and the Internal Audit Charter.

The scope governed by the Internal Audit Charter covers all operational activities across all functional areas of PLN BBN.

The Internal Audit Guidelines regulate, among others, Planning, Execution, Reporting, and Monitoring of Follow-Up Actions and Recommendations.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit
Duties and Responsibilities of Internal Audit

Sesuai dengan yang diatur dalam piagam Internal Audit, tugas dan tanggung jawab Internal Audit PLN BBN adalah:

1. Melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
2. Memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan rencana.
3. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
4. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
5. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.
6. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

In accordance with the Internal Audit Charter, the duties and responsibilities of PLN BBN Internal Audit are as follows:

1. Prepare annual audit plans and budget allocations for the implementation of the internal audit function.
2. Ensure the implementation of internal audits in accordance with the approved plan.
3. Report significant findings to the President Director and the Board of Commissioners for prompt corrective action.
4. Monitor corrective actions taken in response to significant findings.
5. Evaluate the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance processes in accordance with applicable laws and Company policies.
6. Conduct reviews and assessments of efficiency and effectiveness in finance, commercial operations, operations, human resources, information technology, and other activities.

7. Melakukan penyusunan dan pengkajian Piagam Audit Intern secara periodik.
8. Melaksanakan evaluasi kualitas Layanan *Assurance* dan Layanan Konsultansi oleh jajaran SPI maupun pihak independen atas seluruh proses audit.
9. Memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha PLN BBN.
10. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di internal SPI maupun dengan bidang dan unit lainnya, SPI PLN dan SH/AP, lembaga atau instansi/lembaga pengawasan lainnya, guna memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SPI dan perusahaan sesuai kewenangannya.
11. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan.
12. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Prepare and periodically review the Internal Audit Charter.
8. Conduct quality assessments of Assurance and Consulting Services performed by the Internal Audit Unit and/or independent parties across the audit process.
9. Ensure that Internal Audit personnel participate in continuous professional development and training aligned with the increasing complexity and business activities of PLN BBN.
10. Coordinate and collaborate internally within the Internal Audit Unit and with other functions and units, PLN Internal Audit, SH/AP, and other supervisory institutions or agencies to support achievement of targets and enhance Internal Audit and Company performance within their respective authorities.
11. Maintain the confidentiality of Company information and/or data obtained in the course of performing Internal Audit duties and responsibilities, unless disclosure is permitted under applicable laws and regulations and/or court decisions.
12. Safeguard confidential information obtained during tenure in accordance with applicable laws and regulations.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit 2025
Summary of Internal Audit Activities in 2025

Selama tahun 2025 Fungsi Internal Audit telah melakukan pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah laporan singkat pelaksanaan kegiatan Internal Audit Perusahaan sesuai dengan Piagam Internal Audit.

1. Melaksanakan audit internal penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
2. Melaksanakan *join* audit PLN EPI Group (ICOFR Semester 1 tahun 2025 dan GRC tahun 2025).
3. Memonitoring dan menyampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil audit operasional SPI PLN EPI Tahun 2025.

During 2025, the Internal Audit Function carried out its duties and responsibilities. The following is a summary of Internal Audit activities conducted in accordance with the Internal Audit Charter:

1. Conducted an internal audit of the implementation of the ISO 9001:2015 Quality Management System.
2. Participated in joint audits within the PLN EPI Group (ICOFR Semester I 2025 and GRC 2025).
3. Monitored and reported follow-up actions on recommendations resulting from the 2025 PLN EPI Internal Audit operational audit.

Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Eksternal (SPI PLN EPI) Tahun 2025

Fungsi Audit Internal PLN BBN mulai aktif per September 2025 dan telah melakukan *monitoring* serta menyampaikan tindak lanjut hasil audit operasional SPI PLN EPI tahun 2025 sebagai berikut:

Progress of Follow-Up Actions on External Audit Recommendations (PLN EPI Internal Audit) in 2025

The PLN BBN Internal Audit Function became operational in September 2025 and has monitored and reported follow-up actions related to the PLN EPI Internal Audit operational audit recommendations for 2025 as follows:

No.	Judul Rekomendasi Recommendation Title	Rencana Aksi Action Plan	PIC	Due Date	Tanggal Penyelesaian Completion Date	Status Open/ Close Status Open/ Close
1	Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan agar segera melaksanakan sertifikasi pengadaan barang/jasa. Procurement Planning Officials and Procurement Executing Officials should immediately obtain procurement certification.	PLN BBN akan melaksanakan sertifikasi kompetensi Pengadaan Barang/Jasa. PLN BBN will conduct Procurement Goods/Services Competency Certification.	HCADMUM	30/04/2026	03/03/2026	*Closed* 09/03/2026
2	Manajemen PLN BBN agar berkoordinasi dengan PLN EPI terkait percepatan penyelesaian usulan peningkatan batasan kewenangan Direksi PLN BBN. PLN BBN Management should coordinate with PLN EPI to expedite approval of the proposed increase in the Board of Directors' authority limits.	Manajemen PLN BBN akan berkoordinasi dengan Kepala Satuan Perencanaan Korporat dan Manajemen Energi Primer PLN EPI untuk melakukan percepatan penyelesaian usulan peningkatan batasan kewenangan Direksi PLN BBN. PLN BBN Management will coordinate with the Head of Corporate Planning and Primary Energy Management Unit of PLN EPI to accelerate approval of the proposed increase in the Board of Directors' authority limits.	HK	23/12/2025	14/10/2025	*Closed* 31/10/2025
3	Manajemen PLN BBN agar melakukan review atas struktur organisasi perusahaan dan mengusulkan ke Pemegang Saham untuk menambah struktur pejabat pengadaan guna mendukung independensi dan mengelola konflik kepentingan. PLN BBN Management should review the Company's organizational structure and propose the addition of procurement officer positions to support independence and conflict-of-interest management.	PLN BBN akan membuat surat usulan review perubahan struktur organisasi kepada PLN EPI. PLN BBN will submit a proposal to PLN EPI regarding organizational structure revisions.	HCADMUM	23/12/2025	18/10/2025	*Closed* 31/10/2025
4	Manajemen PLN BBN agar memberikan *Coaching, Mentoring, Consulting* (CMC) kepada AMN Kemitraan terhadap ketentuan penggunaan bahasa indonesia dalam perjanjian. PLN BBN Management should provide Coaching, Mentoring, and Consulting (CMC) to the Partnership AMN regarding compliance with Indonesian language requirements in agreements.	*Auditee* akan melaksanakan aksi sesuai dengan rekomendasi. The auditee will implement actions in accordance with the recommendation.	OPR	23/12/2025	18/10/2025	*Closed* 31/10/2025
5	Manajemen PLN BBN agar melakukan addendum kontrak GLS dengan menggunakan bahasa indonesia dan atau Dwi Bahasa (Indonesia dan Inggris).	PLN BBN akan melakukan addendum kontrak dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan atau Dwi Bahasa untuk kontrak GLS.	OPR	20/03/2026	03/03/2026	*Closed* 09/03/2026

No.	Judul Rekomendasi Recommendation Title	Rencana Aksi Action Plan	PIC	Due Date	Tanggal Penyelesaian Completion Date	Status Open/ Close Status Open/ Close
	PLN BBN Management should execute an amendment to the GLS contract using Indonesian and/or bilingual (Indonesian and English) language.	PLN BBN will amend the GLS contract using Indonesian and/or bilingual language.				
6	Pejabat Perencana dan atau Pejabat Pelaksana Pengadaan agar secara berkala melakukan evaluasi proses pengadaan barang dan jasa serta mitra yang telah bekerjasama dengan PLN BBN. Procurement Planning and/or Procurement Executing Officials should periodically evaluate procurement processes and business partners engaged by PLN BBN.	Akan melakukan evaluasi mitra sesuai dengan aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu pengiriman, pemenuhan spesifikasi kontrak, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluation of partners will be conducted based on quality, quantity, delivery timeliness, contract specification compliance, and compliance with applicable regulations.	OPR	23/12/2025	09/12/2025	*Closed* 22/12/2025
7	Direktur Operasi agar menempatkan tenaga *witness* yang berkompeten dalam melakukan pengawasan di Jetty Krakatau Bandar Samudera. The Director of Operations should assign competent witness personnel to supervise activities at Krakatau Bandar Samudera Jetty.	PLN BBN akan menyiapkan personal untuk mengawasi proses *Blending* Batubara. PLN BBN will assign personnel to oversee the coal blending process.	OPR	23/12/2025	09/12/2025	*Closed* 22/12/2025
8	Manajemen PLN BBN agar melakukan evaluasi dan memanfaatkan teknologi untuk dapat mengimplementasikan sistem untuk memantau piutang, jadwal pembayaran, dan kinerja pemasok secara *real-time*. PLN BBN Management should evaluate and utilize technology to implement systems capable of monitoring receivables, payment schedules, and supplier performance in real time.	PLN BBN akan melaksanakan aksi sesuai rekomendasi. PLN BBN will implement actions in accordance with the recommendation.	KRSTIK	23/12/2025	19/09/2025	*Closed* 14/10/2025
9	Manajemen PLN BBN agar dalam kurun waktu 5 Bulan sejak LK Audited terbit segera melakukan penagihan atas piutang kepada pelanggan (PLTU dan non kelistrikan). Jika dalam kurun waktu 5 bulan belum ada realisasi penerimaan kas, Manajemen PLN BBN agar bersurat ke Dewan Komisaris untuk meminta arahan. PLN BBN Management should collect outstanding receivables from customers (CFPP and non-electricity customers) within five months after the issuance of audited financial statements. If no cash collection occurs within five months, Management should seek guidance from the Board of Commissioners.	Manajemen telah melaporkan kepada Dewan Komisaris perkembangan piutang PLTU IPP. Management has reported developments regarding IPP CFPP receivables to the Board of Commissioners.	KRSTIK	23/12/2025	09/12/2025	*Closed* 22/12/2025

No.	Judul Rekomendasi Recommendation Title	Rencana Aksi Action Plan	PIC	Due Date	Tanggal Penyelesaian Completion Date	Status Open/ Close Status Open/ Close
10	Manajemen PLN BBN agar melakukan evaluasi klausul pembayaran dan penalti dalam kontrak penjualan dengan pelanggan dan kontrak pembelian dengan pemasok untuk memastikan kejelasan, keadilan, dan perlindungan bagi PT PLN Batubara Niaga dan mencegah terulang di masa depan. PLN BBN Management should evaluate payment and penalty clauses in sales contracts with customers and purchase contracts with suppliers to ensure clarity, fairness, and protection for PT PLN Batubara Niaga and prevent recurrence in the future.	Manajemen PLN BBN akan melakukan evaluasi sesuai rekomendasi. PLN BBN Management will conduct evaluations in accordance with the recommendation	OPR	23/12/2025	09/12/2025	*Closed* 22/12/2025

Rapat Internal Audit

Dalam pelaksanaan tugasnya, Internal Audit juga melaksanakan rapat untuk membahas progres tindak lanjut hasil audit. Kebijakan rapat Internal Audit merujuk pada *Key Performance Indicator* Fungsi Internal Audit dengan frekuensi sebagai berikut:

a. Rapat dengan Direksi dengan tingkat frekuensi sebulan sekali.
b. Rapat dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan tingkat frekuensi sebulan sekali.

Selama tahun 2025, Fungsi Internal Audit telah melakukan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dan menyampaikan presentasi dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Internal Audit Meetings

In carrying out its duties, Internal Audit also holds meetings to discuss the progress of follow-up actions on audit findings. The Internal Audit meeting policy refers to the Internal Audit Function's Key Performance Indicators, with the following meeting frequencies:

a. Meetings with the Board of Directors: once per month.
b. Meetings with the Board of Commissioners and Audit Committee: once per month.

During 2025, the Internal Audit Function conducted meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee, and delivered presentations with the following attendance frequencies:

Uraian Description	Rapat Direksi Board of Directors Meetings	Rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit Board of Commissioners and Audit Committee Meetings
Frekuensi Rapat Number of Meetings	3 kali/times	3 kali/times



Rencana Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Pada tahun 2025, Personil Internal Audit telah melakukan program pengembangan untuk membantu pelakaksanaan tugasnya di Perusahaan. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan selama tahun 2025 adalah:

Internal Audit Training and Competency Development Plan

In 2025, Internal Audit personnel participated in development programs to support the execution of their duties within the Company. The training and development programs undertaken during 2025 were as follows:

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position	Topik Pelatihan Training Program		Penyelenggara Organizer
Rio Octogi Siregar	Manager Audit Internal Internal Audit Manager	*Self Assessment Internal Control*	Self Assessment Internal Control	PPA&K
		Perpanjangan masa berlaku sertifikat QIA	QIA Certificate Renewal	YPIA
		Perpanjangan masa berlaku sertifikat QRMO	QRMO Certificate Renewal	LSP-MKS
Cut Nadia Dwi Ramadani	Staf Audit Internal Internal Audit Staff	Dasar-Dasar Audit	Fundamentals of Auditing	PPA&K
		Audit Operasional + *Assessment* (ACCIA)	Operational Audit + Assessment (ACCIA)	PPA&K

Manajemen Risiko
Risk Management



Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan dan memantau risiko yang timbul dari suluruh kegiatan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, PLN BBN telah menerapkan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan. PLN BBN menyadari bahwa Perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan memiliki karakteristik yang komplek sehingga memerlukan pemetaan risiko serta mitigasi risiko.

Risk management is a series of structured procedures and methodologies used to identify, measure, treat, and monitor risks arising from all of the Company's business activities. Accordingly, PLN BBN has implemented risk management throughout the Company. PLN BBN recognizes that a Company operating in the health sector has complex characteristics that require comprehensive risk mapping and mitigation measures.

Fungsi yang mengelola Risiko di PLN BBN dilakukan oleh Manager Keuangan, IT, Risiko, dan Kinerja PLN BBN.

Saat ini Fungsi Manajemen Risiko dikoordinasikan oleh Manager Keuangan, IT, Risiko, dan Kinerja.

The risk management function at PLN BBN is carried out by the Manager of Finance, IT, Risk, and Performance.

Currently, the Risk Management Function is coordinated by the Manager of Finance, IT, Risk, and Performance.

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan
Company Risk Management Policy

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
3. Peraturan Direksi PT PLN Batubara Niaga Nomor: 016.P/DIRPLNBBN/2025 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Edaran Direksi Nomor: 016.E/XII/PLNBBN/2025 Prosedur Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi.

In carrying out its duties and responsibilities, the Company refers to the following:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in State-Owned Enterprises.
3. Board of Directors Regulation of PT PLN Batubara Niaga No. 016.P/DIRPLNBBN/2025 concerning the Integrated Risk Management Strategic Policy.
4. Circular Letter of the Board of Directors No. 016.E/XII/PLNBBN/2025 concerning General Guidelines and Procedures for Integrated Risk Management.

5. Edaran Direksi Nomor: 007.E/VI/PLNBBN/2025 tentang standar prosedur pedoman umum Manajemen Risiko.

6. Edaran Direksi Nomor: 006.E/VI/PLNBBN/2025 Standar Prosedur Implementasi 3 *Lines of Model* dalam Manajemen Risiko Terintegrasi dan 4 *Eye Principle*.

5. Circular Letter of the Board of Directors No. 007.E/VI/PLNBBN/2025 concerning Standard Procedures for General Risk Management Guidelines.
6. Circular Letter of the Board of Directors No. 006.E/VI/PLNBBN/2025 concerning Standard Procedures for the Implementation of the Three Lines Model in Integrated Risk Management and the Four Eyes Principle.

Sistem Manajemen Risiko Perusahaan
Company Risk Management System

Implementasi manajemen risiko PT PLN Batubara Niaga dijabarkan dalam kerangka kerja manajemen risiko sebagai berikut:

1. **Gambaran Umum Manajemen Risiko Perusahaan**
   Perusahaan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan mengadopsi standar ISO 31000 *Risk Management – Guidelines*. Perusahaan juga menetapkan Peraturan Direksi No. 016.P/DIRPLNBBN/2025 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi, yang memuat ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam pengelolaan risiko sebagai pedoman umum manajemen risiko serta acuan pelaksanaan pengelolaan risiko perusahaan. Organ Pengelola Manajemen Risiko terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur yang membidangi Pengelolaan Manajemen Risiko, dan Satuan Pengawasan Intern. Proses manajemen risiko dilakukan oleh pemilik risiko dibantu oleh oleh Bidang Risiko. Perusahaan melaksanakan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko di tiap proses manajemen risiko. Koordinasi pengelolaan risiko Perusahaan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

2. **Roadmap Manajemen Risiko**
   PT PLN Batubara Niaga telah menyusun *Roadmap* Manajemen Risiko yang menjadi rujukan proses penerapan manajemen risiko secara bertahap. *Roadmap* Manajemen Risiko Tahun 2024 - 2029 disahkan oleh Plt. Direktur Utama untuk memudahkan implementasi dan sosialisasi rencana jangka panjang ini, ditetapkan tema setiap tahun yang dapat digunakan dalam sosialisasi dan promosi Sasaran, Strategi dan Program Manajemen Risiko. Penyusunan *Roadmap* Manajemen Risiko ini dirancang agar implementasi manajemen risiko terintegrasi dapat dilakukan secara lebih sistematis, fokus, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang:
   1. Fase I tahun 2024 - Meningkatkan Komitmen Kepemimpinan untuk mendorong terciptanya budaya manajemen risiko.
   2. Fase II tahun 2025 - Meningkatkan Komitmen Kepemimpinan untuk mendorong terciptanya budaya manajemen risiko.
   3. Fase III tahun 2026 - Membangun tata kelola risiko.

The implementation of risk management at PT PLN Batubara Niaga is described through the following risk management framework:

1. **Overview of Company Risk Management**
   The Company has established a Risk Management Policy by adopting the ISO 31000 Risk Management – Guidelines standard. The Company has also enacted Board of Directors Regulation No. 016.P/DIRPLNBBN/2025 concerning the Integrated Risk Management Strategic Policy, which contains the requirements governing risk management as a general guideline and reference for implementing corporate risk management. The Risk Management Governance Structure consists of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Integrated Governance Committee, Director responsible for Risk Management, and the Internal Audit Unit. The risk management process is carried out by risk owners with support from the Risk Function. The Company conducts risk assessments consisting of risk identification, analysis, and evaluation in each stage of the risk management process. Coordination of the Company's risk management activities is performed by the Risk Management Unit.

2. **Risk Management Roadmap**
   PT PLN Batubara Niaga has prepared a Risk Management Roadmap that serves as a reference for the phased implementation of risk management. The 2024–2029 Risk Management Roadmap was approved by the Act. President Director. To facilitate implementation and socialization of this long-term plan, annual themes have been established to support the communication and promotion of Risk Management Objectives, Strategies, and Programs. The Roadmap was designed to ensure that integrated risk management can be implemented in a more systematic, focused, and adaptive manner in response to the continuously evolving business environment:
   1. Phase I of 2024 - Strengthening Leadership Commitment to Foster a Risk Management Culture.
   2. Phase II of2025 - Strengthening Leadership Commitment to Foster a Risk Management Culture.
   3. Phase III of 2026 - Establishing Risk Governance.

4. Fase IV Tahun 2027 - Membangun tata kelola risiko.
5. Fase V Tahun 2028 - Membangun budaya manajemen risiko.
6. Fase VI Tahun 2029 - Meningkatkan Penerapan Proses Manajemen Risiko.

3. Tata Kelola Model 3 Lini

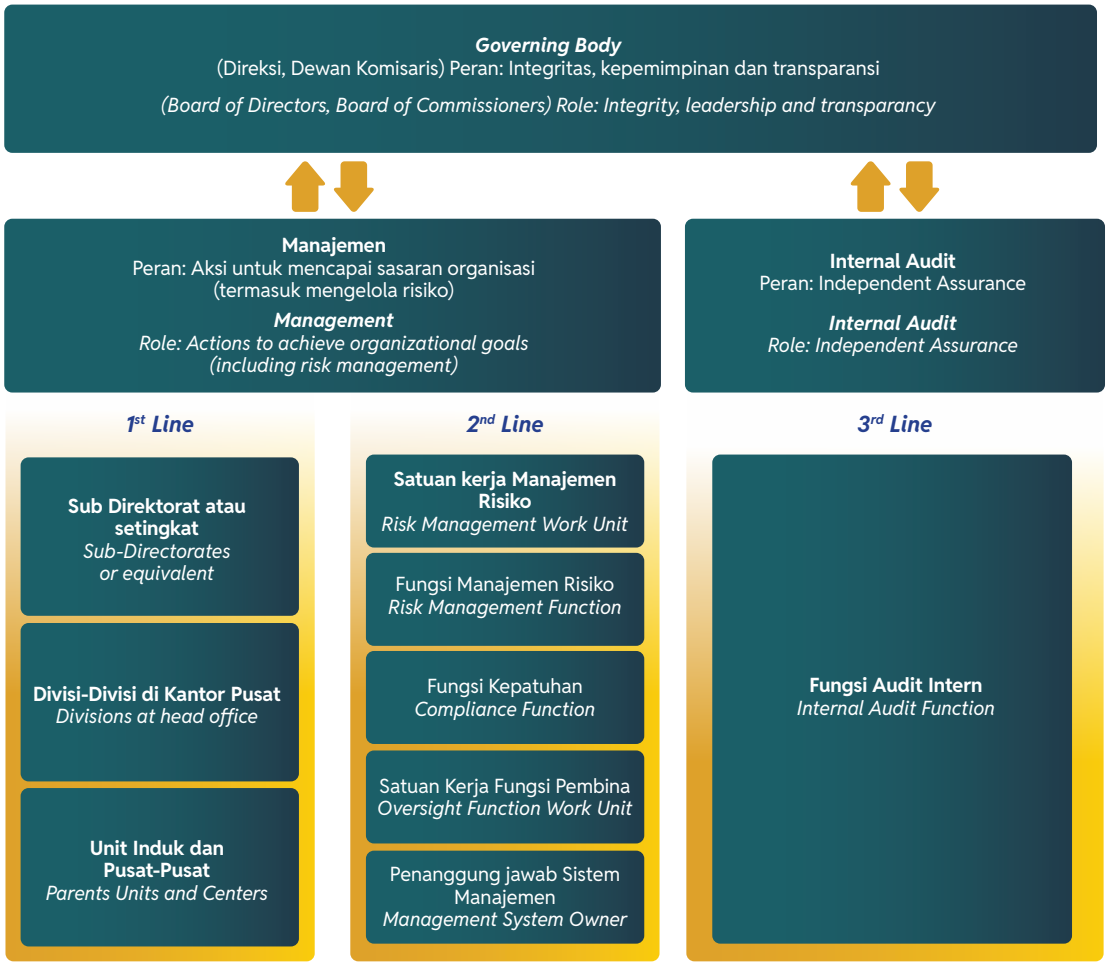
Penerapan manajemen risiko terintegrasi mendorong peran aktif seluruh organ risiko meliputi Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, sampai dengan individu di lingkungan perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan dirancang untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi Perusahaan, dan mengelola risiko tersebut agar tetap berada dalam selera risiko Perusahaan, demi memberikan jaminan yang masuk akal *(reasonable assurance)* atas pencapaian tujuan-tujuan Perusahaan. Model koordinasi manajemen risiko Perusahaan menggunakan Model Tiga Lini *(Three-Lines Model)* yang membagi fungsi-fungsi, mengklarifikasi dan memperkuat prinsip-prinsip yang mendasari, memperluas cakupan, dan menjelaskan bagaimana peran utama setiap fungsi dalam bekerja sama untuk memfasilitasi tata Kelola dan manajemen risiko yang kuat.

4. Phase IV of 2027 - Establishing Risk Governance.
5. Phase V of 2028 - Building a Risk Management Culture.
6. Phase VI of 2029 - Enhancing the Implementation of Risk Management Processes.

3. Three Lines Model Governance

The implementation of integrated risk management encourages the active involvement of all risk governance organs, including the Board of Commissioners, Board Committees, Board of Directors, management, and individual employees throughout the Company. The Company's Risk Management framework is designed to identify events that may affect the Company and manage such risks within the Company's risk appetite to provide reasonable assurance regarding the achievement of corporate objectives. The Company's risk management coordination framework adopts the Three Lines Model, which allocates responsibilities, strengthens the underlying principles, broadens the scope, and clarifies how each key function collaborates to support effective governance and strong risk management.

STRUKTUR TATA KELOLA MODEL TIGA LINI
Governance Structure of Three Line Models



Dalam praktik Manajemen Risiko Terintegrasi, PLN BBN menerapkan mekanisme *Four Eyes Principle* sebagai bagian dari penguatan Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan setiap keputusan dan transaksi material dilakukan secara akuntabel, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa suatu aktivitas kritikal tidak boleh diselesaikan hanya oleh satu individu, melainkan harus melalui mekanisme pemeriksaan dan persetujuan oleh minimal dua pihak yang independen (*maker–checker*).

Penerapan *Four Eyes Principle* dilakukan melalui:

1. **Pemisahan fungsi *(segregation of duties),*** yaitu pemisahan peran antara pihak yang menyusun/memproses (maker) dan pihak yang memeriksa/menyetujui *(checker/approver).*
2. **Otorisasi berjenjang *(dual authorization)*** sesuai limit kewenangan, khususnya pada transaksi keuangan, pengadaan, kontrak, perubahan data master, dan aktivitas yang berdampak signifikan terhadap kinerja atau eksposur risiko Perusahaan.
3. **Verifikasi dokumentasi dan bukti pendukung**, termasuk kesesuaian terhadap SOP, kebijakan internal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Jejak audit *(audit trail)*** pada sistem/aplikasi yang digunakan, sehingga seluruh persetujuan, perubahan data, dan keputusan dapat ditelusuri kembali untuk kepentingan pengawasan dan audit.

Dengan penerapan *Four Eyes Principle*, Perusahaan bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan, penyimpangan, konflik kepentingan, dan potensi fraud, sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

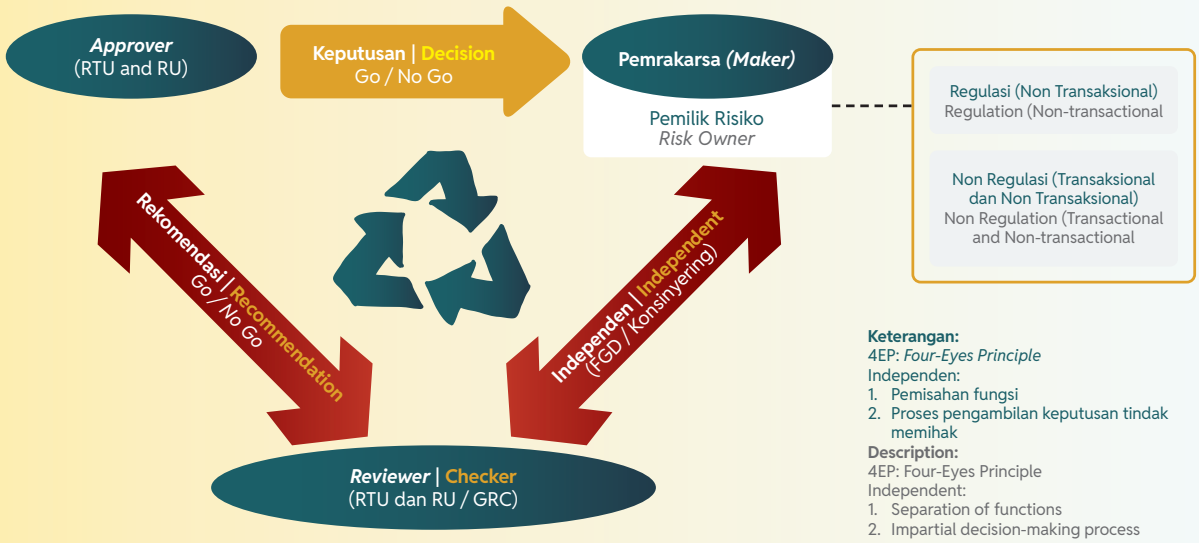
In implementing Integrated Risk Management, PLN BBN also applies the Four Eyes Principle as part of strengthening the Internal Control System to ensure that every material decision and transaction is carried out in an accountable, objective, and compliant manner. This principle emphasizes that a critical activity should not be completed by a single individual but must be reviewed and approved by at least two independent parties (maker-checker).

The Four Eyes Principle is implemented through:

1. **Segregation of duties,** which separates the roles of the party preparing or processing activities (maker) and the party reviewing or approving them (checker/approver).
2. **Dual authorization based on authority limits,** particularly for financial transactions, procurement, contracts, master data changes, and activities with significant impacts on Company performance or risk exposure.
3. **Verification of supporting documents and evidence,** including compliance with SOPs, internal policies, and applicable laws and regulations.
4. **Audit trails within systems and applications,** enabling all approvals, data changes, and decisions to be traced for monitoring and audit purposes.

Through the implementation of the Four Eyes Principle, the Company aims to reduce the risk of errors, irregularities, conflicts of interest, and potential fraud while enhancing decision-making quality and compliance with Good Corporate Governance (GCG) principles.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KEGIATAN 4EP
Decision Making and Activities of 4EP



Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko Perusahaan dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan, mencakup perencanaan, penerapan, pemantauan, serta evaluasi, dan terintegrasi dengan penyusunan rencana jangka panjang maupun rencana kerja tahunan perusahaan. Penerapan manajemen risiko menjadi bagian dari siklus pengelolaan kinerja melalui integrasi dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta inisiatif dan program strategis lainnya. Proses dimulai dengan penetapan lingkup, konteks, dan kriteria risiko sebagai dasar penilaian, termasuk parameter kemungkinan dan dampak serta kriteria penerimaan risiko yang selaras dengan arah strategis Perusahaan. Selanjutnya, Perusahaan melakukan asesmen risiko yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi untuk menentukan prioritas risiko utama sebagai dasar penetapan langkah penanganan yang tepat.

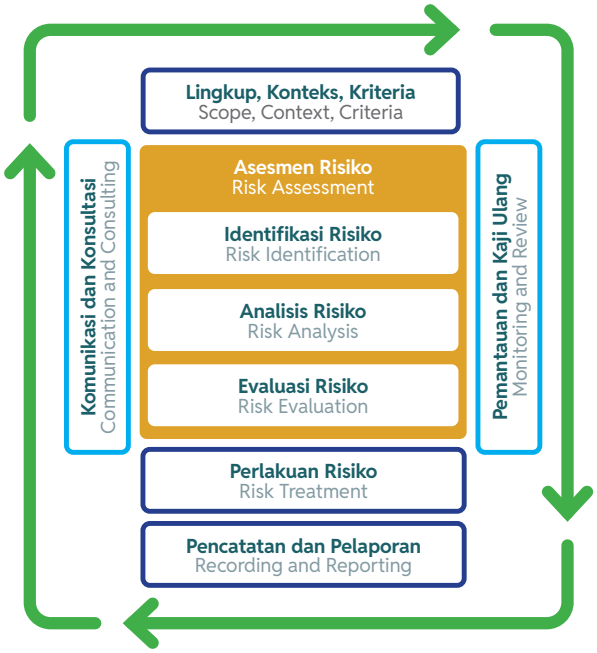
Atas risiko prioritas tersebut, Perusahaan menetapkan perlakuan risiko melalui rencana mitigasi yang terukur, mencakup strategi penanganan, penanggung jawab, target waktu, kebutuhan sumber daya, serta *output/evidence* pelaksanaan. Seluruh aktivitas manajemen risiko didokumentasikan dalam sarana pencatatan dan pelaporan, seperti *risk register* dan profil risiko, yang disampaikan secara berkala kepada manajemen untuk *monitoring*, penguatan akuntabilitas, dan pengambilan keputusan. Proses ini didukung oleh komunikasi dan konsultasi yang berkelanjungan dengan pemangku kepentingan internal, serta pemantauan dan kaji ulang secara periodik terhadap dinamika risiko dan efektivitas pengendalian agar profil risiko tetap relevan terhadap perubahan lingkungan bisnis dan operasional.

Risk Management Process

The Company's risk management process is implemented in a structured and continuous manner, encompassing planning, implementation, monitoring, and evaluation, and is integrated with the preparation of both long-term and annual corporate plans. Risk management forms part of the performance management cycle through integration with the Long-Term Corporate Plan (RJPP), the Company Work Plan and Budget (RKAP), and other strategic initiatives and programs. The process begins with establishing the scope, context, and risk criteria that form the basis for risk assessment, including likelihood and impact parameters as well as risk acceptance criteria aligned with the Company's strategic direction. The Company then conducts risk assessments consisting of risk identification, analysis, and evaluation to determine key risk priorities and appropriate treatment measures.

For identified priority risks, the Company establishes risk treatment plans through measurable mitigation initiatives that include treatment strategies, responsible parties, target completion dates, resource requirements, and implementation outputs/evidence. All risk management activities are documented through recording and reporting tools such as risk registers and risk profiles, which are submitted periodically to management for monitoring, accountability enhancement, and decision-making purposes. This process is supported by continuous communication and consultation with internal stakeholders, as well as periodic monitoring and review of risk developments and control effectiveness to ensure that the risk profile remains relevant to changes in the business and operational environment.

PROSES MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Process



Profil Risiko
Risk Profile

Profil Risiko Perusahaan

Profil risiko PT PLN Batubara Niaga memuat risiko utama *(top risk)* yang berkaitan dengan pencapaian target RKAP. Profil risiko tersebut dipantau secara berkala untuk memastikan risiko yang telah teridentifikasi dikelola dengan baik untuk pencapaian target RKAP.

Sampai dengan akhir tahun 2025, perusahaan melakukan pemamtauan Profil Risiko Korporat secara berkala. Profil Risiko Korporat Triwulan IV Tahun 2025 disajikan dalam peta risiko *(risk heatmap)* berdasarkan level risiko inheren sebagai berikut:

Company Risk Profile

PT PLN Batubara Niaga's risk profile contains key risks (top risks) related to the achievement of RKAP targets. The risk profile is monitored periodically to ensure that identified risks are managed effectively to support the achievement of RKAP objectives.

As of the end of 2025, the Company conducted periodic monitoring of its Corporate Risk Profile. The Corporate Risk Profile for the fourth quarter of 2025 is presented in a risk heatmap based on inherent risk levels as follows:

PROFIL RISIKO KORPORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN 4 TAHUN 2025
PT PLN BATUBARA NIAGA

TINGKAT KEMUNGKINAN

		1 Sangat Rendah	2 Rendah	3 Moderat	4 Tinggi	5 Sangat Tinggi
Hampir Pasti Terjadi	E	Low to Moderate 7	Moderate 12	Moderate to High 17 (2, 1)	High 22	High 25
Sangat Mungkin Terjadi	D	Low 4	Low to Moderate 3	Moderate 14 (4)	Moderate to High 19 (6, 7, 8)	High 24
Bisa Terjadi	C	Low 3	Low to Moderate 8	Moderate 13 (5, 3)	Moderate to High 18	High 23
Jarang Terjadi	B	Low 2	Low to Moderate 6 (7, 8)	Low to Moderate 11	Moderate to High 16	High 21
Sangat Jarang Terjadi	A	Low 1 (6, 2, 4, 3)	Low 5 (1, 5)	Low to Moderate 10	Moderate 15	High 20

TINGKAT DAMPAK

Keterangan: Risiko Inheren; Risiko Residu

High
Moderate to High
Moderate
Low to Moderate
Low

Risiko Utama dan Upaya Mitigasi

Hasil pemetaan risiko PLN BBN tahun 2025, terdapat **8 risiko utama** yang harus dicermati sebagai berikut :

Key Risks and Mitigation Measures

Based on PLN BBN's 2025 risk mapping results, there were **eight key risks** requiring particular attention, as follows:

No Risk ID	Risk Event		Risk Level
1	Kegagalan *Supply* Batubara Melalui ISP ke PLTU Meulaboh 3-4	Failure of Coal Supply through ISP to Meulaboh Units 3-4 CFPP	*Moderate to High*
2	Keterbatasan Sumber Tambang Batubara Untuk PLTU IPP	Limited Coal Mine Sources for IPP CFPP	*Moderate to High*
3	Keterlambatan Kedatangan Pasokan Batubara Ke PLTU	Delay in Coal Supply Arrival at CFPPs	*Moderate*
4	Kualitas Batubara Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Kontrak	Coal Quality Not Meeting Contract Specifications	*Moderate*
5	Kegagalan Penerapan *Maturity* Proses Bisnis	Failure to Achieve Business Process Maturity Implementation	*Moderate*
6	Nilai BOPO Tidak mencapai target	BOPO Value Not Achieving Target	*Moderate to High*
7	Tidak Tercapainya Target EBITDA	Failure to Achieve EBITDA Target	*Moderate to High*
8	Keterbatasan *Cashflow* dalam permodalan	Limited Cash Flow for Capital Requirements	*Moderate to High*

Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Mitigasinya

Selama tahun 2025 Perusahaan telah melakukan *risk treatment* guna mengurangi dampak ataupun kerugian yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Risks Faced by the Company and Their Mitigation

Throughout 2025, the Company implemented risk treatment measures to reduce the impact and potential losses that could affect Company performance, as presented below:

No.	Kategori Risiko Risk Category	Peristiwa Risiko Risk Event	Level Risiko Inheren Inherent Risk Level	Penanganan Risiko Risk Management	
1	Strategis Strategic	Kegagalan *Supply* Batubara Melalui ISP ke PLTU Meulaboh 3-4 Failure to Supply Coal Through ISP to the Meulaboh 3-4 Coal-Fired Power Plant	*Moderate To High*	1. Mengikat Kontrak dengan sumber tambang lokal yang telah mendapatkan penugasan pasokan oleh Dirjen Minerba 2. Menyelesaikan pembangunan ISP dan IC tepat waktu 3. Berkoordinasi dengan PLTU Meulaboh 3-4 terkait penggunaan fasilitas jetty 4. Mencari alternatif sumber tambang	1. Signing contracts with local mining sources assigned by the Directorate General of Mineral and Coal. 2. Completing the construction of the ISP and IC on time. 3. Coordinating with the Meulaboh 3-4 CFPP regarding the use of jetty facilities. 4. Exploring alternative mining sources.
2	Strategis Strategic	Keterbatasan Sumber Tambang Batubara Untuk PLTU IPP Limited Coal Mining Sources for the IPP Coal-Fired Power Plant	*Moderate To High*	1. Berkoordinasi dengan PLN EPI untuk pembagian alokasi penugasan sumber tambang ke PLTU IPP 2. Kontrak kerjasama dengan mitra surveyor untuk pemeriksaan kualitas 3. Melakukan *treatment* terhadap *Self Combustion* sesuai dengan skema CIF dan FOB di PLTU	1. CoordinatING with PLN EPI to allocate mining resources to IPP (Independent Power Plant) power plants. 2. SignING cooperation contract with a surveyor partner for quality inspections. 3. Processing self-combustion according to CIF and FOB schemes at the power plant.

No.	Kategori Risiko Risk Category	Peristiwa Risiko Risk Event	Level Risiko Inheren Inherent Risk Level	Penanganan Risiko Risk Management	
3	Operasional Operational	Keterlambatan Kedatangan Pasokan Batubara Ke PLTU Delays in Coal Supply Arrival to the Coal-Fired Power Plant	*Moderate*	1. Membuat perumusan jadwal rencana muat yang meliputi tanggal rencana muat, tanggal konfirmasi rakor, waktu berlayar, waktu pengurusan dokumen, *laytime* muat dan *laycan* SI (diterapkan pada Rapat Koordinasi) 2. Menjalin KSO dengan mitra transportasi yang kredibel dan *performance* bagus 3. Koordinasi dengan pihak mitra transportasi dan mitra pemasok agar menyiapkan moda transportasi yang sesuai spesifikasi pelabuhan muat 4. Melakukan kerjasama jangka panjang dengan calon mitra transportasi 5. Penindakan sesuai dengan pelanggaran terhadap kontrak	1. Formulating a loading schedule, including the planned loading date, coordination meeting confirmation date, sailing time, document processing time, loading laytime, and SI laycan (applied at the Coordination Meeting). 2. Establishing Joint Operation (KSO) with credible and high-performing transportation partners. 3. Coordinating with transportation partners and suppliers to prepare transportation modes that meet loading port specifications. 4. Establishing long-term cooperation with prospective transportation partners. 5. Taking action against contract violations.
4	Operasional Operational	Kualitas Batubara Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Kontrak Coal Quality Does Not Meet Contract Specifications	*Moderate*	1. Bekerjasama dengan mitra pasok yang kredibel sehingga spesifikasi batubara sesuai dengan kebutuhan PLTU 2. Melakukan verifikasi sumber tambang sebelum melakukan ikatan kontrak 3. Bekerjasama dengan surveyor untuk pelaksanaan supervisi *loading* 4. Aktif melakukan penelusuran dan mencari peluang sumber tambang /mitra baru sebagai alternatif cadangan pasokan batubara 5. Kontrak kerjasama dengan mitra surveyor untuk pemeriksaan kualitas	1. Collaborating with credible supply partners to ensure coal specifications meet the needs of the coal-fired power plant. 2. Verifying mining sources prior to entering contracts. 3. Collaborating with surveyors to supervise loading. 4. Actively exploring and seeking out new mining sources/partners as alternative coal supply reserves. 5. Contracting with surveyor partners for quality inspections.
5	Operasional Operational	Kegagalan Penerapan *Maturity* Proses Bisnis Failure to Implement Business Process Maturity	*Moderate*	1. Melakukan evaluasi terhadap Proses Bisnis PLN BBN	1. Evaluating Business Process of PLN BBN
6	Finansial Financial	Nilai BOPO melebihi target BOPO Value Exceeds Target	*Moderate To High*	1. Membuat *monitoring* realisasi harga dan kualitas pasokan batubara serta negosiasi biaya efisiensi energi primer. 2. Membuat evaluasi harga penawaran biaya transportasi batubara 3. Membuat *monitoring* realisasi harga dan kualitas pasokan batubara serta negosiasi dengan pelanggan.	1. Monitoring actual price and quality of coal supply, as well as negotiating primary energy efficiency costs. 2. Evaluating coal transportation price offers. 3. Monitoring the actual price and quality of coal supply, as well as negotiating with the customers.

No.	Kategori Risiko Risk Category	Peristiwa Risiko Risk Event	Level Risiko Inheren Inherent Risk Level	Penanganan Risiko Risk Management	
7	Finansial Financial	Tidak Tercapainya Target EBITDA EBITDA Target Not Achieved	*Moderate To High*	1. Membuat *monitoring* realisasi harga dan kualitas pasokan batubara serta negosiasi biaya efisiensi energi primer. 2. Membuat evaluasi harga penawaran biaya transportasi batubara 3. Membuat *monitoring* realisasi harga dan kualitas pasokan batubara serta negosiasi dengan pelanggan.	1. Membuat monitoring realisasi harga dan kualitas pasokan batubara serta negosiasi biaya efisiensi energi primer. 2. Membuat evaluasi harga penawaran biaya transportasi batubara 3. Membuat monitoring realisasi harga dan kualitas pasokan batubara serta negosiasi dengan pelanggan.
8	Finansial Financial	Keterbatasan *Cashflow* dalam permodalan Cash Flow Limitations in Capital	*Moderate To High*	1. Melakukan *profiling* pelanggan sebelum memasok 2. Melakukan koordinasi dan menyampaikan kendala-kendala penagihan ke PIC terkait. 3. Menjalankan proses bisnis penagihan dengan optimal termasuk melakukan *daily-meeting* secara konsisten.	1. Customer profiling prior to supplying. 2. Coordinating and communicating billing issues to the relevant PIC. 3. Optimizing billing business processes, including consistent daily meetings.

Evaluasi Atas Kinerja Manajemen Risiko
Evaluation of Risk Management Performance

Penilaian atas pengelola manajemen risiko Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam komponen KPI (*Key Performance Indicators*). Realisasi pencapaian kinerja pengelola manajemen risiko tahun 2025 dengan komponen KPI pengelola manajemen risiko terdiri dari Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko yang telah tercapai 102%.

The performance assessment of the Company's risk management function is regulated through Key Performance Indicators (KPIs). The achievement of the risk management function's performance in 2025 was measured through the implementation of the Risk Management Improvement Roadmap, which achieved 102% of its target.

Pernyataan Kecukupan Sistem Manajemen Risiko
Statement on the Adequacy of the Risk Management System

Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko melalui Komite Nominasi dan Manajemen Risiko dengan melakukan telaah atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direksi dibantu oleh Pimpinan Manajemen Risiko PLN BBN sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah melakukan konsolidasi *risk treatment, continuous improvement* pada setiap aktivitas bisnis dan upaya preventif sehingga hasil penilaian risiko tersebut menunjukan sangat baik dengan tidak terjadinya *loss event* pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut yang menunjukan level baik, sehingga hal tersebut menunjukan penerapan manajemen risiko di PLN BBN selama tahun 2025 telah memadai.

The Board of Commissioners plays an active role in evaluating the risk management system through the Nomination and Risk Management Committee Committee by reviewing evaluation results prepared by the Board of Directors with assistance from the Head of Risk Management of PLN BBN, who is responsible for the effectiveness of the risk management system. One form of evaluation of the risk management policy is the consolidation of risk treatment measures, continuous improvement across business activities, and preventive efforts. The risk assessment results demonstrated a very good outcome, as no loss events occurred during 2025.

Based on these risk assessment results, which indicate a good level of risk management performance, the implementation of risk management at PLN BBN throughout 2025 is considered adequate.

Permasalahan Hukum
Legal Matters

Dalam menjalankan usahanya, PLN BBN senantiasa berkomitmen mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menyadari bahwa penyelenggaraan usahanya akan selalu terekspos dengan benturan dengan berbagai pihak, dan apabila hal itu terjadi, Perusahaan memiliki komitmen untuk mencari penyelesaian yang terbaik atas setiap kasus sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Perusahaan dan Entitas Anak

Selama tahun 2025 tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Perusahaan.

Dampak Masalah Hukum bagi Perusahaan

Selama tahun 2025 tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Perusahaan.

Perkara Hukum Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang sedang menjabat baik perdata maupun pidana.

Perkara Hukum Anak Perusahaan

Pada tahun 2025, PLN BBN tidak memiliki Anak Perusahaan, sehingga tidak ada informasi terkait perkara hukum anak perusahaan.

In conducting its business activities, PLN BBN remains committed to complying with all applicable laws and regulations. The Board of Directors and the Board of Commissioners consistently adhere to prevailing legal and regulatory requirements.

The Company recognizes that its business operations may from time to time involve disputes with various parties. Should such situations arise, the Company is committed to pursuing the best possible resolution for each case in accordance with applicable laws and regulations.

Significant Legal Cases Faced by the Company and Its Subsidiaries

During 2025, there were no legal cases involving the Company.

Impact of Legal Issues on the Company

During 2025, there were no legal cases involving the Company.

Legal Cases Involving Incumbent Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

Throughout 2025, there were no material legal cases, whether civil or criminal, involving incumbent members of the Company's Board of Commissioners or Board of Directors.

Legal Cases Involving Subsidiaries

In 2025, PLN BBN did not have any subsidiaries; therefore, there was no information regarding legal cases involving subsidiaries.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data



PLN BBN berupaya memberikan kemudahan akses informasi dan data Perusahaan kepada *stakeholders* sebagai wujud implementasi prinsip-prinsip GCG khususnya terkait aspek transparansi.

PLN BBN strives to provide stakeholders with easy access to Company information and data as part of its implementation of GCG principles, particularly the principle of transparency.

Muatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Peraturan Direksi bertujuan untuk menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan informasi publik dan dokumentasi di Perusahaan. Perusahaan telah menetapkan Bidang Tata kelola dan Kesekretariatan sebagai penanggung jawab terkait implementasi pengendalian informasi Perusahaan.

Penyediaan informasi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dapat lebih lanjut diakses melalui banyak media Informasi dan Komunikasi yang dimiliki sebagai berikut:

Website Perusahaan

Perusahaan menyediakan akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan melalui https://plnbatubaraniaga.id/id yang memuat berbagai informasi mengenai Perusahaan yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Situs *website* PLN BBN secara berkala terus diperbaharui. Melalui situs ini, PLN BBN menyajikan berbagai informasi yang berkaitan informasi penting Perusahaan.

PLN BBN menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan informasi penting perusahaan selain Laporan Tahunan, diantaranya:

- **Tentang Kami**: Tentang Perusahaan, Produk, Visi, Misi & Moto, Tata Nilai Akhlak, Inisiatif Strategis, Lingkungan Bisnis, Sasaran Mutu, Komisaris, Direksi
- **Aktivitas Bisnis**: Memproduksi Batubara ke PLTU PLN & IPP, Penjualan Batubara ke Industri Non Kelistrikan, Mengelola Pelabuhan Muat/Bongkar dan Sarana Penunjangnya, Mengelola Transportasi & Coal Terminal, Menyediakan Biomassa Untuk Kebutuhan *Co-Firing*, Mengelola *Coal Processing Plant*.

The provisions governing Public Information Disclosure in the Board of Directors Regulation are intended to serve as guidelines for all parties dealing with public information and documentation within the Company. The Company has designated the Governance and Corporate Secretariat Function as the party responsible for implementing Company information control.

Information for Shareholders and stakeholders can be accessed through the following Information and Communication media:

Company Website

The Company provides information access to all stakeholders through https://plnbatubaraniaga.id/id, which contains various Company-related information available in Indonesian and English.

The PLN BBN website is updated periodically. Through this website, PLN BBN presents a variety of information related to important Company matters.

In addition to the Annual Report, PLN BBN provides the following information:

- **About Us:** Company Profile, Products, Vision, Mission & Motto, AKHLAK Core Values, Strategic Initiatives, Business Environment, Quality Objectives, Board of Commissioners, Board of Directors
- **Business Activities:** Supplying Coal to PLN and IPP Power Plants, Coal Sales to Non-Electricity Industries, Managing Loading/Unloading Ports and Supporting Facilities, Managing Transportation and Coal Terminals, Supplying Biomass for Co-Firing Requirements, Managing Coal Processing Plants.

- **Hubungan Investor**: Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Statistik, Laporan Keberlanjutan, Susunan Pemegang Saham, Peta Sumber Tambang, Rencana Penjualan, *Health Safety Security Environment* (HSSE), *Request For Meeting*
- **Tata Kelola**: Pedoman Perilaku, Pedoman Gratifikasi, Manajemen Risiko, Kelompok Usaha PT PLN Batubara Niaga, Kebijakan Pelatihan SDM, WBS, *Board Manual*, Anggaran Dasar
- **Pengadaan**
- **Karir**
- **Kontak**
- **FAQ**

- **Investor Relations:** Annual Reports, Financial Statements, Statistical Reports, Sustainability Reports, Shareholder Composition, Mining Source Maps, Sales Plans, Health Safety Security Environment (HSSE), Request for Meeting
- **Governance:** Code of Conduct, Gratification Guidelines, Risk Management, PT PLN Batubara Niaga Business Group, Human Resources Training Policy, WBS, Board Manual, Articles of Association
- **Procurement**
- **Careers**
- **Contact**
- **FAQ**

SOSIAL MEDIA PERUSAHAAN | COMPANY SOCIAL MEDIA

INSTAGRAM : @plnbatubaraniaga

Forum Komunikasi Internal

PLN BBN menyediakan saluran komunikasi sebagai sarana diskusi antara pekerja dengan manajemen yaitu melalui:

1. Kegiatan *Cascading* KPI Tahun 2025
2. *Board of Director Talk*

Internal Communication Forum

PLN BBN provides communication channels as a discussion forum between Employees and management through:

1. 2025 KPI Cascading Activities
2. Board of Director Talk



Kegiatan *Cascading* KPI Tahun 2025
2025 KPI Cascading Activities



Board of Director Talk

Kode Etik Perusahaan

Code of Conduct



PLN BBN berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Kode Etik Perusahaan. Kode Etik Perusahaan telah diatur dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis *(Code of Conduct/ CoC)* disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 12 November 2025.

PLN BBN is committed to implementing GCG consistently, one of which is through the establishment of a Company Code of Conduct. The Company's Code of Conduct (CoC) was approved through a Joint Resolution of the Board of Commissioners and the Board of Directors on November 12, 2025.

Pedoman *Code of Conduct*/CoC ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan standar perilaku terbaik bagi Insan Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya budaya Perusahaan yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.
3. Menjabarkan nilai - nilai perusahaan sebagai landasan perilaku yang harus diikuti oleh seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehari - hari.
4. Mendorong perbaikan pengelolaan Perusahaan dan pengembangan nilai yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perusahaan.

The Code of Conduct (CoC) has been prepared with the following objectives:

1. To develop the highest standards of conduct for Company Personnel based on GCG principles, thereby fostering the desired corporate culture and, either directly or indirectly, increasing Company value.
2. To create a healthy and comfortable working environment within the Company and minimize opportunities for misconduct.
3. To define the Company's values as the behavioral foundation that must be followed by all Company Personnel in carrying out their daily work activities.
4. To encourage improvements in Company management and value creation, which in turn enhance the Company's reputation.

Muatan Kode Etik

Contents of the Code of Conduct

Pokok-pokok kode etik yang diatur dalam *Code of Conduct*/ CoC PLN BBN antara lain sebagai berikut :

The principal provisions regulated in PLN BBN's Code of Conduct (CoC) include:

Bab/Chapter I	Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan	Vision, Mission, and Corporate Values
Bab/Chapter II	Kepatuhan Persaingan Usaha	Compliance with Business Competition Regulations
Bab/Chapter III	Benturan Kepentingan	Conflict of Interest
Bab/Chapter IV	Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi (Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi)	Giving and Receiving Gratification (Gifts, Hospitality, Entertainment, and Donations)
Bab/Chapter V	Kepedulian Terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan Hidup	Commitment to Occupational Safety, Health, Security, and Environmental Protection

Bab/Chapter VI	Kesempatan Yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi	Equal Employment and Promotion Opportunities
Bab/Chapter VII	Integritas Laporan Keuangan	Integrity of Financial Statements
Bab/Chapter VIII	Penghormatan Kepada Hak Intelektual	Respect for Intellectual Property Rights
Bab/Chapter IX	Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*	Protection of Company Information and Intangible Assets
Bab/Chapter X	*Whistleblowing System*	Whistle Blowing System
Bab/Chapter XI	Perlindungan Harta Perusahaan	Protection of Company Assets
Bab/Chapter XII	Kegiatan Politik dan Sosial	Political and Social Activities
Bab/Chapter XIII	Etika Terkait Dengan *Stakeholders*	Stakeholders Ethics
Bab/Chapter XIV	Mekanisme Penegakkan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Termasuk Pelaporan Atas Pelanggaran	Enforcement Mechanism for the Code of Conduct and Business Ethics, Including Reporting Violations
Bab/Chapter XV	Pelanggaran dan Sanksi, Komitmen Insan PT PLN Batubara Niaga	Violations and Sanctions, Commitment of PT PLN Batubara Niaga Personnel

Keberadaan CoC
Existence of the CoC

CoC disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh Insan PLN BBN baik Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Karyawan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan CoC di lingkungan Perusahaan. Para Manager, Direktur bertanggung jawab atas penerapan CoC di lingkungan unit kerja masing - masing. Selain itu, CoC ini juga berlaku bagi pihak eksternal yang bertindak untuk atas dan nama Perusahaan serta mitra kerja yang bekerjasama dengan Perusahaan.

The CoC serves as a guideline for all PLN BBN Personnel, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, Supporting Organs of the Board of Commissioners, and Employees. The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for implementing the CoC throughout the Company. Managers and Directors are responsible for implementing the CoC within their respective work units. In addition, the CoC also applies to external parties acting on behalf of the Company and business partners working with the Company.

Penyebaran dan Upaya Penegakan CoC
Dissemination and Enforcement of the CoC

PLN BBN telah mengkomunikasikan dan mensosialisasikan CoC kepada seluruh insan PLN BBN dan pihak eksternal perusahaan. Sosialisasi CoC dilakukan oleh Bidang Hukum & Kepatuhan. Sosialisasi CoC dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran akan etika insan PLN BBN. Sosialisasi CoC dilakukan pada tanggal 14 November 2025.

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal - hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi CoC kepada seluruh Insan Perusahaan dan pihak eksternal Perusahaan serta melakukan penyegaran secara berkala.
2. Setiap Pekerja dan *stakeholders* dapat mengakses CoC melalui *website* PLN BBN.
3. Setiap Pekerja harus menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan CoC.

PLN BBN has communicated and disseminated the CoC to all PLN BBN Personnel and external parties. The Legal & Compliance Function conducted the CoC socialization program to strengthen awareness of ethical conduct among PLN BBN Personnel. The socialization was conducted on November 14, 2025.

The Company is also committed to implementing effective and comprehensive socialization through the following measures:

1. Conducting CoC socialization for all Company Personnel and external parties and providing periodic refreshers.
2. Ensuring that Employees and stakeholders can access the CoC through the PLN BBN website.
3. Requiring every Employee to sign a statement of commitment to comply with and implement the CoC.

4. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada insan Perusahaan baik pada masa orientasi maupun masa kerja.
5. Mengkaji secara berkala terhadap CoC dalam rangka mengembangkan CoC dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih Lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perusahaan.

Sebagai wujud komitmen PLN BBN akan implementasi penegakan CoC, seluruh insan PLN BBN telah melakukan penandatanganan terkait pernyataan kepatuhan terhadap CoC. Dari total 48 Pekerja, 48 Pekerja telah menandatangani Kepatuhan terhadap CoC. Termasuk Seluruh (100%) anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris telah melakukan penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap CoC.

4. Evaluating the level of understanding and achievement of Company Personnel during both orientation and employment periods.
5. Reviewing the CoC periodically to support its development and, where necessary, elaborating it further through Company policies and regulations.

As evidence of PLN BBN's commitment to enforcing the CoC, all PLN BBN Personnel have signed statements of compliance with the CoC. Of the total 48 Employees, 48 Employees have signed the CoC compliance statement. In addition, all members (100%) of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners have signed statements of compliance with the CoC.

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan
Statement on Corporate Culture

Penjabaran tentang Budaya Perusahaan telah diuraikan pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

A description of the Company's Corporate Culture is presented in the Company Profile section of this Annual Report.

Pelaporan, Penanganan dan Penegakan Pelanggaran
Reporting, Handling, and Enforcement of Violations

Whistleblowing system (WBS) diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan PLN BBN dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan serta dengan niat baik.

The Whistleblowing System (WBS) was introduced to strengthen implementation efforts by providing all PLN BBN Personnel and other stakeholders with a mechanism to report indications of violations of ethical values based on accountable evidence and submitted in good faith.

WBS adalah sebuah program nyata dari manajemen PLN BBN beserta seluruh grup perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.

The WBS is a tangible initiative of PLN BBN management and all companies within the group to establish a workplace free from fraud, corruption, and extortion.

PLN BBN menyediakan aplikasi/sistem untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan PLN BBN. Melalui sistem ini, PLN BBN dapat menjadi Perusahaan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional. Bagi insan PLN BBN atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

PLN BBN provides an application/system for reporting fraud, corruption, and extortion for all stakeholders who possess relevant information and wish to report suspected violations committed by PLN BBN Personnel. Through this system, PLN BBN aims to become a better Company with stronger competitiveness at both national and international levels. Individuals who submit reports are provided protection, including confidentiality of identity and protection from possible retaliation by the reported party.

Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah sistem yang digunakan untuk menerima, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

The Whistleblowing System is a mechanism used to receive, process, follow up, and report information submitted by whistleblowers regarding violations occurring within the Company.

Tujuan dari WBS adalah sebagai pedoman dalam mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan penyelesaian pengaduan atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.

The objective of the WBS is to provide guidance that facilitates and accelerates the process of resolving complaints concerning alleged violations committed by reported parties.

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah semua perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perusahaan, kode etik, melawan hukum dan segala perbuatan di luar ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian secara materil maupun penurunan citra Perusahaan.

Reportable violations include any acts that deviate from or conflict with Company regulations, the Code of Ethics, applicable laws, and any actions outside established provisions that may result in material losses or damage to the Company's reputation.

Kategori pelanggaran meliputi:
- Indikasi Penipuan
- Indikasi Tindakan Curang
- Indikasi Penggelapan
- Indikasi Benturan kepentingan
- Indikasi Penyuapan
- Indikasi Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan
- Indikasi Pencurian
- Indikasi Korupsi
- Indikasi Pemerasan

Categories of violations include:
- Indications of Fraud
- Indications of Dishonest Conduct
- Indications of Embezzlement
- Indications of Conflict of Interest
- Indications of Bribery
- Indications of Violations of Company Policies and Regulations
- Indications of Theft
- Indications of Corruption
- Indications of Extortion

Dalam implementasinya, *stakeholders* Perusahaan dapat melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran kode etik melalui saluran *Whistleblowing System* (WBS). Direksi membentuk dan mengembangkan pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) yang salah satu tanggung jawabnya adalah menerima dan menangani laporan adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran CoC.

In its implementation, Company stakeholders may report suspected violations of the Code of Ethics through the Whistleblowing System (WBS) channel. The Board of Directors establishes and develops the management of the WBS, one of whose responsibilities is to receive and handle reports of actual or suspected violations of the CoC.

Dalam menyampaikan adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran, pelapor disarankan untuk memberikan informasi mengenai nama, nomor Pekerja (pelapor tidak diwajibkan untuk memberikan nama dan/atau nomor Pekerja), hubungan dengan terlapor, nomor telepon atau email yang dapat dihubungi serta bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan.

When submitting reports of actual or suspected violations, whistleblowers are encouraged to provide information regarding their name, employee number (although whistleblowers are not required to disclose their name and/or employee number), relationship with the reported party, contact telephone number or email address, and preliminary supporting evidence to facilitate and expedite the follow-up process.

Insan PLN BBN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap CoC akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Jenis sanksi dan mekanisme pemberian sanksi mengacu kepada kebijakan kepegawaian yang berlaku di Perusahaan.

PLN BBN Personnel proven to have violated the CoC will be subject to sanctions in accordance with Company policies. The types of sanctions and sanctioning mechanisms refer to the employment policies applicable within the Company.

Jumlah Pelanggaran CoC Beserta Sanksi yang Diberikan pada Tahun Buku Terakhir

Number of CoC Violations and Sanctions Imposed During the Most Recent Fiscal Year

Selama tahun 2025, tidak terdapat laporan pelanggaran etika yang masuk ke PT PLN Batubara Niaga.

Throughout 2025, PT PLN Batubara Niaga did not receive any reports of ethical violations.

Akuntan Publik
Public Accountant



Dalam Tata Kelola Perusahaan *(Good Corporate Governance)* terkait pelaksanaan audit eksternal, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan kegiatan audit dan memberikan opini atas laporan keuangan yang telah disusun oleh Direksi Perusahaan.

As part of Good Corporate Governance (GCG) practices related to the implementation of external audits, the Company appoints a Public Accounting Firm (KAP) to conduct audit activities and provide an opinion on the financial statements prepared by the Company's Board of Directors.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2025, dimana salah satu agendanya adalah penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2025. Pemegang Saham PLN BBN memutuskan memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025 berikut besaran nilai jasanya.

Adapun Akuntan Publik Perusahaan periode 2021 sampai dengan 2025 antara lain sebagai berikut:

At the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024 held on June 30, 2025, one of the agenda items was the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for Fiscal Year 2025. PLN BBN's Shareholders resolved to grant authority and delegate power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, including determining the amount of its professional fees.

The Company's Public Accountants for the 2021–2025 period are as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jasa yang Diberikan Services Provided	Alamat Address	Biaya Jasa (Rp) Service Fee (Rp)
2025	Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Jasa Audit & Assurance (Audit laporan keuangan tahunan) Audit & Assurance Services (Annual Financial Statement Audit)	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920	Biaya Audit ditanggung dan dibayarkan oleh Pemegang Saham yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI) Audit costs are borne and paid by the shareholder, PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI)
2024	Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Jasa Audit & Assurance (Audit laporan keuangan tahunan) Audit & Assurance Services (Annual Financial Statement Audit)	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920	
2023	Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Jasa Audit & Assurance (Audit laporan keuangan tahunan) Audit & Assurance Services (Annual Financial Statement Audit)	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920	

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jasa yang Diberikan Services Provided	Alamat Address	Biaya Jasa (Rp) Service Fee (Rp)
2022	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Jasa Audit & Assurance (Audit laporan keuangan tahunan) Audit & Assurance Services (Annual Financial Statement Audit)	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920	-
2021	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Jasa Audit & Assurance (Audit laporan keuangan tahunan) Audit & Assurance Services (Annual Financial Statement Audit)	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920	-

Jasa dan Fee Audit Lainnya
Other Audit Services and Fees

Selama pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan, Auditor tidak memberikan jasa lain kepada Perusahaan selain jasa audit keuangan, sehingga sangat independen dan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit telah dilaksanakan berdasarkan rencana, dan pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

During the audit of the Financial Statements, the Auditor did not provide any services to the Company other than financial audit services. As a result, the Auditor maintained its independence and no conflict of interest arose during the audit process. The Auditor conducted the audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. The audit was performed based on an audit plan and included testing of evidence supporting the amounts and disclosures presented in the Financial Statements.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy



PLN BBN berkomitmen untuk menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang berintegritas, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan standar ISO 37001:2016.

PLN BBN is committed to creating and maintaining a work environment characterized by integrity, transparency, and freedom from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). This commitment is demonstrated through the implementation of Good Corporate Governance in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as the implementation of an Anti-Bribery Management System in accordance with ISO 37001:2016.

Dalam rangka pencegahan korupsi dan gratifikasi, PLN BBN telah menetapkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan pedoman, antara lain Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta Pedoman Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kebijakan tersebut menjadi landasan dalam mengendalikan risiko penyuapan dan memastikan kepatuhan seluruh Insan PLN BBN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

To prevent corruption and gratification practices, PLN BBN has established and implemented various policies and guidelines, including the Gratification Control Policy, the Anti-Bribery Management System Manual, and the State Officials Wealth Report (LHKPN) Reporting Guidelines. These policies serve as the foundation for managing bribery risks and ensuring compliance with applicable laws and regulations by all PLN BBN personnel.

Program Pencegahan Korupsi
Corruption Prevention Programs

PLN BBN senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah terselenggara secara Bersih, Bebas dari Korupsi dan Gratifikasi. Untuk itu, PLN BBN berkomitmen dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dengan memperhatikan serta menerapkan Kebijakan Anti Korupsi melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang di sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi ISO International.

Berikut serangkaian program Perusahaan dalam rangka mencegah dan memberantas praktek-praktek korupsi:

PLN BBN continuously ensures that Company operations are conducted in a clean manner and remain free from corruption and gratification practices. Accordingly, PLN BBN is committed to conducting its business activities in accordance with the Anti-Corruption Policy through the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS), certified by an internationally recognized ISO certification body.

The Company's anti-corruption initiatives include:

1. Kampanye anti Korupsi melalui Penerbitan Surat Edaran Direksi Perusahaan terkait.
2. Sosialisasi SMAP kepada seluruh pekerja PLN BBN.
3. Penyampaian SMAP kepada vendor melalui akses informasi Perusahaan seperti *Website*.
4. Penyampaian pakta integritas anti penyuapan kepada setiap vendor/mitra yang akan mengajukan kerjasama.
5. Mencantumkan sebagai pasal dalam perjanjian kerjasama dengan mitra/vendor terkait SMAP, CoC dan nilai-nilai perusahaan.

1. Anti-corruption campaigns through the issuance of relevant Board of Directors Circular Letters.
2. ABMS socialization programs for all PLN BBN employees.
3. Dissemination of ABMS information to vendors through Company information channels, including the website.
4. Distribution of anti-bribery integrity pacts to vendors and business partners seeking cooperation with the Company.
5. Inclusion of ABMS, Code of Conduct, and Company values provisions in cooperation agreements with vendors and business partners.

Sosialisasi dan Pelatihan Anti Korupsi
Anti-Corruption Socialization and Training

Pada bulan Desember 2025, PLN BBN telah melakukan sosialisasi internal kepada seluruh pegawai PLN BBN. Sosialisasi SMAP dan Sistem Manajemen Kepatuhan tersebut dilakukan secara offline dan dihadiri oleh seluruh Direksi dan pegawai PLN BBN. Selain itu PLN BBN juga telah melakukan sosialisasi eksternal kepada para mitra melalui surat yang berisikan terkait himbauan dan materi terkait SMAP dan kepatuhan di lingkungan PLN BBN. PLN BBN juga telah melakukan *awareness* semester II tahun 2025 melalui aplikasi COS yang telah dikerjakan oleh seluruh pegawai PLN BBN.

In December 2025, PLN BBN conducted internal socialization programs for all employees. The ABMS and Compliance Management System socialization sessions were conducted offline and attended by all members of the Board of Directors and employees. PLN BBN also conducted external outreach to business partners through formal communications containing information and guidance regarding ABMS and compliance practices within PLN BBN. In addition, PLN BBN carried out its second-semester 2025 compliance awareness program through the COS application, which was completed by all employees.

Laporan Insiden Korupsi Tahun 2025
Corruption Incident Report in 2025

Hingga akhir 31 Desember 2025, tidak terdapat insiden korupsi yang dilakukan oleh Insan Perusahaan sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

As of December 31, 2025, there were no corruption incidents involving Company personnel, as shown below:

Jenis Insiden Type of Incident		Jumlah insiden Number of Incident
Insiden korupsi	Corruption incidents	0
Insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi	Confirmed corruption incidents resulting in employee termination or sanctions	0
Insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi	Confirmed corruption incidents resulting in termination or non-renewal of contracts with business partners	0

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control Policy

PLN BBN telah menyusun kebijakan gratifikasi sebagai komitmen Perusahaan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih. Kebijakan Gratifikasi PLN BBN telah disahkan oleh Komisaris dan Direksi melalui Keputusan Bersama Nomor 13.SK/XII/DIRPLNBBN/2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di PT PLN Batubara Niaga.

PLN BBN has established a Gratification Control Policy as part of its commitment to fostering a clean and ethical work environment. The policy was approved by the Board of Commissioners and Board of Directors through Joint Decree Number 13.SK/XII/DIRPLNBBN/2020 concerning Gratification Control at PT PLN Batubara Niaga.

Ruang Lingkup Kebijakan Gratifikasi:
1. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi
2. Jenis Gratifikasi
3. Pemanfaatan dan Pengelolaan Gratifikasi
4. Implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi
5. Pelaporan dan Sanksi
6. Perlindungan Saksi/Pelapor

Scope of the Gratification Control Policy covers:
1. Fundamental Principles of Gratification Control
2. Types of Gratification
3. Utilization and Management of Gratification
4. Implementation of the Gratification Control Guidelines
5. Reporting and Sanctions
6. Witness and Whistleblower Protection

Media Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan gratifikasi PLN BBN dapat dilakukan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau melalui sarana sistem pelaporan gratifikasi yaitu :
- Website : https://cos.pln.co.id
- Telepon, SMS, Whatsapp ke nomor resmi Pengaduan Pelanggaran di : 08119861901
- Email : wbpln@pln.co.id; dan/atau
- Surat kepada :
  Executive Vice President Kepatuhan PT PLN (Persero)
  Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M – I
  No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

Gratification Reporting Channels

Gratification reports may be submitted through the Gratification Control Unit (UPG) or through the following reporting channels:
- Website : https://cos.pln.co.id
- Call, text, or WhatsApp the official Violation Complaints number at : 08119861901
- Email : wbpln@pln.co.id; and/or
- Letter to :
  Executive Vice President of Compliance, PT PLN (Persero)
  Head Office, Jalan Trunojoyo, Blok M-I
  No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen terhadap penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, PLN BBN telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa seluruh insan perusahaan, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pedoman tersebut. PLN BBN menyadari bahwa pengendalian gratifikasi yang efektif hanya dapat tercapai jika seluruh elemen dalam perusahaan memiliki pemahaman yang sama dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan konsisten. Langkah-langkah yang telah diambil PLN BBN untuk sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi antara lain: Sosialisasi langsung ke Insan PLN BBN, kampanye melalui poster dan video serta melalui *website* Perusahaan.

Gratification Control Socialization

To build awareness and commitment to the implementation of the Gratification Control Guidelines, PLN BBN has taken proactive measures to ensure that all Company personnel, including the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees, understand and apply the principles contained in the guidelines. PLN BBN recognizes that effective gratification control can only be achieved when all elements of the Company share a common understanding and consistently implement the policy. Socialization activities have included direct outreach to PLN BBN personnel, campaigns through posters and videos, and dissemination through the Company's website.

Laporan Pengendalian Gratifikasi 2025
Gratification Control Report for 2025

Selama tahun 2025, PLN BBN tidak menerima laporan gratifikasi dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2025, PLN BBN received 0 gratification reports, as detailed below:

Jenis Laporan Gratifikasi Type of Report		Jumlah Laporan Number of Report	Status Laporan Report Status
Penolakan	Refusal Reports	0	-
Penerimaan	**Received**		
Suap	Bribery	0	-
Makanan	Food	0	-
Hadiah	Gift	0	-

Jenis Laporan Gratifikasi Type of Report		Jumlah Laporan Number of Report	Status Laporan Report Status
Pemberian	**Provided**		
Suap	Bribery	0	-
Makanan	Food	0	-
Hadiah	Gift	0	-
Jumlah Laporan Gratifikasi	Total Gratification Reports	0	-

Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials Wealth Report (LHKPN) Guidelines

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan bentuk komitmen Perusahaan dalam pencegahan korupsi dan komitmen Perusahaan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan LHKPN PLN BBN diatur dalam Edaran Direksi PT PLN Batubara Niaga Nomor 0011.E/II/PLNBBN/2026 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan PT PLN Batubara Niaga.

Ruang lingkup Kebijakan LHKPN PLN BBN mencakup:
1. Wajib LHKPN
2. Penyampaian LHKPN
3. Pengumuman LHKPN
4. Admin Pengelola LHKPN
5. Sanksi

Selain itu sebagai komitmen PLN BBN terhadap anti korupsi, Perusahaan telah menunjuk bidang Hukum & Kepatuhan sebagai pihak yang mengelola LHKPN.

Sosialisasi dan Laporan LHKPN

Pada tahun 2025, Tim pengelola LHKPN telah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada Pejabat terkait melalui pendistribusian dokumen dan sosialisasi formal yaitu *e-lhkpn online* sebagai sarana konsultasi dalam pengisian *e-lhkpn*.

Pada tahun 2025, Pejabat PLN BBN yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 16 orang Pejabat dari total Jumlah Wajib Lapor LHKPN sebanyak 16 orang Pejabat dengan rincian sebagai berikut:

The management of State Officials Wealth Reports (LHKPN) reflects the Company's commitment to corruption prevention and the implementation of Good Corporate Governance. The LHKPN Policy of PLN BBN is governed by the Board of Directors Circular Letter of PT PLN Batubara Niaga Number 0011.E/II/PLNBBN/2026 concerning the Guidelines for State Officials Wealth Reporting within PT PLN Batubara Niaga.

Scope of the LHKPN Policy covers:
1. Mandatory LHKPN Reporting
2. LHKPN Submission Procedures
3. LHKPN Disclosure
4. LHKPN Administration
5. Sanctions

As part of its anti-corruption commitment, PLN BBN has designated the Legal and Compliance Division as the unit responsible for managing LHKPN implementation.

LHKPN Socialization and Reporting

In 2025, the LHKPN Management Team conducted socialization and technical guidance programs for relevant officials through document distribution and formal socialization activities, including the e-LHKPN online platform as a consultation channel for completing e-LHKPN reports.

In 2025, 16 officials were required to submit LHKPN reports, and 16 officials submitted their reports, with reporting dates recorded on December 31, 2025.

Nama Name	Jabatan Position		Status Laporan Reporting Date
Tri Joko S	Plt. Komisaris Utama	Act. President Commissioner	2025-12-31
Noor Adi Baroto	Komisaris Independen	Independent Commissioner	2025-12-31
Rolly	Plt. Direktur Utama	Act. President Director	2025-12-31
Rahmat Dian Amir	Plt. Direktur Niaga dan Operasi	Act. Director of Commerce and Operations	2025-12-31
Joni Arifin	Plt. Direktur Keuangan dan Human Capital	Act. Director of Finance and Human Capital	2025-12-31
Aji Nugroho	Manager Hukum Dan Kepatuhan	Manager of Legal and Compliance	2025-12-31
Dariel Pelawi	Manager Keuangan, IT, Risiko, dan Kinerja	Manager of Finance, IT, Risk, and Performance	2025-12-31
Rika Nan Dini Kustia Mulyana	Manager Human Capital, Administrasi, dan Umum	Manager of Human Capital, Administration, and General Affairs	2025-12-31
Juliawan Dwi Prasetyo	Assistant Manager Kemitraan dan Pengendalian Kontrak	Assistant Manager of Partnership and Contract Control	2025-12-31
Rully Indra	Manager Operasi	Manager of Operations	2025-12-31
A.A. Ayu Triutami	Assistant Manager Keuangan	Assistant Manager of Finance	2025-12-31
Catur Aji Nugroho	Assistant Manager Pengendalian Operasi dan Quality Control	Assistant Manager of Operations Control and Quality Control	2025-12-31
Febrianto Mangopo	Manager Perencanaan Korporat Dan Pengembangan Bisnis	Manager of Corporate Planning and Business Development	2025-12-31
Yahya Purnomo	Assistant Manager It, Risiko, dan Evaluasi Kinerja	Assistant Manager of IT, Risk, and Performance Evaluation	2025-12-31
Rio Octogi Siregar	Manager Audit Internal	Manager of Internal Audit	2025-12-31
Raditya Aji Habsoro	Manager Tata Kelola dan Kesekretariatan	Manager of Governance and Corporate Secretariat	2025-12-31

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System



Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*, selanjutnya disebut WBS, merupakan mekanisme tata kelola yang disediakan PLN BBN untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. WBS mencakup dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan internal, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The Whistleblowing System (WBS) is a governance mechanism established by PLN BBN to receive, manage, and follow up on reports concerning alleged violations occurring within the Company. The WBS covers allegations related to violations of laws and regulations, the code of ethics, internal policies, and the principles of Good Corporate Governance. good faith in accordance with applicable regulations.

WBS dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal PLN BBN untuk menyampaikan laporan apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PLN BBN. PLN BBN menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta memberikan perlindungan kepada pelapor yang beritikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PLN BBN telah memiliki Pedoman sistem pelaporan terhadap dugaan kasus pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Batubara Niaga nomor: 008.P/DIRPLNBBN/2024 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN Batubara Niaga.

The WBS may be utilized by both internal and external parties of PLN BBN to submit reports when indications of violations committed by PLN BBN personnel are identified. PLN BBN guarantees the confidentiality of whistleblowers' identities and provides protection to whistleblowers acting in good faith in accordance with applicable regulations.

PLN BBN has established guidelines for reporting alleged violations through the Board of Directors Regulation of PT PLN Batubara Niaga Number 008.P/DIRPLNBBN/2024 concerning the Whistleblowing System within PT PLN Batubara Niaga.

Ruang Lingkup Kebijakan WBS

Scope of the WBS Policy

Ruang lingkup kebijakan WBS diantaranya mengatur antara lain terkait Pengaduan, Sarana Pengaduan, Pengelolan WBS, Tindak Lanjut Pengaduan, Perlindungan dan Kerahasiaan Identitas Pelapor dan/atau Sanksi, Pemberian Penghargaan, Laporan Pelaksanaan WBS, Kerahasiaan, Sanksi.

Kebijakan WBS telah diungkapkan dalam website Perusahaan di https://plnbatubaraniaga.id/id/page/whistleblowing-system-wbs

The WBS Policy governs, among others, reporting procedures, reporting channels, WBS management, complaint handling and follow-up, protection and confidentiality of whistleblowers' identities, sanctions, rewards, implementation reporting, and confidentiality provisions.

The WBS Policy is publicly accessible through the Company's website at https://plnbatubaraniaga.id/id/page/whistleblowing-system-wbs

Penyampaian dan Media Pelaporan Pelanggaran
Reporting Submission and Channels

Pelapor dapat menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan kepada Tim Pengelola WBS melalui media :

- *Website*: https://cos.pln.co.id
- Telepon, *Short Message Service* (SMS) atau *Whatsapp* ke nomor resmi Pengaduan Pelanggaran di 08119861901
- *Email* ke wbpln@pln.co.id; dan/atau
- Surat kepada Executive Vice President Kepatuhan PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M – I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

Reports concerning alleged violations committed by Company personnel may be submitted in writing to the WBS Management Team through the following channels:

- Website: https://cos.pln.co.id
- Telephone, SMS, or WhatsApp via the official reporting hotline: +62 811 9861 901
- Email: wbpln@pln.co.id
- Mail addressed to the Executive Vice President of Compliance of PT PLN (Persero), Head Office, Jalan Trunojoyo Blok M-I No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

Perlindungan Bagi Pelapor
Whistleblower Protection

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, Perusahaan menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor dan terlapor berupa:

1. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan.
2. Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
3. Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.
4. Perusahaan juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.

In implementing the reporting mechanism for alleged violations, the Company has established the following protection measures for whistleblowers and reported parties:

1. The Company is obligated to protect whistleblowers.
2. Whistleblower protection is intended to encourage individuals to report violations without fear of retaliation.
3. Protection includes confidentiality of the whistleblower's identity and report contents, as well as safeguards against unfair treatment such as unjust dismissal, demotion, intimidation, harassment, discrimination in any form, and adverse records in personal files.
4. The Company also guarantees the confidentiality of the reported party's identity until the alleged violation has been proven.

Pihak Pengelola dan Penanganan Pengaduan
WBS Management and Complaint Handling

Pihak Pengelola dan Penanganan Pengaduan WBS PLN BBN dilaksanakan oleh Manager Hukum dan Kepatuhan dan/atau oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi pengelolaan WBS.

Tugas dan Tanggungjawab Tim

1. Menerima Pengaduan dan melakukan evaluasi Pengaduan yang termasuk tindakan *Fraud* dan/atau Pelanggaran atau tidak termasuk *Fraud* dan/atau Pelanggaran.
2. Pengaduan yang tidak termasuk kategori *Fraud* dan/atau Pelanggaran akan disampaikan kepada Satuan Kerja terkait dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

The management and handling of WBS reports within PLN BBN are carried out by the Manager of Legal and Compliance and/or competent third-party service providers specializing in WBS management.

Duties and Responsibilities of the WBS Team

1. Receive and evaluate reports to determine whether they constitute fraud and/or violations.
2. Reports that do not fall under the category of fraud and/or violations are forwarded to the relevant work unit for follow-up according to its authority.

3. Laporan Pengaduan yang termasuk kategori *Fraud* dan/atau Pelanggaran dilakukan analisa kecukupan pemenuhan Indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran serta Bukti Permulaan yang disampaikan oleh Pelapor.
4. Dalam hal belum dipenuhinya Indikasi *Fraud* dan.atau Pelanggaran dan Bukti Permulaan yang disampaikan Pelapor, Divisi Bagian Hukum, Kinerja dan Risiko dapat melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memenuhi indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran termasuk mencari informasi tambahan atau Bukti permulaan sesuai dengan kewenangannya.

Selaras dengan Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran, mekanisme penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Direksi dan Pegawai wajib berperan aktif melakukan Pengaduan apabila terdapat indikasi adanya *Fraud* dan/atau Pelanggaran.
2. Perusahaan wajib menerima dan menindaklanjuti Pengaduan dari Pelapor yang telah memenuhi Indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran.
3. Pengaduan yang memenuhi Indikasi *Fraud* dan/atau Pelanggaran harus dilengkapi dengan Bukti Permulaan guna menghindari laporan palsu atau fitnah.
4. Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Badan Hukum atau Lembaga, dapat dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
   a. Akta pendirian Badan Hukum atau Lembaga beserta perubahan terakhir; dan
   b. Dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili Badan Hukum atau lembaga tersebut.
5. Laporan Pengaduan yang tidak termasuk kategori *Fraud* dan/atau Pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja terkait sesuai kewenangannya.
6. Laporan Pengaduan yang termasuk *Fraud* dan/atau Pelanggaran dengan Terlapor adalah Pegawai, akan ditindaklanjuti audit investigasi oleh Bidang Audit Internal.
7. Pengaduan yang termasuk *Fraud* akan dievaluasi lebih lanjut guna menentukan terpenuhinya kriteria Tipikor.
8. Pemeriksaan lebih lanjut atas hasil audit investigasi *Fraud* yang tidak termasuk kriteria Tipikor akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
9. Perusahaan memberikan perlindungan dan kerahasiaan identitas Pelapor dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini.
10. Perusahaan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Pengelola WBS dan pihak-pihak terkait yang menindaklanjuti laporan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Perusahaan.

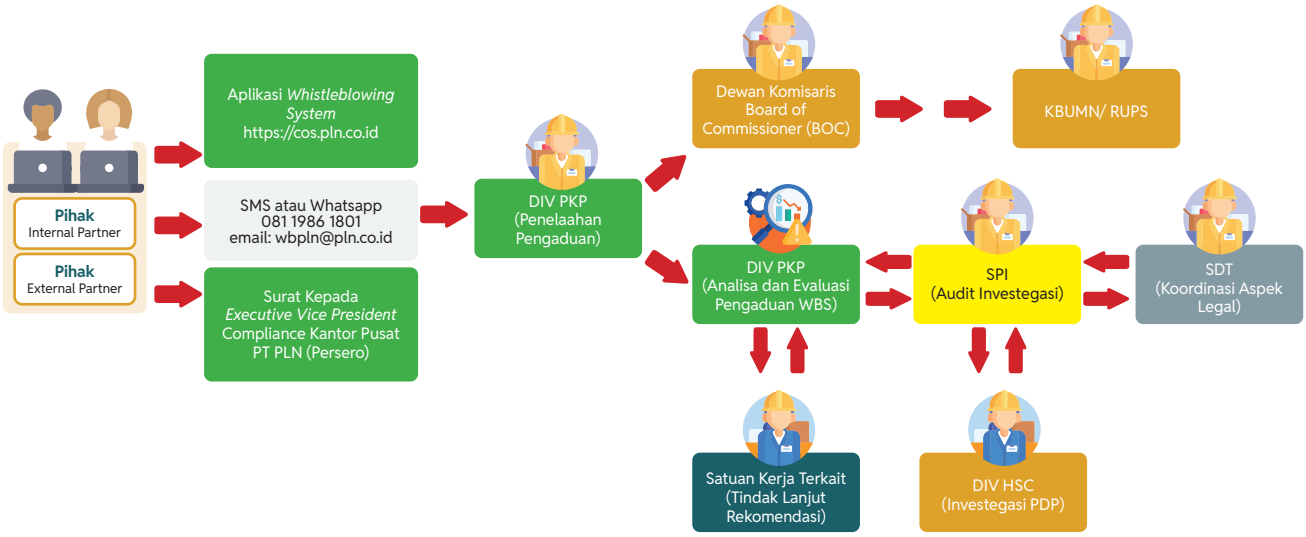
3. Reports categorized as fraud and/or violations are assessed for the adequacy of the reported indications and supporting preliminary evidence submitted by the whistleblower.
4. If the indications of fraud and/or violations and supporting preliminary evidence are deemed insufficient, the Legal, Performance, and Risk Division may take the necessary measures to obtain additional information or preliminary evidence within its authority.

In line with the Violation Reporting Management Guidelines, the complaint handling mechanism is as follows:

1. Directors and employees are required to actively report any indications of fraud and/or violations.
2. The Company must receive and follow up on reports that meet the criteria of fraud and/or violations.
3. Reports must be supported by preliminary evidence to prevent false accusations or defamation.
4. If the report is submitted by a legal entity or institution, it may be accompanied by:
   a. The deed of establishment and its latest amendment; and
   b. Documentation confirming the authority of the reporting representative to act on behalf of the legal entity or institution.
5. Reports that do not fall under fraud and/or violation categories are followed up by the relevant work unit according to its authority.
6. Reports involving fraud and/or violations committed by employees are subject to investigative audits conducted by the Internal Audit Unit.
7. Fraud-related reports are further evaluated to determine whether they meet corruption crime criteria.
8. Further examination of investigative audit results that do not meet corruption crime criteria is conducted in accordance with the Company's prevailing regulations.
9. The Company provides protection and confidentiality for whistleblowers and/or witnesses as stipulated in Article 8 of the relevant regulation.
10. The Company provides protection and legal assistance to WBS administrators and related parties responsible for following up reports in accordance with applicable Company regulations.

Berikut alur mekanisme pengelolaan WBS:

The mechanism of WBS management is as follows:



Jumlah dan Hasil Penanganan Pengaduan Tahun 2025

Number and Resolution of Reports in 2025

Sepanjang tahun 2025, PLN BBN tidak menerima laporan pengaduan yang diterima melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS).

Throughout 2025, PLN BBN did not receive any complaints submitted through the Whistleblowing System (WBS).

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan yang Dimiliki oleh Perusahaan

Long-Term Performance-Based Compensation Policy For Management and/or Employees

Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN BBN bukan perusahaan publik, sehingga PLN BBN tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option* Program (ESOP) dan/ atau *Management Stock Option* Program (MSOP). Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise*.

As of December 31, 2025, PLN BBN was not a publicly listed company; therefore, the Company did not implement an Employee Stock Option Program (ESOP) and/or a Management Stock Option Program (MSOP). Accordingly, there is no information regarding the number of ESOP/MSOP shares granted and exercised, the applicable exercise period, eligibility requirements for employees and/or management, or the exercise price.

Kebijakan *Insider Trading*

Insider Trading Policy

Kebijakan *insider trading* merupakan upaya dan/atau aturan yang jelas mengenai perdagangan dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak internal lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang belum tersedia di pasar.

Hingga akhir 2025, PLN BBN belum memiliki kebijakan *insider trading* karena PLN BBN bukan perusahaan terbuka (emiten) yang sahamnya diperjualbelikan kepada publik.

Selama tahun 2025, PLN BBN tidak menerima satu pun pengaduan terkait dugaan penyebaran informasi non-publik oleh internal Perusahaan demi kepentingan pihak tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai praktik *insider trading*.

The Insider Trading Policy serves as a clear framework and set of rules governing the trading of corporate shares by members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and other internal parties. The policy aims to ensure that no individual gains direct or indirect benefits from material information that has not yet been made available to the market.

As of the end of 2025, PLN BBN had not established an Insider Trading Policy, as PLN BBN is not a publicly listed company whose shares are traded on the stock exchange.

Throughout 2025, PLN BBN did not receive any reports regarding the alleged disclosure of non-public information by internal parties for the benefit of certain individuals or entities that could be identified as insider trading practices.

Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services



Perusahaan menyusun ketentuan mengenai Pengadaan, selanjutnya disebut Pengadaan, untuk mendukung jalannya bisnis Perusahaan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Pemegang Saham serta ketentuan berlaku.

The Company has established provisions governing Procurement (hereinafter referred to as "Procurement") to support the Company's business operations in accordance with the mandate provided by the Shareholders and applicable regulations.

Pelaksana Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Function

Pelaksanaan Pengadaan di BBN terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadaan Batubara dan Pengadaan Non Batubara. Pelaksanaan pengadaan batubara dijalankan oleh Fungsi Manager Operasi dan pelaksanaan pengadaan non batubara dijalankan oleh Fungsi Manager Human Capital, Administrasi, dan Umum. Berikut adalah tugas dan wewenang dari Pelaksana Pengadaan:

a. Manager Operasi selaku pelaksana fungsi pengadaan batubara memiliki tugas dan tanggung jawab:
   1. Merencanakan pengadaan jasa konsultasi dan pekerjaan penunjang terkait dengan pengadaan energi primer.
   2. Memastikan tugas sebagai pengadaan energi primer sesuai dengan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku.
   3. Memastikan evaluasi realisasi kontrak-kontrak pembelian batubara.
   4. Memastikan pemutakhiran data pengadaan batubara.
   5. Menyusun kajian untuk mengoptimalkan biaya pengadaan batubara.
   6. Mengevaluasi proses pengadaan energi primer dan pendukungnya.
   7. Melakukan pengelolaan hubungan kemitraan dalam rangka pelayanan terhadap mitra tambang Batubara.
   8. Melakukan survei kepuasan pemasok.
   9. Mengelola keluhan pemasok.
   10. Membuat berita acara denda keterlambatan dan berita acara pemenuhan jaminan pelaksanaan, dengan mendapatkan input dari bidang pengawasan Mitra Tambang dan bidang Pengendalian Operasi & QC.
   11. Melakukan pemotongan untuk denda keterlambatan.
   12. Menjalankan implementasi kebijakan dan strategi dalam pengendalian kontrak batubara.

Procurement at BBN is divided into two (2) categories, namely Coal Procurement and Non-Coal Procurement. Coal procurement is carried out by the Operations Manager, while non-coal procurement is carried out by the Human Capital, Administration, and General Affairs Function. The following are the duties and authorities of the Procurement Function:

a. The Operations Manager, as the function responsible for coal procurement, has the following duties and responsibilities:
   1. Planning the procurement of consulting services and supporting work related to primary energy procurement.
   2. Ensuring that primary energy procurement activities are carried out in accordance with applicable goods and services procurement guidelines.
   3. Evaluating the realization of coal purchase contracts.
   4. Ensuring the updating of coal procurement data.
   5. Preparing studies to optimize coal procurement costs.
   6. Evaluating primary energy procurement processes and their supporting activities.
   7. Managing partnership relationships to support services for coal mining partners.
   8. Conducting supplier satisfaction surveys.
   9. Managing supplier complaints.
   10. Preparing reports on delay penalties and fulfillment of performance guarantees, based on input from the Coal Mining Partner Supervision function and the Operations Control & QC function.
   11. Implementing deductions for delay penalties.
   12. Implementing policies and strategies related to coal contract management.

13. Menyusun usulan amandemen kontrak dengan pemasok dan transporter mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk menyesuaikan harga patokan batubara, pelaksanaan *due diligence,* dalam memastikan kualitas dan kesiapan tambang untuk kepentingan *Security of Supply.*
14. Menyusun usulan amandemen perjanjian pekerjaan penunjang.
15. Melaksanakan pemutakhiran database kontrak Batubara dengan pemasok dan transportir.
16. Memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan mitra tambang batubara dan mitra transport kepada perusahaan.
17. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di unit kerjanya berbasiskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance),* manajemen risiko, dan kepatuhan.
18. Menganalisa, mengevaluasi, dan menyempurnakan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa bidang non batubara di perupasahaan.
19. Melaksanakan, menganalisa, dan mengevaluasi kajian awal dan proses konsolidasi terkait rencana pengadaan barang dan jasa bidang non batubara serta menyelaraskan dan menyediakan katalog mitra pemasok penyedia barang dan jasa bidang non batubara sebagai acuan pembanding yang dipersyaratkan dalam pekerjaan.
20. Mengevaluasi dan merekomendasikan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Harga Perkiraan Engineer (HPE), dan dokumen pengadaan barang dan jasa bidang non energi primer lainnya untuk masing-masing Unit Kerja.
21. Mensupervisi, mengelola, dan mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa bidang non batubara, pengelolaan dokumentasi pengadaan dan pelaporan sesuai prosedur dan aturan Perusahaan.
22. Mengelola, memonitor, dan mengendalikan kontrak mitra/pemasok, masa berlaku kontrak, serta pembaharuan kontrak sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Selain itu, Manager Human Capital, Administrasi, dan Umum selaku pelaksana fungsi pengadaan non batubara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menganalisa, mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa bidang non batubara di Perusahaan;
2. Melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi kajian awal dan proses konsolidasi terkait rencana pengadaan barang dan jasa bidang non batubara serta menyelaraskan dan menyediakan katalog mitra pemasok penyedia barang dan jasa bidang non batubara sebagai acuan pembanding yang dipersyarakatkan dalam pekerjaan;
3. Mengevaluasi dan merekomendasikan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Harga Perkiraan Engineer (HPE), dan dokumen pengadaan barang dan jasa bidang non energi primer lainnya untuk masing-masing Unit Kerja;

13. Preparing proposed contract amendments with suppliers and transporters in accordance with applicable regulations, including adjustments to coal benchmark prices and the implementation of due diligence to ensure mine quality and readiness in support of Security of Supply.
14. Preparing proposed amendments to supporting service agreements.
15. Updating the database of coal contracts with suppliers and transporters.
16. Verifying the completeness and accuracy of invoice documents submitted by coal mining and transportation partners to the Company.
17. Ensuring that the planning, implementation, and evaluation of all business processes within the work unit are based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), risk management, and compliance.
18. Analyzing, evaluating, and improving policies and strategies for the management of non-coal goods and services procurement within the Company.
19. Conducting, analyzing, and evaluating preliminary studies and consolidation processes related to procurement plans for non-coal goods and services, while maintaining and providing a catalog of suppliers of non-coal goods and services as a required benchmarking reference.
20. Evaluating and recommending the Terms of Reference (TOR), Engineer's Estimate (HPE), and procurement documents for non-primary energy goods and services for each Work Unit.
21. Supervising, managing, and controlling the procurement process for non-coal goods and services, including procurement documentation management and reporting in accordance with Company procedures and regulations.
22. Managing, monitoring, and controlling supplier contracts, contract validity periods, and contract renewals in accordance with the Company's interests.

In addition, the Human Capital, Administration, and General Affairs Manager, as the function responsible for non-coal procurement, has the following duties and responsibilities:

1. Analyze, evaluate, and enhance policies and strategies for the management of non-coal goods and services procurement within the Company;
2. Conduct, analyze, and evaluate preliminary assessments and consolidation processes related to plans for the procurement of non-coal goods and services, as well as align and provide a catalog of suppliers and vendors of non-coal goods and services as a reference for comparison required for the relevant work;
3. Evaluate and recommend the Terms of Reference (TOR), Engineer's Estimated Price (HPE), and other procurement documents for non-primary energy goods and services for each Work Unit;

4. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja mitra pemasok barang dan jasa bidang non batubara;
5. Mensupervisi, mengelola dan mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa bidang non batubara, pengelolaan dokumentasi pengadaan dan pelaporan sesuai prosedur dan aturan Perusahaan;
6. Menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan proses proses pengadaan barang dan jasa bidang non energi primer yang dibutuhkan oleh masing-masing Unit Kerja;
7. Mengelola, memonitor dan mengendalikan kontrak mitra/ pemasok, masa berlaku kontrak, serta pembaharuan kontrak sesuai dengan kepentingan Perusahaan;
8. Memonitor dan mengevaluasi pengelolaan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari mitra/pemasok barang dan jasa bidang non batubara;
9. Menganalisa dan mengevaluasi program kerja, anggaran dan jadwal pengadaan bidang non batubara;

4. Conduct evaluations of the performance of suppliers/ vendors of non-coal goods and services;
5. Supervise, manage, and control the procurement process for non-coal goods and services, procurement documentation management, and reporting in accordance with the Company's procedures and regulations;
6. Analyze, evaluate, and report on the procurement processes for non-primary energy goods and services required by each Work Unit;
7. Manage, monitor, and control supplier/vendor contracts, contract validity periods, and contract renewals in accordance with the Company's interests;
8. Monitor and evaluate the management of performance bonds for work performed by suppliers/vendors of non-coal goods and services;
9. Analyze and evaluate work programs, budgets, and procurement schedules for non-coal goods and services.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Policy

PLN BBN telah menyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang terakhir kali diperbarui melalui Kebijakan Perusahaan Nomor 182.P/IX/PLNBBN/2021 tentang Teknis Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN Batubara Niaga tanggal 29 September 2021. Kebijakan tersebut berisikan hal-hal berikut:

1. Ketentuan Umum.
2. Organisasi Pengadaan.
3. Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya.
5. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi.
6. Pengadaan Perdagangan Bahan Bakar Dan Jasa Terkait Lainnya.
7. Pengadaan Khusus.
8. Perjanjian/Kontrak.

PLN BBN has established a Goods and Services Procurement Guideline, most recently updated through Company Policy No. 182.P/IX/PLNBBN/2021 concerning the Technical Guidelines for Goods and Services Procurement of PT PLN Batubara Niaga on September 29, 2021. The policy covers the following matters:

1. General Provisions.
2. Procurement Organization.
3. Goods/Services Procurement Planning.
4. Implementation of Procurement for Goods, Construction Works, and Other Services.
5. Planning and Implementation of Consulting Services Procurement.
6. Fuel Trading Procurement and Other Related Services.
7. Special Procurement.
8. Agreements/Contracts.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Implementation of Goods and Services Procurement

Pengadaan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional PLN BBN, wajib tunduk dan patuh pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. Pelaksana Pengadaan sebelum melaksanakan pengadaan terlebih dahulu harus menetapkan tata cara pengadaan yang paling tepat atau cocok, meliputi namun tidak terbatas pada: metode pengadaan, sistem penyampaian penawaran dan evaluasi penawaran yang akan digunakan. Dalam hal pelaksanaan proses pengadaan, Pelaksana Pengadaan dilarang memecah pekerjaan untuk bidang pekerjaan yang sama menjadi beberapa paket pekerjaan dengan maksud untuk menghindari Pemilihan Langsung/Pelelangan Terbuka.

Procurement activities are carried out based on operational requirements to support the smooth operation of PLN BBN and must comply with all applicable regulations and provisions. Prior to initiating any procurement process, the Procurement Function is required to determine the most appropriate procurement mechanism, including but not limited to the procurement method, bid submission system, and bid evaluation method to be applied. In carrying out procurement processes, the Procurement Function is prohibited from dividing work within the same scope into multiple work packages for the purpose of avoiding the Direct Selection or Open Tender process.


SANTUNAN
Anak hebat
Raih masa depan
Corporate Social Responsibility
Santunan
Ramadhan 1446 H
KEPADA YAYASAN YATIM PIATU & DHUAFA
YAYASAN AL-HIKMAH

PLN BATUBARA NIAGA

6

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR)



Disclaimer:

Informasi kegiatan kami terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) disampaikan pada Laporan Keberlanjutan PLN BBN Tahun 2025, yang diterbitkan dalam buku terpisah dan dalam waktu yang bersamaan dengan Laporan Tahunan ini, sejalan dengan arahan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021. Secara umum, informasi dalam Laporan Tahunan ini dan Laporan Keberlanjutan PLN BBN Tahun 2025 saling melengkapi.

PLN BBN presents more detailed information regarding activities related to Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) in the PLN BBN 2025 Sustainability Report, published separately and concurrently with this Annual Report, in line with the directive of the Financial Services Authority Circular No. 16/SEOJK.04/2021. In general, the information in this Annual Report and the PLN BBN 2025 Sustainability Report complement each other.

Komitmen Perusahaan dalam Penerapan Program Keberlanjutan

Commitment to Implementing Sustainability Programs

PLN BBN menegaskan komitmennya dalam penerapan program keberlanjutan melalui pengelolaan bisnis batubara yang berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta etika bisnis. Perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara kinerja operasional dan keberlanjutan lingkungan maupun sosial dengan mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke seluruh rantai nilai usahanya.

Komitmen ini diwujudkan melalui perluasan perdagangan batubara yang tetap memperhatikan profitabilitas, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial; pembangunan solusi rantai pasok batubara yang terintegrasi; serta penguatan kemitraan yang mendukung efisiensi dan ketahanan energi nasional. Dengan strategi pertumbuhan yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan, PLN BBN menempatkan dirinya sebagai penyedia batubara nasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan untuk periode 2024–2028.

PLN BBN reaffirms commitment to implementing sustainability programs through coal business management grounded in good corporate governance principles, regulatory compliance, and business ethics. The Company strives to maintain balance between operational performance and environmental and social sustainability by integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles across the entire value chain.

The Company actualized this commitment through the expansion of coal trading while maintaining profitability, environmental sustainability, and social welfare; the development of integrated coal supply chain solutions; and the strengthening of partnerships that support efficiency and national energy security. With a competitive, innovative, and sustainable growth strategy, PLN BBN positions itself as a responsible and sustainability-oriented national coal provider for the 2024–2028 period.

Strategi Penerapan Program TJSL

CSR Program Implementation Strategy

Strategi penerapan program TJSL yang dijalankan PLN BBN berfokus pada upaya menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan melalui berbagai inisiatif yang berkelanjutan. Implementasi program ini didasarkan pada prinsip keberlanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Seluruh pelaksanaan TJSL tersebut sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kinerja operasional dan keberlanjutan lingkungan maupun sosial, yang sejalan dengan prinsip ESG.

PLN BBN carries out CSR program implementation strategy that focuses on creating tangible positive impacts for society and the environment through various sustainable initiatives. The implementation of this program is based on sustainability principles that prioritize a balance between social, economic, and environmental aspects. All CSR activities are aligned with the Company's commitment to maintaining a balance between operational performance and environmental and social sustainability, in line with ESG principles.

Landasan Penerapan Program TJSL Perusahaan

Dalam menjalankan program TJSL, Perusahaan berpedoman pada sejumlah peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN No. 1/2023");
4. Anggaran Dasar Perusahaan No. 02 tanggal 02 Agustus 2019;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 22 tanggal 22 Februari 2021;
6. Peraturan Direksi No. 031.P/DIRPLNBBN/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Foundation for Implementing the Company's CSR Program

In undertaking the CSR program, the Company is guided by the following internal regulations and applicable laws and regulations

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2025 concerning State-Owned Enterprises;
3. Regulation by the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
4. Company Articles of Association No. 02 dated August 2, 2019;
5. Amendment to Company Articles of Association No. 22 dated February 22, 2021;
6. Board of Directors Regulation No. 031.P/DIRPLNBBN/2024 concerning Guidelines for the Implementation of Corporate Social Responsibility.

Dukungan Perusahaan Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Support by the Company for the Achievement of Sustainable Development Goals

PLN BBN mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam menjalankan program TJSL, Perusahaan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan sosial, tetapi juga pada penciptaan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Melalui pendekatan berbasis dampak *(impact-based approach),* PLN BBN mengarahkan program-program TJSL untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan penguatan aspek sosial. Setiap program dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan para pemangku kepentingan serta potensi manfaat jangka panjang yang dapat dihasilkan, sehingga keberadaan Perusahaan dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan nasional.

PLN BBN supports the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) through the implementation of Social and Environmental Responsibility (CSR) programs aligned with Presidential Regulation No. 59 of 2017 concerning the Implementation of Achieving the Sustainable Development Goals. In undertaking the CSR program, the Company not only focuses on implementing social activities but also on creating sustainable benefits for society and the environment.

Through an impact-based approach, PLN BBN directs CSR programs to make tangible contributions to improving community welfare and strengthening social aspects. Each program is designed and implemented by considering the stakeholders needs and the potential long-term benefits that can be generated, so that the Company's presence can provide sustainable added value for society, the environment, and national development.

Governansi (Tata Kelola) Keberlanjutan

Sebagai pilar penting dalam konsep ESG, penerapan GCG berperan besar dalam mendukung kinerja dan keberlanjutan Perusahaan. PLN BBN meyakini bahwa pertumbuhan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Karena itu, Perusahaan menempatkan GCG sebagai fondasi yang menyelaraskan seluruh aspek operasional, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Melalui penerapan GCG yang konsisten, PLN BBN mampu memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, menjaga integritas proses bisnis, dan memastikan setiap keputusan sejalan dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, GCG menjadi pedoman sekaligus pendorong utama terciptanya pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Sustainability Governance

As a key pillar of the ESG concept, GCG implementation is substantial role in supporting the Company's performance and sustainability. PLN BBN believes that sustainable growth can only be achieved through transparent, accountable, and integrity-driven governance. Therefore, for the Company, GCG is foundation that aligns the entire operational aspects, from economic, social, to environmental. Through consistent implementation of GCG, PLN BBN is able to strengthen stakeholder trust, maintain the integrity of business processes, and ensure that every decision is aligned with long-term sustainability goals. Thus, GCG serves as both a guideline and a primary driver for achieving healthy and sustainable growth.

Struktur Governansi Keberlanjutan dan Penanggung Jawab Penerapan Program Keberlanjutan Perusahaan

Penerapan aspek keberlanjutan di PLN BBN didukung oleh struktur tata kelola yang terintegrasi dalam organisasi Perusahaan. Fungsi pengelolaan dan koordinasi program

Sustainability Governance Structure and Person Responsible for Implementing the Company's Sustainability Program

PLN BBN implements sustainability aspects supported by the governance structure integrated within the Company's organization. The function of managing and coordinating

keberlanjutan berada di bawah Divisi Tata Kelola dan Kesekretariatan, yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan implementasi berbagai inisiatif keberlanjutan serta memastikan keselarasan pelaksanaannya dengan strategi dan kebijakan Perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Divisi Tata Kelola dan Kesekretariatan didukung oleh Staf Komunikasi dan CSR yang berperan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pengelolaan komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan dan pelaporan kinerja keberlanjutan.

Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan

PLN BBN memberikan kesempatan dan ruang bagi seluruh insan Perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam menghadapi situasi dan kondisi serta isu-isu terkait ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Secara khusus, Dewan Komisaris, Direksi dan Deputi Direktur serta Divisi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan telah mengikuti berbagai kegiatan, seperti seminar, *workshop*, dan sebagainya, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Adapun topik pelatihan yang diikuti diantaranya terkait sertifikasi CRMO *(Certified Risk Management Officer),* QRMP *(Qualified Risk Management Professional),* QRGP *(Qualified Risk Governance Professional),* dan sertifikasi pengadaan.

Pengungkapan informasi lengkap terkait daftar pengembangan kompetensi program keberlanjutan yang telah dilakukan di tahun 2025 disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 PLN BBN.

Pelibatan Pemangku Kepentingan

PLN BBN menempatkan para pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan. Pelibatan *stakeholder* dilakukan melalui komunikasi yang transparan dan kolaborasi yang berkelanjutan, sehingga setiap program keberlanjutan dapat disusun sesuai kebutuhan dan harapan *stakeholder*. Perusahaan menggandeng pemerintah, karyawan, masyarakat, mitra bisnis, dan akademisi dalam proses perencanaan hingga evaluasi program, untuk memastikan terciptanya dampak positif yang luas. Melalui dialog konstruktif dan mekanisme umpan balik, Perusahaan berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap keputusan demi mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

sustainability programs is under the Governance and Secretariat Division, which is responsible for coordinating the implementation of various sustainability initiatives and ensuring their alignment with the Company's strategies and policies.

In carrying out this function, the Governance and Secretariat Division is supported by the Communication and CSR Staff, who are responsible for implementing the Social and Environmental Responsibility (CSR) program, managing communication with the stakeholders, and preparing and reporting sustainability performance.

Competency Development Related to Sustainable Finance

PLN BBN provides opportunities and space for all Company personnel to enhance knowledge and competencies in addressing situations, conditions, and issues related to economic, social, and community matters. Specifically, the Board of Commissioners, Board of Directors, Deputy Directors, and the Division responsible for implementing sustainable finance have participated in various activities, such as seminars, workshops, and others, including those related to the implementation of sustainable finance. The training topics attended include certifications such as CRMO (Certified Risk Management Officer), QRMP (Qualified Risk Management Professional), QRGP (Qualified Risk Governance Professional), and procurement certification.

Complete information disclosure regarding the list of sustainability program competency developments undertaken in 2025 is available in the PLN BBN 2025 Sustainability Report.

Stakeholders Engagement

PLN BBN regards stakeholders as substantial part of supporting business sustainability of the Company. The Company applies the stakeholders engagement through transparent communication and continuous collaboration, ensuring that every sustainability program is designed following the stakeholders needs and expectations. The Company cooperates with the government, employees, communities, business partners, and academics in the planning to evaluation process of programs, to ensure the creation of broad positive impacts. Through constructive dialogue and feedback mechanisms, the Company is committed to maintaining balance among social, economic, and environmental interests in every decision to support inclusive sustainable development.

Kinerja Aspek Ekonomi

Economic Performance

PLN BBN terus menunjukkan komitmen kuat untuk bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dengan memastikan setiap target kinerja ekonomi yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian target finansial, tetapi juga berupaya menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui penerapan strategi yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika industri. Dalam menjalankan komitmen tersebut, PLN BBN secara konsisten memperkuat strategi pengelolaan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas peluang pertumbuhan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada peningkatan nilai, Perusahaan mampu mendorong kinerja ekonomi yang stabil, kompetitif, dan berkesinambungan, sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan energi nasional.

PLN BBN continues to demonstrate a strong commitment to sustainable growth and development by ensuring that each predetermined economic performance target is optimally achieved. The Company not only focuses on meeting financial targets but also strives to create significant added value for all stakeholders through the implementation of innovative, adaptive, and responsive strategies to industry dynamics. In carrying out this commitment, PLN BBN consistently strengthens its business management strategy, improves operational efficiency, and expands growth opportunities that support long-term sustainability. With a structured approach oriented toward value enhancement, the Company is able to drive stable, competitive, and sustainable economic performance while reinforcing its role in supporting national energy security.

Dari sisi operasional, pada tahun 2025 volume penjualan pasokan batubara terealisasi sebesar 11,89 juta MT atau mencapai 99% dari target RKAP. Selain itu, kinerja operasional menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi pengiriman batubara yang dipasok ke PLTU IPP dan PLN Group memiliki kualitas baik dan telah memenuhi spesifikasi sesuai permintaan pelanggan dengan pencapaian tahun 2025 sebesar 102,82%. Capaian jaminan penyediaan energi primer batubara adalah sebesar 109,58% dan ketepatan waktu pengiriman batubara sesuai jadwal sebesar 110%, masing-masing aspek ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Pencapaian tersebut mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam menjaga kontinuitas pasokan energi primer serta memastikan pengiriman batubara dilakukan secara tepat waktu untuk mendukung keandalan operasional pembangkit listrik.

In terms of operational perspective, coal sales volume reached 11.89 million MT in 2025, reaching 99% of the RKAP target. Furthermore, operational performance demonstrated very positive results, with coal deliveries supplied to IPP and PLN Group coal-fired power plants reaching 102.82% of the 2025 target. The coal supplied was of good quality and fully met the specifications and requirements requested by customers. Achievement for 2025 was 109.58% for primary energy supply assurance and 110% for on-time coal deliveries, exceeding the 100% target, respectively. These achievements reflect the Company's ability to maintain the continuity of primary energy supply and ensure timely coal deliveries to support the operational reliability of power plants.

Dari sisi keuangan, pada tahun 2025 PLN BBN membukukan realisasi penjualan sebesar Rp9.204.576 juta atau mencapai 96% dari target RKAP. Kontribusi penjualan berasal dari segmen PLTU IPP sebesar Rp3.875.137 juta dan penjualan kepada PLN mencapai Rp5.329.438 juta. Dari sisi profitabilitas, laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp155,18 juta atau 58% dari target RKAP, sedangkan EBITDA mencapai Rp269.135 juta atau 69,92% dari target RKAP. Pada posisi keuangan, jumlah aset terealisasi sebesar Rp2.863.767 juta atau 80% dari target RKAP. Sementara itu, jumlah liabilitas mencapai Rp2.355.842 juta atau 84% dari target RKAP. Dengan demikian, jumlah ekuitas tercatat sebesar Rp507.925 juta atau 67% dari target RKAP. Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan ketahanan bisnis Perusahaan dalam menjaga pertumbuhan pendapatan, mengelola aset dan liabilitas secara efektif, serta memperkuat fondasi usaha untuk mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan Pembahasan mengenai kinerja ekonomi

From the financial side, in 2025 PLN BBN recorded sales realization of Rp9,204,576 million or reaching 96% of the RKAP target. Sales contribution came from the IPP PLTU segment amounting to Rp3,875,137 million and sales to PLN reached Rp5,329,438 million. In terms of profitability, current year profit was recorded at Rp155.18 million or 58% of the RKAP target, while EBITDA reached Rp269,135 million or 69.92% of the RKAP target. In the financial position, the total assets realized amounted to Rp2,863,767 million or 80% of the RKAP target. Meanwhile, the total liabilities reached Rp2,355,842 million or 84% of the RKAP target. Thus, the total equity was recorded at Rp507,925 million or 67% of the RKAP target. The 2025 performance achievement demonstrates the Company's business resilience in maintaining revenue growth, managing assets and liabilities effectively, and strengthening the business foundation to support long-term value creation for stakeholders. The discussion regarding PLN BBN's economic

dan strategi PLN BBN telah disampaikan secara lengkap dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan tahun 2025.

Pada tahun 2025, PLN BBN berhasil mencatat nilai ekonomi langsung yang dihasilkan sebesar Rp9,20 triliun, meningkat sebesar 3,60% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8,89 triliun. Nilai ekonomi ini dihasilkan dari aktivitas utama yaitu penjualan batubara ke PLTU PLN, IPP, serta sektor industri non-kelistrikan, serta melalui inovasi produk seperti batubara custom. Nilai ekonomi tersebut didistribusikan kepada pemangku kepentingan dalam berbagai bentuk, antara lain yaitu pembayaran pajak kepada negara, dividen kepada pemegang saham, remunerasi bagi pegawai, serta alokasi untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Total nilai ekonomi yang didistribusikan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp9,05 triliun, meningkat sebesar 1,3% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8,93 triliun. Selain itu, PLN BBN mencatat nilai ekonomi yang ditahan sebesar Rp155,18 juta pada tahun 2025, yang dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan usaha dan pengembangan bisnis ke depan.

Pembahasan mengenai kinerja ekonomi dan strategi PLN BBN telah disampaikan secara lengkap dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan tahun 2025.

performance and strategy has been presented in full in the Company's 2025 Sustainability Report.

In 2025, PLN BBN successfully recorded a direct economic value generated of Rp9.20 trillion, an increase of 3.60% compared to 2024 amounting to Rp8.89 trillion. This economic value was generated from main activities such as coal sales to CFPPs of PLN, IPPs, and the non-electricity industrial sector, as well as through product innovations like custom coal. The economic value is distributed to stakeholders in various forms, including tax payments to the state, dividends to shareholders, remuneration for employees, and allocations for the Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) program. The total economic value distributed in 2025 was recorded at Rp9.05 trillion, an increase of 1.3% compared to 2024, which was Rp8.93 trillion. Additionally, PLN BBN recorded retained economic value of Rp155.18 million in 2025, which was utilized to support business sustainability and future business development.

A comprehensive discussion of PLN BBN's economic performance and strategy has been presented in the 2025 Corporate Sustainability Report.

Kinerja Lingkungan
Environmental Performance

PLN BBN berkomitmen memperkuat kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dan operasional. Komitmen ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, penerapan pertimbangan lingkungan dalam evaluasi proyek, serta pengelolaan dampak lingkungan yang mencakup efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam, pencegahan polusi, pengelolaan limbah, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Perusahaan mendukung keuangan berkelanjutan, meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan iklim, dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

PLN BBN is committed to strengthening contribution to environmental sustainability by making environmental protection a top priority in every business and operational decision. The Company actualized this commitment through compliance with environmental regulations, integrating environmental considerations into project evaluations, and managing environmental impacts, including energy efficiency, natural resource management, pollution prevention, waste management, and biodiversity conservation. Through these strategic measures, the Company supports sustainable finance, enhances readiness for climate change, and contributes to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

Inisiatif Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2025

Sejalan dengan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan, PLN BBN sepanjang tahun 2025 telah melaksanakan berbagai inisiatif pengelolaan lingkungan sebagai wujud nyata upaya keberlanjutan. Program-program tersebut difokuskan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan melalui perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan Energi

Dalam mendukung aktivitas bisnis, PLN BBN menggunakan energi yaitu bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan pengangkutan batubara, distribusi batubara, kendaraan operasional dan genset, serta energi listrik untuk mendukung operasional perkantoran. Selama tahun 2025, total penggunaan energi Perusahaan tercatat sebesar 1.257,24 gigajoule. Selain itu, PLN BBN juga telah melakukan penghitungan intensitas energi sebagai upaya untuk memantau efisiensi energi terhadap jumlah produksi batubara, dengan nilai tahun 2025 sebesar 0,0001057 gigajoule/MT.

PLN BBN telah dan sedang melaksanakan berbagai inisiatif efisiensi energi dalam kegiatan operasionalnya, termasuk optimalisasi jam operasi fasilitas *coal processing* dan *coal blending*, pemeliharaan preventif peralatan untuk menjaga kinerja tetap efisien, serta pengaturan beban listrik di area operasional dan perkantoran. Dalam aktivitas logistik, Perusahaan meningkatkan perencanaan distribusi dan koordinasi pengiriman guna mengurangi konsumsi bahan bakar dan waktu tunggu. PLN BBN juga mendorong efisiensi energi tidak langsung melalui digitalisasi proses administrasi, penggunaan perangkat hemat energi, serta penguatan budaya hemat energi di lingkungan kerja, yang didukung dengan penyusunan *baseline* konsumsi energi dan identifikasi titik penggunaan energi terbesar sebagai dasar peningkatan kinerja berkelanjutan.

Pengelolaan Air dan Air Limbah (Efluen)

PLN BBN berkomitmen mengelola penggunaan air secara bertanggung jawab guna meminimalkan dampak terhadap ketersediaan sumber daya air. Seluruh kebutuhan air Perusahaan dipenuhi dari penyedia resmi air bersih dan tidak berasal dari kawasan lindung maupun wilayah dengan tingkat tekanan air tinggi. Sepanjang tahun 2025, total penggunaan air tercatat sebesar 19.820 m^3 atau 19,82 megaliter.

Untuk meningkatkan efisiensi dan konservasi air, PLN BBN menerapkan prinsip *reduce, reuse,* dan *optimize* dalam penggunaan air operasional, termasuk untuk pengendalian debu di area stockpile, jalur angkut, dan kebutuhan domestik. Perusahaan juga memanfaatkan kembali air limpasan yang telah melalui proses pengendapan serta melakukan pemantauan

Environmental Management Program Initiatives for 2025

In line with the commitment to environmental sustainability, PLN BBN implemented various environmental management initiatives throughout 2025 as a tangible manifestation of the sustainability efforts. These programs are focused on creating lasting positive impacts through environmental protection and conservation, while also supporting the achievement of sustainable development goals.

Energy Management

To support business activities, PLN BBN uses energy in the form of fuel oil for coal transportation, coal distribution, operational vehicles, and power plants, as well as electricity for office operations. During 2025, the Company's total energy consumption was recorded at 1,257.24 gigajoules. Additionally, PLN BBN has calculated its energy intensity to monitor energy efficiency relative to coal production volume, with a 2025 value of 0.0001057 gigajoules per metric ton.

PLN BBN already implemented and is continuing various energy efficiency initiatives in the operations, including optimizing operating hours of coal processing and blending facilities, performing preventive maintenance to keep equipment running efficiently, and managing electrical loads in operational and office areas. In logistics, the Company improves distribution planning and delivery coordination to reduce fuel consumption and waiting times. PLN BBN also promotes indirect energy efficiency through administrative process digitalization, use of energy-efficient devices, and fostering an energy-saving culture in the workplace, supported by establishing energy consumption baselines and identifying major energy consumption points as a basis for continuous performance improvement.

Water and Wastewater (Effluent) Management

PLN BBN is committed to managing water use responsibly to minimize impacts on water resource availability. The Company fulfils all the water needs from official clean water suppliers and do not originate from protected areas or regions with high water stress. Throughout 2025, total water consumption was recorded at 19,820 m^3 or 19.82 megaliters.

To improve efficiency and water conservation, PLN BBN applies the principles of reduce, reuse, and optimize in operational water use, including for dust control in stockpile areas, haul roads, and domestic needs. The Company also reuses runoff water that has undergone sedimentation and conducts regular water consumption monitoring to identify

konsumsi air secara berkala guna mengidentifikasi peluang efisiensi dan mendukung penetapan target pengurangan penggunaan air di masa mendatang. Selain itu, Perusahaan secara aktif melakukan sosialisasi dan himbauan penghematan air di lingkungan kerja.

Dalam pengelolaan air limbah, PLN BBN memastikan seluruh pembuangan air limbah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi baku mutu lingkungan. Air limbah yang dihasilkan, yang sebagian besar berasal dari kegiatan domestik perkantoran dan operasional pendukung, dikelola melalui sistem septic tank yang dipelihara dan dikuras secara berkala guna menjaga efektivitas pengolahan serta mencegah potensi pencemaran lingkungan.

Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah

PLN BBN berkomitmen mengintegrasikan upaya pencegahan polusi dan pengelolaan limbah dalam seluruh aktivitas operasional. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, dengan jenis limbah yang dihasilkan berupa *cartridge printer* dan baterai bekas dari aktivitas perkantoran. Limbah *cartridge printer* dikelola melalui mekanisme reuse oleh *vendor* penyedia, sedangkan baterai bekas dikumpulkan pada tempat khusus dan diserahkan kepada pihak ketiga berizin untuk diangkut dan diolah. Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan belum melakukan perhitungan volume limbah B3 yang dihasilkan.

Selain itu, PLN BBN juga mengelola limbah non-B3 yang berasal dari kegiatan operasional dan perkantoran, seperti sampah organik, kertas, plastik, dan sampah domestik lainnya. Pengelolaan dilakukan melalui proses pengumpulan, penyimpanan sementara, dan penyerahan kepada pihak pengelola berizin. Sepanjang tahun 2025, total limbah non-B3 yang dihasilkan tercatat sebesar 2.844,80 kg.

Dalam aspek pencegahan polusi, PLN BBN berhasil mencatat nihil insiden tumpahan bahan bakar, pelumas, maupun bahan kimia yang berdampak signifikan terhadap lingkungan. Capaian ini didukung oleh penerapan sistem pengendalian risiko, prosedur tanggap darurat, penyediaan *spill kit*, inspeksi rutin, serta evaluasi berkala untuk memastikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan operasional.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati

PLN BBN berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah operasional guna menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Hingga akhir tahun 2025, wilayah operasional Perusahaan tidak berada di dalam atau berdekatan dengan kawasan konservasi atau area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi yang dilindungi.

efficiency opportunities and support the establishment of future water use reduction targets. Additionally, the Company actively promotes and encourages water-saving practices in the workplace.

In wastewater management, PLN BBN ensures that all wastewater disposal complies with applicable regulations and meets environmental quality standards. The wastewater generated, which mainly comes from office domestic activities and supporting operations, is managed through a septic tank system that is regularly maintained and desludged to maintain treatment effectiveness and prevent potential environmental pollution.

Pollution Prevention and Waste Management

PLN BBN is committed to integrating pollution prevention and waste management efforts into the entire operational activities. The Company manages Hazardous and Toxic Waste (B3) based on with applicable regulations, with the types of waste generated including printer cartridges and used batteries from office activities. Printer cartridge waste is managed through a reuse mechanism by the supplier vendor, while used batteries are collected at designated points and handed over to a licensed third party for transport and processing. As of the end of 2025, the Company has not yet calculated the volume of hazardous waste generated.

Furthermore, PLN BBN also manages non-Hazardous waste from operational and office activities, such as organic waste, paper, plastic, and other domestic waste. The Company manages it through collection, temporary storage, and handover to licensed management parties. Throughout 2025, the total non-hazardous waste generated was recorded at 2,844.80 kg.

In terms of pollution prevention, PLN BBN recorded zero incidents of fuel, lubricant, or chemical spills with significant environmental impact. This achievement is supported by the implementation of risk control systems, emergency response procedures, provision of spill kits, routine inspections, and periodic evaluations to ensure environmental protection and operational sustainability.

Biodiversity Conservation

PLN BBN is committed to protecting and preserving biodiversity in its operational areas to maintain ecosystem balance and the sustainability of natural resources around the Company's operational areas. As of the end of 2025, the Company's operational areas are not located in or near protected conservation areas or areas with high biodiversity value.

Biaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

Tahun 2025 PLN BBN mengalokasikan biaya lingkungan untuk dipergunakan dalam perbaikan lingkungan, serta Pembiayaan Program Lingkungan Hidup sebagai bagian dari penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Biaya yang dialokasikan untuk tahun 2025 adalah Rp37,35 juta untuk program:

1. Pengukuran Lingkungan Kerja;
2. Pengangkutan Sampah;
3. Pembelian Tempat Sampah;
4. Penyedotan Limbah Tinja; dan
5. Pembersihan Septic Tank dari Endapan Lumpur.

Pengaduan Masalah Lingkungan

Untuk memastikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan terkait aspek lingkungan dapat ditindaklanjuti secara tepat, PLN BBN menyediakan mekanisme pengaduan lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lainnya yaitu melalui saluran sebagai berikut:

PT PLN Batubara Niaga
Jl. Hj. Tutty Alawiyah No.10, Kalibata, Kec. Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740
Email: kontak@plnbatubaraniaga.co.id
Telp: (021) 26953955

Setiap pengaduan yang diterima, baik secara langsung maupun melalui saluran komunikasi resmi Perusahaan, ditindaklanjuti secara responsif dan sesuai prosedur yang berlaku. Hasil penanganan pengaduan juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan dan peningkatan kinerja lingkungan. Pada tahun 2025 PLN BBN tidak menerima pengaduan dari pemangku kepentingan terkait lingkungan sehingga tidak terdapat denda ataupun sanksi lingkungan yang ditanggung oleh Perusahaan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait lingkungan. Dengan demikian, PLN BBN tidak menerima sanksi administratif maupun denda atas pelanggaran terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan lingkungan dan komitmen Perusahaan dalam memastikan operasional yang patuh terhadap regulasi dan bertanggung jawab secara lingkungan.

Environmental Management and Conservation Costs

In 2025, PLN BBN allocated environmental costs for environmental improvement and the funding of Environmental Programs as part of the implementation of Social and Environmental Responsibility (CSR). The budget allocated for 2025 is Rp37.35 million for the following programs:

1. Workplace Environment Measurement;
2. Waste Transportation;
3. Purchase of Trash Bins;
4. Septic Tank Sludge Removal; and
5. Cleaning of Septic Tank Sediment.

Environmental Complaint Handling

PLN BBN ensures that aspirations, input, and complaints related to environmental aspects can be followed up appropriately by providing environmental complaint mechanism accessible to surrounding communities and other stakeholders through the following channels:

PT PLN Batubara Niaga
Jl. Hj. Tutty Alawiyah No.10, Kalibata, Pancoran Region,
South Jakarta,
Special Capital Region of Jakarta 12740
Email: kontak@plnbatubaraniaga.co.id
Telp: (021) 26953955

Every complaint received, whether directly or through the Company's official communication channels, is followed up responsively and according to applicable procedures. The complaint handling results also serve as evaluation material to strengthen preventive measures and improve environmental performance. In 2025, PLN BBN received no environmental complaints from the stakeholders, so there were no environmental fines or sanctions borne by the Company for non-compliance with environmental laws and regulations. Thus, PLN BBN did not receive any administrative sanctions or fines for violations of applicable environmental regulations. This achievement reflects the effectiveness of the environmental management system and the Company's commitment to ensuring operations compliant with regulations and environmentally responsible.

Kinerja Sosial
Social Performance

Pengembangan Sosial dan Masyarakat
Social and Community Development

Sebagai pemangku kepentingan yang sangat penting, dukungan dan penerimaan masyarakat menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan operasional PLN BBN. Karena itu, Perusahaan berkomitmen membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan masyarakat melalui berbagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Program TJSL tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendekatan ini, PLN BBN menunjukkan komitmennya untuk tumbuh bersama masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Inisiatif Program Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Tahun 2025

Perusahaan menetapkan program TJSL sebagai prioritas utama dengan fokus pada sektor-sektor strategis yang mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip ESG. Program ini disusun untuk merespons tantangan sosial dan lingkungan, sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar area operasional.

Pada tahun 2025, PLN BBN telah menyalurkan dana sebesar Rp66.692.128 untuk program TJSL. Berikut adalah program TJSL prioritas/unggulan yang telah dilaksanakan PLN BBN sepanjang tahun 2025:

Santunan Ramadhan 1446 H ke Yayasan Yatim Piatu & Hafidz Qur'an Rosella

Santunan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025 kepada Yayasan Yatim Piatu & Hafidz Qur'an Rosella yang beralamat di Jalan Duren Tiga Barat VI No. 91 RT 06 Rw 02, Duren Tiga, Pancoran dengan penerima manfaat berjumlah sekitar 50 orang anggota berupa bantuan kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan program ini, PLN BBN telah merealisasikan dana pelaksanaan sebesar Rp10.392.128. Program santunan ini dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), dan Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera).

As a critically important stakeholder, community support and acceptance are key factors for the operations sustainability of PLN BBN. Therefore, the Company is committed to building harmonious and mutually beneficial relationships with the community through various Social and Environmental Responsibility (CSR) Programs.

The CSR programs are implemented sustainably and focused on poverty alleviation and improving the quality of life of the community. Through this approach, PLN BBN demonstrates commitment to growing together with the community and contributing to the achievement of sustainable development goals.

Social and Community Empowerment Program Initiatives for 2025

The Company prioritizes the CSR program with a focus on strategic sectors that support the acceleration of sustainable development in line with ESG principles. PLN BB designed this program to respond to social and environmental challenges, while ensuring that every activity provides real and sustainable benefits for the community and stakeholders around the operational areas.

In 2025, PLN BBN disbursed funds amounting to Rp66,692,128 for the CSR program. The following are the priority/ flagship CSR programs implemented by PLN BBN during 2025:

Ramadan 1446 H Donation to the Rosella Orphan & Quran Hafidz Foundation

The donation was carried out on March 25, 2025, to the Rosella Orphan & Quran Hafidz Foundation located at Jalan Duren Tiga Barat VI No. 91 RT 06 RW 02, Duren Tiga, Pancoran, with approximately 50 beneficiaries receiving basic necessities. PLN BBN realized implementation funds of Rp10,392,128 in this program. This donation program supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 1 (No Poverty), Goal 2 (Zero Hunger), and Goal 3 (Good Health and Well-being).



Santunan Ramadhan 1446 H ke Masjid Jami' Al-Mujtami'in

Santunan berupa uang tunai senilai Rp10.000.000 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025 kepada Masjid Jami' Al-Mujtami'in yang beralamat di Jl. Warung Jati timur No. 10, Jakarta Selatan. Adapun bantuan tersebut diperuntukan berupa santunan uang saku, sembako dan Alat Tulis Sekolah. Program santunan ini dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera).

Ramadan 1446 H Donation to Jami' Al-Mujtami'in Mosque

A cash donation of Rp10,000,000 was provided on March 25, 2025, to Masjid Jami' Al-Mujtami'in, located at Jl. Warung Jati Timur No. 10, South Jakarta. The assistance consisted of pocket money, basic necessities, and school supplies. This donation program supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 4 (Quality Education) and Goal 3 (Good Health and Well-being).



Santunan Idul Adha 1446 H

Perusahaan melakukan santunan berupa hewan kurban di daerah Jakarta Selatan berupa 1 ekor sapi. Dalam melaksanakan program ini, PLN BBN telah merealisasikan dana pelaksanaan sebesar Rp46.300.000. Program santunan ini dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan).

Eid al-Adha Donation 1446 H

The Company provided donation of sacrificial animals in the South Jakarta area, consisting of 1 cow. PLN BBN disbursed Rp46,300,000 in this program. This donation program supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 1 (No Poverty).



Penanganan Pengaduan Masyarakat

PLN BBN menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang terintegrasi dengan PT PLN (Persero). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran hukum, etika, maupun ketentuan internal perusahaan yang dilakukan oleh insan PLN BBN.

Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai kanal yang tersedia, antara lain: melalui *website* resmi https://cos.pln.co.id, telepon/SMS/WhatsApp ke nomor 08119861901, mengirimkan email ke wbpln@pln.co.id, dan/atau melalui surat tertulis yang langsung ditujukan kepada *Executive Vice President* Kepatuhan PT PLN (Persero) yang beralamat di Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M – I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

Seluruh laporan pengaduan yang masuk akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam mekanisme WBS. Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaan dan perlindungannya. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan pengaduan yang diterima melalui seluruh kanal pengaduan tersebut.

Public Complaint Handling

PLN BBN provides a complaint mechanism through the Whistleblowing System (WBS) integrated with PT PLN (Persero). This system can be used by both internal and external parties to report alleged violations of laws, ethics, or internal company regulations committed by PLN BBN personnel.

Complaints can be submitted through various available channels, including: the official website https://cos.pln.co.id, telephone/SMS/WhatsApp at 08119861901, email to wbpln@pln.co.id, and/or via written letter addressed directly to the Executive Vice President of Compliance at PT PLN (Persero) at the Head Office, Jalan Trunojoyo Blok M – I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

All incoming complaint reports will be recorded and followed up according to applicable procedures under the WBS mechanism. The identity of the reporter will be kept confidential and protected. Throughout 2025, no complaint reports were received through any of the complaint channels.

Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Labor Management, Occupational Health and Safety Aspects

Bagi PLN BBN, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Karyawan berperan sebagai penggerak utama operasional dan pencapaian target perusahaan. Karena itu, Perusahaan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memberi kesempatan setara bagi seluruh karyawan, serta terus meningkatkan kompetensi melalui berbagai program pengembangan.

For PLN BBN, Human Resources (HR) is a crucial pillar in maintaining business continuity. Employees are the main drivers of operations and the achievement of the Company targets. Therefore, the Company is committed to creating an inclusive work environment, providing equal opportunities for all employees, and continuously enhancing competence through various development programs.

PLN BBN mengelola karyawan dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam manajemen SDM yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Secara internal, PLN BBN telah menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM, antara lain:

1. Peraturan Direksi No. 12.SK/XII/DIRPLNBBN/2020 tentang Budaya Perusahaan.
2. Peraturan Direksi No. 012.P/DIRPLNBBN/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di PT PLN Batubara Niaga.
3. Peraturan Direksi No. 035.P/DIRPLNBBN/2025 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pegawai PT PLN Batubara Niaga.
4. Keputusan Direksi No. 008.K/DIRPLNBBN/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi.
5. Keputusan Direksi No. 021.K/DIRPLNBBN/2024 tentang Pedoman Sistem Manajemen Penghargaan, Pengembangan, Manajemen Talenta dan Manajemen Kinerja, dan Pengelolaan Disiplin Pegawai PT PLN Batubara Niaga.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Perusahaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan SDM dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta mendukung kesejahteraan dan pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan Perusahaan secara berkelanjutan.

Inisiatif Program Pengelolaan SDM Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan selaras dengan tujuan strategis Perusahaan, PLN BBN melaksanakan berbagai inisiatif sepanjang tahun 2025. sebagai berikut:

Penguatan Budaya Keberlanjutan Perusahaan

PLN BBN terus memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan proses kerja sehari-hari. Perusahaan meyakini bahwa keberlanjutan tidak hanya menjadi bagian dari strategi bisnis, tetapi juga perlu tercermin dalam budaya kerja dan pengambilan keputusan di seluruh lini organisasi.

Untuk mendukung hal tersebut, PLN BBN menginternalisasikan nilai-nilai keberlanjutan melalui penerapan kebijakan perusahaan, pelaksanaan berbagai program yang mendukung aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta peningkatan peran setiap fungsi kerja dalam menjalankan operasional yang bertanggung jawab. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan guna membangun kesadaran, memperkuat akuntabilitas, dan

PLN BBN manages the employees by adopting best practices in HR management according to applicable labor regulations, especially Law No. 13 of 2003 on Manpower, which was amended by Law No. 6 of 2023 on Job Creation. Internally, PLN BBN has established various policies governing HR management, including:

1. Board of Directors Regulation No. 12.SK/XII/DIRPLNBBN/2020 concerning Corporate Culture.
2. Board of Directors Regulation No. 012.P/DIRPLNBBN/2023 concerning Organization and Work Procedures at PT PLN Batubara Niaga.
3. Board of Directors Regulation No. 035.P/DIRPLNBBN/2025 concerning Guidelines for Official Travel for PT PLN Batubara Niaga Employees.
4. Board of Directors Decree No. 008.K/DIRPLNBBN/2023 concerning Determination of Organizational Structure.
5. Board of Directors Decree No. 021.K/DIRPLNBBN/2024 concerning Guidelines for the Reward Management System, Development, Talent Management, Performance Management, and Discipline Management of PT PLN Batubara Niaga Employees.

The Company complies the policies with the purposes to ensure that every aspect of HR management is carried out transparently, fairly, and in accordance with applicable legal standards, as well as supporting employee welfare and development to achieve the Company's goals sustainably.

HR Management Program Initiatives for 2025

In order to support superior, adaptive human resource management aligned with the Company's strategic objectives, PLN BBN implemented various initiatives throughout 2025, as follows

Strengthening Corporate Sustainability Culture

PLN BBN keeps strengthening the integration of sustainability principles in its daily business activities and work processes. The Company believes that sustainability is not only part of the business strategy but also needs to be reflected in the work culture and decision-making across all organizational lines.

To support this, PLN BBN internalizes sustainability values through the implementation of the Company policies, various programs supporting environmental, social, and governance (ESG) aspects, as well as enhancing the role of each work function in carrying out responsible operations. The Company constantly undertakes these efforts to build awareness, strengthen accountability, and ensure the creation of long-

memastikan terciptanya nilai jangka panjang bagi Perusahaan maupun para pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk nyata dari penerapan prinsip SDM yang berkelanjutan, Perusahaan secara bertahap berupaya menerapkan inisiatif pengelolaan keberlanjutan di area kerja yang dimulai dengan pengadaan tempat sampah terpilah untuk sampah organik, anorganik, dan B3 serta secara aktif melakukan kampanye internal terkait isu lingkungan melalui media komunikasi perusahaan dan kegiatan-kegiatan lingkungan yang melibatkan karyawan.

Penguatan Sinergi Hubungan Industrial

Hingga tahun 2025, PLN BBN belum memiliki kelompok serikat pekerja yang terbentuk secara formal. Kondisi ini disebabkan karena PLN BBN sendiri belum memiliki pegawai organik dan pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan saat ini didukung oleh pegawai tugas karya dan tenaga alih daya, sehingga pembentukan serikat pekerja belum menjadi kebutuhan dalam hubungan ketenagakerjaan di lingkungan Perusahaan.

Dalam upaya menjaga hubungan industrial yang sehat dan konstruktif, PLN BBN melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan kesejahteraan pekerja, antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti *Workshop* Nasional: Kiat Membangun Pola Hubungan Kerja melalui Kesepakatan PP dan PKB maupun Sistem Pengupahan yang Adil, serta Pengelolaan Manajemen *Outsourcing* guna Menghindari Sanksi Hukum pada tanggal 20 - 21 Agustus 2025.
2. Mengikuti *Workshop* Hubungan Industrial PLN EPI Group pada tanggal 30 Oktober 2025.

Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan, keamanan, dan kualitas hidup karyawan melalui penyediaan hak, manfaat, dan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik ketenagakerjaan yang berlaku.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian remunerasi yang kompetitif dan berkeadilan sesuai dengan tanggung jawab, kompetensi, serta kinerja karyawan. Kebijakan remunerasi Perusahaan diatur berdasarkan beberapa kebijakan dasar, di antaranya:

1. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (1).
2. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 23 Maret 2023.
3. Kebijakan Pemegang Saham.
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

term value for the Company and the stakeholders.

As a tangible manifestation of the application of sustainable HR principles, the Company gradually seeks to implement sustainability management initiatives in the work area, starting with the provision of segregated waste bins for organic, inorganic, and hazardous and toxic waste, and actively organizing internal campaigns on environmental issues through corporate communication media and environmental activities involving employees.

Strengthening Industrial Relations Synergy

As of 2025, PLN BBN does not yet have a formally established trade union group since PLN BBN internally does not yet have permanent employees. The Company's operational activities are currently supported by seconded employees and outsourced personnel, so the formation of a trade union has not yet become a necessity in the employment relations within the Company.

In an effort to maintain healthy and constructive industrial relations, PLN BBN carried out various activities throughout 2025 aimed at improving communication, collaboration, and worker welfare, including:

1. Participated in National Workshop: Tips for Building Working Relationship Patterns through Collective Labor Agreements and Company Regulations as well as Fair Wage System, and Management of Outsourcing to Avoid Legal Sanctions on August 20–21, 2025.
2. Participated in the PLN EPI Group Industrial Relations Workshop on October 30, 2025.

Employee Welfare Enhancement

The Company is committed to creating a work environment that supports employee welfare, safety, and quality of life through the provision of rights, benefits, and facilities according to statutory regulations and applicable employment practices.

PLN BBN actualized this commitment through the provision of competitive and fair remuneration following the employee responsibilities, competencies, and performance. The Company's remuneration policy is regulated based on basic regulation, including:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 96 paragraph (1).
2. Regulation by the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/2023 concerning State-Owned Enterprise Organs and Human Resources dated March 23, 2023.
3. Shareholders Policy.
4. The Company's Articles of Association.

Selain itu, PLN BBN memberikan berbagai hak cuti bagi karyawan, termasuk cuti melahirkan bagi pekerja perempuan sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas ini merupakan bentuk dukungan Perusahaan terhadap keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi *(work-life balance),* sekaligus mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu serta anak.

Furthermore, PLN BBN provides various types of leave for employees, including maternity leave for female workers according to applicable regulations. This facility is manifestation of the Company support for work-life balance, while also supporting the health and well-being of mothers and children.

Sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan kepastian bagi karyawan setelah memasuki masa purnabakti, Perusahaan juga menyediakan program pensiun yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini bertujuan untuk membantu karyawan mempersiapkan masa depan yang lebih terjamin serta memberikan rasa aman dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

As part of the efforts to provide protection and certainty for employees after retirement, the Company also provides pension program managed following the applicable regulations. This program aims to help employees prepare for a more secure future and provide a sense of security in long-term financial planning.

Melalui berbagai program tersebut, PLN BBN berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan secara berkelanjutan, memperkuat keterikatan (*employee engagement*), serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan mendukung pencapaian kinerja Perusahaan.

Through these various programs, PLN BBN strives to continuously improve employee welfare, strengthen employee engagement, and create a productive, harmonious work environment that supports the achievement of Company performance.

Kesetaraan Dalam Bekerja/Non-Diskriminasi

PLN BBN menyadari bahwa keberagaman karyawan sangat penting bagi inovasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Untuk itu, Perusahaan menitikberatkan pada aspek keberagaman, inklusi, dan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan dalam berkontribusi menciptakan keberlanjutan Perusahaan. Dimulai dari aspek rekrutmen, PLN BBN memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras, dan antar golongan sehingga setiap rekrutmen yang diadakan oleh Perusahaan dapat dipastikan selalu terbebas dari unsur diskriminasi.

Equality in Work / Non-Discrimination

PLN BBN recognizes that employee diversity is essential for innovation and effective decision-making. Therefore, the Company emphasizes diversity, inclusion, and equal opportunity for every employee to contribute to the Company's sustainability. Starting from recruitment, PLN BBN provides equal opportunities regardless of seniority, gender, ethnicity, religion, race, or social group, ensuring that every recruitment process is free from discrimination.

Pada tahun 2025, jumlah karyawan PLN BBN tercatat sebanyak 48 orang, dengan komposisi jumlah karyawan wanita sebanyak 16 orang dan karyawan laki-laki sebanyak 32 orang. Di tahun ini juga Perusahaan telah merekrut karyawan baru sebanyak 12 orang.

In 2025, PLN BBN's total employees reached 48, consisting of 16 female and 32 male employees. In the same year, the Company recruited 12 new employees.

Pekerja Anak dan Kerja Paksa

PLN BBN memastikan tidak mempekerjakan anak atau melakukan praktik kerja paksa dalam operasionalnya. PLN BBN berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, saling menghargai keberagaman, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan dengan berbagai latar belakang. PLN BBN mendorong penerapan praktik ketenagakerjaan yang adil dan transparan guna memastikan setiap individu pekerja diperlakukan setara serta terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, maupun, pelecehan di lingkungan kerja. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, PLN BBN juga mengedepankan penegakkan Hak Asasi Manusia dengan menolak terjadinya praktik pekerja anak dan kerja paksa, serta menjamin kesejahteraan karyawan sebagai prioritas dalam pengelolaan SDM.

Child Labor and Forced Labor

PLN BBN ensures to not employ children or engage in forced labor practices in its operations. PLN BBN is committed to creating an inclusive work environment that respects diversity and provides equal opportunities for all employees from diverse backgrounds. PLN BBN promotes fair and transparent labor practices to ensure that every worker is treated equally and protected from all forms of discrimination, violence, and harassment in the workplace. As part of corporate social responsibility, PLN BBN also upholds human rights by rejecting child labor and forced labor, and prioritizes employee welfare in human resource management.

Kesetaraan Dalam Pengembangan Kompetensi

Upaya kesetaraan juga terlihat dalam pengembangan kompetensi karyawan, di mana PLN BBN memastikan semua karyawan memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti pelatihan. Perusahaan secara konsisten menyelenggarakan berbagai program pelatihan/pendidikan bagi karyawannya guna meningkatkan keterampilan teknis maupun non-teknis yang diselaraskan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Langkah ini dilakukan agar setiap insan perusahaan memiliki kesiapan dalam menghadapi dinamika industri serta tuntutan inovasi yang terus berkembang.

Pelaksanaan program pengembangan kompetensi karyawan didasari pada Petunjuk Penilaian Pencapaian Kinerja PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) yang selaras dengan ketentuan pada Peraturan Menteri BUMN No. 2 Tahun 2023. Dalam implementasinya, PLN BBN bekerja sama dengan institusi pendidikan dan/atau Lembaga profesional lainnya yang berkompeten di setiap bidang yang dibutuhkan. Dengan adanya kolaborasi tersebut, Perusahaan berupaya memastikan kualitas materi, metode pembelajaran, serta relevansi program terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi.

Informasi kegiatan pelatihan termasuk total jumlah peserta dan jam pelatihan dijelaskan lebih lanjut pada bab Tinjauan Pendukung Bisnis sub bab Pengembangan Kompetensi Karyawan dalam Laporan Tahunan ini.

Penanganan Pengaduan Pegawai

PLN BBN menyediakan sarana bagi pegawai untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, maupun laporan dugaan pelanggaran melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) yang terintegrasi dengan PT PLN (Persero). Sistem ini dapat digunakan untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pelanggaran etika, *fraud*, penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, maupun pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan yang telah ditetapkan oleh PT PLN (Persero), dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, independensi, objektivitas, serta perlindungan terhadap pelapor. Melalui penerapan WBS, Perusahaan berupaya membangun budaya integritas, transparansi, dan kepatuhan di seluruh jenjang organisasi.

Sepanjang tahun 2025, PLN BBN tidak menerima maupun menemukan laporan dari karyawan mengenai pelanggaran terhadap hukum, peraturan ketenagakerjaan, maupun peraturan dan kebijakan lainnya. Kondisi ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan lingkungan kerja yang kondusif.

Equality in Competency Development

Equality efforts are also evident in employee competency development, where PLN BBN ensures that all employees have equal opportunities to participate in training. The Company consistently organizes various training/education programs for the employees to improve both technical and non-technical skills aligned with the Company's operational needs. The Company applies this step in order to ensure that every employee is prepared to face industry dynamics and the ever-evolving demands of innovation.

The Company carries out the employee competency development program following Performance Achievement Assessment Guidelines by PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), which align with the provisions of Minister of SOEs Regulation No. 2 of 2023. In its implementation, PLN BBN collaborates with educational institutions and/or other competent professional bodies in each required field. Through this collaboration, the Company strives to ensure the quality of materials, learning methods, and program relevance to improving individual and organizational performance.

Information on training activities, including the total number of participants and training hours, is further described in the Business Support Overview chapter, subchapter Employee Competency Development, in this Annual Report.

Employee Complaint Handling

PLN BBN provides facility for employees to submit complaints, grievances, or reports of alleged violations through the Whistleblowing System (WBS) mechanism integrated with PT PLN (Persero). This system can be used to report various forms of violations, including ethical violations, fraud, abuse of authority, conflicts of interest, and violations of applicable regulations and policies.

Each report received will be followed up in accordance with the handling mechanism established by PT PLN (Persero), upholding the principles of confidentiality, independence, objectivity, and protection of whistleblowers. Through the WBS application, the Company purposes to build a culture of integrity, transparency, and compliance across all levels of the organization.

Throughout 2025, PLN BBN neither received nor found any employee reports regarding violations of the law, labor regulations, or other regulations and policies. This condition reflects the Company's commitment to maintaining compliance with applicable regulations and fostering harmonious industrial relations and a conducive work environment.

Peningkatan Layanan Kepada Pelanggan
Improving Customer Services

Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi PLN BBN, sehingga kebutuhan dan harapan mereka menjadi pendorong penting bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan secara konsisten. Dalam menjalankan komitmen tersebut, PLN BBN fokus pada pengembangan serta inovasi layanan yang berkelanjutan, guna memastikan bahwa setiap solusi yang diberikan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus menjawab tantangan bisnis yang terus berkembang.

Customers are one of the primary stakeholders for PLN BBN, so their needs and expectations are key driver for the Company to continuously improve the quality of products and services consistently. In fulfilling this commitment, PLN BBN focuses on the development and continuous innovation of services, to ensure that every solution provided is able to support the achievement of sustainable development goals while solving the evolving business challenges.

Saat ini, PLN BBN melayani berbagai segmen pelanggan dari berbagai lini usaha dan kebutuhan operasional. Sejalan dengan itu, Perusahaan berupaya menghadirkan layanan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui penerapan standar layanan terbaik yang menekankan kualitas, keberlanjutan, serta kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Currently, PLN BBN serves various customer segments across different business lines and operational needs. In line with this, the Company strives to deliver services that not only provide economic and social benefits but also consider environmental preservation. The Company actualized these through the implementation of best service standards that emphasize quality, sustainability, and positive contribution to the environment and society.

Dalam memberikan layanan, PLN BBN senantiasa menyesuaikan pendekatannya dengan karakteristik kebutuhan setiap pelanggan, seiring berkembangnya portofolio dan cakupan usaha Perusahaan. Fokus utama Perusahaan adalah memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sebagai bentuk komitmen terhadap mutu layanan, PLN BBN memastikan bahwa tidak ada produk maupun layanan yang ditarik kembali, sehingga pelanggan mendapatkan jaminan kualitas yang menjadi prioritas utama bagi Perusahaan.

In delivering services, PLN BBN always tailors approach to the characteristics of each customers needs, as the Company's portfolio and business scope evolve. The Company mainly focuses to provide professional, responsive, and customer satisfaction-oriented service. As a commitment to service quality, PLN BBN ensures that no products or services are recalled, so customers receive the quality assurance that is the Company's top priority.

Sepanjang tahun 2025, PLN BBN melaksanakan berbagai upaya peningkatan kepuasan pelanggan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan mulai dari proses *loading* hingga *unloading*;
2. Pelaksanaan umpire atau uji sampling apabila terdapat keraguan atas hasil *Certificate of Analysis* (CoA);
3. Penilaian kinerja mitra pemasok berdasarkan kualitas batubara, kondisi fisik, dan ketepatan waktu pengiriman;
4. Pelaksanaan *due diligence* bagi tambang yang akan maupun telah menjalin kontrak kerja sama secara berkala;
5. Penerapan prosedur *Pre Shipment Inspection* (PSI) untuk pengiriman *trial shipment;*
6. Monitoring perjalanan transportasi batubara dari pelabuhan muat hingga PLTU tujuan; dan
7. Pengecekan berkala ke area pelabuhan muat mitra pemasok apabila diperlukan.

Throughout 2025, PLN BBN implemented various efforts to improve customer satisfaction as follows

1. Supervision from the loading process to unloading;
2. Conducting umpire or sample testing if there are doubts about the results of the Certificate of Analysis (CoA);
3. Performance evaluation of supplier partners based on coal quality, physical condition, and delivery timeliness;
4. Conducting due diligence for mines that will or have entered into cooperation contracts periodically;
5. Implementation of Pre Shipment Inspection (PSI) procedures for trial shipment deliveries;
6. Monitoring coal transportation journeys from loading ports to destination power plants; and
7. Periodic checks at supplier partners' loading port areas when necessary.

Kesetaraan Pemenuhan Kualitas Layanan kepada Pelanggan

PLN BBN berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dengan memberikan pelayanan yang adil, konsisten, dan berkualitas kepada seluruh pelanggan tanpa memandang latar belakang atau perbedaan apa pun. Komitmen ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan diperlakukan secara profesional dan berintegritas, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan serta berkelanjutan, baik dengan badan usaha milik pemerintah maupun mitra strategis lainnya.

Bagi PLN BBN, pemberian pelayanan yang setara merupakan tanggung jawab moral sekaligus kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan layanan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada setiap konsumen. Penjelasan lebih lanjut dalam aturan tersebut juga menekankan larangan untuk membeda-bedakan pelanggan dalam memberikan pelayanan maupun mutu layanan.

Dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan, PLN BBN memastikan seluruh pelanggan memperoleh perlakuan yang setara, akses yang sama terhadap produk dan layanan, serta kualitas pelayanan yang optimal. Melalui penerapan prinsip tersebut, Perusahaan berupaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan informasi produk dan layanan yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pelanggan melalui situs resmi Perusahaan https://plnbatubaraniaga.id/id. Seluruh informasi disampaikan secara jelas dan informatif untuk memastikan setiap pelanggan memperoleh pemahaman yang setara mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Selain mendukung keterbukaan informasi, langkah ini juga merupakan upaya Perusahaan dalam mencegah penyampaian klaim yang berlebihan, menyesatkan, atau berpotensi merugikan pelanggan akibat keterbatasan informasi.

Inovasi dan Pengembangan Produk/ Layanan Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2025, PLN BBN melaksanakan pengembangan infrastruktur operasional melalui peluncuran *Intermediate Stockpile–Interconnection Conveyor* di PLTU Nagan Raya 3-4 Meulaboh pada Agustus 2025. Pengembangan infrastruktur ini dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi batubara, meningkatkan efisiensi proses operasional, serta memperkuat keandalan pasokan energi bagi operasional pembangkit. Melalui inisiatif tersebut, Perusahaan berupaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendukung operasional pelanggan yang lebih stabil, efisien, dan berkelanjutan.

Equitable Service Quality Fulfillment for Customers

PLN BBN is committed to upholding the principle of equality by providing fair, consistent, and quality service to all customers regardless of background or any differences. This commitment is a crucial foundation in ensuring that every stakeholder is treated professionally and with integrity, thereby fostering mutually beneficial and sustainable relationships with both state-owned enterprises and other strategic partners.

For PLN BBN, providing equal service is both a moral responsibility and a legal obligation as stipulated in the Consumer Protection Law. This regulation affirms that business actors must provide services correctly, honestly, and non-discriminatorily to every consumer. Further explanation in the regulation also emphasizes the prohibition of differentiating customers in service delivery or service quality.

By upholding the principles of equality and fairness, PLN BBN ensures that all customers receive equal treatment, equal access to products and services, and optimal service quality. Through the application of these principles, the Company strives to continuously maintain and enhance customer trust and satisfaction.

PLN BBN actualized this commitment through the provision of transparent, accurate, and easily accessible product and service information to all customers via the Company's official website. All information is conveyed clearly and informatively to ensure that every customer gains an equal understanding of the products and services offered. Apart from supporting information transparency, this step also represents the Company's effort to prevent excessive, misleading claims or those that could potentially harm the customers due to limited information.https://plnbatubaraniaga.id/id

Innovation and Sustainable Product/ Service Development

Throughout 2025, PLN BBN developed operational infrastructure by launching the Intermediate Stockpile–Interconnection Conveyor at the Nagan Raya 3-4 Meulaboh CFPP in August 2025. This infrastructure development was undertaken to support the smooth distribution of coal, improve operational efficiency, and strengthen the reliability of energy supply for power plant operations. Through this initiative, the Company purposes to enhance services quality while supporting more stable, efficient, and sustainable customer operations.

Memberikan Perlindungan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Atas Produk/Layanan Perusahaan

Selama tahun pelaporan, PLN BBN melaksanakan berbagai upaya untuk menjamin keamanan produk dan mendukung keselamatan pelanggan, antara lain melalui verifikasi atas pengajuan *umpire test* (uji sampling) yang diajukan oleh PLTU dan/atau mitra pemasok apabila terdapat keraguan terhadap hasil *Certificate of Analysis* (CoA). Selain itu, Perusahaan juga menyusun *Non Conformity Report* (NCR) baik kepada PLTU maupun mitra pemasok batubara sebagai bentuk pengendalian kualitas guna memastikan bahwa spesifikasi batubara yang dipasok tetap sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah ditetapkan.

Produk yang ditarik Kembali

Sepanjang tahun 2025, PLN BBN tidak terdapat produk batubara yang ditarik kembali atau penarikan kembali atas produk yang telah disalurkan kepada pelanggan. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menjaga kualitas batubara melalui penerapan pengendalian mutu yang konsisten sejak tahap pengadaan, proses pengawasan di titik pemuatan, hingga distribusi kepada pelanggan. Perusahaan secara berkelanjutan memastikan bahwa setiap pasokan batubara telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, sehingga dapat mendukung operasional pelanggan secara andal dan berkelanjutan.

Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, PLN BBN menyediakan mekanisme penyampaian pengaduan yang dapat diakses melalui berbagai saluran komunikasi resmi Perusahaan. Pelanggan dapat menyampaikan keluhan, masukan, maupun pertanyaan melalui surat elektronik di kontak@plnbatubaraniaga.co.id, telepon di (021) 26963955, surat resmi, pertemuan langsung, maupun melalui unit kerja atau *Person in Charge* (PIC) yang bertanggung jawab atas hubungan pelanggan.

Setiap pengaduan yang diterima akan dikelola melalui proses yang terstruktur, mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga tindak lanjut oleh unit terkait sesuai dengan substansi permasalahan yang disampaikan. Dalam proses penyelesaiannya, Perusahaan mengedepankan prinsip responsivitas, objektivitas, transparansi, dan penyelesaian yang berorientasi pada solusi.

Hasil tindak lanjut pengaduan akan dikomunikasikan kembali kepada pelanggan sebagai bentuk akuntabilitas Perusahaan. Selain itu, seluruh pengaduan dan masukan yang diterima juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara Perusahaan dan pelanggan.

Providing Security, Health, and Safety Protection for Customers Regarding the Company's Products/Services

During the reporting year, PLN BBN carried out various efforts to ensure product safety and support customer safety, including through verification of umpire test applications (sampling tests) submitted by CFPP and/or supplier partners when there were doubts about the results of the Certificate of Analysis (CoA). More, the Company also prepared Non-Conformity Reports (NCR) for both CFPP and coal supplier partners as a form of quality control to ensure that the supplied coal specifications remained in accordance with the contracts or agreements that have been established.

Recalled Products

Throughout 2025, PLN BBN had no coal products recalled or withdrawn from customers that had already been distributed. This reflects the Company's commitment to maintaining coal quality through consistent quality control implementation from the procurement stage, supervision at loading points, through to distribution to customers. The Company continuously ensures that every coal supply meets the required specifications, thereby supporting the customers operations reliably and sustainably.

Customers Complaint Management

As part of its commitment to maintaining service quality and improving customer satisfaction, PLN BBN provides complaint submission mechanism that can be accessed through various official Company communication channels. Customers can submit complaints, feedback, or inquiries via email at kontak@plnbatubaraniaga.co.id, phone at (021) 26963955, official letters, face-to-face meetings, or through the work unit or Person in Charge (PIC) responsible for customer relations.

Every complaint received is managed through a structured process, starting from recording, verification, to follow-up by relevant units according to the substance of the issue submitted. In its resolution process, the Company prioritizes the principles of responsiveness, objectivity, transparency, and solution-oriented resolution.

The results of complaint follow-ups will be communicated back to the customer as accountability by the Company. Furthermore, all complaints and feedback received are also used as evaluation material to identify opportunities for improvement, enhance service quality, and strengthen mutually beneficial long-term relationships between the Company and its customers.

Survei Kepuasan Pelanggan

PLN BBN secara konsisten melaksanakan survei kepuasan pelanggan atau *stakeholders* survey kepada para vendor dan mitra kerja sebagai bagian dari upaya untuk memahami tingkat pengetahuan serta persepsi mereka terhadap kinerja Perusahaan. Survei ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap masukan dari para pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat. Melalui proses survei yang terstruktur, Perusahaan dapat mengevaluasi kualitas layanan, mengukur tingkat kepuasan, serta menentukan area yang membutuhkan peningkatan untuk memperkuat hubungan dan kinerja layanan ke depan.

Berdasarkan hasil survei tahun pelaporan, pelanggan memberikan penilaian yang baik terhadap berbagai aspek layanan PLN BBN, di mana parameter spesifikasi batubara memperoleh skor (4,63) yang menunjukkan bahwa spesifikasi batubara dipasok telah sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pada aspek pelayanan kualitas komunikasi memperoleh skor tertinggi yaitu (4,84), responsibilitas terhadap komplain dan permintaan pelanggan juga dinilai tinggi dengan skor (4,79), serta profesionalisme tim operasional dan keuangan memperoleh skor (4,63) yang cukup tinggi. Pencapaian ini mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam merespons kebutuhan pelanggan secara cepat dan tepat serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, aspek informasi terkait jadwal kapal juga memperoleh skor (4,53), yang menunjukkan bahwa Perusahaan telah memberikan informasi pengiriman secara cukup baik kepada pelanggan.

Dari sisi kuantitas, ketepatan jumlah pengiriman memperoleh skor (4,63) yang menunjukkan bahwa volume batubara yang dikirimkan telah sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan, sehingga mendukung kepastian pasokan bagi pelanggan. Sementara itu, ketepatan waktu pengiriman memperoleh skor (4,37) yang mencerminkan bahwa pengiriman secara umum telah berjalan sesuai jadwal, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal akurasi waktu kedatangan dan keandalan distribusi. Meskipun demikian, terdapat beberapa area yang menjadi perhatian untuk peningkatan, khususnya dalam menjaga konsistensi kualitas batubara, peningkatan akurasi dan ketepatan waktu pengiriman, serta penguatan komunikasi dan koordinasi operasional secara lebih intensif dan proaktif kepada pelanggan.

Inisiatif Program Peningkatan Kepuasan Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)*

PLN BBN menjalankan berbagai inisiatif peningkatan kepuasan yang dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan dan ekspektasi *stakeholders*. Upaya ini mencakup penguatan komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan responsif, sehingga setiap pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang akurat dan layanan yang lebih efektif.

Customers Satisfaction Survey

PLN BBN consistently conducts customer satisfaction surveys or stakeholder surveys for vendors and partners as part of its efforts to understand their level of knowledge and perception of the Company's performance. This survey is an important instrument to ensure that all input from stakeholders can be identified and followed up appropriately. Through a structured survey process, the Company can evaluate service quality, measure satisfaction levels, and determine areas that need improvement to strengthen relationships and future service performance.

Based on the survey results for the reporting year, customers rated various aspects of PLN BBN's services favorably. The coal specification parameter received a score of 4.63, indicating that the supplied coal specifications are in accordance with the agreed contracts. In terms of service quality, communication quality scored the highest at 4.84, responsiveness to customer complaints and requests also scored high at 4.79, and the professionalism of the operational and financial teams scored a fairly high 4.63. These achievements reflect the Company's ability to respond to customer needs promptly and accurately, supported by competent and integrity-driven human resources in carrying out their duties. Additionally, the aspect of information related to ship schedules scored 4.53, indicating that the Company has provided delivery information quite well to customers.

In terms of quantity, the accuracy of delivery volume scored 4.63, indicating that the coal volume delivered was according to the agreed amount, thus supporting supply certainty for customers. Meanwhile, delivery timeliness scored 4.37, reflecting that deliveries generally ran on schedule, although there is still room for improvement in arrival time accuracy and distribution reliability. However, there are several areas of concern for improvement, particularly in maintaining coal quality consistency, improving delivery accuracy and timeliness, and strengthening communication and operational coordination more intensively and proactively with the customers.

Program Initiatives for Stakeholders Satisfaction Improvement

PLN BBN carries out various satisfaction improvement initiatives designed specifically to address the needs and expectations of stakeholders. These efforts include strengthening communication to be more open, transparent, and responsive, so that every stakeholder can obtain accurate information and more effective services.

Selain itu, pada tahun 2025 Perusahaan mengimplementasikan sejumlah program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, inovasi proses bisnis, serta penyesuaian terhadap dinamika industri energi dan batubara. Program-program tersebut antara lain meliputi:

Furthermore, in 2025 the Company implemented a number of strategic programs oriented towards improving service quality, business process innovation, and adapting to the dynamics of the energy and coal industry.These programs include:

Nama Program Program Name	Kegiatan Activity	
Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Optimizing Sustainable Infrastructure Development	Perusahaan melaksanakan program pembangunan infrastruktur melalui penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di lingkungan perusahaan yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi tidak langsung bagi masyarakat sekitar. Dengan meningkatnya aktivitas operasional dan mobilitas pengguna kendaraan listrik di area tersebut, keberadaan SPKLU diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha lokal serta mendukung aktivitas ekonomi di sekitar lokasi operasional Perusahaan.	The Company applies infrastructure development program by providing Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) within the premises in South Jakarta. These facilities not only support the development of the electric vehicle ecosystem and the transition to more environmentally friendly energy sources, but also provide an indirect economic impact for the surrounding community. With the increased operational activity and mobility of electric vehicle users in the area, the presence of SPKLU is expected to encourage local business growth and support economic activity around the Company's operational locations.
Mengoptimalkan Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal Optimizing Local Workforce Involvement	Mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja serta mengoptimalkan pelibatan tenaga kerja lokal guna memberikan dampak ekonomi tidak langsung melalui penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan keahlian teknis di sektor logistik energi. Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja lokal yang terlibat dalam operasional Perusahaan mencapai 48 orang, atau setara dengan 100% dari total pegawai Perusahaan. Dari jumlah tersebut, 7 orang atau 14,58% di antaranya menduduki posisi manajer, yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan unit operasional.	Encouraging the increased workforce capacity and optimizing local workforce involvement to provide indirect economic impact through job creation and technical expertise enhancement in the energy logistics sector. By 2025, the number of local workers involved in the Company's operations reached 48 persons, equivalent to 100% of the Company's total employees. Of this number, 7 persons, or 14.58%, hold managerial positions, directly involved in strategic decision-making and operational unit management.
Mengoptimalkan Kemitraan Dengan Pelaku Usaha dan Pemasok Lokal Optimizing Partnerships with Local Business Actors and Suppliers	Selama tahun 2025, PLN BBN melakukan kerja sama dengan pemasok lokal sebanyak 33 pemasok atau sebesar 100% dari total pemasok, dengan nilai pengadaan mencapai Rp8.888.929 juta. Pelibatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pasokan energi primer, tetapi juga memberikan dampak ekonomi tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi daerah, dan pengembangan ekosistem usaha.	During 2025, PLN BBN collaborated with 33 local suppliers, representing 100% of the total, with procurement valued at Rp8,888,929 million. This engagement will not only strengthen primary energy supply security but also provide indirect economic impacts through job creation, increased regional economic activity, and the development of business ecosystems.

PLN BATUBARA NIAGA

7

Laporan Keuangan Audit

Audited Financial Report

PT PLN BATUBARA NIAGA

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2025/
31 December 2025

PT PLN BATUBARA NIAGA
Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. 10, RT.6/RW.3, Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12740
Telp : (021) 26963955 Email: kontak@plnbatubaraniaga.co.id Website: plnbatubaraniaga.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025

PT PLN BATUBARA NIAGA

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama/*Name* : Rolly
   Alamat Kantor/Office Address : Jl. Hj. Tutty Alawiyah No.10, RT.6/RW.3, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12740.
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : V.P.H Blok J2 No. 10, RT.002/007, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kramatwatu.
   Nomor telepon/*Phone number* : 0811-123-042
   Jabatan/*Position* : Plt. Direktur Utama/*Acting President Director*

2. Nama/*Name* : Joni Arifin
   Alamat Kantor/Office Address : Jl. Hj. Tutty Alawiyah No.10, RT.6/RW.3, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12740.
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Jl. Intisari Raya No.105, RT.001/009, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo.
   Nomor telepon/*Phone number* : 0821-3997-1554
   Jabatan/*Position* : Plt. Direktur Keuangan dan Human Capital/*Acting Finance and Human Capital Director*

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT PLN Batubara Niaga ("Perusahaan");

   We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT PLN Batubara Niaga (the "Company");

2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

   The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;

   All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Company's financial statements;

   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

   The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

   We are responsible for the Company's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Direksi.

For and on behalf of the Board of Directors.

METERAI TEMPEL AD91EANX254154947

Rolly
Plt. Direktur Utama/*Acting President Director*

Joni Arifin
Plt. Direktur Keuangan dan Human Capital/
Acting Finance and Human Capital Director

JAKARTA
22 Mei/May 2026

Laporan/*Report* No. 00940/2.1457/AU.1/02/1789-5/1/V/2026

Laporan auditor independen
Kepada para Pemegang Saham

PT PLN Batubara Niaga

Independent auditors' report
To the Shareholders of

PT PLN Batubara Niaga

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT PLN Batubara Niaga ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Opinion

We have audited the financial statements of PT PLN Batubara Niaga (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901/3119 2901
F: +62 (21) 5290 5555/5290 5050

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Jakarta,
22 Mei/*May* 2026

Firman Sababalat, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1789

PLN Batubara Niaga
00940/2.1457/AU.1/02/1789-5/1/V/2026

PT PLN BATUBARA NIAGA

Lampiran 1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4	74,168	24,338	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	5	1,713,183	1,910,531	*Trade receivables*
Piutang non-usaha		14,078	54,011	*Non-trade receivables*
Persediaan	6	156,397	198,969	*Inventories*
Pajak dibayar di muka, bagian lancar	10a	212,903	323,045	*Prepaid taxes, current portion*
Uang muka dan beban dibayar di muka		1,418	1,351	*Advances and prepaid expenses*
Aset lancar lainnya		6,572	4,823	*Other current assets*
Jumlah aset lancar		**2,178,719**	**2,517,068**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSET***
Pajak dibayar di muka, bagian tidak lancar	10a	685,048	604,159	*Prepaid taxes, non-current portion*
Jumlah aset tidak lancar		**685,048**	**604,159**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET		**2,863,767**	**3,121,227**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	7	1,536,512	1,940,061	*Trade payables*
Utang lain-lain	8	567,105	799,276	*Other payable*
Biaya masih harus dibayar	9	244,299	18,653	*Accrued expenses*
Utang pajak	10b			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan		-	-	*Corporate income tax* -
- Pajak lain-lain		7,926	10,487	*Other taxes* -
Jumlah liabilitas jangka pendek		**2,355,842**	**2,768,477**	***Total current liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**2,355,842**	**2,768,477**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham:				*Share capital:*
Modal dasar, ditempatkan dan dan disetor penuh 50.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	11	50,000	50,000	*Authorised, issued and fully paid 50,000 shares at par value Rp1,000,000 (full amount) per share*
Saldo laba		457,925	302,750	*Retained earnings*
JUMLAH EKUITAS		**507,925**	**352,750**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**2,863,767**	**3,121,227**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes from an integral part of these financial statements.

PT PLN BATUBARA NIAGA

Lampiran 2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
Penjualan	12	9,204,576	8,884,597	*Sales*
Beban pokok penjualan	13	(8,888,929)	(8,586,697)	*Cost of sales*
Laba bruto		**315,647**	**297,900**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi	14	(46,512)	(147,997)	*General and administrative expenses*
Penghasilan keuangan		421	1,158	*Finance income*
Beban keuangan		(40,860)	(42,938)	*Finance expense*
Beban lain-lain, bersih	15	(23,454)	(131,028)	*Other expenses, net*
Laba/(rugi) sebelum pajak		**205,242**	**(22,905)**	***Profit/(loss) before tax***
Beban pajak penghasilan	10c	(50,067)	(24,759)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan		**155,175**	**(47,664)**	***Profit/(loss) for the year***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	*Other comprehensive income for the year*
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan		**155,175**	**(47,664)**	***Total comprehensive profit/(loss) for the year***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes from an integral part of these financial statements.

PT PLN BATUBARA NIAGA

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	Modal saham/ *Share capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 1 Januari 2024	**50,000**	**350,414**	**400,414**	***Balance as at 1 January 2024***
Rugi tahun berjalan	-	(47,664)	(47,664)	*Loss for the year*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2024	**50,000**	**302,750**	**352,750**	***Balance as at 31 December 2024***
Laba tahun berjalan	-	155,175	155,175	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2025	**50,000**	**457,925**	**507,925**	***Balance as at 31 December 2025***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes from an integral part of these financial statements.

PT PLN BATUBARA NIAGA

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR** **31 DESEMBER 2025** (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)			***STATEMENT OF CASH FLOWS*** ***FOR THE YEAR ENDED*** ***31 DECEMBER 2025*** *(Expressed in millions of Rupiah)*
	2025	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	9,438,509	8,662,026	*Receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(9,614,577)	(8,896,896)	*Payments to suppliers and employees*
Penerimaan pengembalian pajak	565,521	-	*Receipts of tax refunds*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(72,044)	(132,618)	*Payment of corporate income tax*
Penerimaan pendapatan keuangan	421	1,158	*Receipts of finance income*
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	**317,830**	**(366,330)**	***Net cash provided by/ (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan *Notional Pooling*	3,802,000	617,000	*Proceeds from Notional Pooling*
Pembayaran *Notional Pooling*	(4,070,000)	(316,586)	*Payments of Notional Pooling*
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(268,000)**	**300,414**	***Net cash (used in)/ provided by financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**49,830**	**(65,916)**	***NET INCREASE/(DECREASE) CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**24,338**	**90,254**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**74,168**	**24,338**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes from an integral part of these financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT PLN Batubara Niaga ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 2 Agustus 2019 dari Ina Rosaina, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-00037730.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 22 Februari 2021 dari Miryany Usman, S.H., notaris di Jakarta, untuk mengubah maksud, tujuan dan kegiatan Perusahaan menjadi melakukan jual beli serta pengolahan Batubara untuk memenuhi pasokan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU Batubara *Independent Power Producer* ("IPP") dan kebutuhan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham mayoritas. Perubahan tersebut telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013896.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk perdagangan bahan bakar padat, cair dan produk lainnya yang berkaitan dengan itu.

Pada tanggal 25 Juli 2024, Perusahaan mendapatkan perpanjangan Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang berlaku selama 5 tahun sampai 24 Juli 2029.

Perusahaan mulai beroperasi di bulan September 2020.

Entitas induk Perusahaan adalah PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu PT PLN Batubara) ("PLN EPI"), sebuah perusahaan yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia. Entitas induk utama Perusahaan adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), sebuah perusahaan yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Warung Buncit Raya No. 10, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT PLN Batubara Niaga ("the Company") was established based on Notarial Deed No. 2 dated 2 August 2019 of Ina Rosaina, S.H., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No AHU-00037730.AH.01.01.Tahun 2019 dated 2 August 2019.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently through Notarial Deed No. 22 dated 22 February 2021 of Miryany Usman, S.H., notary in Jakarta. The amendment revised the Company's purpose, objectives, and scope of activities to include the trading and processing of coal to meet the supply requirements of PLTU units owned by Independent Power Producer ("IPP") and other related needs, in accordance with the principles of a Limited Liability Company, as well as to carry out assignments delegated by the majority Shareholder. The change was notified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0013896.AH.01.02.TAHUN 2021 *dated 5 March 2021.*

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is trading of solid and liquid fuel and other related products.

On 25 July 2024, the Company obtained an extended Coal Commodity Transportation and Sales Permit based on the Decree of the Minister of Energy and Resources, Head of Investment Coordinating Board, which is effective for 5 years until 24 July 2029.

The Company started its operation in September 2020.

The Company's parent entity is PT PLN Energi Primer Indonesia (formerly PT PLN Batubara) ("PLN EPI"), a company which is incorporated and domiciled in Indonesia. The Company's ultimate parent entity is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), a company which is incorporated and domiciled in Indonesia.

The Company's head office is located at Jl. Warung Buncit Raya No. 10, Kalibata, Pancoran District, South Jakarta, 12740.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 15 karyawan (2024: 10 karyawan) (tidak diaudit). Jumlah karyawan PLN EPI yang diperbantukan di Perusahaan di tahun 2025 adalah 5 karyawan (2024: 1 karyawan).

b. Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Plt. Komisaris Utama	Tri Joko Supriyanto	*Acting President Commissioner*
Komisaris Independen	Noor Adi Baroto	*Independent Commissioner*
Plt. Direktur Utama	Rolly	*Acting President Director*
Plt. Direktur Keuangan dan *Human Capital*	Joni Arifin	*Acting Finance and Human Capital Director*
Plt. Direktur Niaga dan Operasi	Rahmat Dian Amir	*Acting Commerce and Operation Director*

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and general information** (continued)*

As at 31 December 2025, the Company had a total number of 15 employees (2024: 10 employees), (unaudited). Total numbers of employees assigned by PLN EPI to the Company in 2025 were 5 employees (2024: 1 employee).

b. Others

As at 31 December 2025 and 2024, the composition of the Company's Commissioner and Board of Directors is as follows:

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Lihat Catatan 2b untuk informasi mata uang fungsional perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS").

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Company. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the financial statements

The preparation and presentation of the financial statements are based on going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting.

The statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Figures in the financial statements are rounded and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated. Refer to Note 2b for the information on the company's functional currency

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Untuk memberi pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Penerapan dari amendemen berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK 221 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” - Kekurangan Ketertukaran
- PSAK 117 “Kontrak Asuransi”

Penerapan dari amendemen berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

a. Basis of preparation of the financial statements *(continued)*

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2024, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Company, due to the significant nature or amount, several items of income or expenses have been shown separately.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to SFAS and IFAS

The adoption of this amendment that is effective beginning 1 January 2025, did not result in substantial changes to the Company’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

- *Amendment of SFAS No. 221 “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate” - Lack of Exchangeability*
- *SFAS 117 “Insurance Contracts”*

The adoption of this amendment that is effective beginning 1 January 2026, did not result in substantial changes to the Company’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 "Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 terkait Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- Revisi atas PSAK 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali"

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan Perusahaan.

b. Penjabaran mata uang asing

- **Mata uang fungsional dan penyajian**

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp" atau "IDR"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Perusahaan.

- **Transaksi dan saldo**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

a. Basis of preparation of the financial statements *(continued)*

Changes to SFAS and IFAS *(continued)*

- *Amendment of SFAS 109 and SFAS 107 "Classification and Measurement of Financial Instruments"*
- *Amendments to SFAS 109 and SFAS 107 of Contracts Referencing Nature-dependent Electricity*
- *Revision to SFAS No. 338 "Business Combinations of Entities Under Common Control"*

The adoption of the new standard is effective beginning 1 January 2027. Retrospective application is required, and the comparative information for the financial year ending 31 December 2026 will be restated in accordance with this standard:

- *SFAS 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements"*

As at the date of these financial statements, the Company is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations on the Company's financial statements.

b. Foreign currency translation

- ***Functional and presentation currency***

Items included in the financial statements entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp" or "IDR"), which is the functional currency of the Company and presentation currency of the Company.

- ***Transactions and balances***

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah using the closing exchange rate. The exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains or losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Mata uang			*Currency*
Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS")	16,720	16,157	*United States of Dollar ("US Dollar")*

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

b. Foreign currency translation *(continued)*

As at the statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the exchange rates prevailing at the date of the statement of financial position published by Bank Indonesia were as follows:

c. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties as defined under SFAS No. 224, "Related Parties Disclosures", as follows:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  (i) Has control or joint control over the reporting entity;
  (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
  (iii) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
  (i) The entity and the reporting entity are members of the same Group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
  (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member);
  (iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
  (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
  (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
(viii) Entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah Indonesia, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

e. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang dapat diterima dari pelanggan atas penjualan batubara dan jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha normal. Piutang non-usaha merupakan saldo piutang yang tidak terkait dengan kegiatan usaha normal Perusahaan. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Transactions with related parties *(continued)*

(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

(vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or

(viii) The entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to the Government of the Republic of Indonesia, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entities include entities which are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

e. Trade receivables and non-trade receivables

Trade receivables represent amounts due from customers for coal sold and services performed in the normal course of business. Other receivables represent receivables that are not related to the normal business activities of the Company. If receivables are expected to be collected within one year or less, they are classified as current assets. Otherwise, the receivables are presented as non-current assets in the statement of financial position.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Piutang usaha dan piutang non-usaha (lanjutan)

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap *item* baris yang sama.

f. Aset keuangan

I. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah memilih tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

e. Trade receivables and non-trade receivables *(continued)*

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

f. Financial assets

I. Classification, recognition and measurement

The Company classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI"); and*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the Company's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI").

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

I. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam penghasilan atau beban lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam penghasilan dan beban kurs mata uang asing dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

I. Classification, recognition and measurement *(continued)*

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are SPPI.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Company classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent SPPI are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

- *Fair value through other comprehensive income: Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, in cases where the assets' cash flows represent SPPI, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income and expenses. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses on foreign exchanges, net and impairment expenses in other expenses.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

I. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan bersih dalam laba rugi.

II. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

III. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

g. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

I. Classification, recognition and measurement *(continued)*

Debt instruments (continued)

- *Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship, is recognised in profit or loss and presented net in profit or loss.*

II. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

III. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset, and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

g. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perusahaan menerapkan "pendekatan yang disederhanakan" untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

h. Persediaan batubara

Persediaan batubara merupakan batubara yang menjadi hak Perusahaan dan dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak yang mencakup harga pembelian dan biaya pengangkutan yang melekat sampai batubara melewati pelabuhan bongkar. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan beban penjualan.

Penyisihan persediaan batubara usang ditentukan berdasarkan estimasi penjualan persediaan pada masa mendatang.

i. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok di luar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

j. Modal saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

g. Impairment of financial assets *(continued)*

The Company applies the "simplified approach" to measuring expected credit losses ("ECL") which uses a lifetime expected credit loss allowance for all trade receivables and other receivables without significant financing components. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception of the receivables which can be assessed at their own rating of expected credit losses.

h. Coal inventory

Coal inventory represents the Company's entitlement to coal on hand and is valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined on the purchase price and the respective transportaion costs until such coal passes at the discharging port. Net realisable value is the estimated sales amount in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and selling expenses.

An allowance for obsolete coal inventory is determined on the basis of estimated future usage or sale of inventory items.

i. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired out of the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

j. Share capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Penjualan batubara

Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika pengendalian berpindah ke pelanggan. Pengendalian beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika produk dimuat ke kapal dimana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Perusahaan menjual batubara dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Perusahaan tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban pelaksanaan, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu juga, Perusahaan menjual batubara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Perusahaan sampai batubara melewati pelabuhan bongkar. Oleh karena itu, Perusahaan menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban pelaksanaan dengan penjualan batubara dikarenakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu Perusahaan tidak memiliki kewajiban pelaksanaan terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa atas jasa penyewaan *Intermediate Stockpile* ("ISP") dan *Interconnecting Conveyor* ("IC") diakui pada akhir bulan selama periode sewa diberikan kepada pelanggan.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

l. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di rugi komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam rugi komprehensif lain atau ekuitas.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

k. Revenue and expense recognition

Revenue recognition

Sales of coal

Sales revenue is recognised on each individual sale when control transfers to the customer. Control passes to the customer and sales revenue is recognised when the product is loaded onto the vessel on which the coal will be shipped to the destination port or the customer's premises.

The Company generally sells its coal products under Free on Board ("FOB") terms, where the Company has no responsibility for freight or insurance once control of the goods has passed at the loading port. For this term there is only one performance obligation, being for provision of product at the point where control passes. In addition, the Company also sells coal under Cost, Insurance and Freight ("CIF") terms, but under the sales agreement, the title and risk of loss of coal shall remain with the Company until such coal passes at the discharging port. As such, the Company considers that the insurance and freight costs are not separate performance obligations but one performance obligation with the sale of coal due to the control over coal supplies passing to the buyer when the coal has arrived at the buyer's location. Accordingly, the Company does not have any separate performance obligations for the transportation and insurance services provided.

Lease income

Lease income from Intermediate Stockpile ("ISP") and Interconnecting Conveyor ("IC") is recognized at the end of each month during the lease period provided to the customer.

Expenses recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

l. Current and deferred income tax

The tax expense comprised current and deferred taxes. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive loss or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive loss or directly in equity, respectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara di mana Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak atas dalam ventura bersama dan asosiasi dimana Perusahaan dapat mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer dan kemungkinan perbedaan tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

I. Current and deferred income tax *(continued)*

The current income tax is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in the annual tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; or deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction effects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in joint ventures and associates where the Company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Perusahaan telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan Perusahaan yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Perusahaan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini:

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Company has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the financial results or financial position of the Company as reported in future years.

Critical accounting estimates and assumptions

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below:

Income taxes

The calculations of income tax expenses for the Company require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimation and assumption regarding the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Provisi atas KKE piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Perusahaan yang diobservasi. Perusahaan akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi, dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Provision for ECL of trade receivables and other financial asset

The Company uses a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating and other matters).

The provision matrix is initially based on the Company's historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions, and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of a customer's actual default in the future.

4. KAS DAN SETARA KAS / ***4. CASH AND CASH EQUIVALENTS***

	2025	**2024**	
Kas dalam perjalanan	-	20,000	*Cash in transit*
Kas di bank			*Cash in banks*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	74,167	4,337	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank BNI")	1	1	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank BNI")*
	74,168	**24,338**	

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 16 for details of related party transactions.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 16)	1,006,224	1,004,749	*Related parties (Note 16)*
Pihak ketiga	828,466	1,023,941	*Third parties*
	1,834,690	2,028,690	
Cadangan kerugian penurunan nilai - pihak ketiga	(121,507)	(118,159)	*Provision for impairment - third parties*
	1,713,183	**1,910,531**	

Analisis umur piutang usaha yang belum jatuh tempo atau lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Aging analysis of trade receivables not yet overdue or overdue but not impaired is as follows:

	2025	2024	
Lancar	1,337,869	1,226,371	*Current*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 30 hari	11,995	226,244	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	43,783	80,529	*31 - 60 days*
> 60 hari	441,043	495,546	*> 60 days*
	1,834,690	2,028,690	
Cadangan kerugian penurunan nilai - pihak ketiga	(121,507)	(118,159)	*Provision for impairment - third parties*
	1,713,183	**1,910,531**	

Mutasi provisi penurunan nilai piutang usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

Movements in the Company's provision for impairment of trade receivables is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	118,159	-	*Balance at beginning*
Penambahan	3,348	118,159	*Additions*
Saldo akhir	**121,507**	**118,159**	*Ending balance*

Berdasarkan penilaian manajemen terhadap penyisihan KKE atas piutang usaha, manajemen berpendapat bahwa penyisihan KKE telah cukup untuk menutupi penurunan nilai piutang usaha.

Based on management's assessment of the allowance for ECL on trade receivables, management is of the opinion that the allowance for ECL is sufficient to cover impairment of trade receivables.

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 16 for details of related party transactions.

6. PERSEDIAAN BATUBARA / *6. COAL INVENTORY*

	2025	2024	
Batubara	**156,397**	**198,969**	*Coal*

Manajemen berpendapat nilai realisasi neto persediaan masih melebihi nilai tercatat persediaan batubara, sehingga tidak diperlukan adanya provisi persediaan batubara usang dan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025.

Management believes that the net realisable value of coal inventory exceeds the carrying amount of coal inventory, and therefore, a provision for obsolete stock and decline in value is not considered necessary as at 31 December 2025.

7. UTANG USAHA / *7. TRADE PAYABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 16)	357,974	98,061	*Related parties (Note 16)*
Pihak ketiga	1,178,538	1,842,000	*Third parties*
	1,536,512	**1,940,061**	

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 16 for details of related party transactions.

8. UTANG LAIN-LAIN / *8. OTHER PAYABLE*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 16)	**567,105**	**799,276**	*Related party (Note 16)*

Pada tanggal 30 September 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian Pelayanan Jasa *Notional Pooling* dengan PLN dan Bank BNI. Adapun perjanjian ini adalah untuk menyediakan layanan manajemen integrasi kas dalam rangka memfasilitasi kebutuhan PLN grup guna mengelola likuiditas keuangan secara efisien. Saldo *Notional Pooling* Perusahaan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp567.105 (2024: Rp799.276). Perjanjian ini tidak mengatur pembatasan yang harus dipenuhi Perusahaan dan tidak dijamin dengan aset tertentu yang dimiliki Perusahaan.

On 30 September 2022, the Company entered Notional Pooling agreement with PLN and Bank BNI. This agreement's purpose is to facilitate the PLN Group's needs in managing financial liquidity efficiently. As of 31 December 2025, the Notional Pooling balance amounting to Rp567,105 (2024: Rp799,276). This agreement does not impose any restrictions on the Company and is not secured by any specific assets owned by the Company.

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 16 for details of related party transactions.

9. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / *9. ACCRUED EXPENSES*

	2025	2024	
Pengangkutan batubara	234,002	9,268	*Transportation of coal*
Gaji dan insentif	3,376	6,722	*Salaries and incentive*
Lain-lain	6,921	2,663	*Others*
	244,299	**18,653**	

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 16 for details of related party transactions.

10. PERPAJAKAN / *10. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	2025	2024	
Pajak penghasilan			*Corporate income tax*
- 2025	21,977	-	*2025 -*
- 2024	108,999	106,732	*2024 -*
- 2023	-	49,883	*2023 -*
	130,976	**156,615**	

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / *10. TAXATION (continued)*

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan) / *a. Prepaid taxes (continued)*

	2025	2024	
Pajak lain-lain			*Other taxes*
Pajak pertambahan nilai ("PPN")	766,975	770,589	*Value added tax ("VAT")*
	897,951	**927,204**	
Dikurangi: bagian lancar	**(212,903)**	**(323,045)**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**685,048**	**604,159**	***Non-current portion***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2025	2024	
Pajak penghasilan:			*Corporate income tax:*
- Pasal 25	-	-	*Article 25 -*
	-	-	
Pajak lain-lain:			*Other taxes:*
- Pasal 22	4,474	7,730	*Article 22 -*
- Pasal 15	2,273	1,520	*Article 15 -*
- Pasal 23	902	775	*Article 23 -*
- Pasal 21	106	297	*Article 21 -*
- Lain-lain	171	165	*Other -*
	7,926	**10,487**	
	7,926	**10,487**	

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expense*

	2025	2024	
Kini	50,067	24,759	*Current*
Tangguhan	-	-	*Deferred*
	50,067	**24,759**	

Perhitungan beban pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut: / *The calculation of the current corporate income tax expense is as follows:*

	2025	2024	
Laba/(rugi) sebelum pajak Perusahaan	205,242	(22,905)	*The Company's profit/(loss) before tax*
Koreksi fiskal:			*Fiscal corrections:*
Penghasilan keuangan yang dikenakan pajak final	(421)	(1,158)	*Finance income subjected to final tax*
Pendapatan lain-lain yang telah dikenakan pajak final	-	(119)	*Other income subject to final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	22,757	136,724	*Non-deductible expenses*
Laba fiskal	227,578	112,542	*Taxable income*

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***10. TAXATION*** *(continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / ***c. Income tax expense*** *(continued)*

	2025	2024	
Beban pajak penghasilan badan dihitung dengan tarif yang berlaku	50,067	24,759	*Current corporate income tax expense calculated with applicable tax rate*
Dikurangi pajak dibayar di muka:			*Less prepaid taxes:*
- Pasal 22	(72,044)	(128,114)	*Article 22 -*
- Pasal 25	-	(3,377)	*Article 25 -*
Lebih bayar pajak penghasilan badan	(21,977)	(106,732)	*Over payment of corporate income tax*

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan saat SPT tahunan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when annual tax returns are filed with the Directorate General of Tax ("DGT").

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perhitungan pajak teoritis atas laba sebelum pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between tax expense and the theoretical tax amount on the Company's profit before tax is as follows:

	2025	2024	
Laba/(rugi) sebelum pajak	205,242	(22,905)	*Profit/(loss) before tax*
Pajak yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	45,153	(5,039)	*Income tax calculated at applicable tax rate*
Penghasilan keuangan yang dikenakan pajak final	(93)	(255)	*Finance income subjected to final tax*
Penghasilan lain-lain yang telah dikenakan pajak final	-	(26)	*Other income subject to final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	5,007	30,079	*Non-deductible expenses*
	50,067	**24,759**	

d. Pajak tangguhan / ***d. Deferred tax***

Manajemen berkeyakinan untuk tidak mengakui pajak tangguhan pada saat ini, karena adanya ketidakpastian apakah laba yang akan diperoleh dalam jangka waktu yang disyaratkan cukup untuk memanfaatkan pajak tangguhan tersebut.

Management believes not to recognize deferred tax at this time, as it is not probable that sufficient profits will be generated in the period required to utilise the deferred tax.

e. Audit pajak / ***e. Tax audit***

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan telah mengajukan keberatan kepada DJP atas hasil pemeriksaan pajak badan untuk tahun 2021. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan Perusahaan kurang bayar atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar Rp31.408. Keputusan atas keberatan tersebut ditolak oleh DJP, sehingga manajemen memutuskan untuk mengajukan permohonan banding.

As of the date of these financial statements, the Company has filed an objection with the DGT regarding the results of the corporate tax audit for the year 2021. The audit results indicated an underpayment of Value Added Tax ("VAT") by the Company amounting to Rp31,408. The decision on this objection was rejected by the DGT, leading management to decide to submit an appeal.

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Audit pajak (lanjutan)

Selain itu, Perusahaan juga mengajukan restitusi atas kelebihan bayar pajak badan untuk tahun 2024 sebesar Rp108.999. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp565.521 atas PPN dan PPh badan tahun 2023. Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan dalam proses audit pajak badan dan PPN untuk tahun pajak 2024.

f. Tarif pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang- Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP menetapkan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

g. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, dan menyetorkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

h. Aturan Model Pilar Dua *Organization for Economic Cooperation and Development* ("OECD")

Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") telah diundangkan di Indonesia, yurisdiksi dimana tempat Perseroan didirikan, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Perusahaan berada dalam cakupan ketentuan model OECD Pilar Dua dan menerapkan pengecualian untuk pengakuan serta pengungkapan informasi terkait aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berhubungan dengan pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025.

Entitas induk utama ("UPE") dari Perusahaan berada dalam lingkup aturan model OECD Pilar Dua dan telah menerapkan pengecualian untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025. Undang-undang Pilar Dua telah diundangkan atau hampir diundangkan di beberapa yurisdiksi tempat UPE beroperasi. Undang-undang tersebut mulai berlaku untuk tahun keuangan Perusahaan yang berakhir setelah 31 Desember 2024. UPE tunduk pada undang-undang yang telah diundangkan atau hampir diundangkan tersebut dan telah melakukan penilaian terhadap potensi eksposurnya terhadap pajak penghasilan Pilar Dua.

***10. TAXATION** (continued)*

***e. Tax audit** (continued)*

Additionally, the Company has filed for a refund of overpaid corporate tax for the year 2024 amounting to Rp108,999. During the year ended 31 December 2025, the Company received a tax refund of Rp565,521 for VAT and CIT for the year 2023. As of the date of these financial statements, the Company undergoing a tax audit for corporate income tax and VAT for the fiscal year 2024.

f. Tax rate

On 29 October 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law stipulates that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

g. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

h. Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules

The Ministry of Finance ("MoF") Regulation No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025.

The Company is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and applied the exception to recognizing and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes from 1 January 2025.

The ultimate parent entity ("UPE") of the Company is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and has applied the exception to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes from 1 January 2025. Pillar Two legislation has been enacted or substantially enacted in certain jurisdictions in which the UPE operates. The legislation has become effective for the Company's financial year ended after 31 December 2024. The UPE is subject to the enacted or substantially enacted legislation and has conducted an assessment of its potential exposure to Pillar Two income taxes.

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Aturan Model Pilar Dua *Organization for Economic Cooperation and Development* ("OECD") (lanjutan)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, tingkat pajak efektif di seluruh yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi berada di atas 15%. Oleh karena itu, tidak diperlukan pajak tambahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

***10. TAXATION** (continued)*

***h. Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules** (continued)*

Based on the assessment, the effective tax rates in all jurisdictions in which the Company operates are above 15%. Therefore, there was no top-up tax required for the year ended 31 December 2025.

11. MODAL SAHAM

a. Komposisi pemegang saham

11. SHARE CAPITAL

a. Composition of shareholders

Nama pemegang saham/ *Name of shareholders*	Jumlah saham/*Number of share*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up share capital*
PLN EPI	49,950	99.90%	49,950
PT PLN EPI Investasi*	50	0.1%	50
	50,000	**100%**	**50,000**

*) Per tanggal 19 Maret 2025 PT PLN Batubara Inventasi berubah nama menjadi PT PLN EPI Investasi.

*) *As of 19 March 2025, PT PLN Batubara Investasi changed its name to PT PLN EPI Investasi.*

b. Cadangan wajib

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap perusahaan untuk membentuk cadangan wajib sampai cadangan menjadi paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu tertentu yang ditetapkan untuk pembentukan cadangan wajib tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan belum membentuk cadangan wajib tersebut.

b. Statutory reserve

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 introduced in August 2007, requires the establishment of a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of a company's issued and paid up capital. There is no set period of time over which this reserve should be established. On 31 December 2025 and 2024, the Company has not yet established the statutory reserve.

12. PENJUALAN

12. SALES

	2025	2024	
Penjualan batubara:			*Coal sales:*
Pihak berelasi (Catatan 16)	7,156,170	6,297,546	*Related parties (Note 16)*
Pihak ketiga	2,048,406	2,587,051	*Third parties*
	9,204,576	**8,884,597**	

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 16 for details of related party transactions.

13. BEBAN POKOK PENJUALAN / *13. COST OF SALES*

	2025	2024	
Beban langsung:			*Direct costs:*
Pengangkutan batubara	1,957,774	2,048,651	*Coal transportation*
Sewa ISP dan IC	15,629	-	*Lease ISP and IC*
Analisis batubara	6,522	9,918	*Coal analysis*
Asuransi pengangkutan	3,066	8,484	*Cargo insurance*
Lain-lain	6,519	2,953	*Others*
	1,989,510	2,070,006	
Persediaan awal tahun	198,969	372,974	*Beginning inventories*
Pembelian batubara	6,856,847	6,342,686	*Purchase of coal*
Persediaan akhir tahun	(156,397)	(198,969)	*Ending inventories*
	8,888,929	**8,586,697**	

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi. / *Refer to Note 16 for details of related party transactions.*

14. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *14. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2025	2024	
Beban kepegawaian	6,405	9,883	*Employee expenses*
Kerugian penurunan nilai piutang usaha	3,348	118,159	*Impairment of trade receivables*
Lain-lain	36,759	19,955	*Others*
	46,512	**147,997**	

15. BEBAN LAIN-LAIN, BERSIH / *15. OTHER EXPENSES, NET*

	2025	2024	
Penalti	3,867	86,870	*Penalties*
Beban lain-lain, bersih	19,587	44,158	*Other expenses, net*
	23,454	**131,028**	

Lihat Catatan 16 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi. / *Refer to Note 16 for details of related party transactions.*

16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *16. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Sifat hubungan berelasi / ***Nature of related parties***

a. PLN EPI merupakan entitas induk Perusahaan. / *PLN EPI is the parent entity of the Company.*
b. PT PLN Batubara Investasi merupakan pemegang saham Perusahaan. / *PT PLN Batubara Investasi is the shareholder of the Company.*
c. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan BUMN lainnya. / *The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PLN and other SOEs.*
d. Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan. / *The Commissioner and Board of Directors are the key management of the Company.*

16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

16. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Entitas/*Parties*	Hubungan/*Relationships*	Transaksi/*Transactions*
PLN EPI	Entitas induk/*Parent entity*	Utang usaha/*Trade payables*
PLN	Entitas induk utama Perusahaan/ *Ultimate parent entity*	Piutang usaha, utang-lain-lain, dan penjualan/*Trade receivables, other payables, and sales*
PIP	Entitas sepengendali dengan induk Perusahaan/*Entity under common control with parent of the Company*	Piutang usaha, piutang non-usaha, dan penjualan/*Trade receivables, non-trade receivables, and sales*
PNP	Entitas sepengendali dengan induk Perusahaan/*Entity under common control with parent of the Company*	Piutang usaha, piutang non-usaha, dan penjualan/*Trade receivables, non-trade receivables, and sales*
PLN Batam	Entitas sepengendali dengan induk Perusahaan/*Entity under common control with parent of the Company*	Piutang usaha dan penjualan/ *Trade receivables and sales*
SGPJB	Ventura bersama PNP, entitas sepengendali dengan induk Perusahaan/*Joint venture of PNP, entity under common control with parent of the Company*	Piutang usaha dan penjualan/ *Trade receivables and sales*
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (“BAG”)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/*Entity under common control with the Company*	Utang usaha dan beban pokok penjualan/*Trade payables and cost of sales*
PT Banyan Koalindo Lestari (“BKL”)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/*Entity under common control with the Company*	Utang usaha dan beban pokok penjualan/*Trade payables and cost of sales*
PT Haleyora Power Indo (“HPI”)	Entitas anak PT Haleyora Power, entitas sepengendali dengan Induk Perusahaan/*Subsidiary of PT Haleyora Power, entity under common control with parent of the Company*	Utang usaha dan beban umum dan administrasi/*Trade payables and General and administrative expenses*
Bank Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*
Bank BNI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*

16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) / ***Balances and transactions with related parties*** *(continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi yang tidak diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan ini adalah sebagai berikut:

Related party balances and transactions not disclosed elsewhere in these financial statements are as follows:

	2025	2024	
Penjualan			***Sales***
PNP	1,907,559	1,693,803	*PNP*
SGPJB	1,826,723	1,975,247	*SGPJB*
PLN	1,756,345	617,365	*PLN*
PIP	1,374,350	1,800,879	*PIP*
PLN Batam	291,193	210,252	*PLN Batam*
	7,156,170	6,297,546	
Beban pokok penjualan			***Cost of sales***
BAG	1,174,447	183,824	*BAG*
BKL	16,412	-	*BKL*
	1,190,859	183,824	
Beban umum dan administrasi			***General and administrative expenses***
HPI	2,239	-	*HPI*
Piutang usaha			***Trade receivables***
SGPJB	515,114	231,405	*SGPJB*
PLN	284,176	246,285	*PLN*
PNP	145,273	218,141	*PNP*
PIP	49,213	271,993	*PIP*
PLN Batam	12,448	36,925	*PLN Batam*
	1,006,224	1,004,749	
Piutang non-usaha			***Non-trade receivables***
PNP	12,440	12,440	*PNP*
PIP	1,638	41,571	*PIP*
	14,078	54,011	
Utang usaha			***Trade payables***
BAG	313,833	55,332	*BAG*
PLN EPI	42,729	42,729	*PLN EPI*
BKL	1,412	-	*BKL*
	357,974	98,061	
Biaya masih harus dibayar			***Accrued expenses***
BAG	219,454	-	*BAG*
HPI	1,039	-	*HPI*
	220,493	-	
Utang lain-lain			***Other payable***
PLN	567,105	799,276	*PLN*

Kebijakan harga Perusahaan yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada harga di dalam kontrak.

The Company pricing policy related to transactions with related parties is set based on contracted prices.

Jumlah kompensasi Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.510 dan Rp4.498.

Total compensation of the Company's Commissioner and the Board of Directors in 2025 and 2024 were Rp5,510 and Rp4,498, respectively.

16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Seluruh kompensasi kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

16. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Balances and transactions with related parties *(continued)*

All the remunerations to the Company's Commissioner and the Board of Directors represent short-term employee benefits.

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINGENSI

a. Perjanjian penjualan batubara

i. Pada tanggal 17 Februari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pasokan Batubara CIF dengan PLN EPI, pihak berelasi, dimana Perusahaan bersedia untuk memenuhi kebutuhan Batubara unit-unit pembangkit listrik milik PNP. Dalam perjanjian tersebut Perusahaan berkomitmen untuk menjual 1,07 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

ii. Pada tanggal 16 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pasokan Batubara CIF dengan PLN EPI, pihak berelasi, dimana Perusahaan bersedia memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PIP dan anak perusahaannya dengan total 905 ribu metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

iii. Pada tanggal 15 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pasokan Batubara CIF dengan PLN EPI, pihak berelasi, dimana Perusahaan bersedia untuk memenuhi kebutuhan batubara unit-unit pembangkit listrik milik PLN dengan total 825 ribu metrik ton batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

iv. Pada tanggal 31 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pasokan Batubara CIF dengan SGPJB, dimana Perusahaan bersedia memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan batubara pembangkit listrik di PLTU Jawa-7 dengan total 1,05 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

b. Perjanjian pembelian batubara

i. Pada tanggal 3 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Jhonlin Group dengan sumber tambang PT Arutmin Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN Group dan IPP dengan total 3 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Coal sales agreements

i. On 17 February 2025, the Company entered a Coal Supply Agreement CIF with PLN EPI, related party, where the Company agreed to supply the coal demands for PLTU units owned by PNP. In the contract, the Company has commitments to sell 1.07 million metric tonnes of coal. This contract will be valid until 31 December 2025.

ii. On 16 January 2025, the Company entered a Coal Supply Agreement CIF with PLN EPI, related party, where the Company agreed to supply the coal demands for PLTU units owned by PIP and its subsidiaries with total amounting 905 thousand metric tonnes of coal. This agreement will be valid until 31 December 2025.

iii. On 15 January 2025, the Company entered a Coal Supply Agreement CIF with PLN EPI, related party, where the Company agreed to supply the coal demands for PLTU units owned by PLN with total amounting 825 thousand metric tonnes of coal. This agreement will be valid until 31 December 2025.

iv. On 31 January 2025, the Company entered a Coal Supply Agreement CIF with SGPJB, where the Company agreed to supply the coal demands of power plant at PLTU Jawa-7 with total amounting 1.05 million metric tonnes of coal. This agreement will be valid until 31 December 2025.

b. Coal purchase agreements

i. On 3 January 2025, the Company entered a Coal Purchase Agreement (FOB) with PT Jhonlin Group with coal supplied from PT Arutmin Indonesia mining sources, to supply the coal demands for PLTU units owned by PLN Group and IPP with total amounting 3 million metric tonnes of coal. This agreement will be valid until 31 December 2025.

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINGENSI (lanjutan)

b. Perjanjian pembelian Batubara (lanjutan)

ii. Pada tanggal 20 November 2024, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Antang Gunung Meratus, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN dan IPP dengan total 620.000 metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

iii. Pada tanggal 20 November 2024, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Borneo Indobara, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN dan IPP dengan total 1,2 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

iv. Pada tanggal 31 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Jhonlin Group dengan sumber tambang PT Bangun Karya Pratama Lestari, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN dan anak perusahaannya dengan total 1 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

v. Pada tanggal 3 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Mifa Bersaudara, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN dan anak perusahaannya dengan total 1,2 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

vi. Pada tanggal 2 Januari 2025, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Pembelian Batubara (FOB) dengan PT Tiwa Abadi, untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU milik PLN dan anak perusahaannya dengan total 1,2 juta metrik ton batubara. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

c. Perjanjian sewa ISP dan IC

Pada tanggal 24 Juni 2024, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kontrak Jasa Penyediaan (Pembangunan dan Pengelolaan) ISP dan IC PLTU Meulaboh Unit 3 & 4 dengan Konsorsium PT Adhi Guna Putera dan PT Pelabuhan Bara Utama ("PT AGP-PBU"), sebagai tindaklanjut penugasan dari pemegang saham (PLN EPI) untuk menyediakan tempat penyimpanan batubara tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan batubara PLTU Meulaboh 3 & 4.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Coal purchase agreements *(continued)*

ii. On 2 January 2024, the Company entered a Coal Purchase Agreement (FOB) with PT Antang Gunung Meratus, to supply the coal demands for PLTU units owned by PLN and IPP with total amounting 620,000 metric tonnes of coal. This agreement is valid until 31 December 2025.

iii. On 20 November 2024, the Company entered a Coal Purchase Agreement (FOB) with PT Borneo Indobara, to supply the coal demands for PLTU units owned by PLN and IPP with total amounting 1.2 million metric tonnes of coal. This agreement is valid until 31 December 2025.

iv. On 31 January 2025, the Company entered a Coal Purchase Agreement (FOB) with PT Jhonlin Group, with coal supplied from PT bangun Karya Pratama Lestari mining source, to supply the coal demands for PLTU units owned by PLN and its subsidiaries with total amounting 1 million metric tonnes of coal. This agreement is valid until 31 December 2025.

v. On 3 January 2025, the Company entered a Coal Purchase Agreement (FOB) with PT Mifa Bersaudara, to supply the coal demands for PLTU units owned by PLN and its subsidiaries with total amounting 1.2 million metric tonnes of coal. This agreement is valid until 31 December 2025.

vi. On 2 January 2025, the Company entered a Coal Purchase Agreement (FOB) with PT Tiwa Abadi, to supply the coal demands for PLTU units owned by PLN and its subsidiaries with total amounting 1.2 million metric tonnes of coal. This agreement is valid until 31 December 2025.

c. ISP and IC lease agreements

On 24 June 2024, the Company entered into a Service Contract Agreement for the Provision (Construction and Management) of ISP and IC for PLTU Meulaboh Units 3 & 4 with a Consortium consisting of PT Adhi Guna Putera and PT Pelabuhan Bara Utama ("PT AGP-PBU"). This agreement serves as a follow-up to the assignment from the shareholder (PLN EPI) to provide additional coal storage facilities to meet the coal requirements of PLTU Meulaboh 3 & 4.

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINGENSI (lanjutan)

c. Perjanjian sewa ISP dan IC (lanjutan)

Perjanjian ini telah diamandemen sebanyak empat kali, dengan perubahan utama mencakup penyesuaian tanggal mulai beroperasinya fasilitas menjadi 1 Agustus 2025, pengambilan minimum bulanan menjadi 130.000 MT per bulan (1,56 juta MT per tahun), serta penyesuaian jangka waktu perjanjian dari 25 tahun menjadi 24 tahun mengikuti masa berlaku *Coal Supply Agreement* antara Perusahaan dengan PT Meulaboh Power Generation.

d. Peraturan Pemerintah No. 36/2024

Pada tanggal 30 September 2024, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 36/2024 yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan tarif dan jenis PNBP yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan, yaitu PP No. 12/2014, PP No. 33/2014, dan PP No. 44/2014.

Berdasarkan peraturan ini, diatur beberapa jenis PNBP yang berlaku, termasuk denda administratif atas pelanggaran, perizinan dan penyusunan dokumen lingkungan.

Manajemen menilai bahwa saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap Perusahaan dari peraturan baru tersebut.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. ISC and IC lease agreements *(continued)*

The agreement has been amended four times, with key revisions including the adjustment of the facility's operational commencement date to 1 August 2025, the Monthly Minimum Offtake to 130,000 MT per month (1.56 million MT per year), and the contract duration from 25 years to 24 years, aligning with the term of the Coal Supply Agreement between the Company and PT Meulaboh Power Generation.

d. Government Regulation No. 36/2024

On 30 September 2024, the Government issued Government Regulation No. 36/2024 which regulates the Types and Rates of Non-Tax State Revenue ("PNBP") applicable in the Ministry of Environment and Forestry, where this regulation was made to adjust the rates and types of PNBP previously regulated in several regulations, namely GR No. 12/2014, GR No. 33/2014, and GR No. 44/2014.

Based on this regulation, several types of PNBP are regulated, including administrative fines for violations, licensing and preparation of environmental documents.

Management assesses that there is no significant impact on the Company from the new regulation.

18. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang non-usaha sebesar Rp1.801.429 (2024: Rp1.988.880). Perusahaan hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2025, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain dan biaya masih harus dibayar sebesar Rp2.344.540 (2024: Rp2.751.268). Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

18. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

As at 31 December 2025, the Company's financial assets comprised cash and cash equivalents, trade receivables and non-trade receivables amounted to Rp1,801,429 (2024: Rp1,988,880). The Company only has financial assets categorised as financial assets held at amortised cost.

As at 31 December 2025, the Company's financial liabilities comprised trade payables, other payables and accrued expenses amounted to Rp2,344,540 (2024: Rp2,751,268). The Company only has financial liabilities categorised as financial liabilities held at amortised cost.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

I. Faktor risiko keuangan

Aktivitas Perusahaan rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perusahaan.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

I. Financial risk factors

The Company's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Company's financial performance.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko pasar

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Secara kas, mayoritas transaksi Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, Perusahaan menilai bahwa risiko nilai tukar mata uang asing adalah minimal.

ii. Risiko suku bunga

Eksposur terhadap suku bunga dimonitor untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang adalah kas dan setara kas. Risiko pengaruh suku bunga mengambang pada kas dan setara kas tidak signifikan.

b. Risiko kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang non-usaha.

Kebijakan umum Perusahaan untuk penjualan batubara ke pelanggan baru dan yang sudah ada adalah sebagai berikut:

- Menyeleksi pelanggan-pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat serta reputasi yang baik.
- Penerimaan pelanggan baru dan penjualan batubara disetujui oleh karyawan yang berwenang sesuai dengan struktur pendelegasian wewenang yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Untuk piutang usaha, Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

I. Financial risk factors *(continued)*

Risk management is the responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Company's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and the liquidity risk.

a. Market risk

i. Foreign exchange risk

On a cash basis, the majority of the Company's transactions are denominated in Rupiah, which reduces the impact of fluctuations in foreign exchange rates. Therefore, the Company assesses the foreign exchange risk as minimal.

ii. Interest rate risk

Interest rate exposure is monitored to minimise any negative impact to the Company.

As at 31 December 2025, the financial assets and financial liabilities of the Company which are impacted by floating interest rates are cash and cash equivalents. Floating interest rate risk on cash and cash equivalents is not significant.

b. Credit risk

Credit risk arises from cash and cash equivalents, trade receivables and non-trade receivables.

The Company's general policies for coal sales to new and existing customers are as follows:

- *Selecting customers with strong financial condition and good reputation.*
- *Acceptance of new customers and sales of coal are approved by the authorised personnel according to the Company's delegation of authority structure.*

For trade receivable, Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure to credit risk given that the Company has clear policies on selection of customers.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Untuk kas dan setara kas, Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan bank yang digunakan untuk penempatan kas. Pemilihan bank dilakukan dengan mempertimbangkan peringkat kredit eksternal yang tersedia.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

I. Financial risk factors *(continued)*

b. Credit risk *(continued)*

For cash and cash equivalent, Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure to credit risk given that the Company has clear policies on selection of banks for cash placement. The selection is performed by considering the available external credit rating.

	2025	2024	
Kas dan setara kas			***Cash and cash equivalents***
Pefindo			***Pefindo***
AAA	74,168	24,338	*AAA*
Piutang usaha			***Trade receivables***
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal			*Counterparties with external credit rating*
Pefindo			*Pefindo*
AAA	284,176	246,285	*AAA*
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal			*Counterparties without external credit rating*
Grup 1	-	-	*Group 1*
Grup 2	968,229	1,236,461	*Group 2*
Grup 3	460,778	427,785	*Group 3*
	1,713,183	1,910,531	
Piutang non-usaha			***Non-trade receivables***
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal			*Counterparties without external credit rating*
Grup 1	14,078	54,011	*Group 1*
	14,078	54,011	

- Grup 1 - pelanggan baru/pihak-pihak berelasi (kurang dari enam bulan).
- Grup 2 - pelanggan yang sudah ada/pihak-pihak berelasi (lebih dari enam bulan) tanpa adanya kasus gagal bayar di masa terdahulu.
- Grup 3 - pelanggan yang sudah ada/pihak-pihak berelasi (lebih dari enam bulan) dengan beberapa kejadian gagal bayar pada masa terdahulu. Seluruh gagal bayar telah terpulihkan.

- *Group 1 - new customers/related parties (less than six months).*
- *Group 2 - existing customers/related parties (more than six months) with no defaults in the past.*
- *Group 3 - existing customers/related parties (more than six months) with some defaults in the past. All defaults were fully recovered.*

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Perusahaan kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan:

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Financial risk factors (continued)

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below describes the Company's financial liabilities based on their maturities. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ *Contractual maturities of financial liabilities*					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *More than five years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2025						***31 December 2025***
Utang usaha	1,536,512	-	-	-	1,536,512	*Trade payables*
Utang lain-lain	567,105	-	-	-	567,105	*Other payables*
Biaya yang masih harus dibayar	240,923	-	-	-	240,923	*Accrued expenses*
	2,344,540	-	-	-	2,344,540	
31 Desember 2024						***31 December 2024***
Utang usaha	1,940,061	-	-	-	1,940,061	*Trade payables*
Utang lain-lain	799,276	-	-	-	799,276	*Other payables*
Biaya yang masih harus dibayar	11,931	-	-	-	11,931	*Accrued expenses*
	2,751,268	-	-	-	2,751,268	

II. Manajemen risiko permodalan

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham. Direksi secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

II. Capital risk management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company's capital structure consists of shareholders' equity. The Board of Directors regularly reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

III. Estimasi nilai wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

III. Fair value estimation

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at 31 December 2025 and 2024.

20. TAMBAHAN INFORMASI TERKAIT ARUS KAS

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

20. ADDITIONAL INFORMATION RELATED TO CASH FLOWS

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	31 Desember/ *December 2024*	*Penambahan/ Addition*	Pembayaran/ *Repayment*	Mutasi non-kas/ *Non-cash movement*	31 Desember/ *December 2025*	
Notional Pooling	799,276	3,802,000	(4,070,000)	35,829	567,105	*Notional Pooling*

	31 Desember/ *December 2023*	*Penambahan/ Addition*	Pembayaran/ *Repayment*	Mutasi non-kas/ *Non-cash movement*	31 Desember/ *December 2024*	
Notional Pooling	455,924	617,000	(316,586)	42,938	799,276	*Notional Pooling*

21. KELANGSUNGAN USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki modal kerja negatif sebesar Rp177.123. Hal ini terutama diakibatkan oleh pemakaian fasilitas *Notional Pooling* dari PLN yang tidak memiliki jadwal pembayaran yang pasti, sehingga Perusahaan mengkategorikan pinjaman ini sebagai pinjaman jangka pendek.

Sebagai akibat dari kondisi diatas, manajemen Perusahaan akan mengambil langkah-langkah berikut untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dan posisi keuangan Perusahaan:

1. Percepatan *Days Sales Outstanding* (DSO) melalui perbaikan tata kelola penagihan ke pelanggan.
2. Konsistensi restitusi PPN bulanan agar jatuh tempo pencairan lebih cepat.
3. Melakukan re-negosiasi terkait *term of payment* pada perjanjian jual beli batubara.

Selain itu, Perusahaan telah menerima surat dukungan dari PLN EPI selaku Perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas Perusahaan. Manajemen berpendapat bahwa dukungan keuangan tersebut cukup untuk menutupi liabilitas yang akan jatuh tempo dan dengan demikian memastikan kelangsungan hidup Perusahaan selama dua belas bulan ke depan, sejak tanggal laporan keuangan.

Laporan keuangan telah disusun atas dasar kelangsungan usaha Perusahaan dan tidak termasuk penyesuaian yang mungkin timbul dari hasil ketidakpastian.

21. GOING CONCERN

As at 31 December 2025, the Company had negative working capital of Rp177,123. This was primarily driven by the utilisation of Notional Pooling facility from PLN, which does not have a definite repayment schedule; accordingly, the Company has classified this borrowing as a short-term borrowing.

Due to the condition above, the Company's management will take the following measures to improve the Company's performance and financial position:

1. *Acceleration of Days Sales Outstanding (DSO) through improvements in customer billing governance.*
2. *Consistent monthly VAT restitution submissions to expedite the disbursement timeline.*
3. *Re-negotiation of payment terms under the coal sales and purchase agreements.*

In addition, the Company has received a letter of support from PLN EPI as parent entity and major shareholder of the Company. Management is of the opinion that the financial support is adequate to cover maturing liabilities and thus ensure the Company's ability to continue as a going concern for the next twelve months from the date of the financial statements.

The financial statements have been prepared on the basis of the Company's continuing as a going concern and do not include any adjustments that might result from the outcome of the uncertainties.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini telah disusun dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 22 Mei 2026.

22. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were prepared and authorised for issuance by the Board of Directors on 22 May 2026.

PLN BATUBARA NIAGA

Mengokohkan Fondasi Pasokan Energi

untuk Keandalan Sistem Kelistrikan

Strengthening Energy Supply Foundations
for Reliable Power Systems

PT PLN BATUBARA NIAGA
Jl. Hj. Tutty Alawiyah No.10,
Kalibata, Kec. Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

2025 LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT